

JADWAL SEMENTARA

Masa Penawaran Awal	: 5 – 20 April 2018	Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 8 Mei 2018
Perkiraan Tanggal Efektif	: 30 April 2018	Perkiraan Tanggal Distribusi Saham secara Elektronik	: 8 Mei 2018
Perkiraan Masa Penawaran Umum	: 2 – 4 Mei 2018	Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek Indonesia	: 9 Mei 2018
Perkiraan Tanggal Penjatahan	: 7 Mei 2018		

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK BRISYARIAH TBK. ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK BRISYARIAH TBK

Kegiatan Usaha Utama:

Perbankan Syariah

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:
 Jl. Abdul Muis No.2-4
 Jakarta Pusat 10160
 Tel. +62 21 345 0226 / 345 0227
 Fax. +62 21 351 8812 / 344 1904
 Website: www.brisyariah.co.id
 E-mail: investor-relations@brisyariah.co.id

Jaringan Kantor
 Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, 1.044 kantor layanan syariah yang tersebar di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bengkulu, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar-besarnya 27,00% (dua puluh tujuh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("Saham Yang Ditawarkan"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp* (* Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham ("FPS"). Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp* (* Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT Bank BRISyariah No. 8 tanggal 8 Januari 2018, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA") dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 65.583.765 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham atau sebesar-besarnya 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 300.498.300 (tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar-besarnya 3,00% (tiga koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014. Informasi lebih lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENCATATAN ATAS SAHAM YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PENJAMIN EMISI EFEK

Akan ditentukan kemudian

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN APABILA AKTIVITAS PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN RISIKO KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA YANG DIHADAPI PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU HARGA SAHAM PERSEROAN MUNGKIN MENGALAMI FLUKTUASI YANG SIGNIFIKAN DI KEMUDIAN HARI TERUTAMA DIKARENAKAN PERSEPSI ATAS PROSPEK BISNIS PERSEROAN DAN SEKTOR PERBANKAN SECARA UMUM. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PT Bank BRISyariah Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan" atau "BRIS") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK di Jakarta dengan surat No. S.B.082-PDR/02-2018 tanggal 22 Februari 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM" atau "Undang-Undang Pasar Modal") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang telah dibuat antara Perseroan dengan BEI pada tanggal 15 Maret 2018 sepanjang memenuhi persyaratan pencatatan saham yang ditetapkan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 7.092.762.898 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 9.618.952.363 (sembilan miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan sejumlah 97.161.135 (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh lima) saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 1,00% (satu koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29") dan Pengumuman BEI No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang terafiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya, dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	-----	iii
RINGKASAN	-----	xvi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	-----	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	-----	8
III. PERNYATAAN UTANG	-----	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	-----	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	-----	19
VI. FAKTOR RISIKO	-----	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	-----	52
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	-----	53
1. Riwayat Singkat Perseroan	-----	53
2. Perkembangan Kepemilikan Saham dan Permodalan Perseroan Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir	-----	67
3. Struktur Organisasi Perseroan	-----	69
4. Pengurusan dan Pengawasan	-----	69
5. Sumber Daya Manusia	-----	89
6. Keterangan Ringkas Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan di Atas 50% (Lima Puluh Persen)	-----	93
7. Diagram Kepemilikan Perseroan	-----	95
8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	-----	95
9. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga	-----	95
10. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Afiliasi	-----	97
11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan	-----	98
12. Asuransi	-----	101
13. Hak Atas Kekayaan Intelektual	-----	101
14. Perijinan	-----	105
15. Perkara Material yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris	-----	105
16. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha	-----	105
16.1. Umum	-----	105
16.2. Nilai – Nilai Budaya Kerja	-----	105
16.3. Keunggulan Kompetitif	-----	106
16.4. Kegiatan Usaha	-----	106
16.5. Jaringan Kantor	-----	115
16.6. Strategi Pengembangan	-----	115
16.7. Strategi usaha	-----	118
16.8. Prospek Usaha	-----	119
16.9. Persaingan Usaha	-----	122
16.10. Pelanggan Utama	-----	122
16.11. Tingkat Kesehatan	-----	122
16.12. Manajemen Risiko	-----	122
16.13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)	-----	123
16.14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	-----	127
16.15. Teknologi Informasi	-----	129
16.16. Penghargaan	-----	131
IX. EKUITAS	-----	134
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	-----	136

XI.	PERPAJAKAN	137
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK	139
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	140
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	142
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM	149
	15.1 Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham	149
	15.2 Persyaratan Pemesanan Yang Dapat Diterima	149
	15.3 Jumlah Pemesanan	149
	15.4 Penyerahan Formulir Pemesanan	149
	15.5 Masa Penawaran Umum Perdana Saham	149
	15.6 Tanggal Penjatahan	150
	15.7 Kriteria dan Persyaratan Pemesanan Khusus oleh Karyawan Perseroan	150
	15.8 Persyaratan Pembayaran	150
	15.9 Tanda Terima untuk FPPS	150
	15.10 Penjatahan Saham	151
	15.11 Pembatalan Pemesanan	152
	15.12 Pengembalian Uang Pemesanan	152
	15.13 Distribusi Saham dan Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham	153
	15.14 Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham	154
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	156
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	157
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	175

DEFINISI DAN SINGKATAN

- Afiliasi** : Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut.
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama.
 - hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung yang mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
 - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
- Akad Hawalah** : Berarti akad pengalihan penagihan utang dari satu pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggung pembayarannya.
- Akad Ijarah** : Berarti penyediaan dana dalam rangka pemindahan hak guna/manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- Akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bittamlik)** : Berarti penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna/manfaat atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.
- Akad Istishna** : Berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat.
- Akad Kafalah** : Berarti akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).
- Akad Mudharabah (qiradh)** : Berarti akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama/pemilik modal (*malik/shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua/pengelola (*'amil/mudharib*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pihak pertama/pemilik modal (*malik/shahibul maal*) kecuali jika pihak kedua/pengelola (*'amil/mudharib*) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- Akad Murabahah** : Berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu untuk transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya.
- Akad Musyarakah** : Berarti akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.
- Akad Musyarakah Mutanaqishah** : Berarti pembiayaan *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.

- Akad Qardh** : Berarti akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan di mana Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- Akad Rahn** : Berarti akad pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* di mana *murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- Akad Wadiah** : Berarti akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.
- ATMR** : Berarti singkatan dari Aset Tertimbang Menurut Risiko yaitu jumlah aset yang telah dibobot sesuai dengan ketentuan BI, untuk digunakan sebagai penyebut (pembagi) dalam menghitung Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*).
- Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH** : Berarti lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- Bank Indonesia atau BI** : Berarti pihak yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Bank Sentral Republik Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Bank Kustodian** : Berarti bank sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- BAPEPAM** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Undang Undang Pasar Modal.
- BAPEPAM dan LK** : Berarti Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH** : Berarti biaya penyelenggaraan ibadah Haji yang ditetapkan Pemerintah.
- Biro Administrasi Efek atau BAE** : Berarti pihak yang melaksanakan administrasi saham Perseroan, termasuk Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, dalam hal ini adalah PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Bursa Efek** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta, di mana saham Perseroan dicatatkan.

BRI	: Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Compounded Annual Growth Rate atau CAGR	: Berarti rata-rata pertumbuhan tahunan majemuk suatu akun untuk suatu periode tertentu.
Daftar Pemegang Saham	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh pemegang saham.
Daftar Pemesanan Pembelian Saham atau DPPS	: Berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, dan disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.
Dana Pihak Ketiga atau DPK	: Berarti kewajiban Perseroan kepada penduduk dan bukan penduduk dalam Rupiah dan valuta asing.
Dana Syirkah Temporer	: Dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lain dimana Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.
Dewan Pengawas Syariah	: Berarti dewan yang bertanggung jawab memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Pihak yang melakukan Kegiatan Syariah di Pasar Modal, dengan memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan peraturan pelaksanaannya.
Dokumen Emisi	: Berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Informasi dan/atau perbaikan Prospektus Ringkas, Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek antara Perseroan dengan Bursa Efek untuk pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek, beserta semua perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya dan pembaharuan-pembaharuannya serta dokumen-dokumen lain yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, sukuk, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
Efek Syariah	: Berarti Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang akad maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal.

- Efektif** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto angka 4 Peraturan Bapepam dan LK No IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, yaitu:
1. Atas dasar lewatnya waktu yaitu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi; atau
 2. Atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan;
- dengan ketentuan bahwa Pernyataan Pendaftaran harus menjadi Efektif selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2018.
- Emisi** : Berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
- FASBIS** : Berarti fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam rangka *standing facilities* syariah.
- Force Majeure** : Berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- Formulir Pemesanan Pembelian Saham atau FPPS** : Berarti formulir pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan yang harus dibuat dalam rangka 5 (lima) yang masing-masing harus diisi lengkap, dibubuhi tanda tangan asli oleh calon pembeli atau pemesan dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Efek pada waktu memesan Saham Yang Ditawarkan.
- Harga Penawaran** : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp● (● Rupiah).
- Hari Bank** : Berarti hari dimana Bank Indonesia menyelenggarakan kliring antar bank.
- Hari Bursa** : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- Hari Kerja** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

- Informasi atau Fakta Material** : Berarti informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga saham pada Bursa Efek dan/atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut.
- Istishna** : Berarti akad penjualan antara *almustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.
- Kantor Cabang atau KC** : Berarti adalah kantor bank yang bertanggung jawab kepada kantor pusat dan memiliki tanggung jawab pembinaan terhadap Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas di bawah supervisinya.
- Kantor Cabang Pembantu atau KCP** : Berarti adalah kantor bank yang kegiatan usahanya di bawah pembinaan terhadap Kantor Cabang.
- Kantor Layanan Syariah atau KLS** : Berarti seluruh kantor yang melakukan kegiatan operasional Perseroan dan melayani nasabah Perseroan, namun Perseroan dalam hal ini bekerja sama dengan Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu Bank BRI, di mana KLS berlokasi pada KC atau KCP tertentu Bank BRI sesuai dengan kesepakatan antara Perseroan dengan Bank BRI.
- Kelompok Bimbingan Ibadah Haji atau KBIH** : Berarti lembaga sosial keagamaan yang telah mendapatkan ijin dari Kementerian Agama RI untuk melaksanakan tugas pembimbingan terhadap jama'ah haji dengan tujuan mewujudkan jama'ah haji yang mandiri, yaitu jama'ah yang dapat melaksanakan seluruh rangkaian ibadah hajinya secara mandiri tanpa bergantung kepada perorangan maupun kelompok.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham** : Berarti suatu organisasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri, serta memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Kewajiban Penyediaan Modal Minimum atau KPMM** : Berarti rasio sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank yang dihitung dengan membandingkan modal bank dengan ATMR.
- Konfirmasi Tertulis** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo saham dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di Pasar Sekunder.
- KSEI** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang dalam emisi saham ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan saham berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI.

- Lancar (Kolektibilitas 1)** : Berarti kondisi pembayaran angsuran pokok pembiayaan dibayarkan secara tepat waktu dan pembiayaan belum jatuh tempo serta memiliki prospek usaha dan performance keuangan yang baik, sebagaimana tercantum dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014.
- Likuidasi** : Berarti pemberesan harta benda/harta kekayaan (aset-aset) sebagai tindak lanjut dari Penutupan Usaha.
- Manajer Penjatahan** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum yang dimuat dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-691/PM/2011 tanggal 30 Desember 2011. Dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Danareksa Sekuritas.
- Masa Penawaran** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana diatur dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yaitu paling kurang 1 (satu) Hari Kerja dan paling lama 5 (lima) Hari Kerja.
- Masyarakat** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
- Menkumham** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Murabahah** : Berarti akad jual beli antara nasabah dengan Perseroan, dimana Perseroan membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.
- Nasabah Penyimpan** : Berarti nasabah yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian antara Perseroan dengan nasabah yang bersangkutan.
- Non Performing Financing atau NPF** : Berarti rasio antara total pembiayaan yang diberikan dengan kategori non lancar dengan total pembiayaan yang diberikan.
- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK** : Berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU No. 21 Tahun 2011). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Bapepam dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.

- Pembiayaan** : Berarti penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa:
- transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
 - transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
 - transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*;
 - transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
 - transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* atau transaksi multijasa.
- berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
- Pemegang Rekening** : Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI, dengan memperhatikan Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan KSEI.
- Pemegang Saham Utama** : Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pemerintah** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- Penawaran Awal (*bookbuilding*)** : Berarti suatu ajakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang bertujuan untuk mengetahui minat Masyarakat atas Saham Yang Ditawarkan, berupa indikasi jumlah Saham Yang Ditawarkan yang ingin dibeli dan/atau perkiraan harga atas harga penawaran efek.
- Penawaran Umum** : Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- Penitipan Kolektif** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Pasar Modal.
- Penutupan Usaha** : Berarti keadaan dimana Perseroan dinyatakan atau diperintahkan dengan keputusan dari pihak yang berwenang baik atas keputusan pemegang saham Perseroan atau OJK atau penggantinya yang mempunyai kewenangan terhadap Perseroan untuk membubarkan, membekukan atau menutup atau dengan suatu keputusan Pengadilan yang berwenang yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- Penjamin Emisi Efek** : Berarti Pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek** : Berarti pihak yang bertanggung-jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- Peraturan No. IX.A.2** : Berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7** : Berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
- Peraturan No. IX.E.1** : Berarti Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
- Peraturan No. IX.E.2** : Berarti Peraturan No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Peraturan No. IX.J.1** : Berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No.7** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.1 kecuali angka 6 huruf l yang mengatur tentang ketentuan mengenai dokumen lain berupa perjanjian pendahuluan dengan Bursa Efek yang baru akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan OJK ini yaitu tanggal 14 Maret 2017.
- Peraturan OJK No.8** : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, yang merupakan peraturan pengganti dari Peraturan No. IX.C.2 dan IX.C.3.
- Peraturan OJK No.16** : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014.
- Peraturan OJK No.21** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014.
- Peraturan OJK No.23** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017.
- Peraturan OJK No.25** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017.
- Peraturan OJK No.30** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum yang diundangkan pada tanggal 22 Desember 2015.

- Peraturan OJK No.32** : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
- Peraturan OJK No.33** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No.35** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No.53** : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.: 53/POJK.04/2015 tentang Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- Peraturan OJK No. 55** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- Peraturan OJK No. 56** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.
- Peraturan KSEI** : Berarti peraturan KSEI No. Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15 Mei 2000 tentang Jasa Kustodian Sentral sebagaimana telah disetujui oleh OJK sesuai dengan surat keputusan No. S-1053/PM/2000 tanggal 15 Mei 2000 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau perubahan-perubahannya di kemudian hari.
- Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham** : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Bank BRISyariah Tbk. No. 38 tanggal 21 Februari 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari, yang dibuat oleh dan antara Biro Administrasi Efek dengan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, berikut perubahan-perubahannya yang sah dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek** : Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek yang telah dibuat pada tanggal 15 Maret 2018, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Perjanjian Penjaminan Emisi Efek** : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Saham PT Bank BRISyariah Tbk. No. 37 tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 19 Maret 2018, berikut perubahan perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek.

- Perjanjian Pendaftaran Efek di KSEI** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI No.SP-006/SHM/KSEI/0118 tanggal 18 Januari 2018, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, berikut segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
- Pernyataan Pendaftaran** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM juncto Peraturan OJK No. 7/2017.
- Perseroan atau Mudharib** : Berarti badan hukum yang akan melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Bank BRISyariah Tbk., berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
- Perusahaan Efek** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.
- PHU** : Berarti Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- Pihak** : Berarti orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir.
- Piutang** : Berarti piutang *murabahah* dan piutang *istishna*.
Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode margin efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.
Fasilitas pembiayaan pembelian barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Margin *istishna* yang ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.
- Pinjaman *qardh*** : Berarti penyaluran dana dengan akad *qardh*.
Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Perseroan) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Perseroan mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.
Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen Perseroan terhadap kualitas pembiayaan yang ada.
- Portofolio** : Berarti portofolio pembiayaan dalam mata uang Rupiah.

- Prinsip Syariah di Pasar Modal** : Berarti prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Program *Employee Stock Allocation* atau Program ESA** : Berarti program pemberian saham penghargaan kepada karyawan oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebesar-besarnya 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 65.583.765 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham berdasarkan Akta No. 8/2018 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. B.004-PDR/01-2018 tanggal 23 Januari 2018 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
- Program *Management and Employee Stock Option Program* atau Program MESOP** : Berarti program pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dan aktif Perseroan 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pendistribusian hak opsi ("Peserta").
- Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.498.300 (tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar-besarnya 3,00% (tiga koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- Prospektus** : Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- Prospektus Awal** : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran, penjaminan emisi Saham yang Ditawarkan, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.
- Prospektus Ringkas** : Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 dan yang akan diumumkan dalam sekurang-kurangnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan Prospektus Ringkas sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.2.

- PT TASPEN (Persero) atau Tabungan dan Asuransi Pensiun** : Berarti Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- Rekening Efek** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham.
- Rupiah atau Rp** : Berarti mata uang resmi Negara Republik Indonesia.
- RUPS** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka. RUPS diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dimana beberapa ketentuan di dalamnya telah diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014.
- Saham Baru** : Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- Saham Yang Ditawarkan** : Berarti saham-saham biasa atas nama yang akan ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham, sebesar-besarnya 27% (dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham selesai dilaksanakan atau sejumlah sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham baru, masing-masing Saham dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang ditawarkan dan dijual melalui Penjamin Emisi Efek kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham menurut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan akan dicatatkan pada Bursa Efek, yang kepastian jumlah sahamnya akan ditentukan kemudian.
- Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN** : Berarti surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- Sistem Komputerisasi Haji Terpadu atau SISKOHAT** : Berarti jaringan komputer yang tersambung secara online dan *real time* antara Ditjen BIPH dengan Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) dan Kanwil Departemen Agama.
- Tanggal Efektif** : Berarti tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- Tanggal Emisi** : Berarti tanggal distribusi saham ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
- Tanggal Pembayaran** : Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek ke dalam rekening Perseroan (*in good funds*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

- Tanggal Pencatatan** : Berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi yang telah ditentukan dalam Prospektus.
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan** : Berarti tanggal dimulainya periode pengembalian sisa dana pemesanan saham oleh para penjamin emisi kepada para pemesan yang tidak mendapatkan saham sesuai dengan pemesanannya.
- Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Perbankan Syariah** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UUPT** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 4756.
- Wadi'ah Yad Dhamanah** : Berarti titipan nasabah kepada penerima titipan, dalam hal ini Perseroan, yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan menghendaki, dan Perseroan bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut.
- Penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seijin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat jika pemilik menghendakinya.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 29 April 1970 dibuat dihadapan Henk Limanow (Liem Toeng Kie), Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan ialah berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB No. 8 tanggal 8 Januari 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan surat persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 2 Maret 2018. Akta-Akta ini mencantumkan persetujuan pemegang saham Perseroan atas beberapa hal yaitu (i) menyetujui rencana Perseroan untuk menghimpun dana dari Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO); (ii) menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp5.000.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp500, menjadi Rp7.500.000.000.000 yang terbagi atas 15.000.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500; (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp1.979.000.000.000 menjadi Rp3.546.381.449.000 yang dilakukan secara tunai dan melalui kapitalisasi laba ditahan; (iv) perubahan Anggaran Dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32, dan Peraturan OJK No. 33; (v) menyetujui kepemilikan 1% saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, namun dalam bentuk warkat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum; (vi) menyetujui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 27% (dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, yang ditawarkan melalui IPO, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp500 yang ditawarkan dengan Harga Penawaran termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 2,5% dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka IPO, dengan program ESA; (vii) menyetujui pelepasan hak oleh BRI dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (YKP BRI) untuk mengambil saham baru sehubungan dengan IPO Perseroan; dan (viii) pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen & Karyawan (*Management & Employee Stock Option Program/ MESOP*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.

Perseroan telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang menetapkan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Syariah BRI menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/139/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, dan 1.044 kantor layanan syariah.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: a) *Wakalah*; b) *Hawalah*; c) *Kafalah*; d) *Rahn*;
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad Amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit (L/C)* berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh OJK dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.

Sedangkan kegiatan usaha penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Prospek Usaha Perseroan

Perseroan masih tetap optimis dalam menghadapi usaha di tahun 2018 meskipun mulai memasuki tahun politik diantaranya pemilihan daerah serentak 2018 dan persiapan pemilihan umum tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan indikator baik finansial maupun non finansial di tahun 2017. Secara finansial antara lain dengan adanya pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta laba bersih juga meningkat dari tahun 2016. Namun demikian pemberian pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dan hati-hati, kualitas pembiayaan selalu dijaga dan tetap meminimalkan hapus buku, mengingat kondisi makro ekonomi di tahun 2017.

Dalam mengembangkan usaha menghadapi persaingan dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah dimiliki maka target yang dilakukan Perseroan difokuskan pada beberapa kegiatan yaitu:

- Akselarasi peningkatan Komposisi CASA.
- Akselarasi pendapatan jasa (*Fee Based Income*).
- Peningkatan jasa pelayanan Haji dan Umroh.
- Optimalisasi Pembiayaan Komersial dan Retail (SME, Kemitraan/*Linkage*, Konsumer dan Mikro).
- Optimalisasi jaringan Kantor Layanan Syariah Bank (LSB).
- Peningkatan kompetensi karyawan.

3. Keterangan tentang Saham Yang Ditawarkan

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham baru atau sebesar-besarnya 27,00% (dua puluh tujuh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, termasuk saham yang akan dialokasikan untuk pelaksanaan Program ESA sebesar-besarnya 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jumlah saham yang dicatatkan : Sebanyak-banyaknya 9.618.952.363 (sembilan miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri dari saham lama sebanyak 6.995.601.763 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga) saham dan saham baru sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham, dimana saham baru tersebut merupakan Saham Yang Ditawarkan.

Nilai Nominal	:	Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham.
Harga Penawaran	:	Rp● (● Rupiah)
Nilai Emisi	:	Rp● (● Rupiah)
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Mei 2018
Tanggal Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia	:	9 Mei 2018

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000		15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	-	-	-	2.623.350.600	1.311.675.300.000	27,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.092.762.898	3.546.381.449.000	100,00000	9.716.113.498	4.858.056.749.000	100,00000
Saham dalam Portepel	7.907.237.102	3.953.618.551.000		5.283.886.502	2.641.943.251.000	

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program *Employee Stock Allocation (ESA)*

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar-besarnya 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 65.583.765 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham berdasarkan Akta No. 8/2018 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. B.004-PDR/01-2018 tanggal 23 Januari 2018 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000		15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	-	-	-	2.557.766.835	1.278.883.417.500	26,32500
4. Karyawan Perseroan melalui Program ESA	-	-	-	65.583.765	32.791.882.500	0,67500
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.092.762.898	3.546.381.449.000	100,00000	9.716.113.498	4.858.056.749.000	100,00000
Saham dalam Portepel	7.907.237.102	3.953.618.551.000		5.283.886.502	2.641.943.251.000	

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 25"), setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah Harga Penawaran dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP")

Berdasarkan Akta No. 8 tanggal 8 Januari 2018, pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.498.300 (tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar-besarnya 3,00% (tiga koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada pada Harga Pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yang telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tertanggal 20 Januari 2014 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.B.001-KOM/01-2018 tanggal 23 Januari 2018.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA, dan Sebelum Pelaksanaan Program MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan MESOP		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000		15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999	7.092.761.655	3.546.380.827.500	70,80999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00001	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	2.557.766.835	1.278.883.417.500	26,32500	2.557.766.835	1.278.883.417.500	25,53525
4. Karyawan Perseroan melalui Program ESA	65.583.765	32.791.882.500	0,67500	65.583.765	32.791.882.500	0,65475
5. Peserta Program MESOP	-	-	-	300.498.300	150.249.150.000	3,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.716.113.498	4.858.056.749.000	100,00000	10.016.611.798	5.008.305.899.000	100,00000
Saham dalam Portepel	5.283.886.502	2.641.943.251.000		4.983.388.202	2.491.694.101.000	

Penjelasan mengenai Saham Yang Ditawarkan selengkapnya dapat dilihat pada Bab I dalam Prospektus ini.

4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dipotong dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 80% akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan;
- Sekitar 12,5% akan digunakan untuk pengembangan sistem Teknologi Informasi; dan
- Sekitar 7,5% akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor.

5. Struktur Permodalan pada saat Prospektus diterbitkan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.092.762.898	3.546.381.449.000	100,00000
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.907.237.102	3.953.618.551.000	

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Aset	24.230.247	27.687.188	31.543.384
Piutang			
Piutang <i>murabahah</i>	10.003.275	10.782.243	10.886.965
Cadangan kerugian penurunan nilai	(222.925)	(281.710)	(429.948)
	9.780.350	10.500.533	10.457.017
Piutang <i>istishna</i>	7.428	5.900	4.421
Cadangan kerugian penurunan nilai	(187)	(140)	(112)
	7.241	5.760	4.309
	9.787.591	10.506.293	10.461.326
Pinjaman <i>Qardh</i>	398.874	295.388	538.243
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.339)	(2.269)	(14.142)
	387.535	293.119	524.101
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	1.121.467	1.285.582	858.019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.901)	(14.097)	(17.045)
	1.106.566	1.271.485	840.974
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	5.082.963	5.379.830	5.577.220
Cadangan kerugian penurunan nilai	(120.617)	(193.940)	(129.222)
	4.962.346	5.185.890	5.447.998
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - Neto	46.259	286.181	1.146.920
Aset tetap – neto	156.188	140.816	177.935
Aset pajak tangguhan	28.186	52.152	140.883
Aset lain-lain	407.022	746.514	1.100.422
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.910)	(87.001)	(317.687)
	395.112	659.513	782.735
Liabilitas	6.421.537	8.464.428	9.100.455
Dana <i>Syirkah</i> Temporer	15.468.898	16.712.746	19.840.088
Ekuitas	2.339.812	2.510.014	2.602.841

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	2.424.752	2.634.201	2.816.524
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.027.442)	(1.035.501)	(1.193.918)
Hak bagi hasil milik bank	1.397.310	1.598.700	1.622.606
Pendapatan usaha lainnya	130.460	127.967	149.003
Beban usaha	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - neto	(231.353)	(319.011)	(453.372)
Laba usaha	158.979	239.232	139.494
Pendapatan (beban) non-usaha - neto	10.090	(623)	11.463
Laba sebelum beban pajak	169.069	238.609	150.957
Beban pajak	(46.432)	(68.400)	(49.866)
Laba bersih	122.637	170.209	101.091
Jumlah pendapatan komprehensif lain bersih setelah pajak	2.685	(7)	(8.264)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	125.322	170.202	92.827
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	36,34	43,00	25,54

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.496.959	652.133	3.993.431
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	1.434.055	(893.736)	1.123.770
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444

Rasio-Rasio Penting (Sesuai PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai <i>Mudharib</i>	N/A	8,64%	6,92%
Hak Bagi Hasil milik Bank	N/A	14,41%	1,50%
Laba Usaha	N/A	50,48%	-41,69%
Laba Bersih	N/A	38,79%	-40,61%
Jumlah Laba Komprehensif	N/A	35,81%	-45,46%
Jumlah aset	N/A	14,27%	13,93%
Jumlah liabilitas	N/A	31,81%	7,51%
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	N/A	8,04%	18,71%
Jumlah ekuitas	N/A	7,27%	3,70%
Permodalan			
CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana dan operasional	14,05%	20,69%	20,30%
CAR (KPMM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana, risiko operasional dan risiko pasar	13,94%	20,63%	20,29%
Kualitas Aset			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	1,63%	1,91%	2,04%
Rentabilitas			
ROA	0,77%	0,95%	0,51%
ROE	6,33%	7,40%	4,10%
BOPO	93,79%	91,33%	95,24%
Net Imbalan (NI)	6,66%	6,67%	5,84%
Kualitas Kredit			
Gross NPF	4,86%	4,57%	6,43%
Net NPF	3,89%	3,19%	4,72%
Likuiditas			
FDR	84,16%	81,47%	71,87%
Kepatuhan (Compliance)			
Persentase Pelanggaran BMPD	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPD	-	-	-
GWM Rupiah	5,05%	5,02%	7,03%
GWM Valas	3,74%	1,13%	1,70%
PDN	6,01%	1,43%	0,34%
Komposisi Dana Pihak Ketiga			
CASA	27,23%	28,60%	30,13%

7. Faktor Risiko

Dalam menjalankan usahanya yang sehat dan berkesinambungan Perseroan menyadari perlunya praktek pengelolaan risiko yang baik. Pengelolaan risiko meliputi proses identifikasi risiko, proses pengukuran, proses pemantauan dan pengendalian risiko yang muncul atas setiap aktivitas kegiatan bank.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko Kredit

Risiko Terkait Dengan Kegiatan Usaha Perseroan Yang Bersifat Material

1. Risiko Investasi
2. Risiko Operasional
3. Risiko Likuiditas
4. Risiko Pasar
5. Risiko Strategik
6. Risiko Reputasi
7. Risiko Kepatuhan
8. Risiko Hukum
9. Risiko Imbal Hasil
10. Risiko Konsentrasi Dana Haji
11. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi
12. Risiko Persaingan
13. Risiko Perubahan Teknologi
14. Risiko Konsentrasi Pembiayaan

Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global
2. Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Risiko Investasi bagi pemegang saham Perseroan Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari
2. Likuiditas Saham Perseroan
3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari
4. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Penjelasan mengenai Faktor Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Penjelasan mengenai Kebijakan Dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp500 (lima ratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar-besarnya 27,00% (dua puluh tujuh koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp● (● Rupiah) setiap saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan FPPS. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebesar Rp● (● Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPM dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijamin kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



PT BANK BRISYARIAH TBK

Kegiatan Usaha Utama:
Perbankan Syariah
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia
Kantor Pusat:
Jl. Abdul Muis No.2-4
Jakarta Pusat 10160
Tel. +62 21 345 0226 / 345 0227
Fax. +62 21 351 8812 / 344 1904
Website: www.brisyariah.co.id
E-mail: investor-relations@brisyariah.co.id

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT. DAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA PERSEROAN APABILA AKTIVITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN RISIKO KREDIT BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT PENDAPATAN DAN KESEHATAN PERSEROAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU HARGA SAHAM PERSEROAN MUNGKIN MENGALAMI FLUKTUASI YANG SIGNIFIKAN DI KEMUDIAN HARI TERUTAMA DIKARENAKAN PERSEPSI ATAS PROSPEK BISNIS PERSEROAN DAN SEKTOR PERBANKAN SECARA UMUM. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Penawaran Umum Perdana Saham

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan syariah, penerbitan saham bank melalui penawaran umum di bursa efek (*go public*) wajib dilaporkan ke OJK dan dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini, Perseroan telah melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 13 Januari 2018 dan mencantumkan rencana Penawaran Umum Perdana Saham di dalam Rencana Bisnis Bank periode tahun 2018-2020 tanggal 27 November 2017.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut :

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000		15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	-	-	-	2.623.350.600	1.311.675.300.000	27,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.092.762.898	3.546.381.449.000	100,00000	9.716.113.498	4.858.056.749.000	100,00000
Saham dalam Portepel	7.907.237.102	3.953.618.551.000		5.283.886.502	2.641.943.251.000	

Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan saham sebesar-besarnya 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 65.583.765 (enam puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) saham berdasarkan Akta No. 8/2018 dan ditetapkan oleh Direksi berdasarkan Surat Keputusan No. B.004-PDR/01-2018 tanggal 23 Januari 2018 yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA. Harga pelaksanaan saham ESA sama dengan Harga Penawaran.

Tujuan utama dari Program ESA adalah agar karyawan Perseroan mempunyai rasa turut memiliki bisnis Perseroan, sehingga diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja Perseroan. Selain itu, dengan memberikan apresiasi berupa saham Perseroan, Program ESA diharapkan dapat meningkatkan loyalitas karyawan Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah bagian Sumber Daya Manusia ("SDM").

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Peserta Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah sebanyak 3.000 orang (tidak diperuntukkan bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, Anggota Komite Perseroan). Adapun yang memenuhi persyaratan sebagai Peserta Program ESA adalah sebagai berikut:

Kriteria/Persyaratan Peserta Program ESA

1. Tercatat sebagai pegawai tetap dalam database SDM Perseroan sampai dengan 31 Desember 2017.
2. Masih aktif bekerja pada saat tanggal alokasi.
3. Memiliki penilaian kinerja sebelum tanggal alokasi.
4. Tidak sedang dalam masa sanksi (kecuali dalam bentuk surat peringatan).

Mekanisme Pelaksanaan Program ESA

Berdasarkan level jabatan

Pembagian saham dilakukan kepada seluruh karyawan Perseroan berdasarkan level eselon jabatan karyawan yang digolongkan menjadi 6 (enam) level eselon, dimana setiap level jabatan mendapatkan jumlah yang berbeda.

Berdasarkan kinerja individu

Pembagian saham dilakukan berdasarkan kinerja individu yang digolongkan menjadi 6 (enam) tingkatan pencapaian yang berbeda, dimana setiap tingkatan mendapatkan jumlah yang berbeda.

Berdasarkan masa kerja

Pembagian saham dilakukan berdasarkan masa kerja yang digolongkan menjadi 5 (lima) kategori yang berbeda, dimana setiap kategori mendapatkan jumlah yang berbeda.

Seluruh Peserta Program ESA yang memenuhi persyaratan tersebut di atas akan diberikan alokasi jatah pasti dalam bentuk Saham Penghargaan sesuai dengan level jabatan, kinerja individu, dan masa kerjanya masing-masing. Alokasi akan ditentukan oleh Direksi Perseroan.

Seluruh karyawan yang berhak menjadi peserta Program ESA adalah karyawan tetap yang tidak sedang dalam masa sanksi (kecuali surat peringatan) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah memiliki Rekening Efek sebelum penjatahan saham dilakukan. Pemesanan saham Program ESA wajib diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selambat-lambatnya pada hari pertama Penawaran Umum dimulai yaitu pada tanggal 2 Mei 2018.

Saham Penghargaan merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh Peserta Program ESA dan tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan selama dalam periode masa tunggu ("*Vesting Period*"). Total masa tunggu dari Program ESA ini adalah 3 tahun sejak pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia, namun besaran alokasi saham Program ESA ini akan menjadi Hak Peserta dalam 3 tahap sebagai berikut :

- 34% (tiga puluh empat persen) dari total Saham program ESA yang telah dialokasikan menjadi hak Peserta dalam waktu 1 (satu) tahun sejak pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
- 33% (tiga puluh tiga persen) dari total Saham program ESA yang telah dialokasikan menjadi hak Peserta dalam waktu 2 (dua) tahun sejak pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Perseroan.
- 33% (tiga puluh tiga persen) dari total Saham program ESA yang telah dialokasikan menjadi hak Peserta dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Dalam hal Peserta Program ESA tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang menyebabkan gugurnya alokasi saham tersebut, Peserta Program ESA masih dapat meneruskan kepemilikan sahamnya dan dapat memperjualbelikan dan/atau memindahtangankannya untuk porsi saham yang telah melewati masa tunggu dan memenuhi syarat *vesting*, namun untuk porsi saham yang masih dalam masa tunggu akan gugur seluruhnya dan akan dikembalikan ke perseroan untuk dialihkan ke pegawai lainnya dengan ketentuan yang ditetapkan perseroan. Seluruh Saham Penghargaan memiliki hak yang sama

dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Biaya sehubungan dengan Program ESA seluruhnya merupakan biaya Perseroan dengan memperhitungkan harga yang sama dengan Harga Penawaran serta pajak yang timbul atas penerimaan Saham Penghargaan dari Program ESA.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000		15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	-	-	-	2.557.766.835	1.278.883.417.500	26,32500
4. Karyawan Perseroan melalui Program ESA	-	-	-	65.583.765	32.791.882.500	0,67500
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.092.762.898	3.546.381.449.000	100,00000	9.716.113.498	4.858.056.749.000	100,00000
Saham dalam Portepel	7.907.237.102	3.953.618.551.000		5.283.886.502	2.641.943.251.000	

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta Program ESA.

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Karyawan dan Manajemen (*Management And Employee Stock Option Program* atau "MESOP")

Berdasarkan Akta No.8/2018, pemegang saham Perseroan juga telah menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Program MESOP.

Program MESOP adalah pemberian hak opsi untuk membeli saham kepada Peserta Program MESOP yakni anggota Dewan Komisaris (kecuali komisaris independen), anggota Direksi dan karyawan Perseroan yang tercatat dalam daftar karyawan tetap dengan level Eselon III ke atas yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perusahaan dan aktif di Perseroan sebelum tanggal pendistribusian hak opsi ("Peserta").

Peserta program MESOP yang berhak menerima hak opsi pada setiap tahap akan ditetapkan oleh direksi Perseroan 14 hari kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi setiap tahap.

Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 300.498.300 (tiga ratus juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus) saham atau sebesar-besarnya 3,00% (tiga koma nol nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:

- Tahap pertama dengan sebanyak-banyaknya sejumlah 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 60 hari setelah tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
- Tahap kedua dengan sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam Program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun kedua pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS.

- Hak opsi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membeli saham Perseroan selama 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS persetujuan MESOP yaitu tanggal 21 Januari 2018 (*option life*).
- Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh Harga Pelaksanaan.
- Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu (*vesting period*) selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama. Selama *vesting period* pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.
- Setelah berakhirnya *vesting period*, Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali *window exercise* dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *window exercise* yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Pelaksanaan Hak Opsi dilakukan dalam 3 tahap sebagai berikut :
 - Peserta Program MESOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 40% (empat puluh persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama.
 - Peserta Program MESOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama.
 - Peserta Program MESOP dapat menggunakan Hak Opsi sebanyak 30% (tiga puluh persen) dari total hak opsi yang telah didistribusikan waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendistribusian tahap pertama.
- Hak opsi yang telah melewati masa tunggu namun belum dilaksanakan tetap berlaku selama tidak melewati *option life*.
- Harga Pelaksanaan (*exercise price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep 305/BJ/07-2004 tertanggal 19 Juli 2004 yaitu sekurang-kurangnya 90% dari harga rata-rata penutupan saham perusahaan tercatat yang bersangkutan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum laporan akan dilaksanakannya Periode Pelaksanaan.
- Peserta wajib untuk membayar Harga Pelaksanaan secara penuh pada saat pelaksanaan hak opsi dalam Program MESOP.

- Peserta program yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri, maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan menjadi dihapuskan.
- Peserta Program MESOP tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.

Dilusi dalam hal seluruh Peserta Program MESOP melaksanakan seluruh hak opsinya adalah sebesar 3%. Prosedur dan tata cara Program ESA dan Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan secara proforma sebelum dan setelah pelaksanaan Program MESOP adalah sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA, dan Sebelum Pelaksanaan Program MESOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan MESOP		
	Nilai Nominal Rp500 per saham			Nilai Nominal Rp500 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar						
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000		15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	72,99999	7.092.761.655	3.546.380.827.500	70,80999
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00001	1.243	621.500	0,00001
3. Masyarakat	2.557.766.835	1.278.883.417.500	26,32500	2.557.766.835	1.278.883.417.500	25,53525
4. Karyawan Perseroan melalui Program ESA	65.583.765	32.791.882.500	0,67500	65.583.765	32.791.882.500	0,65475
5. Peserta Program MESOP	-	-	-	300.498.300	150.249.150.000	3,00000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	9.716.113.498	4.858.056.749.000	100,00000	10.016.611.798	5.008.305.899.000	100,00000
Saham dalam Portepel	5.283.886.502	2.641.943.251.000		4.983.388.202	2.491.694.101.000	

Biaya Program ESA dan Program MESOP

Biaya Program ESA merupakan biaya remunerasi atas Saham Penghargaan yang diterima oleh Peserta dengan demikian termasuk PPh pasal 21 yang akan diperhitungkan kepada Perseroan. Selanjutnya setelah periode *lock-up* berakhir dan Peserta dapat melakukan transaksi penjualan Saham Penghargaan melalui Bursa Efek Indonesia atau di luar Bursa Efek Indonesia, atas pelaksanaan penjualan saham tersebut akan dikenakan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Perseroan akan mencadangkan biaya Program MESOP sebagaimana diatur dalam PSAK 53 tentang insentif berbasis saham dengan menggunakan metode *Binomial Lattice* dalam laporan keuangannya setelah pelaksanaan pendistribusian hak opsi kepada Peserta Program MESOP.

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tertanggal 15 Maret 2018. Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 (dua miliar enam ratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus) saham biasa atas nama, Perseroan atas nama pemegang saham lama juga akan mencatatkan sejumlah 6.995.601.763 (enam miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga) saham, sehingga jumlah seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah 9.618.952.363 (sembilan miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga) saham atau 99,00% (sembilan puluh sembilan koma nol nol persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Sedangkan sejumlah 97.161.135 (sembilan puluh tujuh juta seratus enam puluh satu ribu

seratus tiga puluh lima) saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau 1,00% (satu persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, tidak dicatatkan pada BEI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("PP No. 29") dan Pengumuman BEI No. Peng-10/BEJ-DAG/U/05 1999 tanggal 20 Mei 1999 perihal Porsi Kepemilikan Saham Perbankan oleh Pemodal Asing.

Apabila harga saham baru sehubungan dengan penambahan modal yang dilakukan oleh Bank BRI dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank BRI (YKP BRI) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berada di bawah Harga Penawaran, maka Bank BRI dan YKP BRI dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya pada Perseroan dalam waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK, KECUALI OPSI UNTUK MEMBELI SAHAM PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN DARI PROGRAM MESOP PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. APABILA DI KEMUDIAN HARI PERSEROAN BERMAKSUD MELAKUKAN HAL TERSEBUT, MAKA PERSEROAN AKAN MENGIKUTI SEMUA KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dipotong dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk:

- Sekitar 80,0% akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan.
- Sekitar 12,5% akan digunakan untuk pengembangan sistem Teknologi Informasi yang meliputi pengembangan pada *core banking system*, *electronic channel*, infrastruktur jaringan, *support system*, *digital banking* dan *big data*.
- Sekitar 7,5% akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor dengan membuka sejumlah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas pada wilayah Sumatera dan/atau Jawa & Bali dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi dan/atau Nusa Tenggara, Maluku & Papua.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal, termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbitan instrumen pasar modal lainnya dan/atau pinjaman dari lembaga lainnya dan/atau sumber lainnya.

Perseroan wajib menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk membiayai kegiatan atau investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan wajib menyampaikan laporan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek paling lambat satu hari kerja setelah terpenuhinya kondisi sebagai berikut: (1) seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah diterima oleh Perseroan; dan/atau (2) dana yang diterima sudah mulai digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini sebagaimana dimaksud di atas atau menggunakan hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini selain daripada rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan terlebih dahulu akan menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPS dan memperoleh persetujuan dari RUPS, sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini mengandung unsur transaksi afiliasi, transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha utama, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.E.1 dan/atau Peraturan No. IX.E.2 atau peraturan penggantinya.

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini akan dibayarkan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham. Total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ●% dari nilai emisi. Semua biaya di bawah ini, sudah memperhitungkan pajak yang berlaku, merupakan persentase dari total biaya yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjaminan Emisi sekitar ●% yang terdiri dari: biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) ●%, jasa penjaminan (*underwriting fee*) ●% dan jasa penjualan (*selling fee*) ●%.
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal ●% yang terdiri dari biaya: biaya jasa Akuntan Publik ●%, Konsultan Hukum ●% dan Notaris ●%, dan biaya jasa Penilai Independen ●%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal ●% yang terdiri dari: biaya jasa Biro Administrasi Efek ●%.
- Biaya pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ke OJK: ●%.
- Biaya lain-lain seperti biaya konsultan keuangan dan konsultan SDM, biaya penyelenggaraan *Public Expose*, biaya percetakan prospektus dan sertifikat, biaya iklan Prospektus Ringkas, biaya kunjungan lokasi, biaya jasa BEI, biaya jasa KSEI, dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut, sekitar ●%.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (“PSS”), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Per 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp9.100.455 juta dan dana syirkah temporer berjumlah Rp19.840.088 juta.

LIABILITAS

Tabel berikut ini menggambarkan komponen liabilitas Perseroan.

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Liabilitas segera	86.752
Bagi hasil yang belum dibagikan	35.683
Simpanan	
Giro wadiah	1.769.344
Tabungan wadiah	4.749.652
	6.518.996
Simpanan dari bank lain	14.333
Pinjaman yang diterima	-
Utang pajak	40.391
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	2.134
Liabilitas lain-lain	1.402.166
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi	1.000.000
Jumlah Liabilitas	9.100.455
Dana Syirkah Temporer	
Giro <i>mudharabah</i>	139.535
Tabungan <i>mudharabah</i>	1.270.484
Deposito <i>mudharabah</i>	18.430.069
Jumlah Dana Syirkah Temporer	19.840.088

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang kemungkinan dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan kewajiban Perseroan kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai kewajiban Perseroan kepada pemberi amanat. Rincian liabilitas segera per 31 Desember 2017 adalah Rp86.752 juta, dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Titipan ATM	65.917
Titipan tagihan pembayaran	558
Titipan uang muka <i>istishna</i>	312
Titipan lainnya	19.965
Total	86.752

2. Bagi Hasil yang Belum Dibagikan

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Perseroan kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha Perseroan yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*. Saldo bagi hasil yang belum dibagikan per 31 Desember 2017 adalah Rp35.683 juta (belum jatuh tempo).

3. Giro Wadiah

Giro *wadiah* merupakan giro *wadiah yaddhamanah* yakni titipan dana pihak lain dimana pemilik dana mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan Perseroan. Giro *wadiah* dicatat sebesar nilai titipan pemegang giro *wadiah*. Saldo giro *wadiah* per 31 Desember 2017 adalah Rp1.769.344 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	1.753.268
Pihak-pihak afiliasi	16.076
Total	1.769.344

4. Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan dimana tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Perseroan. Saldo tabungan *wadiah* per 31 Desember 2017 adalah Rp4.749.652 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	4.741.835
Pihak-pihak afiliasi	7.817
Total	4.749.652

5. Simpanan dari Bank Lain

Akun ini merupakan Simpanan dari bank lain yang ditempatkan pada Perseroan berupa simpanan giro *wadiah* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Saldo simpanan dari bank lain per 31 Desember 2017 adalah Rp14.333 juta, dengan perincian sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	14.333
Pihak-pihak afiliasi	-
Total	14.333

6. Utang Pajak

Saldo utang pajak per 31 Desember 2017 adalah Rp40.391 juta, dengan perincian sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan	
Pasal 4 (2)	18.822
Pasal 21	7.996
Pasal 22	51
Pasal 23	342
Pasal 25	9.572
Pasal 29	655
PPN WAPU	2.953
Total	40.391

7. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi

Akun ini merupakan penyisihan kerugian untuk komitmen dan kontinjensi yang dibentuk serta penyisihan atas perkara hukum. Saldo estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi per 31 Desember 2017 adalah Rp2.134 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal tahun	895
Pembentukan (pembalikan) selama tahun berjalan	1.239
Saldo akhir tahun	2.134

8. Sukuk Mudharabah Subordinasi

Saldo Sukuk *Mudharabah* Subordinasi per per 31 Desember 2017 adalah Rp1.000.000 juta. Pada tanggal 17 November 2016, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil. Besarnya nisbah pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari gross revenue tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau Lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat A+ dari Fitch.

Berdasarkan Surat No. SR-32/PB.13/2016 tertanggal 29 November 2016, telah disetujui permohonan Bank oleh OJK untuk memperhitungkan hasil penjualan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) sebagai komponen modal pelengkap bank (setinggi-tingginya 100% dari modal inti).

9. Liabilitas lain-lain

Saldo liabilitas lain-lain per per 31 Desember 2017 adalah Rp1.402.166 juta, dengan perincian sebagai berikut.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rekening sementara	1.290.882
Estimasi liabilitas imbalan kerja	43.133
Cadangan bonus	37.704
Setoran jaminan	4.403
Premi asuransi	3.420
Perantara hasil kliring	958
Lain-lain	21.666
Total	1.402.166

10. Estimasi Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo estimasi liabilitas imbalan kerja per per 31 Desember 2017 adalah Rp43.133 juta, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Cuti besar	30.304
Pemutusan hubungan kerja	12.829
Total	43.133

Estimasi liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsiasumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

Imbalan Kerja

Perseroan memberikan imbalan kerja lain berupa imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

Program pensiun iuran pasti

Perseroan juga menyediakan program pensiun iuran pasti, yaitu iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji karyawan yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Perseroan. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh karyawan-karyawan tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Perseroan juga menyediakan Imbalan pasca-kerja dan imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti besar yang diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh karyawan yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Perseroan dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003. Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

DANA SYIRKAH TEMPORER

1. Giro Mudharabah

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah pada Perseroan yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bank garansi dan sarana perintah pembayaran lainnya. Saldo giro *mudharabah*, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
Pihak Ketiga	139.535
Total	139.535

2. Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo tabungan nasabah di Perseroan. Saldo tabungan *mudharabah*, dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga - Bukan Bank	
Rupiah	
Tabungan haji <i>mudharabah</i>	1.215.106
Tabungan impian	51.479
Total Rupiah	1.266.585
Dolar Amerika Serikat	
Tabungan haji <i>mudharabah</i>	3.899
Total	1.270.484

3. Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Perseroan atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan Perseroan. Saldo deposito *mudharabah* per 31 Desember 2017 adalah Rp18.430.069 juta, dengan perincian sebagai berikut:

a. Berdasarkan mata uang

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bukan Bank	
Pihak Ketiga	
Rupiah	18.136.341
Dolar Amerika Serikat	189.743
	<hr/>
	18.326.084
Pihak Berelasi	
Rupiah	58.002
	<hr/>
	18.384.086
Bank	
Pihak Ketiga	
Rupiah	45.983
Total	18.430.069

b. Berdasarkan jangka waktu

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
1 bulan	17.667.666
3 bulan	324.328
6 bulan	89.183
12 bulan	159.149
	<hr/>
	18.240.326
Dolar Amerika Serikat	
1 bulan	189.743
Total	18.430.069

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rupiah	
≤ 1 bulan	14.150.533
> 1 - ≤ 3 bulan	3.949.562
> 3 - ≤ 12 bulan	140.231
	18.240.326
Dolar Amerika Serikat	
≤ 1 bulan	135.675
> 1 - ≤ 3 bulan	54.068
Total	18.430.069

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN, YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN KEWAJIBAN ATAS LIABILITAS PERSEROAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (NEGATIVE COVENANTS)

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KOMITMEN DAN KONTINJENSI SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2017.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
ASET			
Kas	279.855	318.105	347.997
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	3.814.178	4.015.626
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	453.391	245.821
Investasi pada surat berharga	2.181.054	4.706.065	7.411.068
Piutang			
Piutang <i>murabahah</i>	10.003.275	10.782.243	10.886.965
Cadangan kerugian penurunan nilai	(222.925)	(281.710)	(429.948)
	9.780.350	10.500.533	10.457.017
Piutang <i>istishna</i>	7.428	5.900	4.421
Cadangan kerugian penurunan nilai	(187)	(140)	(112)
	7.241	5.760	4.309
	9.787.591	10.506.293	10.461.326
Pinjaman Qardh	398.874	295.388	538.243
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.339)	(2.269)	(14.142)
	387.535	293.119	524.101
Pembiayaan Mudharabah	1.121.467	1.285.582	858.019
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.901)	(14.097)	(17.045)
	1.106.566	1.271.485	840.974
Pembiayaan Musyarakah	5.082.963	5.379.830	5.577.220
Cadangan kerugian penurunan nilai	(120.617)	(193.940)	(129.222)
	4.962.346	5.185.890	5.447.998
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - Neto	46.259	286.181	1.146.920
Aset Tetap - Neto	156.188	140.816	177.935
Aset Pajak Tangguhan	28.186	52.152	140.883
Aset lain-lain	407.022	746.514	1.100.422
Cadangan kerugian penurunan nilai	(11.910)	(87.001)	(317.687)
	395.112	659.513	782.735
Jumlah Aset	24.230.247	27.687.188	31.543.384
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER, DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	48.237	86.911	86.752
Bagi hasil yang belum dibagikan	34.776	34.991	35.683
Simpanan			
Giro wadiah	938.831	1.129.560	1.769.344
Tabungan wadiah	3.715.929	4.176.761	4.749.652
	4.654.760	5.306.321	6.518.996
Simpanan dari bank lain	890.852	972.719	14.333
Pinjaman yang diterima	100.000	100.000	-
Utang pajak	56.416	49.613	40.391
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.242	895	2.134
Liabilitas lain-lain	635.254	912.978	1.402.166
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi	-	1.000.000	1.000.000
Jumlah Liabilitas	6.421.537	8.464.428	9.100.455
Dana syirkah temporer			

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Giro <i>mudharabah</i>	-	-	139.535
Tabungan <i>mudharabah</i>	696.198	983.121	1.270.484
Deposito <i>mudharabah</i>	14.772.700	15.729.625	18.430.069
Jumlah Dana <i>Syirkah</i> Temporer	15.468.898	16.712.746	19.840.088
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham			
Modal dasar - 10.000.000.000 (nilai penuh) saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.958.000.000 (nilai penuh) saham	1.979.000	1.979.000	1.979.000
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	11.722	11.715	3.451
Cadangan umum	13.614	25.878	42.899
Saldo laba	335.476	493.421	577.491
Jumlah Ekuitas	2.339.812	2.510.014	2.602.841
Jumlah Liabilitas, Dana <i>Syirkah</i> Temporer dan Ekuitas	24.230.247	27.687.188	31.543.384

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>			
Pendapatan dari jual beli	1.461.483	1.534.570	1.508.223
Pendapatan bagi hasil	642.005	693.611	670.205
Pendapatan usaha utama lainnya	306.378	393.188	544.757
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - neto	14.886	12.832	93.339
	2.424.752	2.634.201	2.816.524
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.027.442)	(1.035.501)	(1.193.918)
Hak bagi hasil milik bank	1.397.310	1.598.700	1.622.606
Pendapatan usaha lainnya	130.460	127.967	149.003
Beban usaha			
Gaji dan tunjangan	(509.098)	(538.227)	(522.067)
Umum dan administrasi	(471.061)	(489.747)	(500.278)
Administrasi ATM	(79.937)	(62.692)	(66.705)
Bonus <i>wadiah</i>	(25.667)	(27.193)	(35.326)
Lain-lain	(51.675)	(50.565)	(54.367)
	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - neto	(231.353)	(319.011)	(453.372)
Laba usaha	158.979	239.232	139.494
Pendapatan (beban) non-usaha - neto	10.090	(623)	11.463
Laba sebelum beban pajak	169.069	238.609	150.957
Beban pajak	(46.432)	(68.400)	(49.866)
Laba bersih	122.637	170.209	101.091
Pendapatan komprehensif lain:			
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			
Pengukuran kembali program imbalan pasti	3.580	(7)	(11.020)
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	(895)	-	2.756
Jumlah pendapatan komprehensif lain bersih setelah pajak	2.685	(7)	(8.264)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	125.322	170.202	92.827
Laba per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	36,34	43,00	25,54

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			
Penerimaan bagi hasil, <i>margin</i> , pendapatan <i>ijarah</i> dan pendapatan usaha utama lainnya	2.403.709	2.601.681	2.795.605
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer	(1.036.512)	(1.035.502)	(1.193.226)
Penerimaan pendapatan usaha lainnya	130.460	127.967	149.003
Beban usaha	(1.172.328)	(1.348.586)	(1.501.122)
Pendapatan non-usaha - neto	10.022	(957)	11.183
Pembayaran pajak penghasilan badan	(34.354)	(102.766)	(143.178)
Pembayaran zakat	(4.242)	(6.998)	(8.933)
Penyaluran dana kebajikan	(1.374)	(783)	(2.308)
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	295.381	234.056	107.024
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	55.645	(300.000)	1.400.000
Piutang	20.419	(777.440)	(103.243)
Pinjaman <i>qardh</i>	192.975	103.486	(242.855)
Pembiayaan syariah	(1.227.847)	(460.982)	230.173
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>	(827)	(141.910)	(933.030)
Aset lain-lain	(82.281)	(306.975)	(332.986)
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			
Liabilitas segera	(1.017)	38.674	(158)
Simpanan dari nasabah	735.726	659.342	1.223.916
Simpanan dari bank lain	(76.011)	81.868	(958.386)
Utang pajak	(5.209)	448	(2.535)
Liabilitas lain-lain	147.923	277.718	478.170
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer	2.442.082	1.243.848	3.127.341
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	2.496.959	652.133	3.993.431
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			
Penerimaan kembali investasi pada surat berharga	121.859	2.644.031	79.071
Hasil penjualan aset tetap	68	335	280
Perolehan aset tetap	(49.770)	(21.193)	(64.937)
Perolehan surat berharga	(1.635.061)	(5.169.042)	(2.784.075)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Setoran modal	500.000	-	-
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	-	-	(100.000)
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	-	1.000.000	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas	1.434.055	(893.736)	1.123.770
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:			
Kas	279.855	318.105	347.997
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3.719.138	2.464.178	3.765.626
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	453.391	245.821
Jumlah	4.129.410	3.235.674	4.359.444

Rasio-Rasio Penting (Sesuai PBI No. 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Rasio Pertumbuhan			
Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai <i>Mudharib</i>	N/A	8,64%	6,92%
Hak Bagi Hasil milik Bank	N/A	14,41%	1,50%
Laba Usaha	N/A	50,48%	-41,69%
Laba Bersih	N/A	38,79%	-40,61%
Jumlah Laba Komprehensif	N/A	35,81%	-45,46%
Jumlah aset	N/A	14,27%	13,93%
Jumlah liabilitas	N/A	31,81%	7,51%
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	N/A	8,04%	18,71%
Jumlah ekuitas	N/A	7,27%	3,70%
Permodalan			
CAR (KPM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana dan operasional	14,05%	20,69%	20,30%
CAR (KPM) dengan memperhitungkan risiko kredit/penyaluran dana, risiko operasional dan risiko pasar	13,94%	20,63%	20,29%
Kualitas Aset			
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	1,63%	1,91%	2,04%
Rentabilitas			
ROA	0,77%	0,95%	0,51%
ROE	6,33%	7,40%	4,10%
BOPO	93,79%	91,33%	95,24%
Net Imbalan (NI)	6,66%	6,67%	5,84%
Kualitas Kredit			
Gross NPF	4,86%	4,57%	6,43%
Net NPF	3,89%	3,19%	4,72%
Likuiditas			
FDR	84,16%	81,47%	71,87%
Kepatuhan (Compliance)			
Persentase Pelanggaran BMPD	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPD	-	-	-
GWM Rupiah	5,05%	5,02%	7,03%
GWM Valas	3,74%	1,13%	1,70%
PDN	6,01%	1,43%	0,34%
Komposisi Dana Pihak Ketiga			
CASA	27,23%	28,60%	30,13%

- Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun terkait sebagai berikut:
 - untuk akun-akun posisi keuangan, selisih saldo akun-akun terkait pada 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya, atau
 - untuk akun-akun laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, selisih saldo akun-akun terkait, masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember, dengan saldo akun-akun tersebut untuk tahun yang sama pada tahun sebelumnya.
- CAR (Capital Adequacy Ratio) dihitung berdasarkan peraturan BI merupakan rasio modal Tier I ditambah modal Tier II terhadap jumlah aset tertimbang menurut risiko kredit/penyaluran dana, risiko operasional dan risiko pasar pada akhir periode yang bersangkutan.
- Rasio CKPN (Cadangan Kerugian Penurunan Nilai) aset keuangan terhadap aset produktif adalah rasio CKPN aset keuangan terhadap total aset produktif (diluar transaksi rekening administratif). CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI), sedangkan cakupan komponen aset produktif adalah sesuai ketentuan BI mengenai kualitas aset bank umum.
- ROA (Return on Assets) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset. Laba sebelum pajak adalah laba periode berjalan sebelum pajak yang disetahunkan sedangkan rata-rata total aset dihitung dari rata-rata total aset pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.
- ROE (Return on Equity) yang dihitung sesuai peraturan BI adalah rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas. Laba setelah pajak adalah laba periode berjalan setelah pajak yang dapat diatribusikan kepada pemilik yang disetahunkan sedangkan rata-rata ekuitas dihitung dari rata-rata modal inti (tier 1) pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.
- Rasio BOPO (Beban operasional terhadap pendapatan operasional) adalah rasio total beban operasional (termasuk hak pihak ketiga atas bagi hasil) terhadap total pendapatan operasional (termasuk pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib) untuk periode yang bersangkutan.
- Rasio NI (Net Imbalan) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio hak bagi hasil milik bank terhadap rata-rata total aset produktif. Hak bagi hasil milik bank adalah pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil dan beban bonus simpanan wadiah yang disetahunkan sedangkan rata-rata aset produktif dihitung dari rata-rata total aset produktif pada setiap akhir bulan selama periode yang bersangkutan.
- Rasio Gross NPF (Non-Performing Financing) adalah rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan pada akhir periode yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
- Rasio Net NPF (Non-Performing Financing) adalah rasio total pembiayaan bermasalah dikurangi CKPN pembiayaan terhadap total pembiayaan pada akhir periode yang bersangkutan. Pembiayaan bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet sedangkan CKPN pembiayaan adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam PSAK mengenai Instrumen Keuangan dan PAPS. Total pembiayaan dihitung berdasarkan nilai tercatat dalam neraca secara gross (sebelum dikurangi CKPN).
- Rasio FDR (Financing to Deposit Ratio) yang dihitung sesuai dengan peraturan BI adalah rasio total pembiayaan terhadap total dana pihak ketiga pada akhir tahun yang bersangkutan.
- GWM (Giro Wajib Minimum) dihitung sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.
- PDN (Posisi Devisa Neto) dihitung sesuai dengan peraturan BI yang berlaku.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

A. UMUM

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Djasa Arta pada 9 Oktober 2008 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 Perseroan secara resmi beroperasi. Kemudian Perseroan mengubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Perseroan hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Perseroan tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, Perseroan menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini Perseroan merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah/Layanan Syariah Bank dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

1. Kondisi Perekonomian Global dan Indonesia

Berdasarkan data Bank Dunia, Ekonomi dunia mengalami pertumbuhan ekonomi yang mencapai 3,4% (yoy) pada Kuartal III tahun 2017, pertumbuhan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan investasi, manufaktur, perdagangan dan perbaikan harga komoditas. Amerika Serikat yang merupakan barometer ekonomi dunia pada Kuartal III tahun 2017, tumbuh sebesar 2,4% (*year-on-year/yooy*) didorong oleh pengeluaran konsumsi barang dan jasa serta pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran konsumsi barang dan jasa didorong oleh peningkatan konsumsi untuk perumahan dan kebutuhan harian, layanan kesehatan, rekreasi dan kendaraan. Pada Kuartal III tahun 2017, Kawasan Eropa (EA19) tumbuh sebesar 2,3%, didorong oleh perekonomian Spanyol yang mulai mengalami pertumbuhan ekonomi yang moderat setelah krisis finansial tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan akan meningkat sebesar 2,3% pada tahun 2017, yang juga akan menguntungkan mitra dagang negara-negara tersebut. Kondisi pembiayaan global tetap baik dan harga komoditas telah stabil. Dengan peningkatan kondisi internasional tersebut, pertumbuhan di pasar dan ekonomi negara berkembang secara keseluruhan akan meningkat menjadi 4,3% di tahun 2017 dari 3,7% di tahun 2016.

Bank Dunia baru saja merilis laporan terbaru Januari 2018 yang berjudul "*Global Economic Prospects: Broad-Based Upturn, but for How Long?*". Salah satu sorotan pada laporan tersebut adalah pertumbuhan antar kelompok 7 *emerging market* terbesar, yaitu Brazil, Tiongkok, India, Indonesia, Meksiko, Rusia, and Turki, yang diperkirakan akan meningkat hingga 2018. Pertumbuhan mereka akan melampaui pertumbuhan kelompok 7 ekonomi maju besar seperti Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris dan Amerika Serikat. Berdasarkan Bank Dunia pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada tahun 2017 diestimasikan sebesar 6,8% (yoy). Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan

kinerja industri, selain itu terdapat penurunan harga rumah sehingga meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Inflasi yang stabil merupakan salah satu faktor perbaikan di sektor industrial di Tiongkok. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang diestimasikan sebesar 1,7% di tahun 2017 (yoy), didorong oleh pertumbuhan konsumsi dan investasi. Pertumbuhan di sektor konsumsi dan investasi tersebut dikarenakan implementasi dari paket stimulus fiskal di negara tersebut

Bank Indonesia (BI) merilis pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2017 tumbuh sebesar 5,06% dan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,1% - 5,5% pada tahun 2018. Membaiknya pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan struktur yang lebih berimbang seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor dan investasi, serta konsumsi yang relatif terjaga. Investasi tumbuh lebih tinggi didukung perbaikan iklim usaha dan realisasi proyek-proyek infrastruktur. Pertumbuhan investasi triwulan III 2017 sebesar 7,11% (yoy). Pertumbuhan ekspor meningkat sejalan dengan masih tingginya harga komoditas dan membaiknya pertumbuhan ekonomi dunia. Pertumbuhan ekspor pada triwulan III 2017 sebesar 17,27% (yoy). Pertumbuhan konsumsi rumah tangga relatif terjaga seiring dengan inflasi yang rendah dan dukungan belanja Pemerintah. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III 2017 tumbuh sebesar 4,93% (yoy).

2. Kondisi Perbankan Nasional dan Perbankan Syariah

Perekonomian Indonesia pada triwulan IV 2017 diperkirakan tumbuh lebih baik dari triwulan sebelumnya. Perkiraan perbaikan ekonomi didukung oleh pertumbuhan investasi dan pelonggaran kebijakan moneter. Pertumbuhan pada triwulan IV ditopang oleh pertumbuhan investasi infrastruktur serta pertumbuhan ekspor dan dampak positif pemulihan pertumbuhan dunia. Perbaikan investasi diperkirakan terus berlanjut didukung investasi bangunan yang tumbuh cukup tinggi dan investasi non-bangunan yang membaik sebagaimana tercermin antara lain pada meningkatnya penjualan alat-alat berat untuk sektor pertambangan dan perkebunan serta meningkatnya impor mesin-mesin dan perlengkapan untuk keperluan industri pengolahan. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global, ekspor diperkirakan membaik terutama pada produk tambang dan perkebunan. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR) serta sektor industri pengolahan. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan Bank Indonesia secara keseluruhan Triwulan IV 2017 tumbuh sebesar 5,19%.

Pada Desember 2017, secara umum industri perbankan nasional menunjukkan pertumbuhan yang moderat, tercermin dari meningkatnya total aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum masing-masing sebesar 9,77% (yoy), 9,22% (yoy), dan 9,66% (yoy). Selain itu, indikator kinerja Bank Umum Konvensional (BUK) juga masih terjaga baik. Hal ini tercermin dari rasio kecukupan modal (CAR) yang cukup tinggi sebesar 23,18% (sumber: OJK, Statistik Perbankan Indonesia Desember 2017).

Kinerja perbankan syariah (BUS dan UUS) pada Desember 2017 berdasarkan rilis dari OJK mengalami pertumbuhan yang signifikan yang disebabkan Bank Aceh dikonversikan menjadi Bank Umum Syariah yang mengakibatkan pertumbuhan BUS yang signifikan baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang relatif sedikit menurun. Meskipun demikian, pertumbuhan Aset, pembiayaan dan DPK perbankan syariah pada tahun 2017 mengalami peningkatan masing-masing sebesar 18,98% (yoy), 15,23% (yoy) dan 19,83% (yoy).

3. Kondisi Kinerja Perseroan Dibandingkan dengan Perbankan Syariah

Per 31 Desember 2017, aset Perseroan mencapai Rp31.543.384 juta atau tumbuh 13,93% dari angka Rp27.687.188 juta di akhir tahun 2016. Sementara itu, pangsa pasar aset Perseroan pada 2017 mencapai sebesar 7,44%. Aset perbankan syariah tumbuh sebesar 18,98% menjadi Rp424.181 miliar di Desember 2017, dari posisi Rp356.504 miliar pada akhir tahun 2016. Pangsa pasar aset perbankan syariah terhadap perbankan nasional pada Desember 2017 sebesar 5,74%.

Pembiayaan Perseroan pada Desember 2017 mencapai Rp19.012 miliar dari Rp18.035 miliar di akhir tahun 2016. Pangsa pasar pembiayaan Perseroan sebesar 6,65%. Pembiayaan perbankan syariah meningkat 15,23% pada Desember 2017, menjadi Rp 285.785 miliar dari posisi Rp 248.007 miliar di akhir 2016. Pada pembiayaan, pangsa pasar perbankan syariah sebesar 3,98% terhadap perbankan nasional pada posisi Desember 2017 (sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2017).

Perseroan berhasil menghimpun DPK sebesar Rp26.373 miliar pada Desember 2017, meningkat 19,63% dari Rp22.019 miliar di akhir tahun 2016. Pangsa pasar pada periode tersebut cenderung stabil yaitu sebesar 7,87%. Sementara itu DPK perbankan syariah hanya meningkat 19,83% pada Desember 2017, dari Rp279.335 miliar di akhir 2016 menjadi Rp334.719 miliar di Desember 2017. Pangsa pasar DPK perbankan syariah pada Desember 2017 sebesar 5,65% terhadap perbankan nasional (sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2017).

Dari segi rasio-rasio menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga dibandingkan dengan pembiayaan membuat FDR Perseroan turun dari 81,47% pada Desember 2016 menjadi 71,87% pada Desember 2017. CAR Perseroan pada Desember 2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 20,63% menjadi 20,29%. CAR perbankan syariah di angka 17,91% pada 2017, naik dari tahun sebelumnya sebesar 16,63% (sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2017).

ROA Perseroan pada Desember 2017 sebesar 0,51%, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,95%. ROA perbankan syariah meningkat menjadi 1,17% di 2017 dari semula 0,95% pada akhir 2016. Laba perbankan mengalami penurunan sehubungan dengan upaya perbaikan kualitas pembiayaan dan efisiensi operasional yang dilakukan sehingga berdampak perbaikan laba perbankan. (sumber :OJK, Statistik Perbankan Syariah-Desember 2017).

Jika dibandingkan dengan *peers group* perbankan syariah, dari data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir dari sisi aset, pembiayaan, dan DPK tertinggi masih dikuasai oleh 5 Bank Umum Syariah (BUS) yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Muamalat, BNI Syariah, BRISyariah dan Bank Aceh. Posisi persaingan Perseroan dibandingkan dengan BUS lainnya per Desember 2017 dari sisi aset, pembiayaan dan DPK berada pada posisi keempat setelah BSM, Muamalat dan BNI Syariah. Dari sisi rasio-rasio posisi Desember 2017, Perseroan masih sejajar dengan *peers group* pada beberapa rasio (sumber :Laporan Publikasi Bank-Desember 2017).

4. Faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil usaha Perseroan

- **Kinerja Perseroan dibandingkan dengan periode sebelumnya**

Secara umum kinerja Perseroan menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Per posisi 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp31.543.384 juta naik sebesar 13,93% dari Rp27.687.188 juta pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh investasi surat berharga dan aset yang diperoleh untuk ijarah - neto yang masing-masing tumbuh sebesar 57,48% atau senilai Rp2.705.003 juta dan sebesar 300,77% atau senilai Rp860.739 juta.

Untuk aset per posisi 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp27,69 triliun naik sebesar 14,27% dari Rp24,23 triliun pada tahun 2015. Peningkatan juga terjadi pada liabilitas, per posisi 31 Desember 2016 jumlah liabilitas Perseroan di luar dana *syirkah* temporer adalah sebesar Rp8,46 triliun naik sebesar 31,81% dari Rp6,42 triliun pada tahun 2015. Demikian pula halnya dengan komposisi dana murah (giro dan tabungan) pada tahun 2016 adalah sebesar 31,59% atau mengalami peningkatan sebesar 1,88% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 29,70%. Seiring dengan perkembangan aset dan dana pihak ketiga, pendapatan Perseroan pada tahun 2016, dari aktivitas pengelolaan dana sebesar Rp2,63 triliun, meningkat sebesar 8,64% dengan laba pada tahun 2016, sebesar Rp170,20 miliar, atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 35,81% dari Rp122,64 miliar dibandingkan pada tahun 2015.

- **Faktor yang mempengaruhi kinerja perseroan**

Sebagai bagian dari industri perbankan syariah yang ada di Indonesia, Perseroan juga tidak luput dari pengaruh eksternal yang berdampak pada perkembangan kinerja Perseroan. Faktor eksternal yang berpengaruh pada kinerja perseroan diantaranya adalah pergerakan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate pengaruh dari perubahan harga komoditas. Penetapan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate merupakan bagian kebijakan pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia. Banyak penyebab yang menjadikan faktor perubahan tersebut, diantaranya inflasi dan kebijakan perekonomian global. Begitu pula halnya dengan perubahan harga komoditas, dimana perubahan tersebut juga disebabkan karena terjadinya perubahan *supply* dan *demand* terhadap barang komoditas tersebut.

Apabila Bank Indonesia mengeluarkan perubahan kebijakan tingkat suku bunga acuan atau BI Rate, maka secara langsung dan tidak langsung hal tersebut juga memberikan dampak kepada Perseroan. Peningkatan suku bunga acuan atau BI Rate berdampak kepada meningkatnya beban biaya dana atau *cost of fund* untuk dana pihak ketiga. Hal tersebut tercermin pada saat BI Rate meningkat dari 5,75% di Januari 2013 menjadi 7,50% di Januari 2014 berdampak pada peningkatan beban biaya dana atau *cost of fund* Perseroan dari 5,56% di Januari 2013 menjadi 7,04% di Januari 2014. Adapun untuk faktor pergerakan harga komoditas berdampak bagi Perseroan apabila terjadi penurunan harga komoditas. Dimana penurunan harga komoditas tersebut berdampak pada berkurangnya pendapatan nasabah Perseroan yang menjalankan usaha/bisnis yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan komoditas tersebut.

Dalam hal ini apabila harga suatu komoditas mengalami penurunan, misal *crude palm oil* dan batubara, maka nasabah Perseroan yang sumber pendapatannya berasal dari penjualan komoditas, atau menjalankan usaha penunjang/turunannya akan mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan yang dialami oleh nasabah tersebut selanjutnya berdampak kepada kemampuan membayar kewajiban kepada Perseroan. Dan bagi Perseroan hal tersebut menyebabkan terjadi peningkatan *non performing financing*. Seperti yang terjadi pada harga *crude palm oil* dari Rp7.127/kg dan harga batubara dari USD 81,75/ton di akhir tahun 2012 selanjutnya mengalami penurunan menjadi Rp6.799/kg untuk *crude palm oil* dan USD53,51/ton untuk batubara berdampak pada peningkatan *non performing financing (gross)* dari 3,00% di akhir tahun 2012 menjadi 4,86% pada akhir tahun 2015. (sumber: Kementerian ESDM, 2016, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi/BAPPEBTI, 2016, dan Bank Indonesia, 2016)

Menghadapi kondisi tersebut di atas, maka Perseroan melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meminimalisir dampak kerugian yang ditimbulkan. Terhadap meningkatnya beban biaya dana atau *cost of fund* sebagai akibat meningkatnya tingkat suku bunga acuan atau BI Rate, maka efisiensi dan pengaturan portofolio dana pihak ketiga menjadi langkah yang dilakukan oleh perusahaan. Efisiensi dan pengaturan portofolio tersebut diantaranya melakukan peninjauan kembali terhadap biaya dana pada dana pihak ketiga yang telah jatuh tempo dengan mengurangi biaya yang harus dibayarkan. Selain itu juga melakukan upaya diversifikasi dengan memperbanyak portofolio dana pihak ketiga berbiaya rendah seperti giro dan tabungan. Upaya tersebut terbukti mampu menurunkan beban biaya dana atau *cost of fund* dari 6,10% di akhir tahun 2015 menjadi 5,35% di akhir tahun 2016 walaupun pada saat tersebut tingkat suku bunga acuan atau BI rate meningkat dari 7,50% di akhir tahun 2015 menjadi 6,50% di awal tahun 2016. Menghadapi peningkatan harga komoditas dan berdampak pada penurunan kemampuan bayar nasabah, Perseroan melakukan berbagai upaya diantaranya restrukturisasi terhadap fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah Perseroan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penurunan harga komoditas tersebut. Selain itu Perseroan juga melakukan upaya pencegahan dengan mengurangi dan atau menghentikan pembiayaan pada bidang usaha yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan komoditas tersebut. Upaya yang dilakukan tersebut memberikan dampak pada Perseroan mampu meminimalisir peningkatan *non performing financing* menjadi lebih besar, dalam hal ini Perseroan dapat menjaga *non performing financing* di 4,57% di akhir tahun 2016 dari yang sebelumnya sebesar 4,86% di akhir tahun 2015.

Seiring dengan rencana pertumbuhan pembiayaan maka diperlukan dana pihak ketiga yang cukup. Sumber dana pihak ketiga dapat berasal dari giro, tabungan dan deposito. Bersamaan dengan langka Perseroan untuk meningkatkan komposisi dana murah, dalam hal ini giro dan tabungan, maka Perseroan telah berhasil melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan pendanaan. Upaya yang telah dilakukan tersebut membuktikan bahwa Perseroan memiliki kemampuan dan dipercaya untuk melakukan penghimpunan dana, diantaranya :

- i. Jumlah outstanding tabungan di kantor layanan syariah yang dicapai pada tahun 2016 sebesar Rp35 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebanyak Rp31 miliar.
- ii. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank Operasional 2, untuk melayani pembayaran gaji PNS/TNI/POLRI.
- iii. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank persepsi pembayaran Pensiunan melalui PT TASPEN.
- iv. Perseroan telah ditunjuk sebagai pengelola dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
- v. Perseroan telah ditunjuk sebagai pengelola rekening khusus SBSN.
- vi. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank pelaksana transaksi pembayaran non tunai Kementerian Agama.
- vii. Perseroan telah ditunjuk sebagai Bank persepsi penerima pajak.

- **Perilaku konsumen dan persaingan serta aktivitas pemasaran**

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, perilaku konsumen di perbankan juga mengalami perubahan, begitu pula halnya dengan konsumen atau nasabah perbankan syariah. Konsumen, baik pendanaan maupun pembiayaan, saat ini menginginkan pelayanan yang cepat, mudah dan nyaman. Dalam melakukan interaksi atau berhubungan dengan perbankan syariah, konsumen menginginkan layanan yang cepat, prosesnya mudah dan tidak berbelit-belit serta memberikan kenyamanan. Untuk itu diperlukan suatu perubahan dalam proses layanan yang diberikan oleh perbankan syariah. Hal itu pula yang dilakukan oleh Perseroan dalam melakukan pelayanan kepada calon nasabah baik untuk nasabah pendanaan maupun pembiayaan. Perseroan telah memanfaatkan teknologi informasi, diantaranya mobile banking untuk nasabah pendanaan sehingga mudah dalam melakukan transaksi keuangan, serta pemanfaatan sistem informasi dalam melakukan analisa pembiayaan retail-mikro dan retail-konsumer sehingga proses keputusan pembiayaan menjadi lebih cepat.

Perubahan perilaku yang terjadi di konsumen selanjutnya juga berdampak kepada aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Selain melakukan pemasaran dengan kegiatan *open table* yang dilakukan secara rutin setiap minggu oleh masing-masing kantor cabang, Perseroan juga melakukan pemasaran dengan kerjasama dengan beberapa instansi atau lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan serta keagamaan. Perseroan menyediakan laboratorium perbankan syariah dan melakukan kerjasama dengan sebanyak mungkin institusi pendidikan khususnya untuk sistem pembayaran. Untuk meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap Perseroan, maka dilakukan pula intensif komunikasi marketing yang efektif dan efisien melalui sosial media. Peningkatan aktivitas pemasaran tidak hanya dilakukan untuk menjual produk dana, Perseroan juga melakukan pemasaran untuk produk retail-mikro dan retail-konsumer. Untuk pemasaran retail-mikro, Perseroan melakukan serbu-pasar yang dilakukan secara berkala dan rutin di beberapa pasar yang ada di wilayah masing-masing kantor cabang. Dalam memasarkan produk retail-konsumer, Perseroan melakukan beberapa upaya yaitu kerjasama dengan pengembang atau developer untuk meningkatkan penjualan pembiayaan rumah dan kerjasama dengan instansi atau lembaga pemerintahan untuk meningkatkan penjualan pembiayaan multiguna.

Aktivitas pemasaran yang telah dilakukan oleh Perseroan memberikan hasil berupa peningkatan dana pihak ketiga khususnya giro dan tabungan serta peningkatan *outstanding* pembiayaan rumah dan pembiayaan multiguna. Langkah Perseroan ini selanjutnya dijadikan acuan oleh bank syariah pesaing lainnya untuk melakukan perubahan pola pemasaran. Untuk peningkatan dana pihak ketiga, beberapa bank pesaing mulai mengikuti jejak Perseroan melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pendidikan. Bank syariah pesaing pun juga turut meningkatkan pemasaran produk dan layanannya melalui pameran di beberapa lokasi strategis, mengoptimalkan sosial media serta aktivitas lainnya. Pada produk pembiayaan, terdapat beberapa bank syariah pesaing yang mulai melakukan peningkatan pembiayaan mikro melalui pembukaan outlet di beberapa pasar tradisional yang ada di wilayah atau propinsi tertentu.

- **Pengembangan produk baru dan upaya peningkatan kinerja**

Untuk menghadapi persaingan di industri perbankan syariah yang cukup ketat, maka Perseroan dituntut untuk terus melakukan inovasi atau pengembangan produk dan layanan. Langkah pengembangan produk dan layanan yang dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kinerja Perseroan untuk beberapa tahun yang akan datang. Beberapa langkah pengembangan produk dan layanan yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan kinerja keuangan, diantaranya:

- i. Pengembangan produk *Mudharabah Muqayadah* peningkatan pelayanan terhadap nasabah dalam penyaluran pembiayaan yang dapat ditentukan peruntukan oleh Perseroan dan Nasabah yang memegang dana.
- ii. *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ) berarti suatu pembiayaan *musyarakah* atau *syirkah* yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (*syarik*) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya .
- iii. Untuk mengoptimalkan pendapatan Perseroan atas likuidasi yang dimiliki dengan membentuk produk Repo Syariah Antarbank.

- iv. *Medium Term Note* (MTN) Syariah merupakan produk penghimpun Dana yang menarik untuk nasabah dengan imbal hasil lebih besar dari DPK sementara Perseroan memperoleh dana yang dibutuhkan.
- v. Dalam hal memudahkan transaksi dalam usaha Perseroan menerbitkan Tabungan Faedah Bisnis Individu salah satu solusi kemudahan transaksi nasabah.
- vi. Dalam hal penghimpunan dana valuta asing, Perseroan mengeluarkan Tabungan Faedah Valas dan dapat menjadi alternatif nasabah dalam menabung.
- vii. Penerbitan Kartu ATM Gold, Platinum dan e-Money untuk penambahan fasilitas dari penabung dalam penarikan dalam jumlah nominal besar.
- viii. Penerbitan MasterCard Debit diterbitkan untuk dapat penarikan dana nasabah yang berada diluar negeri.
- ix. Dalam hal untuk meningkatkan *fee based income* Perseroan mengandalkan salah satu *Trade Finance* serta memberikan fasilitasnya dalam hal transaksi ekspor impor nasabah.
- x. Dengan berkembangnya perusahaan *Financial Technology (FinTech)* Perseroan juga meluncurkan produk-produk *fintech* dalam mengikuti perkembangan saat ini, serta didukung oleh *e-Commerce & Pembayaran QR Code*.
- xi. Untuk memperluas jaringan ATM Perseroan melaksanakan kerjasama Jaringan ATM Link.
- xii. Untuk meningkatkan Dana Pihak Ketiga Perseroan meluncurkan Layanan Nasabah Prima (LNP) bagi nasabah yang memiliki dana besar.

Faktor khusus yang dapat mempengaruhi pertumbuhan Perseroan untuk lima tahun mendatang adalah :

- Ketersediaan sumber daya insani yang handal untuk bisa menjawab tantangan perubahan yang sangat cepat dalam industri perbankan khususnya dengan semakin berkembangnya *fintech* dan digitalisasi.
- Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan Syariah yang harus terus dilakukan didorong oleh pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dan OJK.
- Perlunya kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi Syariah juga dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan Syariah dengan menggunakan 'hukum *fiqh*' masih dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan *mazhab (lack of convergence of sharia interpretation)*.

5. Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan

- **Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.**

Dengan diundangkannya UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat pengalihan fungsi pengawasan kegiatan usaha di sektor perbankan yang sebelumnya oleh Bank Indonesia dialihkan fungsi tersebut kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Desember 2013. Dengan adanya pengalihan fungsi pengawasan tersebut, untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara independen dan profesional, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2014 tanggal 12 Februari 2014 tentang Pungutan oleh OJK, yang salah satu sumbernya berasal dari Pungutan dari Lembaga Jasa Keuangan.

- **Peraturan Bank Indonesia No.17/10/PBI/2015 tanggal 18 Juni 2015 perihal Rasio *Loan To Value* Atau *Rasio Financing To Value* Untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Bermotor.**

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan penerapannya dengan diundangkannya peraturan PBI No.17/10/PBI/2015, yang mengatur mengenai ketentuan minimum *down payment* (DP) untuk pembiayaan kendaraan bermotor dan pembiayaan perumahan. BI menetapkan *Loan-to-Value* (LTV) atau *Financing-to-*

Value (FTV) untuk Kredit Atau Pembiayaan Properti Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Bermotor. Penentuan urutan fasilitas kredit/pembiayaan tersebut harus memperhitungkan seluruh fasilitas KPP/KPP iB dan KKBP/KKBP iB yang telah diterima debitur/nasabah di bank yang sama maupun bank lainnya.

BI juga menetapkan minimum DP untuk kredit/pembiayaan kendaraan bermotor, yaitu 25% untuk kendaraan bermotor roda dua, 30% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan non produktif, dan 20% untuk kendaraan bermotor roda tiga atau lebih untuk keperluan produktif. Selain itu BI menetapkan larangan pemberian kredit/pembiayaan untuk uang muka (*down payment*). Ketentuan ini berlaku efektif tanggal 18 Juni 2015.

- **Peraturan Menteri Agama RI No.30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.**

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, akuntabel, amanah, dan transparan perlu dikeluarkan peraturan yang mengatur tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang salah satu pengelolaannya dilakukan oleh bank syariah yang memiliki layanan bersifat nasional dan memiliki kondisi kesehatan bank sesuai dengan peraturan Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan lainnya. Perseroan merupakan salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang ditunjuk oleh Kementerian Agama RI.

- **Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah.**

Berkenaan dengan telah diundangkannya Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, maka perlu diatur lebih lanjut ketentuan pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Dengan diterbitkannya PAPS I 2013 diharapkan dapat meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan laporan keuangan Bank Umum Syariah menjadi relevan, komprehensif, andal, dan dapat diperbandingkan. Salah satu ketentuan yang diatur, adanya kewajiban mengukur penurunan nilai pembiayaan dan membentuk Cadangan Kerugian Pembentukan Nilai (CKPN) atas pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari *peer group* atas pembiayaan secara kolektif.

- **Peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 perihal Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 perihal Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti.**

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha Dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/8/DPbS tanggal 27 Maret 2013 tentang Pembukaan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Berdasarkan Modal Inti, bank syariah hanya dapat memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki. Modal inti Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp2.452.308 juta, Dengan besar modal inti tersebut, pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas, 1.044 kantor layanan syariah yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Dengan modal inti sebesar Rp2.452.308 juta, maka Perseroan masuk dalam kelompok BUKU 2 dan masih memiliki ruang cukup untuk melakukan ekspansi jaringan.

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dikeluarkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas modal bank agar bank lebih mampu menyerap potensi kerugian baik akibat krisis keuangan dan ekonomi maupun karena pertumbuhan pembiayaan yang berlebihan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Penyediaan modal minimum dihitung dengan menggunakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

- **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2014 tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan diterbitkan dalam rangka mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Berdasarkan POJK tersebut, konglomerasi keuangan wajib menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Konglomerasi keuangan adalah lembaga jasa keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian. Konglomerasi keuangan memiliki struktur yang terdiri dari entitas utama dan perusahaan anak. Perseroan dalam hal ini adalah sebagai perusahaan anak, dan BRI sebagai entitas utama (induk).

6. Kebijakan akuntansi penting

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Murabahah*", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi *Mudharabah*", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi *Musyarakah*", PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi *Ijarah*", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Bank juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan posisi keuangan;
- (ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (iii) Laporan arus kas;
- (iv) Laporan perubahan ekuitas;
- (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- (vi) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah. Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah. Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Transaksi dan saldo mata uang asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansi-nya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

c. Perubahan kebijakan akuntansi

2017

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2017, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu:

- Amandemen PSAK No.102 (2016), Akuntansi Murabahah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 107 (2016), Akuntansi Ijarah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 101 (2016), Penyajian Laporan Keuangan Syariah tentang penyajian laporan keuangan asuransi syariah
- Amandemen PSAK No. 103 (2016), Akuntansi Salam tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 104 (2016), Akuntansi Istishna' tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 108 (2016), Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 3, Penyajian Laporan Keuangan tentang Laporan Keuangan Interim.

Penerapan PSAK diatas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

2016

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2016, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu:

- PSAK 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", menambahkan persyaratan pihak-pihak berelasi dan mengklarifikasi pengungkapan imbalan yang dibayarkan oleh entitas manajemen.
- Amandemen PSAK 16, "Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi", memberikan tambahan penjelasan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset. Amandemen PSAK 16 ini juga mengklarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pada pendapatan adalah tidak tepat.

- Amandemen PSAK 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada jumlah tahun jasa, misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji.
- PSAK 16 (Penyesuaian 2015), "Aset Tetap", memberikan klarifikasi pada paragraf 35 terkait model revaluasi, bahwa ketika entitas menggunakan model revaluasi, jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.
- PSAK 68 (Penyesuaian 2015), "Pengukuran Nilai Wajar", mengklarifikasi bahwa pengecualian portofolio, yang memperkenankan entitas mengukur nilai wajar kelompok aset keuangan dan liabilitas keuangan secara neto, diterapkan pada seluruh kontrak (termasuk kontrak non-keuangan) dalam ruang lingkup PSAK 55.
- PSAK 25 (Penyesuaian 2015), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan", memberikan koreksi editorial pada PSAK 25 paragraf 27 tentang keterbatasan penerapan retrospektif.
- PSAK No. 110 (Revisi 2015), "Akuntansi Sukuk", mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi sukuk ijarah dan sukuk mudharabah, baik sebagai penerbit maupun investor sukuk.

Penerapan PSAK di atas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

2015

Perseroan telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2015, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Perseroan, yaitu:

- PSAK No. 24 (Revisi 2013), "Imbalan Kerja" yang diadopsi dari IAS 19, yang menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontijensi untuk menyederhanakan klasifikasi dan pengungkapan. Perseroan telah melakukan penyajian kembali laporan keuangan atas penerapan awal PSAK No.24 (Revisi 2013) yang diterapkan secara retrospektif.
- PSAK No. 46 (Revisi 2014), "Pajak Penghasilan", yang diadopsi dari IAS 12. PSAK ini memberikan tambahan pengaturan untuk aset dan liabilitas pajak tangguhan yang berasal dari aset yang tidak disusutkan yang diukur dengan menggunakan model revaluasi, dan yang berasal dari properti investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.
- PSAK No. 48 (Revisi 2014), "Penurunan Nilai Aset", yang diadopsi dari IAS 36. PSAK ini memberikan tambahan persyaratan pengungkapan untuk setiap aset individual atau Unit Penghasil Kas yang mana kerugian penurunan nilai telah diakui atau dibalik selama periode. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.
- PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang diadopsi dari IAS 39. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan kriteria instrumen lindung nilai yang tidak dapat dianggap telah kedaluarsa atau telah dihentikan, serta ketentuan untuk mencatat instrument keuangan pada tanggal pengukuran dan pada tanggal setelah pengukuran awal. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.
- PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", yang diadopsi dari IFRS 7. PSAK ini, antara lain, menambah pengaturan pengungkapan saling hapus dengan informasi kuantitatif dan kualitatif, serta pengungkapan mengenai pengalihan instrument keuangan. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar", yang diadopsi dari IFRS 13, memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan. Penerapan PSAK ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

7. Langkah-langkah yang dilakukan Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja termasuk kebijakan investasi Perseroan

Untuk dapat menghadapi tantangan masa depan di sektor perbankan syariah yang semakin kompetitif, Perseroan telah merumuskan Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*) 2014-2018 dengan arah kebijakan ditahun 2016 adalah tahun transformasi bisnis, antara lain melalui peningkatan market share bisnis ritel dan mikro, peningkatan pelayanan kepada nasabah, efisiensi biaya yang berkelanjutan, peletakan pondasi bisnis internasional, dan optimalisasi kerjasama dengan induk perusahaan (Bank BRI) dalam pemanfaatan jaringan dan teknologi informasi. Tahun 2017 tahun akselerasi bisnis, antara lain melalui akselerasi peningkatan komposisi CASA, akselerasi pendapatan jasa, peningkatan jasa pelayanan haji dan umroh, dan optimalisasi jaringan kantor layanan syariah atau layanan syariah banking. Pada 2018 tahun optimalisasi bisnis, melalui optimalisasi keuntungan dengan meningkatkan bisnis ritel dan mikro, pertumbuhan aset dan liabilitas yang sehat, dan optimalisasi *customer engagement* dan *channel*.

Upaya-upaya untuk mencapai rencana kebijakan tersebut akan didukung oleh penguatan permodalan. Permodalan dibutuhkan selain untuk menunjang pengembangan bisnis, juga sebagai penyangga untuk menyerap kerugian yang timbul dari berbagai risiko dan untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (Rasio Kecukupan Modal). Pada masa mendatang, dimungkinkan untuk menerbitkan surat berharga syariah (*senior debt/sub debt*) dalam rangka pemenuhan likuiditas jangka panjang perusahaan dan untuk menjaga CAR sesuai dengan ketentuan KPMM yang baru.

Untuk mencapai tujuan perusahaan maka langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mendukung pencapaian visi dan misi perusahaan, terbagi menjadi target jangka menengah dan jangka pendek, antara lain sebagai berikut:

1. Target Jangka Menengah

Fokus kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan visinya menjadi Bank Ritel Modern, maka lebih dalam menjalankan kegiatan usahanya beraspirasi pada :

- a. Fokus di bisnis UMKM dan Konsumer.
- b. *Funding* fokus untuk meningkatkan porsi *Current Account* dan *Savings Account* (CASA) menjadi 40%.
- c. Menjalankan *best retail banking practice* setara *leader player* Bank Rakyat Indonesia (BRI).
- d. Perusahaan terbuka dengan *brand* reputasi yang kuat.
- e. Organisasi *sales* yang kuat (*70% frontline & sales*).
- f. Keuangan kokoh; ROE < 80% ; ROA > 1,2%.

2. Target Jangka Pendek

Dengan mengangkat tema "Tahun Akselerasi Optimalisasi Bisnis", ditahun 2018 Perseroan akan fokus pada:

- a. Akselerasi peningkatan Komposisi CASA.
- b. Akselerasi pendapatan jasa (*Fee Based Income*).
- c. Peningkatan jasa pelayanan Haji dan Umroh.
- d. Optimalisasi Pembiayaan Komersial dan Retail (SME, *Linkage*, Konsumer dan Mikro).
- e. Optimalisasi jaringan Kantor Layanan Syariah Bank (LSB).
- f. Peningkatan kompetensi karyawan.

B. ANALISIS KEUANGAN

1. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel berikut memperlihatkan komposisi pendapatan dan beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015, 2016, dan 2017:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal		
	31 Desember		
	2015	2016	2017
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	2.424.752	2.634.201	2.816.524
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(1.027.442)	(1.035.501)	(1.193.918)
Hak bagi hasil milik bank	1.397.310	1.598.700	1.622.606
Pendapatan usaha lainnya	130.460	127.967	149.003
Beban usaha	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal		
	31 Desember		
	2015	2016	2017
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - neto	(231.353)	(319.011)	(452.562)
Laba usaha	158.979	239.232	139.494
Pendapatan (beban) non-usaha - neto	10.090	(623)	11.464
Laba sebelum beban pajak	169.069	238.609	150.957
Beban pajak	(46.432)	(68.400)	(49.866)
Laba bersih	122.637	170.209	101.091
Jumlah pendapatan komprehensif lain bersih setelah pajak	2.685	(7)	(8.264)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	125.322	170.202	92.827

Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai Mudharib

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal		
	31 Desember		
	2015	2016	2017
Pendapatan dari jual beli	1.461.483	1.534.570	1.508.223
Pendapatan bagi hasil	642.005	693.611	670.205
Pendapatan usaha utama lainnya	306.378	393.188	544.757
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - neto	14.886	12.832	93.339
Jumlah pendapatan pengelolaan dana sebagai Mudharib	2.424.752	2.634.201	2.816.524

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan membukukan pendapatan bank dari aktivitas pengelolaan dana sebesar Rp2.816.524 juta, meningkat sebesar 6,92% dari Rp2.634.201 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan usaha utama lainnya yang naik sebesar 38,55% diikuti dengan kenaikan pendapatan dari *ijarah* - neto sebesar 627,39%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, Perseroan membukukan pendapatan bank dari aktivitas pengelolaan dana sebesar Rp2.634.201 juta, meningkat sebesar 8,64% dari Rp2.424.752 juta dibandingkan pada tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan usaha utama lainnya yang naik sebesar 28,33% diikuti dengan kenaikan pendapatan bagi hasil dan pendapatan dari jual beli masing-masing sebesar 8,04% dan 5,00%.

Pendapatan Usaha Lainnya

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, pendapatan usaha lainnya Perseroan sebesar Rp149.003 juta, meningkat sebesar 16,44% dari Rp127.967 juta dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan imbalan jasa perbankan yang semula Rp102.545 juta menjadi Rp122.620 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, pendapatan usaha lainnya Perseroan sebesar Rp127.967 juta, menurun sebesar 1,91% dari Rp130.460 juta dibandingkan pada tahun 2015. Penurunan tersebut terjadi karena penurunan pendapatan lain-lain yang terdiri dari pendapatan administrasi rekening, pendapatan administrasi cek, pendapatan komisi asuransi dan lainnya dari Rp33.208 juta menjadi Rp25.422 juta, meskipun pendapatan imbalan jasa perbankan meningkat dari Rp97.252 juta menjadi Rp102.545 juta.

Beban Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2016	2017
Gaji dan Tunjangan Umum dan Administrasi	(509.098)	(538.227)	(522.067)
Administrasi ATM	(471.061)	(489.747)	(500.278)
Bonus Wadiah	(79.937)	(62.692)	(66.705)
Lain-lain	(25.667)	(27.193)	(35.326)
	(51.675)	(50.565)	(54.367)
Beban usaha	(1.137.438)	(1.168.424)	(1.178.743)

Beban usaha Perseroan digunakan untuk beberapa faktor utama seperti perekrutan karyawan dan investasi yang lebih besar di bidang teknologi informasi guna menopang strategi untuk terus memperluas jaringan kantor dan elektronik.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun 2017, beban usaha Perseroan adalah sebesar Rp1.178.743 juta, naik sebesar 0,88% dari Rp1.168.424 juta dibandingkan pada tahun 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban umum & administrasi dan bonus wadiah pada tahun 2017 yaitu peningkatan sebesar Rp10.531 juta atau sekitar 2,15% dan Rp8.133 juta atau sekitar 29,91%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, beban usaha Perseroan adalah sebesar Rp1.168.424 juta, meningkat sebesar 2,72% dari Rp1.137.438 juta dibandingkan pada tahun 2015. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban gaji dan tunjangan pada tahun 2016 sebesar Rp29.129 juta meningkat 5,72% dari posisi tahun 2015 yaitu sebesar Rp509.098 juta.

Laba Usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun 2017, laba usaha Perseroan adalah sebesar Rp139.494 juta, atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar 41,69% dari Rp239.232 juta dibandingkan pada tahun 2016. Penurunan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh penambahan beban pembentukan cadangan CKPN-Neto sebesar 42,12% dari tahun sebelumnya dan peningkatan beban hak pihak ketiga atas bagi hasil *syirkah* temporer sebesar 15,30% dari tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, laba usaha Perseroan adalah sebesar Rp239.232 juta, atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 50,48% dari Rp158.979 juta dibandingkan pada tahun 2015. Peningkatan laba usaha tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan pengelolaan dana sebagai *mudharib* sebesar 8,64%.

Laba Bersih

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016

Pada tahun 2017, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp150.957 juta, atau mengalami penurunan yang signifikan sebesar 36,73% dari Rp238.609 juta dibandingkan pada tahun 2016. Sementara itu laba bersih pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp101.091 juta atau mengalami penurunan sebesar 40,61% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp170.209 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015

Pada tahun 2016, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp238.609 juta, atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 41,13% dari Rp169.069 juta dibandingkan pada tahun 2015. Sementara itu laba bersih pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp170.209 juta atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 38,79% dibandingkan tahun 2015 sebesar Rp122.637 juta.

2. Analisis Laporan Posisi Keuangan

Aset

Tabel berikut menunjukkan komposisi aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Kas	279.855	318.105	347.997
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	3.814.178	4.015.626
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	453.391	245.821
Investasi pada surat berharga	2.181.054	4.706.065	7.411.068
Piutang <i>murabahah – neto</i>	9.780.350	10.500.533	10.457.017
Piutang <i>istishna – neto</i>	7.241	5.760	4.309
Pinjaman <i>Qardh - neto</i>	387.535	293.119	524.101
Pembiayaan <i>mudharabah – neto</i>	1.106.566	1.271.485	840.974
Pembiayaan <i>musyarakah – neto</i>	4.962.346	5.185.890	5.447.998
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah - Neto</i>	46.259	286.181	1.146.920
Aset tetap - Neto	156.188	140.816	177.935
Aset pajak tangguhan	28.186	52.152	140.883
Aset lain-lain - neto	395.112	659.513	782.735
JUMLAH ASET	24.230.247	27.687.188	31.543.384

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp31.543.384 juta naik sebesar 13,93% dari Rp27.687.188 juta pada tahun 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh investasi surat berharga dan aset yang diperoleh untuk *ijarah - neto* yang masing-masing tumbuh sebesar 57,48% atau senilai Rp2.705.003 juta dan sebesar 300,77% atau senilai Rp860.739 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp27.687.188 juta naik sebesar 14,27% dari Rp24.230.247 juta pada tahun 2015. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan secara signifikan pada investasi surat berharga yaitu bertumbuh sebesar 115,77% dari Rp2.181.054 juta pada tahun 2015 menjadi Rp4.706.065 juta pada tahun 2016, lalu disusul dengan kenaikan piutang *murabahah* dan *istishna* (setelah dikurangi dengan CKPN) sebesar 7,34% dari Rp9.787.591 juta pada tahun 2015 menjadi Rp10.506.293 juta pada tahun 2016, dan kenaikan aset lain-lain (setelah dikurangi dengan CKPN) sebesar 66,92% dari Rp395.112 juta pada tahun 2015 menjadi Rp659.513 juta pada tahun 2016.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah - neto*

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>	214.410	356.320	1.289.350
Akumulasi penyusutan	(168.151)	(70.139)	(142.430)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah - neto</i>	46.259	286.181	1.146.920

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah aset yang diperoleh untuk *ijarah – neto* Perseroan adalah sebesar Rp1.146.920 juta naik secara signifikan yaitu sebesar 300,77% dari Rp286.181 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama karena Perseroan telah mengembangkan alternatif akad pembiayaan yang tidak hanya berfokus pada akad *murabahah*, salah satunya adalah dengan menyediakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT*, sehingga pembiayaan pada segmen ritel dan komersial mulai banyak menggunakan akad IMBT. Selain itu, pada segmen konsumen, nasabah Perseroan juga mulai banyak yang menggunakan akad IMBT.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah aset yang diperoleh untuk *ijarah* – neto Perseroan adalah sebesar Rp286.181 juta naik secara signifikan yaitu sebesar 518,65% dari Rp46.259 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama karena Perseroan mulai memberikan alternatif akad pembiayaan yang baru yaitu akad *ijarah muntahiyah bittamlik/IMBT* untuk menjadi pilihan selain akad *murabahah*, *musyarakah* dan *mudharabah*, di mana akad IMBT menjadi pilihan yang menarik bagi nasabah dengan profil yang cocok dengan skema akad IMBT.

Dana Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Dana Pihak Ketiga Perseroan dikelompokkan menjadi tabungan, giro, dan deposito dengan komposisi masing-masing sebesar 22,84%, 7,24%, dan 69,92% pada tahun 2017. Komposisi dana murah (giro dan tabungan) pada tahun 2017 adalah sebesar 30,08% atau mengalami kenaikan sebesar 5,31% dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 28,56%. Apabila dilihat secara nominal jumlah dana mahal (deposito) mengalami kenaikan yang signifikan sebesar Rp2.700.444 juta yaitu dari Rp15.729.625 juta pada tahun 2016 menjadi Rp18.430.069 juta pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Dana Pihak Ketiga Perseroan dikelompokkan menjadi tabungan, giro, dan deposito dengan komposisi masing-masing sebesar 23,43%, 5,13%, dan 71,44% pada tahun 2016. Komposisi dana murah (giro dan tabungan) pada tahun 2016 adalah sebesar 28,56% atau mengalami kenaikan sebesar 7,42% dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 26,59%. Apabila dilihat secara nominal jumlah dana mahal (deposito) mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 6,48% yaitu dari Rp14.772.700 juta pada tahun 2015 menjadi Rp15.729.625 juta pada tahun 2016.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Liabilitas segera	48.237	86.911	86.752
Bagi hasil yang belum dibagikan	34.776	34.991	35.683
Simpanan	4.654.760	5.306.321	6.518.996
Simpanan dari bank lain	890.852	972.719	14.333
Pinjaman yang diterima	100.000	100.000	-
Utang pajak	56.416	49.613	40.391
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	1.242	895	2.134
Liabilitas lain-lain	635.254	912.978	1.402.166
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi	-	1.000.000	1.000.000
JUMLAH LIABILITAS	6.421.537	8.464.428	9.100.455

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah liabilitas Perseroan di luar dana *syirkah* temporer adalah sebesar Rp9.100.455 juta naik sebesar 7,51% dari Rp8.464.428 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan giro wadiah sebesar 56,64% dari Rp1.129.560 juta pada tahun 2016 menjadi Rp1.769.344 juta pada tahun 2017, yang diiringi dengan penurunan simpanan dari bank lain sebesar 98,53% dari Rp972.719 juta menjadi Rp14.333 juta, dan peningkatan tabungan wadiah sebesar 13,72% dari Rp4.176.761 juta pada tahun 2016 menjadi Rp4.749.652 juta pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah liabilitas Perseroan di luar dana *syirkah* temporer adalah sebesar Rp8.464.428 juta naik sebesar 31,81% dari Rp6.421.537 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan giro wadiah sebesar 20,32% dari Rp938.831 juta pada tahun 2015 menjadi Rp1.129.560 juta pada tahun 2016, peningkatan liabilitas lain-lain sebesar 43,72% dari Rp635.254 juta pada tahun 2015 menjadi Rp912.978 juta pada tahun 2016, peningkatan tabungan wadiah sebesar 12,40%, yaitu dari Rp3.715.929 juta pada tahun 2015 menjadi Rp4.176.761 juta pada tahun 2016, dan penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi senilai Rp1.000.000 juta pada tahun 2016.

Dana Syirkah Temporer

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Giro mudharabah	-	-	139.535
Tabungan mudharabah	696.198	983.121	1.270.484
Deposito mudharabah	14.772.700	15.729.625	18.430.069
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER	15.468.898	16.712.746	19.840.088

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah dana syirkah temporer Perseroan adalah sebesar Rp19.840.088 juta, naik sebesar 18,71% dari Rp16.712.746 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan deposito *mudharabah* sebesar 17,17% dari Rp15.729.625 juta pada tahun 2016 menjadi Rp18.430.069 juta pada tahun 2017, yang diikuti dengan peningkatan tabungan *mudharabah* sebesar 29,23% dari Rp983.121 juta pada tahun 2016 menjadi Rp1.270.484 juta pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah dana syirkah temporer Perseroan adalah sebesar Rp16.712.746 juta, naik sebesar 8,04% dari Rp15.468.898 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan peningkatan tabungan *mudharabah* sebesar 41,21% dari Rp696.198 juta pada tahun 2015 menjadi Rp983.121 juta pada tahun 2016.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.979.000	1.979.000	1.979.000
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	11.722	11.715	3.451
Laba ditahan	349.090	519.299	620.390
JUMLAH EKUITAS	2.339.812	2.510.014	2.602.841

Pada tanggal 31 Desember 2017 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2016

Per posisi 31 Desember 2017, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.602.841 juta naik sebesar 3,70% dari Rp2.510.014 juta pada tahun 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh laba bersih pada tahun 2017 yang menyebabkan kenaikan laba ditahan yang tercatat pada tahun 2016 sebesar Rp519.299 juta, naik menjadi Rp620.390 juta pada tahun 2017.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2015

Per posisi 31 Desember 2016, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp2.510.014 juta naik sebesar 7,27% dari Rp2.339.812 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Laba Ditahan sebesar 48,76% dari Rp349.090 juta pada tahun 2015 menjadi Rp519.299 juta pada tahun 2016.

3. Analisis Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2015	2016	2017
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas operasi	2.496.959	652.133	3.993.431
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas investasi	(1.562.904)	(2.545.869)	(2.769.661)
Kas neto (digunakan untuk) diperoleh dari aktivitas pendanaan	500.000	1.000.000	(100.000)
(Penurunan) kenaikan neto kas dan setara kas	1.434.055	(893.736)	1.123.770
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	2.695.355	4.129.410	3.235.674
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	4.129.410	3.235.674	4.359.444

Arus Kas dari Aktivitas Operasional

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp3.993.431 juta, meningkat sebesar 512.36% dari Rp652.133 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah dana *syirkah* temporer dan pencairan serta jatuh temponya giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain.

Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp652.133 juta, menurun sebesar 73,88% dari Rp2.496.959 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya perolehan dana *syirkah* temporer.

Untuk tiga tahun terakhir, sumber arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama berasal dari penerimaan bagi hasil, margin, pendapatan ijarah dan pendapatan usaha utama lainnya yaitu sebesar Rp2.795.605 juta pada tahun 2017, Rp2.601.681 juta pada tahun 2016, dan Rp2.403.709 juta pada tahun 2015. Sedangkan sumber arus kas keluar dari aktivitas operasi terutama berasal dari pembayaran bagi hasil dana *syirkah* temporer sebesar Rp1.193.226 juta pada tahun 2017, Rp1.035.502 juta pada tahun 2016, dan Rp1.036.512 juta pada tahun 2015, serta berasal dari beban usaha Rp1.501.122 juta pada tahun 2017, Rp1.348.586 juta pada tahun 2016, dan Rp1.172.328 juta pada tahun 2015. Pola tersebut merupakan pola yang baik karena menggambarkan arus kas masuk Perseroan dari kegiatan usaha utama masih lebih besar daripada arus kas keluar, yang tercermin pula pada kas neto diperoleh dari aktivitas operasi yang positif dari tahun ke tahun selama tiga tahun terakhir.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp2.769.661 juta, meningkat sebesar 8,79% dari Rp2.545.869 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian surat berharga.

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp2.545.869 juta, meningkat sebesar 62,89% dari Rp1.562.904 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan pada perolehan surat berharga sebesar 216,14% dari Rp1.635.061 juta pada tahun 2015 menjadi Rp5.169.042 juta pada tahun 2016.

Untuk tiga tahun terakhir, sumber arus kas masuk dari aktivitas investasi terutama berasal dari penerimaan kembali investasi pada surat berharga yaitu sebesar Rp79.071 juta pada tahun 2017, Rp2.644.031 juta pada tahun 2016, dan Rp121.859 juta pada tahun 2015, namun arus kas masuk tersebut tidak seimbang dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi yang bersumber dari perolehan surat berharga yaitu sebesar Rp2.784.075 juta pada tahun 2017, Rp5.169.042 juta pada tahun 2016, dan Rp1.635.061 juta pada tahun 2015. Adapun pola ini merupakan sesuatu yang wajar terjadi karena Perseroan sebagai Bank diperkenankan untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya ke surat berharga syariah, sebagai strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan dana yang dimiliki baik dana yang bersumber dari dana pihak ketiga, dana hasil penerbitan sukuk, maupun dana yang merupakan modal yang disetorkan oleh pemegang saham (jika ada).

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp100.000 juta yang merupakan pelunasan akad pembiayaan *mudharabah* dengan PT Sarana Multigriya Financial (SMF).

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp1.000.000 juta, meningkat dibandingkan Rp500.000 juta pada tahun 2015. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi Perseroan senilai Rp1.000.000 juta pada tahun 2016.

Untuk tiga tahun terakhir, sumber arus kas dari aktivitas pendanaan terutama berasal dari hasil penerbitan Sukuk Mudharabah Subordinasi senilai Rp1.000.000 juta pada tahun 2016 dan setoran modal sebesar Rp500.000 juta pada tahun 2015 dari Bank BRI. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat kepercayaan dari pihak lain selain pemegang saham untuk memberikan dana kepada Perseroan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan usaha Perseroan.

C. Analisis Operasi per segmen

Posisi nilai *outstanding* pembiayaan per 31 Desember berdasarkan segmen untuk tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Mikro	3.460.690	21,30%	3.861.785	22,38%	3.551.874	19,28%
Konsumer	3.532.310	21,75%	4.015.010	23,27%	5.185.691	28,15%
Ritel dan Kemitraan	4.407.609	27,13%	4.352.810	25,22%	3.616.706	19,63%
Komersial	4.843.429	29,82%	5.027.182	29,13%	6.067.050	32,93%
Total	16.244.038	100,00%	17.256.787	100,00%	18.421.321	100,00%

Selama tiga tahun terakhir, segmen komersial secara konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap total pembiayaan Perseroan, namun terdapat peningkatan signifikan pada tahun 2017, dimana pada tahun tersebut, kontribusi pembiayaan pada segmen komersial meningkat menjadi sebesar 32,93% jika dibandingkan dengan pada tahun 2016 yang sebesar 29,13%. Hal tersebut terutama disebabkan karena adanya porsi pembiayaan yang relatif besar yang telah didistribusikan kepada perusahaan-perusahaan berstatus BUMN.

Jika dilihat dari sisi pertumbuhan nilai pembiayaan, segmen konsumer merupakan segmen yang bertumbuh paling pesat pada tahun 2017, yaitu sekitar 29,16%, yang terutama disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan KPR Syariah, baik yang berasal dari program KPR yang disubsidi oleh pemerintah (FLPP) maupun KPR reguler. Sedangkan dari sisi kontribusi terhadap total pembiayaan Perseroan, segmen konsumer juga mengalami pertumbuhan paling pesat, dari sebesar 23,27% pada tahun 2016 menjadi sebesar 28,15% pada tahun 2017.

Di samping itu, terdapat penurunan pembiayaan pada segmen mikro dan ritel & kemitraan, adapun hal tersebut disebabkan karena terdapatnya perubahan rentang plafon yang ditetapkan pada segmen mikro, yang pada awalnya ditetapkan maksimum sejumlah Rp500 juta, menjadi Rp200 juta, sehingga otomatis nilai pinjaman yang tadinya termasuk pada segmen mikro menjadi dikelompokkan pada segmen lainnya yang mempunyai nilai plafon di atas Rp200 juta. Penurunan pada segmen ritel dan kemitraan, terutama disebabkan karena Perseroan memutuskan untuk menyalurkan pembiayaan pada segmen konsumer dan komersial. Perseroan berkeyakinan bahwa segmen mikro akan menjadi salah faktor pendorong pertumbuhan yang utama di masa mendatang, seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang membaik.

Secara total, nilai *outstanding* pembiayaan per 31 Desember 2017 mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016, dari sebesar Rp17.256.787 juta menjadi Rp18.421.321 juta, atau meningkat sekitar 6,75%. Tingkat pertumbuhan rata-rata majemuk tahunannya untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 adalah sekitar 6,49%.

Posisi nilai *outstanding* pendanaan per 31 Desember untuk tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Giro	938.831	4,67	1.129.560	5,13	1.908.879	7,24
Tabungan	4.412.127	21,93	5.159.882	23,43	6.020.136	22,84
Deposito	14.772.700	73,40	15.729.625	71,44	18.430.069	69,92
Total	20.123.658	100,00	22.019.067	100,00	26.359.084	100,00

Selama tiga tahun terakhir, deposito nasabah secara konsisten merupakan kontribusi terbesar terhadap total nilai Dana Pihak Ketiga (DPK) Perseroan. Berbanding terbalik dengan pertumbuhan nilai pendanaan, kontribusi deposito nasabah terhadap total DPK Perseroan mengalami penurunan dari tahun ke tahun, di mana pada akhir tahun 2015 kontribusi deposito sebesar 73,40% menurun menjadi sebesar 71,44% pada tahun 2016, lalu menurun menjadi 69,92% pada tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa komposisi dana mahal berangsur-angsur menurun dari tahun ke tahun, sedangkan komposisi dana murah berangsur-angsur meningkat dari tahun ke tahun.

D. Pendanaan dan likuiditas

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mendapatkan likuiditasnya dari internal maupun eksternal. Sumber likuiditas internal Perseroan berasal dari arus kas operasional yang didapatkan dari hasil melaksanakan kegiatan usaha utama maupun penunjangnya. Sementara sumber likuiditas eksternal Perseroan berasal dari modal yang disetor oleh pemegang saham, dana pihak ketiga, penempatan antar bank, pinjaman yang diterima, instrumen pasar modal seperti sukuk yang telah diterbitkan oleh Perseroan selama ini.

Likuiditas Perseroan diukur dengan menggunakan rasio FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR Perseroan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan tahun 2016, mengalami penurunan sekitar 9,6% dari 81,47% menjadi 71,87%. Kondisi tersebut disebabkan oleh peningkatan dana pihak ketiga yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan total pembiayaan pada tahun 2017. Adapun peningkatan dana pihak ketiga tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penempatan dana haji.

Perseroan menyatakan bahwa selama menjalankan kegiatan usahanya, memiliki likuiditas yang cukup sesuai dengan kebutuhan maupun peraturan yang mengatur mengenai Perbankan Syariah.

E. Belanja modal

Belanja modal yang direalisasikan pada tahun 2017 sebesar Rp65 miliar, yang terutama terdiri dari pembelian aset tetap dan infrastruktur *information technology* (IT). Belanja modal tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan terutama dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada nasabah guna meningkatkan daya saing. Belanja modal pada tahun 2017 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016, yaitu dari senilai Rp21 miliar menjadi Rp65 miliar. Hal tersebut terutama disebabkan karena pada tahun 2017, Perseroan masih mengembangkan jaringan IT dan kantor untuk mendukung Perseroan dalam meningkatkan daya saing.

Berikut ini adalah lima transaksi belanja modal IT terbesar yang dilakukan pada tahun 2017:

No	Jenis Pengadaan	Nama Vendor	Nilai transaksi
1	Pengadaan <i>Backup Management System</i> BRISyariah	PT Juke Solusi Teknologi	2.337.500.000
2	Pengadaan Perangkat <i>Firewall IT Security System</i> BRISyariah	PT Juke Solusi Teknologi	1.936.000.000
3	Pengadaan Kartu Chip NSICCS Tahap 1	PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk.	1.408.793.984
4	Pengadaan Mesin Printer dan Aplikasi Perso	PT Datindo Infonet Prima	1.329.693.696
5	Pengadaan <i>Antispam, Email Enhancement & Peningkatan Authentikasi</i>	PT Inovasi Informatika Indonesia	1.024.100.000

Kelima transaksi terbesar belanja modal sehubungan dengan infrastruktur IT, dibayar dengan menggunakan kas internal Perseroan dan menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran.

Tujuan investasi barang modal IT tersebut di atas adalah untuk meningkatkan layanan kepada nasabah dan keamanan sistem informasi Perseroan.

Berikut ini adalah lima transaksi belanja modal aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan yang dilakukan pada tahun 2017:

No	Luas Tanah/Luas Bangunan (m ²)	Peruntukkan	Nilai transaksi (Rp)
1	324/756	KC Surabaya Gubeng	19.553.400.000
2	190/428	KC Jakarta BSD	11.551.300.000
3	644/511	KC Malang	11.054.800.000
4	1000/527	KC Cianjur Taepur	10.636.000.000
5	299/477	KC Tj. Karang Sudirman	7.222.500.000

Kelima transaksi terbesar belanja modal sehubungan dengan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan, dibayar dengan menggunakan kas internal Perseroan dan menggunakan mata uang Rupiah sebagai alat pembayaran.

Tujuan pembelian aset tetap berupa tanah dan bangunan tersebut di atas adalah sebagai upaya untuk efisiensi dalam menurunkan biaya operasional khususnya biaya sewa gedung, dan sebagai wujud komitmen Perseroan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah-wilayah tersebut.

F. Prinsip-Prinsip Perbankan Yang Sehat

Tingkat Kesehatan Bank adalah hasil penilaian sendiri terhadap kondisi Perseroan yang dilakukan berdasarkan risiko termasuk risiko terkait penerapan prinsip syariah dan kinerja bank atau disebut dengan *Risk-Based Bank Rating* (RBBR). Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank berbasis risiko:

Penilaian Faktor Profil Risiko

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian sendiri terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional Perseroan. Risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, dan risiko investasi.

Dalam menilai profil risiko, Perseroan wajib pula memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko yang terdiri dari:

1. Penilaian risiko inheren atas 10 jenis risiko tersebut di atas.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko terhadap 4 aspek yang saling terkait yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko, (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Penetapan peringkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing risiko.
- b) Penetapan peringkat risiko inheren komposit dan peringkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan;
- c) Penetapan peringkat faktor profil risiko Perseroan berdasarkan hasil penetapan peringkat dari masing-masing risiko baik peringkat risiko inheren komposit serta peringkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, berdasarkan hasil analisis secara komprehensif dan terstruktur dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.

Penilaian Faktor *Good Corporate Governance* (GCG)

Penilaian faktor GCG bagi Perseroan merupakan Penilaian sendiri terhadap *governance* struktur, *governance* proses dan *governance outcome* dengan berlandaskan pada pelaksanaan 5 (lima) prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG tersebut berpedoman pada ketentuan GCG yang berlaku bagi bank dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank.

Dalam penerapan faktor GCG, Perseroan harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu antara lain:

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;
- e) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f) Penanganan benturan kepentingan;
- g) Penerapan fungsi kepatuhan bank;
- h) Penerapan fungsi audit intern;
- i) Penerapan fungsi audit ekstern;
- j) Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD);
- k) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Proses penilaian GCG Perseroan tersebut dilakukan dalam cakupan *governance system* yang terdiri dari 3 (tiga) aspek governance yaitu *Governance structure*, *Governance process* dan *Governance outcome*.

Penilaian Faktor Rentabilitas

Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, manajemen rentabilitas, dan pelaksanaan fungsi sosial. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif.

Dalam menentukan *peer group*, Perseroan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perseroan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.

Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas Perseroan.

Penilaian Faktor Permodalan

Penilaian faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan modal dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, Perseroan mengacu pada ketentuan yang berlaku mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan modal, Perseroan juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko. Semakin tinggi risiko, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut.

Parameter/indikator dalam menilai permodalan meliputi:

- a. Kecukupan modal
Penilaian kecukupan modal bank dilakukan secara komprehensif, mencakup:
 1. Tingkat, *trend*, dan komposisi modal;
 2. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional
 3. Kecukupan modal dikaitkan dengan profil risiko.
- b. Pengelolaan Permodalan
Analisis terhadap pengelolaan permodalan bank meliputi manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.

Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter/indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter/indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan Perseroan.

G. Manajemen Risiko

Pengaruh globalisasi industri, perkembangan ekonomi nasional dan perkembangan industri perseroan yang pesat mengakibatkan persaingan usaha yang semakin ketat. Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan Perseroan yang sangat pesat meningkatkan eksposur risiko. Kondisi tersebut mendorong Perseroan untuk lebih meningkatkan dan mengoptimalkan manajemen risiko, untuk mencapai tujuan Perseroan.

Manajemen risiko memiliki peran dalam meningkatkan kualitas pengelolaan Perseroan. Dengan pertumbuhan dan perkembangan bisnis yang makin pesat, maka Perseroan menerapkan pola pengelolaan risiko secara terpadu yaitu dengan mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko di seluruh lini organisasi.

Untuk mendukung penerapan manajemen risiko yang efektif, Perseroan membentuk kerangka manajemen risiko yang dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi dan kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha Perseroan.

Dasar Acuan Manajemen Risiko

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan manajemen risiko di Perseroan, didasarkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dari sisi internal, Perseroan telah mengatur mengenai pengelolaan manajemen risiko di Perseroan dengan ditetapkan Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) beserta kebijakan-kebijakan lain yang mengatur tentang pengelolaan risiko secara lebih spesifik pada masing-masing aktivitas/kegiatan, antara lain Kebijakan Umum Pembiayaan Perseroan (KUP), kebijakan Kebijakan Umum Operasional (KUO), Kebijakan Umum Audit, Kebijakan Umum Logistik, dan Kebijakan Umum SDM.

Struktur Tata Kelola Manajemen Risiko

Perseroan menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengendalikan 10 jenis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tersebut di atas. Kerangka penerapan manajemen risiko tersebut mencakup:

1. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko di Perseroan. Komisaris melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan proses implementasi kebijakan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi telah melakukan pengelolaan risiko yang efektif di Perseroan. Dalam melakukan pengawasannya, Komisaris dibantu oleh Komite Pemantau Risiko.

Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan seluruh eksposur risiko dan hubungannya dengan pengelolaan modal serta pengembangan budaya manajemen risiko. Direksi menetapkan kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif serta melaksanakan kebijakan tersebut termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, untuk setiap jenis risiko dan setiap aktivitas fungsional Perseroan. Direksi di bantu oleh Komite Manajemen Risiko (KMR) sebagai komite tertinggi dalam sistem manajemen risiko Perseroan. KMR bersifat non struktural dan independen terhadap unit kerja operasional.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dan mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

2. Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Manajemen Risiko
Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) Perseroan menjelaskan tentang dasar-dasar kebijakan manajemen risiko Perseroan dan merupakan ketentuan tertinggi bidang manajemen risiko di Perseroan. Selain KMR, pengelolaan risiko Perseroan juga diatur dalam kebijakannya lainnya secara lebih rinci/detail per masing-masing aktivitas, antara lain Kebijakan Aktiva Produktif Pasar Uang, Kebijakan Umum Pembiayaan Perseroan dan Kebijakan Umum Operasional Perseroan, dll.

Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO) merupakan salah satu cara untuk memitigasi risiko yang akan muncul dilingkup Perseroan. Penerbitan PPO ini berfungsi sebagai peraturan tertulis yang digunakan unit-unit lain dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Prosedur pengelolaan dan penetapan limit untuk setiap jenis risiko disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*). Penentuan limit seperti penetapan limit aset likuid, limit posisi devisa netto dan limit pembiayaan ditentukan oleh komite/pejabat berwenang sesuai kebijakan/prosedur yang telah disepakat.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko terdiri dari :

a. Identifikasi

Identifikasi dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang terdapat pada setiap aktivitas dan produk-produk Perseroan. Proses identifikasi risiko melibatkan proses penetapan sasaran identifikasi, penetapan sumber-sumber risiko yang dapat berdampak untuk perseroan baik dari sisi internal maupun eksternal Perseroan.

b. Pengukuran

Pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Persero sebagai acuan untuk pengendalian. Pengukuran dilakukan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif. Pengukuran risiko dapat tercermin diantaranya dari Laporan Profil Risiko triwulanan, perhitungan ATMR, *stress testing*, rasio likuiditas dan profil maturitas.

c. Pemantauan

Aktivitas pemantauan risiko dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko yang terdapat dalam seluruh portofolio produk dan kegiatan usaha serta efektivitas proses manajemen risiko. Contoh pemantauan yang dilakukan oleh Perseroan antara lain Laporan *kualitas pembiayaan*, laporan portofolio pembiayaan, Laporan Portofolio Treasuri, dan pemantauan rekening Dorman.

d. Pengendalian

Pengendalian dilakukan dengan mengelola seluruh eksposur risiko, agar tetap berada dalam risk appetite dan risk tolerance, serta melakukan strategi mitigasi risiko. Salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan oleh Perseroan antara lain penetapan limit dan ikut serta berperan dalam validator tetap pembentukan Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO).

Sistem Informasi Manajemen Risiko

Tersedianya penggunaan metode pengukuran sistem informasi manajemen risiko dalam rangka melakukan kalkulasi secara tepat eksposur risiko pada setiap produk dan transaksi Perseroan, serta aktivitas fungsional Perseroan dan penetapan data dan informasi yang terkait dengan eksposur risiko sebagai input untuk mengambil keputusan.

4. Sistem pengendalian intern manajemen risiko

Kompleksitas produk dan aktivitas usaha perseroan semakin meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, globalisasi dan integrasi pasar keuangan yang memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang dihadapi oleh perseroan sehingga diperlukan upaya-upaya untuk memitigasi risiko tersebut. Proses mitigasi yang dilakukan melalui berbagai upaya pengendalian internal baik yang bersifat preventif maupun kuratif agar mampu mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu.

• Pengendalian Internal yang bersifat preventif

Perseroan telah melakukan pengendalian internal preventif salah satunya dengan membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang berfungsi untuk mengawasi fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah, PBI/POJK atau peraturan perundang-undangan. Selain itu, Perseroan pun telah memiliki Direktur Kepatuhan yang membawahi unit kerja kepatuhan dan membawahi unit kerja Manajemen Risiko

• Pengendalian Internal yang bersifat Kuratif

Pada pengendalian yang bersifat kuratif, Perseroan telah membentuk Internal Audit Group (IAG) yang bertanggung jawab untuk memastikan segenap unit telah mengimplementasikan kebijakan manajemen risiko.

• Penerbitan Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO)

Perseroan telah memiliki Pedoman Pelaksanaan Operasional (PPO) sebagai landasan dalam operasional Perseroan. Setiap penerbitan atau *review* PPO harus melalui mekanisme review dan persetujuan. Proses *review* PPO dilakukan oleh Risk Management Group dan Compliance Desk, yang sebelumnya telah divalidasi terlebih dahulu oleh unit-unit terkait.

- Pengendalian Internal oleh Dewan Pengawas Syariah
Dewan Pengawas Syariah memastikan bahwa produk dan aktivitas yang dikeluarkan oleh Perseroan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Profil Risiko

Perseroan telah melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa keuangan (OJK). Komponen Profil Risiko terdiri dari Risiko Inheren (*Inherent Risk*), Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) dan Risiko Komposit (*Composite Risk*).

Sesuai dalam Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang telah ditegaskan kembali dengan Surat Edaran OJK No. 10/SE.OJK03/2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan diwajibkan menghitung dan melaporkan 10 risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Selain itu, terhitung mulai periode Juni 2014, Perseroan menyesuaikan seluruh parameter profil risiko sesuai ketentuan yang telah diatur oleh OJK.

Hasil penilaian Profil Risiko Perseroan pada posisi Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Periode	Maret 2017	Juni 2017	Desember 2017
Tingkat Risiko	Low-To-Moderate	Low-To-Moderate	Low-To-Moderate

Jenis Risiko	Peringkat Risiko	Peringkat Risiko	Peringkat Risiko	Trend
	Maret 2017	Juni 2017	Desember 2017	
Kredit	M	M	M	Stabil
Pasar	L	L	L	Stabil
Likuiditas	L	L	L	Stabil
Operasional	LTM	LTM	LTM	Stabil
Hukum	LTM	LTM	LTM	Stabil
Strategik	LTM	LTM	LTM	Stabil
Reputasi	L	L	L	Stabil
Kepatuhan	L	L	LTM	Stabil
Imbal Hasil	LTM	LTM	LTM	Stabil
Investasi	LTM	LTM	LTM	Stabil
Predikat Risiko Komposit	LTM	LTM	LTM	Stabil

Dari hasil penilaian Profil Risiko Desember 2017, risiko komposit untuk Perseroan berada pada predikat “*Low to Moderate*” dengan predikat *inherent risk* yaitu “*Low to Moderate*” dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) berpredikat “*Satisfactory*”.

Penetapan peringkat Profil Risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat yaitu Peringkat1 (*Low*), Peringkat2 (*Low to Moderate*), Peringkat 3 (*Moderate*), Peringkat 4 (*Moderate to High*), dan Peringkat 5 (*High*).

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Perseroan juga menerapkan *Key Risk Indicators* yang akan memberikan kemampuan untuk monitor secara berkelanjutan guna memberikan tanda-tanda peringatan awal dari perkembangan risiko yang tidak dapat ditoleransi diantara pengukuran risiko dan *periodic control* sebagai upaya untuk pengembangan *Key Risk Indicators*.

Key Risk Indicators dikenal juga sebagai *Early Warning Sistem (EWS)* yaitu suatu alat yang digunakan sebagai indikator bagi perusahaan untuk dapat membantu memonitor risiko-risiko utama (*key risk*) yang didapatkan dari suatu proses *Risk Self-Assesment (RSA)*.

Key Risk Indicators Perseroan berdasarkan ketentuan yang berlaku meliputi :

No	Risiko	<i>Key Risk Indicators</i>
1	Risiko kredit	<ul style="list-style-type: none"> • kualitas pembiayaan yang ditunjukkan antara lain dengan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> • besarnya <i>coverage</i> cadangan yang dibentuk, • pembiayaan yang direstrukturisasi • tingkat konsentrasi pembiayaan
2	Risiko pasar	<ul style="list-style-type: none"> • kecukupan modal untuk meng-cover risiko pasar akibat pergerakan nilai tukar • kepatuhan terhadap limit risiko pasar (limit PDN, limit transaksi dealer)
3	Risiko likuiditas	<ul style="list-style-type: none"> • kecukupan terhadap penyediaan aset <i>likuid</i> • tingkat <i>Financing to Deposit Ratio</i> • kemampuan dalam mengakses pasar uang dan pasar modal.
4	Risiko operasional	<ul style="list-style-type: none"> • gangguan terhadap transaksi di Perseroan • kerugian aktual akibat risiko operasional • kecukupan dan kualitas SDM
5	Risiko hukum	Jumlah dan besarnya gugatan pihak ketiga atas Perseroan yang berpotensi menimbulkan kerugian perseroan.
6	Risiko stratejik	<ul style="list-style-type: none"> • pencapaian target-target perusahaan atas sasaran dan strategi bisnis yang ditetapkan perusahaan.
7	Risiko reputasi	<ul style="list-style-type: none"> • pemberitaan negatif di media massa • tingkat komplain keluhan nasabah
8	Risiko kepatuhan	Pelanggaran yang dilakukan Perseroan atas ketentuan yang berlaku.
9	Risiko Imbal Hasil (<i>Rate of Return Risk</i>)	tingkat bagi hasil kepada nasabah Perseroan dibandingkan dengan industri
10	Risiko Investasi (<i>Equity Investment Risk</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • kualitas pembiayaan dengan akad bagi hasil yang ditunjukkan dengan <i>Non Performing Financing (NPF)</i> untuk pembiayaan bagi hasil • besarnya <i>coverage</i> yang dibentuk terhadap pembiayaan bagi hasil yang bermasalah • tingkat konsentrasi pembiayaan dengan akad bagi hasil terhadap total pembiayaan

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

A. Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan

Risiko Kredit

Bagian terbesar dari aktiva yang dimiliki Perseroan sebagai suatu bank adalah berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Risiko kredit timbul apabila terjadi ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya baik berupa pokok pembiayaan maupun *margin/ujroh/imbalannya*. Apabila jumlah pembiayaan yang tidak dapat dikembalikan cukup material, termasuk eksekusi terhadap jaminan pembiayaan yang bersangkutan (jika ada), maka pembiayaan tersebut menjadi pembiayaan bermasalah dan mempengaruhi tingkat NPF pembiayaan yang akhirnya akan mempengaruhi likuiditas dan kondisi keuangan Perseroan.

Portofolio pembiayaan terbesar saat ini adalah penyaluran pembiayaan pada sektor konsumtif. Pada tahun 2017 bank telah menyalurkan pembiayaan kepada sektor Rumah Tangga hingga mencapai 25,37% dari total pembiayaan. Konsentrasi ini merupakan yang paling tinggi diantara sektor lainnya. Walaupun Perseroan secara berkesinambungan aktif mengelola dan menjalankan program manajemen risiko dan memonitor portofolio pembiayaan yang dimiliki oleh Perseroan serta terus menyempurnakan kebijakan prosedur dan sistem manajemen risiko kredit yang telah ada, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kebijakan, prosedur dan system tersebut sempurna. Kegagalan atas kebijakan, prosedur dan sistem manajemen risiko kredit Perseroan dapat mengakibatkan bertambahnya NPF yang dimiliki sehingga akan berdampak negatif atas kualitas portofolio pembiayaan Perseroan. Lebih lanjut, kualitas portofolio pembiayaan dapat juga memburuk akibat berbagai alasan lainnya, termasuk faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan. Apabila hal ini terjadi, maka menurunnya kualitas portofolio pembiayaan Perseroan tersebut dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

B. Risiko Terkait dengan Kegiatan Usaha Perseroan Yang Bersifat Material

1. Risiko Investasi

Risiko investasi adalah risiko akibat Perseroan ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*. Dalam aktivitas penyaluran dana, Perseroan juga menggunakan akad berbasis bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* dengan metode *revenue sharing*. Perseroan berpotensi turut menanggung penurunan pendapatan apabila usaha nasabah mengalami kemunduran.

2. Risiko Operasional

Seperti juga pada institusi keuangan lainnya, Perseroan juga dihadapkan pada berbagai jenis risiko operasional. Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang antara lain disebabkan kegagalan manusia tidak berfungsinya proses internal, tidak efektifnya sistem dan prosedur operasional, serta adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial. Apabila penyimpangan-penyimpangan tersebut sering terjadi dan menimbulkan dampak kerugian keuangan bagi Perseroan, maka secara keseluruhan dapat berdampak secara negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko operasional yang melekat dalam perseroan perbankan lebih ditekankan kepada pelaksanaan transaksi, produk, klien, proses bisnis serta proses manajemen. Selain itu sistem informasi teknologi yang tidak mendukung dapat mengganggu kelancaran operasional dan mutu pelayanan kepada nasabah. Dalam era teknologi saat ini, efektivitas operasional Perseroan tergantung dari kemampuan mendapatkan akses yang akurat dan dapat dipercaya serta tepat waktu seperti pengelolaan likuiditas dan optimalisasi layanan serta produk bank. Ketidakmampuan Perseroan untuk mengerti dan memahami perkembangan teknologi akan menurunkan mutu pelayanan kepada nasabah di samping menciptakan kondisi rawan terhadap kejahatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi pendapatan Perseroan.

3. Risiko Likuiditas

Pendanaan Perseroan sebagian besar berasal dari sumber-sumber dana jangka pendek seperti giro, tabungan dan deposito berjangka, sedangkan penyalurannya pada pembiayaan yang memiliki jangka waktu relatif panjang. Kesenjangan jangka waktu tersebut akan menimbulkan risiko likuiditas yaitu kegagalan Perseroan dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah dan pihak lainnya.

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan risiko likuiditas bersumber antara lain dari adanya *maturity mismatch* yang tidak bisa dikendalikan, adanya penarikan dana oleh nasabah yang tidak mampu ditangani, kesulitan aksesibilitas Perseroan ke pasar uang serta rendahnya kemampuan Perseroan untuk menghasilkan arus kas dalam operasinya yang berdampak pada permodalan perusahaan, sehingga kebijakan dan strategi risiko likuiditas harus mempertimbangkan toleransi risiko dan dampaknya terhadap permodalan dengan memperhatikan perubahan eksternal dan internal serta Perseroan harus melakukan analisis mengenai kemungkinan dampak penerapan berbagai skenario yang berbeda atas posisi likuiditas karena kondisi likuiditas Perseroan tergantung pada pola *cash flow* dalam berbagai kondisi.

4. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dalam hal terjadi fluktuasi variabel pasar diantaranya suku bunga dan nilai tukar, yang disebabkan oleh perubahan ekonomi, ataupun peristiwa/kejadian tertentu berkaitan dengan penerbit instrumen keuangan tersebut. Komponen risiko pasar meliputi:

1. Risiko nilai tukar, baik pada sisi aktiva maupun pasiva dalam bentuk mata uang asing.
2. Risiko acuan suku bunga, didefinisikan sebagai pengurangan dari pendapatan margin/ujrah dan bagi hasil bersih pada bank yang disebabkan oleh perubahan suku bunga acuan pada sisi aktiva dan pasiva yang sensitif terhadap pergerakan suku bunga acuan.

Sebagai salah satu bank devisa, transaksi Perseroan juga berkaitan dengan fluktuasi mata uang asing baik dari sisi aktiva maupun kewajiban. Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing yang dipengaruhi oleh berbagai macam factor baik internal maupun eksternal, akan berdampak negatif pada kinerja Perseroan terutama apabila Perseroan mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dalam mata uang asing. Standar PDN menurut BI yaitu maksimal 20% dari modal. Posisi risiko nilai tukar Perseroan yang ditunjukkan dengan besaran Posisi Devisa Netto (PDN) per 31 Desember 2017 sebesar 0,34% dari modal. Perubahan risiko nilai tukar mata uang asing berdampak secara finansial pada permodalan Perseroan, dimana Perseroan harus menutup risiko yang diakibatkan oleh perubahan nilai tukar mata uang asing yang merugikan baik dari penghimpunan dana maupun penyaluran dana dalam permodalan.

Perseroan memperoleh pendapatan yang berasal dari selisih pendapatan margin/ujrah/bagi hasil dari aktiva dan beban margin/ujrah/bagi hasil dari kewajiban. Penyesuaian ulang terhadap tingkat margin/ujrah/bagi hasil baik di sisi aktiva maupun kewajiban dilakukan bukan pada saat yang bersamaan. Hal ini mengakibatkan Perseroan rentan terhadap perubahan suku bunga acuan pasar.

Kondisi rendahnya tingkat bunga acuan saat ini telah menarik nasabah di Indonesia untuk mengajukan pembiayaan kepada bank yang membantu pertumbuhan pembiayaan dan peningkatan keuntungan Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa kenaikan suku bunga acuan di masa datang tidak akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan pembiayaan, keuntungan, kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan.

Risiko tingkat bunga acuan adalah risiko kemungkinan turunnya pendapatan margin/ujrah/bagi hasil bersih dan nilai pasar portofolio aktiva akibat perubahan tingkat bunga acuan di pasar uang. Komposisi portofolio termasuk aktiva, kewajiban dan rekening administratif cukup sensitif terhadap perubahan tingkat bunga acuan. Oleh karena aktiva dan kewajiban seperti deposito pada bank lain, investasi dalam surat berharga, pinjaman, deposito berjangka, pinjaman jangka panjang dan kewajiban-kewajiban pasar uang lainnya memiliki berbagai tingkat margin/ujrah/bagi hasil dan jangka waktu, maka perubahan pada tingkat bunga acuan akan mengakibatkan perubahan pada pendapatan margin/ujrah/bagi hasil bersih. Dampak risiko acuan suku bunga terhadap Perseroan, selain berpengaruh terhadap tingkat margin/ujrah/bagi hasil bersih yang dihasilkan karena perubahan tingkat suku bunga acuan di pasar, juga terhadap permodalan Perseroan dimana Perseroan harus meng-cover kerugian yang diakibatkan oleh perubahan tingkat suku bunga *benchmark* karena adanya perubahan pada kebijakan moneter Indonesia yang menimbulkan manajemen harus mengubah kebijakan menetapkan *pricing* margin/ujrah/bagi hasil bersih secara menguntungkan dengan menimbang faktor pasar.

5. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal.

Potensi risiko yang dapat muncul akibat dari keputusan strategik terkait diantaranya :

- Rencana strategik dan rencana bisnis tidak sejalan dengan visi dan misi Perseroan.
- Strategi bisnis tidak dikembangkan dengan baik.
- Salah memperhitungkan kebutuhan sumber daya perusahaan seperti SDM, cabang baru, produk baru dan sebagainya.
- Kondisi eksternal seperti indikator ekonomi yang tidak mendukung, kondisi pasar yang tidak tepat, perilaku nasabah yang tidak sesuai dan sebagainya.

Apabila Perseroan tidak melakukan mitigasi risiko ini maka Perseroan akan mengalami kerugian antara lain penurunan pendapatan.

6. Risiko Reputasi

Perseroan sebagai perusahaan yang memberikan jasa layanan perbankan kepada para nasabah dituntut untuk menjaga citra Perseroan. Selain untuk bertahan dalam persaingan, Perseroan harus memberikan pelayanan dan tanggap terhadap keluhan nasabah serta dapat menyelesaikan isu-isu negatif sehingga tercipta *corporate image* yang baik. Faktor risiko yang dapat menimbulkan risiko reputasi Perseroan antara lain terjadinya pemberitaan negatif mengenai Perseroan dan ketidakmampuan Perseroan dalam menangani pengaduan atau ketidakpuasan nasabah. Ketidakmampuan Perseroan dalam menjaga reputasi Perseroan akan dapat memberikan dampak yang cukup luas terhadap kinerja usaha Perseroan

7. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan ditimbulkan dengan adanya pelanggaran atau ketidaktahuan pegawai dalam pemenuhan seluruh ketentuan/peraturan yang berlaku baik dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, ketentuan perbankan maupun ketentuan-ketentuan lainnya.

Pada prakteknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko Perseroan yang terkait pada perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), risiko stratejik yang terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan lain sebagainya. Ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi peraturan dan ketentuan dapat berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan.

8. Risiko Hukum

Perseroan di dalam usahanya tidak terlepas dari risiko hukum, yang disebabkan lemahnya aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan dalam perikatan, kejadian tersebut dapat timbul dari tindakan manajemen Perseroan, karyawan yang melanggar hukum, regulasi, kecurangan (*fraud*) dan perbuatan lain yang merugikan Perseroan maupun pihak lain seperti nasabah atau masyarakat.

Sebagai perusahaan yang berdiri dalam sebuah negara hukum, Perseroan harus selalu tunduk terhadap segala peraturan hukum yang berlaku. Kegagalan Perseroan dalam mengikuti peraturan hukum yang berlaku akan mengakibatkan pada timbulnya tuntutan hukum yang akan ditujukan kepada Perseroan.

Semakin banyak tuntutan hukum yang muncul maka semakin besar biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan. Apabila kondisi ini dialami oleh Perseroan dan bersifat material maka hal ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja Perseroan.

9. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil adalah risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Perseroan kepada nasabah yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dan pihak ketiga Perseroan. Pemberian imbalan kepada nasabah penyimpan dana dipengaruhi oleh kemampuan rentabilitas Perseroan. Nasabah akan mendapatkan imbalan yang lebih besar pada saat rentabilitas Perseroan naik/tinggi, sehingga tingkat imbalan nasabah bisa lebih tinggi dibandingkan suku bunga di pasar (konvensional). Namun nasabah juga menanggung potensi tingkat imbalan yang lebih rendah dibandingkan suku bunga di pasar (konvensional) pada saat rentabilitas Perseroan turun/rendah.

Ketidakpuasan nasabah terhadap tingkat imbalan yang lebih rendah dibandingkan pasar berpotensi mengakibatkan nasabah menarik dananya dan memindahkan kepada pihak pesaing yang memberikan imbalan lebih tinggi. Kegagalan Perseroan dalam mengelola risiko imbal hasil berpotensi berdampak pula terhadap risiko likuiditas dan risiko stratejik.

10. Risiko Konsentrasi Dana Haji

Ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan dana haji dikelola oleh bank syariah berdampak pada peningkatan DPK perseroan secara signifikan sebagai akibat masuknya dana haji, terutama dana haji yang berasal dari pengelolaan BRI sebagai induk perusahaan yang berbasis konvensional sejak tahun 2015. Hal ini menempatkan dana haji menjadi dominan pada struktur DPK perseroan.

Akhir Desember 2017 konsentrasi Dana Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) yang berada di Bank kami mencapai 53,83% dari total DPK. Besarnya konsentrasi dana ini berpotensi mempengaruhi risiko lainnya seperti risiko likuiditas, risiko imbal hasil dan risiko strategik bank. Risiko likuiditas berpotensi terjadi pada saat adanya penarikan dana dalam jumlah besar oleh BPKH dan aset likuid bank tidak mencukupi untuk mengcover dana yang ditarik. Risiko imbal hasil

muncul apabila imbal hasil yang diberikan bank berada dibawah ekspektasi pengelola (BPKH). Dalam kondisi ini bank dituntut untuk memberikan imbal hasil yang maksimal kepada BPKH agar dana tersebut tidak dipindah ke bank lain yang memberikan imbal hasil yang lebih tinggi. Risiko Strategik muncul berbarengan dengan adanya penarikan dana besar, dimana penarikan dana besar ini akan menurunkan DPK bank dan berpotensi terhadap tidak tercapainya target DPK. Selain itu, risiko strategik muncul dari permintaan BPKH yang mengharapkan imbal hasil yang tinggi. Kondisi ini akan berdampak terhadap laba rugi bank, dimana biaya dana bank akan menjadi mahal.

Dominasi dana haji meningkatkan risiko konsentrasi dana dan risiko likuiditas bank di masa depan, terutama sehubungan adanya rencana pemerintah untuk mengalihkan dana haji dari bank syariah kepada lembaga BPKH yang memiliki kewenangan untuk mengelola investasi dana haji sesuai UU nomor 34 tahun 2014.

11. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

Kelemahan Perseroan dalam mengelola sistem informasi berpotensi menimbulkan risiko operasional dan risiko reputasi yang dapat mengganggu rencana bisnis Perseroan. Kelemahan sistem informasi juga menimbulkan itu potensi tindakan *fraud* baik dari pihak eksternal maupun internal Perseroan yang berpotensi merugikan Perseroan secara finansial dan risiko reputasi. Teknologi sistem informasi yang terus berkembang menuntut Perseroan untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar selaras dengan perkembangan teknologi terkini.

12. Risiko Persaingan

Industri perbankan di Indonesia memiliki relatif cukup banyak institusi yang menjalankan kegiatan usaha utama yang serupa, baik jasa perbankan maupun jasa perbankan syariah. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan kepada institusi lainnya, harus memiliki daya saing yang relatif baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun peminjam dana.

Jika Perseroan lalai dalam mengembangkan kualitas layanan dan SDM, inovasi produk, dan kapasitas dalam mengikuti perkembangan di industri perbankan untuk tetap dapat bersaing dengan kompetitor, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

13. Risiko Perubahan Teknologi

Seiring dengan peningkatan kesadaran dan gaya hidup masyarakat akan teknologi yang mampu memudahkan dalam melakukan aktivitas perbankan dengan menggunakan internet atau sistem operasi telepon genggam seperti Android, iOS, dan sejenisnya, beberapa institusi perbankan terkemuka telah menangkap gaya hidup tersebut dan berusaha beradaptasi dengan setiap perkembangan gaya hidup/perilaku nasabah perbankan.

Meskipun pada saat ini aktivitas perbankan secara konvensional seperti datang ke Kantor Cabang/ Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Layanan Syariah untuk melakukan penyetoran uang atau pembukaan/penutupan rekening atau lainnya, datang ke mesin ATM, dan aktivitas lainnya yang memerlukan nasabah untuk datang ke kantor atau ATM, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan nanti setiap aktivitas tersebut akan tergantikan dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi.

Jika Perseroan lalai dalam mencermati dan mengikuti perkembangan teknologi yang diperlukan, baik untuk memudahkan nasabah dalam bertransaksi maupun untuk memudahkan proses internal Perseroan, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

14. Risiko Konsentrasi Pembiayaan

Risiko konsentrasi kredit merupakan salah satu risiko yang diatur dalam Pilar 2 Basel II. Risiko konsentrasi kredit antara lain tercermin dari jumlah pembiayaan kepada 25 debitur terbesar Perseroan terhadap total penyaluran pembiayaan Perseroan yang mencapai 26,19% pada Desember 2017. Penurunan kualitas pembiayaan dari 25 debitur terbesar dimaksud berpotensi mempengaruhi Perseroan secara cukup signifikan terutama dari sisi keuangan maupun kualitas portofolio pembiayaan secara *bankwide*.

C. Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Secara Makro Atau Global

Pemulihan perekonomian global mengalami pertumbuhan yang baik, termasuk pertumbuhan dinegara-negara kawasan Asia, Amerika, dan negara-negara Uni Eropa. Pemulihan ekonomi global saat ini dipengaruhi oleh pertumbuhan PDB Amerika Serikat, pemulihan perekonomian Eropa yang cukup solid, serta perbaikan perekonomian di Cina. Perbaikan perekonomian negara-negara maju yang menjadi tujuan ekspor Indonesia tersebut berdampak pada peningkatan ekspor di Indonesia. Kerjasama perdagangan yang selama ini terjalin dengan negara-negara maju tersebut sebagai salah satu kontribusi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dimana negara terbesar tujuan perdagangan ekspor Indonesia saat ini adalah Cina, Amerika dan Jepang.

Pada Kuartal III Tahun 2017 berdasarkan data dari World Bank pertumbuhan ekonomi Cina tumbuh sebesar 6,8%. Pertumbuhan ekonomi Cina juga memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sampai dengan November 2017, pertumbuhan ekspor Indonesia ke negara Cina tumbuh sebesar 44,49%. Ekspor barang-barang dari Indonesia Ke Cina berkontribusi sebesar 13,69% dari total ekspor Indonesia ke sejumlah negara.

Pertumbuhan ekonomi Amerika pada Kuartal III tumbuh sebesar 2,4%. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Amerika juga mempengaruhi peningkatan jumlah perdagangan ekspor Indonesia ke Amerika. Sampai dengan November 2017, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Amerika tumbuh sebesar 10,48%. Perdagangan tersebut berkontribusi 11,25% dari total Indonesia ke sejumlah negara. Selain itu Jepang juga merupakan pasar potensial tujuan ekspor Indonesia. Dimana perdagangan ekspor Indonesia dengan Jepang berkontribusi sebesar 9,46% dari total ekspor Indonesia ke sejumlah negara

Perbaikan pemulihan ekonomi global saat ini berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Untuk memenuhi permintaan atas barang-barang ekspor tersebut produsen di Indonesia perlu meningkatkan produksinya. Dengan peningkatan produksi di Indonesia tersebut, produsen akan membutuhkan lebih banyak bahan baku produksi dan tenaga kerja. Hal tersebut menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dan meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Perseroan menyalurkan pembiayaan kepada sektor usaha berbasis komoditas tertentu yang cukup terpengaruh oleh kondisi perekonomian global, yaitu batu bara, kelapa sawit dan minyak & gas. Fluktuasi harga global mempengaruhi kelancaran usaha nasabah, sehingga berdampak terhadap kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada Perseroan.

2. Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Perseroan selain berhubungan dengan pihak-pihak yang berada di dalam negeri, juga memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan perbankan yang berhubungan dengan pelanggan di luar negeri. Untuk melakukan kegiatan perbankan di negara lain, tentu membutuhkan pengetahuan yang berbeda dengan kegiatan perbankan di Indonesia, khususnya mengenai ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara tersebut yang pada akhirnya dapat mengganggu hasil usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

D. Risiko Investasi bagi pemegang saham Perseroan

1. Harga Saham Perseroan mungkin mengalami fluktuasi yang signifikan di kemudian hari

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri Perbankan secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau Pasar Modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan;
- fluktuasi harga-harga saham di Pasar Modal Indonesia.

2. Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, Pasar Modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di Pasar Modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid atau sama sekali.

Pasar Modal di Indonesia, walaupun sedang berkembang pesat, memiliki nilai kapitalisasi pasar sahamnya relatif masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara maju, sehingga harga-harga saham yang diperdagangkan di Pasar Modal Indonesia relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan di negara maju. Perbedaan besaran nilai kapitalisasi saham di Pasar Modal juga dapat menunjukkan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam Pasar Modal beberapa negara maju tersebut, memiliki pemahaman, kekuatan finansial, dan kemauan yang lebih tinggi untuk berinvestasi saham di Pasar Modal, sehingga jika saham suatu perusahaan tercatat di beberapa negara maju tersebut hendak diperdagangkan, maka pihak yang akan menjual saham perusahaan tersebut relatif akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pihak yang bersedia untuk membeli saham perusahaan tersebut.

3. Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

4. Kepentingan Pemegang Saham Pengendali dapat bertentangan dengan kepentingan pembeli Saham Yang Ditawarkan

Setelah Penawaran Umum Perdana, Pemegang Saham Pengendali yang memiliki lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham Perseroan yang beredar, dapat memegang kendali efektif atas Perseroan, termasuk kewenangan untuk memilih Direktur dan Komisaris Perseroan dan menentukan hasil dari suatu tindakan yang membutuhkan persetujuan pemegang saham. Walaupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib memperhatikan setiap kepentingan perusahaan dan pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, namun dengan mempertimbangkan bahwa Pemegang Saham Pengendali dapat memiliki kepentingan bisnis di luar Perseroan, Pemegang Saham Pengendali dapat mengambil tindakan yang lebih menguntungkan bagi kepentingan bisnis Pemegang Saham Pengendali tersebut dibandingkan kepentingan Perseroan, dimana hal ini dapat berdampak material dan merugikan terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan. Oleh karena itu, Pemegang Saham Pengendali telah dan akan tetap memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan, termasuk pengaruh sehubungan dengan:

- menyetujui penggabungan, konsolidasi atau pembubaran Perseroan;
- memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan urusan Perseroan;
- memilih sebagian besar Direktur dan Komisaris Perseroan; dan
- menentukan hasil dari tindakan yang memerlukan persetujuan pemegang saham (selain dari persetujuan atas transaksi yang memiliki benturan kepentingan dimana Pemegang Saham Pengendali memiliki benturan kepentingan atau memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Utama (pemegang saham yang memiliki 20% atau lebih dari saham yang beredar) yang memiliki benturan kepentingan diharuskan untuk tidak memberi suara berdasarkan Peraturan OJK), termasuk waktu dan pembayaran atas dividen di masa depan.

Di masa yang akan datang, Perseroan dapat melakukan transaksi dengan entitas yang dikendalikan oleh Pemegang Saham Pengendali dan pihak terkait lainnya dalam kegiatan usaha sehari-hari. Tidak ada jaminan bahwa transaksi tersebut akan dilakukan pada syarat dan ketentuan yang menguntungkan bagi Perseroan, namun setiap transaksi benturan kepentingan (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan OJK) yang dilakukan Perseroan dengan pihak terafiliasi setelah Penawaran Umum Perdana wajib memperoleh persetujuan pemegang saham independen sesuai dengan peraturan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian dan transaksi penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan Auditor Independen yang tercantum dalam Prospektus ini, atas laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang telah diaudit KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI yang dalam laporannya bertanggal 13 Maret 2018 memberikan opini audit tanpa modifikasian, selain yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1969 dengan nama PT Bank Djasa Arta berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970, dan telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung di bawah No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242. Pada saat pendirian, berikut adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan:

Pemegang Saham		Jumlah Saham	Nilai Nominal	(%)
Modal Dasar		100	50.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	Sabas Gunawan	15	7.500.000	25,00
2.	Lies Harjati	7	3.500.000	11,67
3.	Sunarso Gunawan	2	1.000.000	3,33
4.	Linawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
5.	Litawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
6.	Ritawati Gunawan	2	1.000.000	3,33
7.	Harjono Lukman	4	2.000.000	6,67
8.	Grace Andriani Lukman	2	1.000.000	3,33
9.	Lilis Surjati	9	4.500.000	15,00
10.	Karliman Danihardja	5	2.500.000	8,33
11.	Lili Inawati	5	2.500.000	8,33
12.	Meylyati	5	2.500.000	8,33
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		60	30.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		40	20.000.000	

Perubahan anggaran dasar terakhir Perseroan ialah berdasarkan (i) Akta No. 8/2018 dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018. Akta-akta tersebut mencantumkan persetujuan pemegang saham Perseroan atas beberapa hal yaitu (i) menyetujui rencana Perseroan untuk menghimpun dana dari Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO); (ii) menyetujui peningkatan Modal Dasar Perseroan yang semula berjumlah Rp5.000.000.000.000 yang terbagi atas 10.000.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp500, menjadi Rp7.500.000.000.000 yang terbagi atas 15.000.000.000 saham, masing-masing saham dengan nilai nominal Rp500, (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari Rp1.979.000.000.000 menjadi Rp3.546.381.449.000 yang dilakukan secara tunai dan melalui kapitalisasi laba ditahan; (iv) perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 32, dan Peraturan OJK No. 33; (v) menyetujui kepemilikan 1% saham milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, namun dalam bentuk warkat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum; (vi) menyetujui pengeluaran saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 27% (dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, yang ditawarkan melalui IPO, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp500 yang ditawarkan dengan Harga Penawaran termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 2,5% dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka IPO, dengan program ESA; (vii) menyetujui pelepasan hak oleh BRI dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (YKP BRI) untuk mengambil saham baru sehubungan dengan IPO Perseroan; dan (viii) pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen & Karyawan (*Management & Employee Stock Option Program/MESOP*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 3% dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.

Perseroan telah memperoleh ijin usaha sebagai bank umum syariah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 yang menetapkan penggunaan izin usaha atas nama PT Bank Syariah BRI menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh izin sebagai bank devisa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/139/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 27 Desember 2013.

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan adalah:

- a. Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah menyelenggarakan usaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip Syariah.
- b. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
 1. Kegiatan usaha utama:
 - 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiyah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
 - 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
 - 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: a) *Wakalah*; b) *Hawalah*; c) *Kafalah*; d) *Rahn*;
 - 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
 - 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
 - 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
 - 13) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
 - 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad Amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
 - 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
 - 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
 - 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
 - 19) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
 - 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh OJK dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.
 2. Kegiatan usaha penunjang
 - 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
 - 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

Anggaran dasar Perseroan dan pengelolaan usahanya selama ini telah dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah.

Perizinan dan status kantor Perseroan

Berikut adalah perizinan yang dimiliki Perseroan sehubungan dengan kantor operasionalnya yang terdiri dari 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu dan 11 kantor kas beserta status kantor tersebut:

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
JAKARTA					
1.	KC Jakarta Abdul Muis	Jl. Abdul Muis No. 2 - 4, Gambir, Jakarta Pusat	12/496/DPbS	15 April 2010	Sewa sampai tanggal 31 Desember 2018
2.	KCP Jakarta Benhil	Jl. Raya Benhil No. 17B, Menteng, Jakarta Pusat	11/63/KEP.GBI/DpG/2009	15 Desember 2009	Sewa sampai tanggal 22 Maret 2019
3.	KCP Jakarta Cikini	Cikini Gold Center GF/AKS No. 23A, Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat	15/855/DPbS	6 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 2 Mei 2033
4.	KCP Jakarta ITC Mangga Dua	Gedung ITC Mangga Dua Lt. 3, Blok A 40 - 41, Jl. Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat	10/67KEP.GBI/DpG/2008	-	Milik Perseroan
5.	KC Jakarta Fatmawati	Jl. Fatmawati Raya, Komplek Deplu No. 12, Sektor V, Cilandak, Jakarta Selatan	S-143/PB.131/2014	24 Oktober 2014	Sewa sampai tanggal 5 Agustus 2019
6.	KCP Jakarta Warung Buncit	Jl. Buncit Raya No. 302A, Pancoran, Jakarta Selatan	S-31/PB.1311/2016	2 Maret 2016	Sewa sampai tanggal 26 Januari 2021
7.	KCP Jakarta Mayestik	Jl. Kyai Maja Blok D/1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan	S-25/PB.1311/2016	22 Februari 2016	Sewa sampai tanggal 1 Februari 2021
8.	KCP Jakarta Pasar Minggu	Jl. Raya Pasar Minggu No. 6 I - J, Pasar Minggu, Jakarta Selatan	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 3 Maret 2021
9.	KC Jakarta Tanjung Priok	Ruko Enggano Megah No. 11C dan 11D, Tanjung Priok, Jakarta Utara	12/496/DPbS	15 April 2010	Sewa sampai tanggal 14 Maret 2020
10.	KCP Jakarta Kelapa Gading	Jl. Boulevard Timur Blok NB1 No. 46 - 47, Kelapa Gading, Jakarta Timur	S-3/PB.1311/2015	6 Januari 2015	Sewa sampai tanggal 9 Agustus 2019
11.	KCP Jakarta Rawamangun	Jl. Paus Raya No. 8D, Pulo Gadung, Jakarta Timur	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 1 November 2019

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
12.	KCP Jakarta Sunter	Jl. Danau Sunter Utara Blok R No. 54, Tanjung Priok, Jakarta Utara	S.46/PB.131/2014	28 April 2014	Sewa sampai tanggal 6 September 2021
13.	KCP Jakarta Koja	Jl. Kramat Jaya Blok I No. 7A, Koja, Jakarta Utara	S-99/PB.131/2014	27 Juli 2014	Sewa sampai tanggal 21 Januari 2022
14.	KC Jakarta Kebon jeruk	Jl. Lapangan Bola No. 5 A-B Kebon Jeruk, Jakarta Barat	S-57/PB.13/2014	9 Juni 2014	Sewa sampai tanggal 16 November 2019
15.	KC Jakarta Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim No. 228, Jakarta Pusat	S-478/MK.17/1996	10 April 1996	Milik Perseroan
16.	KCP Jakarta Dewi Sartika	Jl. Dewi Sartika No. 200, Kramat Jati, Jakarta Timur	12/1959/DPbS	15 November 2010	Sewa sampai tanggal 14 Agustus 2018
17.	KCP Jakarta Jatinegara	Jl. Pasar Jatinegara Lt. 3, Blok AKS No. 10, Jatinegara, Jakarta Timur	12/2606/DPbS	30 Desember 2010	Milik Perseroan
18.	KCP Jakarta Matraman	Ruko Mitra Matraman Blok A2/3, Jl. Matraman Raya No. 148, Matraman, Jakarta Timur	12/1959/DPbS	15 November 2010	Sewa sampai tanggal 14 Juni 2020
19.	KCP Jakarta Palmerah	Jl. Palmerah Barat No. 32 F, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan	8/340/DPbS	16 Februari 2016	Sewa sampai tanggal 18 Agustus 2019
20.	KCP Jakarta Tanah Abang	Pusat Grosir Tanah Abang Blok A B 1, Los F No. 083, Jakarta Pusat	11/1495/DPbS	-	Sewa sampai tanggal 6 Oktober 2019
21.	KCP Jakarta Tebet Timur	Jl. Tebet Raya No. 43 D, Tebet Timur, Jakarta Selatan	S-46/PB.131/2014	28 April 2016	Sewa sampai tanggal 10 Oktober 2019
22.	KK Jakarta Kramat Jati	Jl. Raya Bogor Km. 17, Pasar Induk, Kramat Jati Blok D1 No. 18, Jakarta Timur	S-99/PB.131/2014	27 Juli 2014	Sewa sampai tanggal 5 Januari 2020
BOGOR					
23.	KC Bogor Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 19, Tanah Sereal, Bogor	S-174/PB.131/2014	24 November 2014	Milik Perseroan
24.	KCP Bogor Pajajaran	Jl. Pajajaran No. 256B, Bogor Utara, Bogor	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 31 Agustus 2018
25.	KCP Bogor Dramaga	Jl. Raya Cibanteng No. 58, Ciampea, Bogor	15/855/DPbS	6 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 30 November 2018
26.	KCP Bogor Parung	Jl. Raya Parung, Kampung Jati, Bogor	14/1135/DPbS	25 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 8 April 2018
27.	KCP Bogor Tajur	Jl. Raya Wangun - Ciawi No. 265, Bogor	14/1135/DPbS	25 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 20 Maret 2020
28.	KK Bogor Ciomas	Jl. Raya Ciomas Blok R17, Ciomas, Bogor	S-46/PB.131/2014	28 April 2016	Sewa sampai tanggal 22 Desember 2019
DEPOK					
29.	KC Depok Margonda	Margonda Aarden Office Park Blok 7 - 8, Jl. Margonda Raya No. 41, Depok	S-58/PB.13/2016	20 April 2016	Milik Perseroan
30.	KCP Bogor Cibinong	Jl. Raya Bogor Km. 43, Cibinong, Bogor	12/925/DPbs	8 Juni 2010	Sewa sampai tanggal 1 Maret 2021
31.	KCP Jakarta Cibubur	Ruko Kranggan Permai No. 17, Jl. Alternatif Cibubur Km. 3, Kranggan, Bekasi	15/16/DpbS/PrzS	16 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 15 Oktober 2018
32.	KCP Depok Cimanggis	Jl. Raya Bogor Km. 31, Cimanggis, Depok	S-99/PB.131/2014	27 Juli 2014	Sewa sampai tanggal 1 Februari 2020

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
33.	KCP Bogor Cileungsi	Jl. Perum. Metland Transyogi No. 20, Cileungsi, Bogor	14/1064/DPbS	29 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 5 Juni 2020
34.	KK Jakarta Pasar Cibubur	Jl. Raya Lapangan Tembak, Cibubur, Jakarta Timur	15/2243/DPbS	27 Desember 2013	Sewa sampai tanggal 29 Juli 2019
TANGERANG					
35.	KC Tangerang Daan Mogot	Jl. Daan Mogot No. 39, Tangerang	12/1806/DPbS	1 November 2010	Milik Perseroan
36.	KCP Tangerang Balaraja	Jl. Raya Serang Km. 22, Cikupa, Tangerang	14/1043/DPbS	18 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 31 April 2020
37.	KCP Tangerang Curug	Ruko Niaga Sentul, Jl. Raya STPI Curug No. 7, Tangerang	14/1043/DPbS	18 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2020
38.	KCP Tangerang Jatiuwung	Jalan Raya Serang 1, Sangiang Jaya, Periuk Tangerang	S-169/PB.1311/2015	31 Juli 2015	Milik Perseroan
39.	KCP Tangerang Tanah Tinggi	Jl. Permata Ruko Niaga II, No. 12 Perum Taman Royal I, Tangerang	14/1043/DPbS	18 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 30 April 2020
40.	KCP Tangerang Karawaci	Ruko Dahung, Jl. Imam Bonjol No. 8, Cibodas, Tangerang	S-46/PB.131/2014	28 April 2014	Sewa sampai tanggal 31 Oktober 2019
41.	KCP Tangerang Ciledug	Ruko CBD Ciledug Blok A5 No. 7, Tangerang	S-46/PB.131/2014	28 April 2014	Sewa sampai tanggal 31 Oktober 2019
42.	KK Tangerang Pasar Curug*	Jalan Raya PLP Curug, Tangerang	-	-	Milik Perseroan
43.	KC Tangerang Bumi Serpong Damai (BSD)	Ruko Tol Boulevard Blok D.20 - 21 Jl. Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang	S-17/PB.131/2018	7 Februari 2018	Milik Perseroan
44.	KCP Jakarta Bintaro	Ruko Kebayoran Arcade KA.1 Blok C1 No. 19-20, Kawasan Niaga Bintaro Jaya Sektor 7, Jalan Raya Boulevard Bintaro, Tangerang Selatan	12/2606/DPbS	30 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 16 November 2018
45.	KCP Jakarta Ciledug	Ruko CBD Ciledug Blok A5 No. 7, Tangerang	B.425-UUS/PRN/12/2005	29 Desember 2005	Sewa sampai tanggal 18 September 2019
46.	KCP Jakarta Ciputat	Jl. Otista Sasak Tinggi No. 3, Ciputat, Tangerang	14/790/DPbS	24 April 2012	Sewa sampai tanggal 31 Desember 2019
47.	KCP Jakarta Meruya	Jl. Meruya Selatan Raya No. 46, Jakarta Barat	S-22/PB.1311/2016	12 Februari 2016	Sewa sampai tanggal 31 Desember 2021
48.	KCP Tangerang Pamulang	Jl. Parakan Raya No. 14, Pamulang, Tangerang	S-157/PB.1311/2017	4 September 2017	Sewa sampai tanggal 10 Juni 2022
49.	KCP Jakarta Serpong	Ruko Jalur Sutra Kav. 29A No. 3, Pakualam	15/1811/DPbS	8 November 2013	Sewa sampai tanggal 26 Juni 2021
BEKASI					
50.	KC Bekasi Square	Jl. Ahmad Yani, Bekasi Square No. 60 - 61, Bekasi	S-149/PB.131/2014	17 Oktober 2014	Milik Perseroan
51.	KCP Bekasi Cikarang	Ruko Plaza Roxy, Jalan Kasuari Raya Blok S1 B No. 19, Cikarang Utara, Bekasi	14/1135/DPbS	25 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 21 Mei 2020
52.	KCP Bekasi Pondok Bambu	Jl. Inspeksi Kalimantan No. 9, Ruko Kalimantan Square, Duren Sawit, Jakarta Timur	13/349/DPbS	1 Maret 2011	Sewa sampai tanggal 2 Januari 2021
53.	KCP Bekasi Jatiwaringin	Jl. Raya Jatiwaringin No. 89, Pondok Gede, Bekasi	S-243/PB.1311/2015	24 November 2015	Milik Perseroan
54.	KCP Bekasi Tambun	Ruko Tambun City BC/6, Jl. Sultan Hasanudin Tambun, Bekasi	S-122/PB.1311/2015	28 April 2005	Sewa sampai tanggal 20 Maret 2020

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
55.	KCP Jakarta Kalimalang	Jl. Raya Kalimalang Pekavlingan A2/4 C-D, Duren Sawit, Jakarta Timur	S-236/PB.1311/2015	5 November 2015	Milik Perseroan
CILEGON					
56.	KC Cilegon Tirtayasa	Jl. S.A. Tirtayasa No. 62, Jombang, Cilegon	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 15 Februari 2020
57.	KCP Cikande Modern Land	Ruko Modern Land, Jl. Raya Nambo Ilir, Cikande Blok A No. 11, Serang	15/985/DPbS	24 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 26 Februari 2021
58.	KCP Labuan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 11B, Pandeglang, Banten	15/985/DPbS	24 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 5 April 2019
59.	KCP Lebak Rangkasbitung	Komplek Rabinza Blok B.18, Jl. Hardiwinangun, Lebak Banten	15/256/DPbS	14 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 1 Januari 2019
60.	KCP Pandeglang Lapangan	Jl. Lapangan Sukarela, Kampung Kadupandak, Pandeglang, Banten	14/1198/DPbS	6 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 30 April 2018
61.	KCP Serang Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 165, Serang, Banten	12/582/DPbS	22 April 2010	Sewa sampai tanggal 30 September 2018
62.	KK Serang Unsera	Kampus Terpadu UNSERA Lt. 1, Jl. Raya Serang Cilegon, Serang, Banten	S-75/PB.131/2014	8 Juni 2014	Sewa sampai tanggal 5 Desember 2020
63.	KC Bandung Citarum	Jl. Taman Citarum No. 4, Bandung	11/106/DPbS/PAdBS/Bd	19 Agustus 2009	Milik Perseroan
64.	KCP Bandung Cijerah	Jl. Melong Asih No. 66, Kav. F, Komplek Melong Nirwana Residence Cijerah, Bandung Kulon, Bandung	14/130/DPbS.IDABS.Bd	25 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 16 April 2020
65.	KCP Bandung Kopo	Jl. Kopo Sayati No. 98A.3, Bandung	12/161/DPbS/PADBS/Bd	26 November 2010	Sewa sampai tanggal 01 Agustus 2020
66.	KCP Bandung Majalaya	Jl. Babakan No. 91-B, Majalaya, Bandung	S-90/KR.213/2015	9 April 2015	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2021
67.	KCP Bandung Setiabudi	Jl. Setiabudi No. 146, Bandung	12/57/DPbS/PAdBS/Bd	5 Mei 2010	Sewa sampai tanggal 08 Januari 2020
68.	KCP Cimahi Jend. Amir Mahmud	Jl. Jend. Amir Mahmud No. 815 B, Cimahi	S-506/KR.022/2017	30 Agustus 2017	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2021
69.	KCP Soreang Wahid Hasyim	Jl. Wahid Hasyim Km. 15,5 Soreang, Bandung	15/133/DPbS/IDABS/Bd	5 September 2013	Sewa sampai tanggal 27 Juli 2019
70.	KCP Subang Otista	Jl. Otista No. 53, Subang	S-112/KR.022/2016	25 Juli 2016	Sewa sampai tanggal 04 Juli 2021
71.	KK Bandung Lembang	Jl. Grand Hotel No. 21, Bandung	12/178/DPbs/PADBS/Bd	20 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 01 Oktober 2020
72.	KK Bandung Unisba	Jl. Hariang Banga 2, Bandung	B.207.KC.BDG/OPS/05/2011	9 Mei 2011	Sewa sampai tanggal 28 Maret 2026
73.	KC Purwakarta Gandanegara	Jl. Gandanegara No. 12, Purwakarta	S-8/PBI.131/2016	6 Januari 2013	Sewa sampai tanggal 28 Desember 2020
74.	KC Bandung Suniaraja	Jl. Suniaraja No. 82, Bandung	D.15.6.1-4-40	3 Juli 1969	Milik Perseroan
75.	KCP Bandung Buah Batu	Jl. Buah Batu No. 242, Bandung	12/157/DPbS/PADBS/Bd	10 November 2010	Sewa sampai tanggal 02 Januari 2020
76.	KCP Bandung Padalarang	Jl. Raya Purwakarta No. 68, Padalarang, Bandung	14/163/DPbS/IDABS/Bd	6 September 2012	Sewa sampai tanggal 04 Juli 2020
77.	KCP Bandung Rancaekek	Jl. Cipasir No. 130, Desa Jelegong, Bandung	15/81/DPbS/IDABS/Bd	6 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 20 Maret 2021

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
78.	KCP Ujung Berung	Jl. AH. Nasution No. 94B, Bandung	14/163/DPbS/IDABS/Bd	6 September 2012	Sewa sampai tanggal 11 Juni 2020
79.	KCP Sumedang Tanjungsari	Jl. Raya Tanjungsari, Sumedang	14/163/DPbS/IDABS/Bd	6 September 2012	Sewa sampai tanggal 04 Juli 2020
80.	KCP Bandung Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta No. 590, Buah Batu, Bandung	S-45/KR.21/2015	7 April 2015	Sewa sampai tanggal 24 November 2021
81.	KC Tasikmalaya Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 15 dan 17, Tawang, Tasikmalaya	14/2058/DPbS	2 September 2012	Sewa sampai tanggal 17 Agustus 2020
82.	KCP Banjar Victoria	Komplek Ruko Victoria, Jl. Mayjend. Didi Kartasasmita, Banjar	15/9/DPbS/IDABS/Tsm	19 Agustus 2013	Sewa sampai tanggal 7 Mei 2019
83.	KCP Ciamis Pasar Manis	Jalan Letnan Samuji Ruko No. 33, Ciamis	15/9/DPbS/IDABS/Tsm	19 Agustus 2013	Sewa sampai tanggal 06 Mei 2019
84.	KCP Garut Ciledug	Jl. Ciledug No. 104, Garut	15/112/DPbS/IDABS.Bd	2 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 15 Oktober 2019
85.	KC Cianjur Taepur	Jl. Taifur Yusup No. 37, Cianjur	6/6/DPbS/Bd	12 Mei 2004	Sewa sampai tanggal 08 Mei 2018
86.	KCP Cianjur Cipanas	Jl. Raya Cipanas, Cipanas, Cianjur	14/107/DPbS/IDABS/Bd	28 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 30 November 2020
87.	KCP Cianjur Ciranjang	Jl. Raya Bandung - Cianjur Km. 14	14/121/DPbS/IDABS/Bd	13 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 29 Juni 2018
88.	KCP Cianjur Sukanagara	Jl. Raya Sukanegara, Sukanegara, Cianjur	15/24/DPbS/IDABS/Bd	4 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 10 Oktober 2020
89.	KCP Cianjur Warung Kondang	Jl. Raya Sukabumi Km. 8, Cianjur	14/121/DPbS/IDABS/Bd	13 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 11 Mei 2018
90.	KCP Sukabumi Cibadak	Jl. Siliwangi No. 110, Sukabumi	14/179/DPbS/IDABS/Bd	19 Oktober 2012	Sewa sampai tanggal 20 Oktober 2018
91.	KCP Sukabumi Pelabuhan Ratu	Kampung Cangehgar, Sukabumi	15/48/DPbS/IDABS/Bd	13 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 25 Januari 2019
92.	KCP Sukabumi R.E. Martadinata	Jl. R. E. Martadinata No. 37, Sukabumi	12/174/DPbS/PADBS/Bd	10 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 01 Agustus 2020
93.	KCP Sukabumi Cicurug	Jl. Raya Siliwangi No. 17, Sukabumi	S-246/KR.022/2016	29 September 2016	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2021
94.	KC Cirebon Siliwangi	Jl. Siliwangi No. 181, Cirebon	5/16/DPIP/Prz	10 Januari 2003	Sewa sampai tanggal 03 Juli 2020
95.	KCP Cirebon Arjawinangun	Jl. Ki Hajar Dewantara Blok II, Kec. Arjawinangun, Cirebon	14/8/DPbS/PADbS/Cn	31 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 23 Februari 2021
96.	KCP Cirebon Plered	Jl. Ir. H. Juanda No. 84B, Cirebon	15/14/DPbS/PAdBS/Cn	23 September 2013	Sewa sampai tanggal 18 Maret 2020
97.	KCP Indramayu Suprpto	Jl. Jend. Suprpto No. 699, Indramayu	4/142/DPIP/Prz	-	Milik Perseroan
98.	KCP Kuningan Veteran	Jl. Veteran Ruko Taman Kota No. C3, Kuningan	15/2/DPbS/PADbS/Cn	22 Januari 2013	Milik Perseroan
99.	KCP Majalengka Abdul Halim	Jl. KH. Abdul Halim No. 199 Blok Kliwon	S-270A/KO.021/2017	29 Maret 2017	Sewa sampai tanggal 25 Januari 2022
100.	KCP Majalengka Kadipaten	Ruko Kadipaten Trade Centre, Jl. Siliwangi No. 7 - 8, Majalengka	S-274/KO.21/2015	22 Juli 2015	Sewa sampai tanggal 30 Juni 2020
101.	KC Purwokerto Karang Kobar	Jl. Karang Kobar RT 03 RW 08, Sokanegara, Jawa Tengah	S-14/PB.131/2018	26 Januari 2018	Milik Perseroan

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
102.	KCP Banyuwangi Ajibarang	Jl. Raya Pancasan Ajibarang, Banyumas	14/3/DPbS/IDABS/Pwt	31 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2018
103.	KCP Cilacap Gatot Subroto	Jl. Gatot Subroto No. 57, Cilacap	S-284/KO.033/2016	26 April 2016	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2021
104.	KCP Purbalingga MT Haryono	Jl. M.T. Haryono No. 45, Purbalingga	14/3/DPbS/IDABS/Pwt	31 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 02 Juni 2019
105.	KCP Kebumen Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 37, Kebumen	14/18/DPbS/PrzS/Sm	7 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 03 Juli 2018
106.	KC Semarang MT Haryono	Jl. MT. Haryono No. 655A, Semarang	S-72/PB.131/2017	6 April 2017	Sewa sampai tanggal 9 Juni 2026
107.	KCP Demak Sultan Fattah	Jl. Sultan Fattah No. 37, Demak	S-49/KR.0313/2016	9 Agustus	Sewa sampai tanggal 01 Agustus 2021
108.	KCP Kendal Weleri	Jl. Utama Barat No. 230, Weleri	15/3/DPbS/PrzS/Sm	8 Januari 2013	Sewa sampai tanggal 24 Oktober 2018
109.	KCP Kudus Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 125 Blok B4, Kudus	7/207/DPIP/Prz/Sm	26 Desember 2005	Sewa sampai tanggal 05 Agustus 2019
110.	KCP Pati Diponegoro	Jl. Pangeran Diponegoro No. 65, Pati	14/7/DPbS/PrzS/Sm	15 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2018
111.	KCP Purwodadi Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 41, Purwodadi, Grobogan	15/7/DPbS/PrzS/Sm	13 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 13 Februari 2021
112.	KCP Semarang Majapahit	Jl. Brigjend Sudiarto No. 234, Pedurungan, Semarang	12/1/DPbS/Sm	6 Januari 2010	Sewa sampai tanggal 01 Oktober 2019
113.	KCP Ungaran Diponegoro	Ruko Ungaran Square No. 3, Jl. Diponegoro 745, Semarang	S-76/KR.413/2015	27 Juli 2015	Sewa sampai tanggal 01 September 2020
114.	KC Solo Veteran	Jl. Veteran No. 120, Pasar Kliwon, Surakarta	14/20/DPBS/IDABS/Slo	6 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 22 November 2019
115.	KCP Karanganyar Palur	Jl. Raya Palur No. 6B, Jaten, Karanganyar	12/46/DPbS/PAdBS/Slo	24 Agustus 2010	Sewa sampai tanggal 12 Januari 2020
116.	KCP Klaten Pemuda	Jl. Veteran No. 134, Klaten	14/32/DPBS/IDABS/Slo	14 September 2012	Sewa sampai tanggal 24 April 2018
117.	KCP Sragen Atrium	Jl. Sukowati, Komplek Plaza Atrium Blok H, Sragen	14/44/DPBS/IDABS/Slo	17 Oktober 2012	Sewa sampai tanggal 02 Juli 2018
118.	KCP Wonogiri RM Said	Jl. RM Said Joho, Wonogiri	S-590/KO.032/2016	4 Oktober 2016	Sewa sampai tanggal 07 Juni 2021
119.	KC Tegal Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 42, Tegal	12/322/DPbS	24 Maret 2010	Sewa sampai tanggal 30 Juli 2019
120.	KCP Brebes Jatibarang	Jl. Raya Barat Jatibarang No. 80, Brebes	14/8/DPbS/PAdBS/Tgl	14 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
121.	KCP Brebes Ketanggungan	Jl. Jend. Sudirman No. 360, Ketanggungan, Brebes	14/8/DPbS/PAdBS/Tgl	14 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2020
122.	KCP Pekalongan Yagis	Jl. Bandung No. 60, Sugihwaras, Pekalongan	15/2/DPbS/PRBS/Tgl	12 September 2013	Sewa sampai tanggal 01 Juli 2028
123.	KCP Pemalang Sudirman	Jl. Jend. Sudirman Timur No. 146, Pemalang	14/29/DPbS/PAdBS/Tgl	28 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 10 November 2020
124.	KCP Tegal Banjaran	Jl. Raya Selatan Banjaran No. 45, Tegal	14/20/DPbS/PAdBS/Tgl	5 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 10 Juni 2020

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
125.	KC Yogyakarta Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso No. 1, Kota Baru, Yogyakarta	11/134/DPbS/PAdBS/Yk	8 Oktober 2009	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2019
126.	KCP Bantul Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 15, Melikan, Bantul	12/181/DPbS/PAdBS/Yk	11 November 2010	Sewa sampai tanggal 25 Juli 2020
127.	KCP Gedong Kuning	Jl. Gedongkuning No. 94C, Gede Yogyakarta	15/110/DPbS/IDABS/Yk	23 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 30 Maret 2021
128.	KCP Gunung Kidul Wonosari	Jl. Brigjen Katamso No. 110, Wonosari, Gunung Kidul	15/88/DPbS/IDABS/Yk	17 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 2 Desember 2019
129.	KCP Sleman Affandi	Jl. Affandi No. 57, Caturtunggal, Sleman	10/99/DPbS/.PAdBS/Yk	27 Juni 2008	Sewa sampai tanggal 24 Juli 2020
130.	KCP Sleman Godean	Jl. Godean Km. 4,5 No. 32, Gamping Sleman	15/88/DPbS/IDABS/Yk	17 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 03 Mei 2023
131.	KCP Sleman Prambanan	Jl. Raya Yogyakarta Solo, Kranggan, Sleman	15/88/DPbS/IDABS/Yk	17 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 07 Januari 2021
132.	KCP Yogyakarta AH Dahlan	Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 89, Yogyakarta	11/146/DPbS/PAdBS/Yk	14 Desember 2009	Sewa sampai tanggal 31 Juli 2019
133.	KCP Magelang Singosari	Ruko Gading Mas Blok A No. 3-4, Jl. Singosari, Magelang	12/30/DPbS/Sm	5 Oktober 2010	Sewa sampai tanggal 01 Juli 2022
134.	KC Surabaya Diponegoro	Jl. Diponegoro No. 16, Wonokromo, Surabaya	13/35/DPbS	10 Januari 2011	Sewa sampai tanggal 02 Agustus 2020
135.	KCP Sidoarjo Gateway	Ruko Gateway A-20, Jl. Raya S. Parman, Waru, Sidoarjo	13/71/DPbS/Sb	6 April 2011	Sewa sampai tanggal 01 Desember 2018
136.	KCP Surabaya Ngagel	Jl. Ngagel Jaya Selatan No. 27A, Gubeng, Surabaya	14/204/DPbS/Sb	17 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 06 September 2018
137.	KCP Surabaya HR Mohammad	Komplek Ruko Surya Inti Permata II Blok C-7, Jl. HR. Muhammad No. 175, Dukuh Pakis, Surabaya	S-167/KR.313/2015	10 Juni 2015	Sewa sampai tanggal 28 Januari 2020
138.	KCP Surabaya Rungkut	Jl. Raya Rungkut Kidul Industri No. 41	12/84/DPbS/Sb	11 Mei 2010	Sewa sampai tanggal 01 Januari 2020
139.	KCP Surabaya Wiyung	Ruko Taman Pondok Indah Blok A No. 10, Wiyung, Surabaya	14/204/DPbS/Sb	17 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 01 November 2020
140.	KCP Surabaya Kapas Krampung	Jl. Kapas Krampung No. 220, Surabaya	S-2/KR.31/2014	10 Januari 2014	Sewa sampai tanggal 21 Agustus 2019
141.	KC Surabaya Gubeng	Jl. Raya Gubeng No. 38, Surabaya	S-68/PB.131/2014	26 Mei 2014	Sewa sampai tanggal 2 November 2018
142.	KCP Bangkalan Trunojoyo	Jl. Trunojoyo 39 F, Bangkalan, Madura	11/222/DPbS/Sb	4 Desember 2009	Sewa sampai tanggal 31 Agustus 2019
143.	KCP Pamekasan Stadion	Jl. Stadion No. 65A, Pamekasan	15/34/DPbS/Sb	15 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 24 Oktober 2018
144.	KCP Surabaya Mulyosari	Jl. Mulyosari No.310, Sukolilo, Surabaya	15/63/DPbS/Sb	2 April 2013	Sewa sampai tanggal 17 Januari 2021
145.	KCP Surabaya Perak	Jl. Perak Barat No.217C, Pabean Cantikan, Surabaya	15/63/DPbS/Sb	2 April 2013	Sewa sampai tanggal 20 Maret 2019
146.	KK Surabaya Pasar Grosir	Jl. Dupak Emplasemen Stasiun Pasar Turi Blok J1 No. 1-3,5-7	12/91/DPBS/SB	26 Mei 2010	Sedang dalam proses penandatanganan akad sewa gedung antara Perseroan dan manajemen

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
					Pasar Grosir Surabaya
147.	KC Gresik Dr. Sutomo	Jl. Dr. Sutomo No. 140, Gresik	S-64/PB.13/2016	4 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 Desember 2019
148.	KCP Gresik Menganti	Komplek Ruko Sidowungu No. 4, Jl. Raya Sidowungu No. 19, Gresik	14/112/DPbS/Sb	17 September 2012	Sewa sampai tanggal 15 Mei 2018
149.	KCP Bojonegoro Suropati	Jl. Untung Suropati Blok A, No.9, Ruko Adipura, Bojonegoro	15/69/DPbS/Sb	8 April 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2019
150.	KCP Lamongan Wahidin	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusudo No.15, Lamongan	15/23/DPbS/Sb	29 Januari 2013	Sewa sampai tanggal 01 November 2018
151.	KCP Tuban Basuki Rachmat	Jl. Basuki Rachmat No. 276A, Tuban	14/204/DPbS/Sb	17 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 06 Oktober 2018
152.	KC Sidoarjo Ahmad Yani	Jl. A. Yani No. 41 A-B, Sidokumpul, Sidoarjo	15/1832/DPbS	19 November 2013	Milik Perseroan
153.	KCP Jombang Mojoagung	Jl Raya Gambiran No. 140, Jombang	14/95/DPbS/Sb	13 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2020
154.	KCP Jombang Ploso	Jl. Raya Rejoagung No.38, Jombang	14/100/DPbS/Sb	2 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 30 Mei 2018
155.	KCP Jombang Wachid Hasyim	Jl. Wachid Hasyim No.9 A1-2, Jombang	12/91/DPbS/Sb	-	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2020
156.	KCP Mojokerto Majapahit	Jl. Mojopahit No. 465, Mojokerto	14/67/DPbS/Sb	4 Mei 2012	Sewa sampai tanggal 09 Oktober 2021
157.	KCP Mojokerto Mojosari	Jl. Masjid No.7, Sarirejo, Mojokerto	14/112/DPbS/Sb	17 September 2012	Sewa sampai tanggal 30 Maret 2020
158.	KCP Mojokerto Bangsal	Jl. Raya Pacing Bangsal No. 20 A, Bangsal, Mojokerto	S-183/KR.313/2015	21 Agustus 2015	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2020
159.	KCP Sidoarjo Sepanjang	Jl. Ngelom Raya No. 62, Taman, Sidoarjo	15/96/DPbS/Sb	30 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 11 Mei 2021
160.	KK Jombang Darul Ulum	Pondok Pesantren Tinggi Darul Ulum, Jl. Rejoso - Peterongan, Jombang	15/56/DPbS/Sb	18 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 21 Juni 2019
161.	KC Kediri Hasanuddin	Jl. Hasanuddin No. 21B, Dandangan, Kediri	45/PB.131/2016	16 Agustus 2016	Sewa sampai tanggal 2 Desember 2025
162.	KCP Blitar Tanjung	Jl. Tanjung No. 17, Blitar	15/27/DPbS/PAdBS/Kd	10 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2019
163.	KCP Kediri Ngronggo	Jl. Kapten Tendean No. 201, Kediri	14/51/DPbS/PAdBS/Kd	14 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
164.	KCP Kediri Pare	Jl. Lawu 6A, Pare, Kediri	14/51/DPbS/PAdBS/Kd	14 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2018
165.	KCP Nganjuk Yos Sudarso	Jl. Yos Sudarso 15, Nganjuk	14/51/DPbS/PAdBS/Kd	14 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 07 Mei 2020
166.	KCP Trenggalek Sudirman	Jl. Panglima Sudirman No. 43, Trenggalek	15/34/DPbS/PAdBS/Kd	1 Agustus 2013	Sewa sampai tanggal 30 April 2019
167.	KK Kediri Tulung Agung	Jl. Hasanuddin, Komplek Ruko Panglima Sudirman Trade Center Blok A-1, Tulung Agung	12/43/DPbS/PAdBS/Kd	11 Juni 2010	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2020
168.	KC Madiun S. Parman	Jl. Letjen. S. Parman No. 44, Madiun	S-134/PB.131/2015	24 Agustus 2015	Sewa sampai tanggal 1 Juli 2020
169.	KCP Ponorogo Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta No. 2B, Ponorogo	15/28/DPbS/PAdBS/Kd	27 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2021

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
170.	KCP Magetan MT Haryono	Jl. MT. Haryono Permai, Magetan	15/32/DPbS/PAdBS/Kd	8 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 03 April 2021
171.	KCP Ngawi Sudirman	Jl. PB. Sudirman No. 54, Ngawi	S-66/KO.042/2016	24 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2021
172.	KC Malang Soekarno Hatta	Jl. Soekarno Hatta B15-17 dan S12, Lowokwaru, Malang	S-175/PB.131/2017	26 Oktober 2017	Milik Perseroan
173.	KCP Malang Batu	Jl. Diponegoro No.161 A, Temas, Batu	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
174.	KCP Malang Bululawang	Jl. Bululawang Utara, Malang	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2020
175.	KCP Malang Kepanjen	Jl. Sultan Agung No. 20, Malang	S-522/KO.34/2015	20 Agustus 2015	Sewa sampai tanggal 30 April 2022
176.	KCP Malang Lawang	Jl. Komplek Ruko Lawang View Kav.8	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 03 Juni 2018
177.	KCP Malang Pakis	Jl. Pakis Kembar No.78 C	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2020
178.	KCP Malang Turen	Jl. Panglima Sudirman No. 124A, Turen	14/3DPIP/Prz/MJ	15 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 19 Mei 2022
179.	KCP Pasuruan Sudirman	Jl. Panglima Sudirman No. 77, Pasuruan	12/74/DPbS/PAdBS/Mj	28 September 2010	Sewa sampai tanggal 19 Mei 2020
180.	KCP Malang Pandaan	Jl. Dr. Sutomo Desa Sumbergedang, Pasuruan	S-758/KO.34/2015	8 Oktober 2015	Milik Perseroan
181.	KC Banyuwangi A. Yani	Jl. Ahmad Yani No. 95, Banyuwangi	S-181/KO.351/2015	8 Juli 2015	Sewa sampai tanggal 27 Juni 2020
182.	KCP Banyuwangi Genteng	Jl. Wachid Hasyim No.11 Genteng, Banyuwangi	14/28/DPbS/IDABS/Jr	27 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
183.	KCP Banyuwangi Rogojampi	Ruko Sentra Niaga Blok AA3, Jl. Raya Rogojampi, Banyuwangi	14/28/DPbS/IDABS/Jr	27 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
184.	KC Jember Trunojoyo	Jl. Trunojoyo No. 101, Jember	S-181/KO.351/2015	8 Juli 2015	Sewa sampai tanggal 19 Juni 2020
185.	KC Mataram Pejangik	Jl. Pejangik No. 108, Mataram	S-68/PB.131/2014	26 Mei 2014	Milik Perseroan
186.	KCP Bima Soetta	Jl. Sukarno Hatta No. 08, Bima	15/72/DPbS/IMBS/Mtr	27 Desember 2013	Sewa sampai tanggal 31 Agustus 2018
187.	KCP Lombok Aikmel	Jl. Pendidikan No. 61A, Lombok Timur	14/42/DPbS/IDABS/Mtr	14 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 16 September 2019
188.	KCP Lombok Praya	Jl. Jend. Sudirman No. 81, Lombok Tengah	14/42/DPbS/IDABS/Mtr	14 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2022
189.	KCP Lombok Selong	Jl. TGKH. M. Zainuddin Abdul Majid, Selong, Lombok Timur	14/28/DPBS/PAdBS/Mtr	29 Juni 2012	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2020
190.	KC Denpasar Mahendradatta	Jl. Mahendradatta No. 100x, Kel. Padangsambian, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali	S-19/PB.131/2017	24 Januari 2017	Milik Perseroan
191.	KC Makassar Pettarani	Jl. Andi Pangeran Pettarani No. 70, Makassar	13/21/DPbS/PAdBS/Mks	9 Agustus 2011	Sewa sampai tanggal 22 Januari 2026
192.	KCP Bone Jeppee	Jl. Durian No. 5, Watampone	15/5/DPbS/PAdBS/Mks	31 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 27 Februari 2019

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
193.	KCP Gowa Sungguminasa	Jl. KH. Wahid Hasyim No. 256, Gowa	15/38/DPbS/PAdBS.Mks	28 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 03 April 2019
194.	KCP Makassar Arief Rate	Jl. Arief Rate No. 35, Ujung Pandang, Makassar	S-126/KR.612/2015	18 September 2015	Sewa sampai tanggal 08 Mei 2018
195.	KCP Makassar Tamalanrea	Jl. Perintis Kemerdekaan 8 (Km 10), Kompleks Pertokoan Tamalanrea Unit 12	12/14/DPbS/Mks	2 Januari 2010	Sewa sampai tanggal 01 Desember 2019
196.	KCP Palopo	Jl. Andi Djemma No. 15 B, Palopo	15/5/DPbS/PRBS/Mks	24 Desember 2013	Sewa sampai tanggal 01 Agustus 2019
197.	KCP Pinrang Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 59, Pinrang	15/5/DPbS/PAdBS/Mks	31 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 20 Februari 2019
198.	KCP Wajo Sudirman	Jl. Jend. Sudirman, Sengkang, Wajo	15/5/DPbS/PAdBS/Mks	31 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 28 April 2019
199.	KCP Pannampu	Jl. Pannampu No. 7, Tallo, Makassar	S-98/KR.6/2015	25 Mei 2015	Sewa sampai tanggal 12 Mei 2022
200.	KC Kendari Abdullah Silondae	Jl. Abdullah Silondae No. 123, Mandonga, Kendari	S-175/PB.131/2015	14 Oktober 2015	Sewa sampai tanggal 02 Juli 2020
201.	KCP Baubau Betoambari	Jl. Betoambari	S-421/KO.0601/2017	21 November 2017	Sewa sampai tanggal 1 Agustus 2019
202.	KC Manado Tendean	Jl. Piere Tendean (Boulevard) Ruko Mantos No. 11-12, Sario, Manado	15/580/DPbS	17 April 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2019
203.	KC Palu Wolter Monginsidi	Jl. Wolter Monginsidi No. 133 C, Palu	S-684/KO.63/2015	2 November 2015	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2021
204.	KC Banjarmasin Ahmad Yani	Jl. A. Yani Km. 3 No. 147C, Banjarmasin	12/35/DPbS/PIA/Bjm	2 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 28 Juni 2020
205.	KCP Banjarbaru Ahmad Yani	Jl. A. Yani Km. 33.5, Banjarbaru	13/29/DPbS/PAdBS/Bjm	7 Desember 2011	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2021
206.	KCP Banjarmasin Kayutangi	Jl. Sultan Adam No.13A, Banjarmasin	15/5/DPbS/IDABS/Bjm	15 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 14 Maret 2019
207.	KCP Banjarmasin Pasar Baru	Jl. Pasar Baru, Komp. Pasar baru Permai Blok E/6, Banjarmasin	15/5/DPbS/IDABS/Bjm	15 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 18 Februari 2019
208.	KCP Tabalong Tanjung	Jl. Pahlawan, Tanjung, Tabalong	15/2/DPbS/IDABS/Bjm	25 Januari 2013	Sewa sampai tanggal 25 November 2018
209.	KC Palangkaraya Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 56, Pahandut, Palangka Raya	S-72/KO.0923/2016	24 Oktober 2016	Sewa sampai tanggal 16 Oktober 2021
210.	KC Balikpapan Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 05, Damai, Balikpapan	12/27/DPIP/Prz/Bpp	9 Juli 2010	Sewa sampai tanggal 31 Januari 2019
211.	KCP Balikpapan Iswahyudi	Jl. Marsma Iswahyudi No.482, Balikpapan	14/47/DPBS/Bpp	15 Oktober 2012	Sewa sampai tanggal 23 Mei 2018
212.	KCP Balikpapan Pandansari	Jl. Pandansari No.114, Balikpapan	13/29/DPIP/Prz/Bpp	25 Oktober 2011	Sewa sampai tanggal 04 Maret 2021
213.	KCP Paser Tanah Grogot	Jl. Anden Oko, Paser, Kalimantan Timur	15/7/DPbS/Bpp	21 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 30 Desember 2019
214.	KCP Penajam Propinsi	Jl. Propinsi Km. 1, Penajam	15/7/DPbS/Bpp	21 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 11 Desember 2018
215.	KC Pontianak Gusti Sulung	Jl. Gusti Sulung Lelanang Blok B No. 6-8, Komplek Pontianak Mall, Pontianak	12/12/DPBS/Ptk	19 Mei 2010	Sewa sampai tanggal 1 November 2019

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
216.	KCP Pontianak Ahmad Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No.69, Pontianak	13/2/DPbS/Ptk	23 Februari 2011	Sewa sampai tanggal 27 Oktober 2020
217.	KCP Pontianak Kota Baru	Jl. Prof. Dr. M. Yamin, Ruko No. 2A, Pontianak	15/7/DPbS/Ptk	28 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 02 November 2018
218.	KCP Pontianak Siantan	Jl. Gusti Situt Mahmud, Siantan Hulu, Pontianak	14/2/DPbS/Ptk	23 Mei 2012	Milik Perseroan
219.	KCP Sanggau Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani, Ilir Kota, Pontianak	15/5/DPbS/Ptk	12 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 15 Agustus 2018
220.	KCP Singkawang Merdeka	Jl. Merdeka, Singkawang, Pontianak	14/13/DPbS/Ptk	28 November 2012	Sewa sampai tanggal 05 Juli 2018
221.	KC Samarinda Bhayangkara	Jl. Bhayangkara No. 33, Samarinda	12/18/DPbS/PAdbS/Smr	23 Juni 2010	Sewa sampai tanggal 17 September 2019
222.	KCP Kukar Tenggarong	Jl. KH. Akhmad Muksin No. 19, Tenggarong, Kutai Kartanegara	S-56/KO.0931/2016	6 September 2016	Sewa sampai tanggal 03 April 2021
223.	KCP Samarinda Ahmad Yani	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 19, Sungai Pinang, Samarinda	S-291/KO.131/2014	20 Oktober 2014	Sewa sampai tanggal 30 April 2020
224.	KCP Samarinda Loa Janan	Jl. Cipto Mangunkusumo, Loa Janan Ilir, Samarinda	15/10/DPbS/PrzS/Smr	11 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2019
225.	KCP Samarinda Seberang	Jl. Bung Tomo No. 2, Samarinda	S-28/KO.0931/2016	26 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2021
226.	KCP Kutai Sangatta	Jl. Yos Sudarso II, Sangatta Utara, Kutai Timur	S-29/KO.0931/2016	26 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2021
227.	KC Banda Aceh Daud Beureuh	Jl. T. Daud Beureuh, Banda Aceh	S-56/PB.13/2016	22 April 2016	Sewa sampai tanggal 2 Januari 2026
228.	KCP Aceh Barat Meulaboh	Jl. Manek Roo No. 106, Meulaboh	15/7/DPbS/Bna	15 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 30 Maret 2019
229.	KC Lhokseumawe	Jl. Merdeka, Simpang Empat, Lhokseumawe	S-139/PB.131/2017	3 Agustus 2017	Sewa sampai tanggal 30 April 2022
230.	KC Batam Business Center	Ruko Rafflesia Blok E No.8-9, Batam	14/2756/DPbS	18 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 1 Agustus 2020
231.	KC Bengkulu S. Parman	Jl. S. Parman No. 51 A-B Padang Jati, Bengkulu	13/2478/DPbS	6 Desember 2011	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2021
232.	KCP Bengkulu Panorama	Jl. Salak Raya No. 80, Bengkulu	14/10/DPbS/PrzS/Bn	26 September 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
233.	KC Jambi Hayam Wuruk	Jl. Hayam Wuruk No. 32, Jelutung Jambi	12/49/DPIP/Prz/Jb	25 Agustus 2010	Sewa sampai tanggal 1 September 2020
234.	KCP Jambi Rimbo Bujang	Jl. Pahlawan No. 91, Rimbo Bujang, Jambi	15/6/DPbS/PrzS/Jb	31 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 01 Desember 2018
235.	KCP Jambi Sipin	Jl. Sumantri Bojonegoro No.19, Telanaipura, Jambi	14/16/DPIP/Prz/Jb	4 September 2012	Sewa sampai tanggal 10 Juni 2020
236.	KCP Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera	S-291/KR.071/2016	4 Oktober 2016	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2019
237.	KCP Muara Bungo Sudirman	Jl. Jenderal Sudirman No.135-136, Bungo, Jambi	15/6/DPbS/PrzS/Jb	31 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 01 April 2019
238.	KCP Sungai Bahar	Jl. Jalur III B No.131, Muaro Jambi	15/7/DPbS0Prz/Jb	9 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 01 April 2019
239.	KC Medan S. Parman	Jl. S. Parman No. 250-E/8, Medan Baru, Medan	12/100/DPbS/Mdn	14 Desember 2010	Milik Perseroan

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
240.	KCP Binjai Sudirman	Jl. Jend. Sudirman No. 292-294, Binjai	12/99/DPbS/Mdn	9 Desember 2010	Sewa sampai tanggal 15 Oktober 2018
241.	KCP Langkat Stabat	Jl. Proklamasi No. 1, Kwala Bingai, Langkat	14/78/DPbS/Mdn	22 Juli 2012	Sewa sampai tanggal 31 Juli 2018
242.	KCP Lubuk Pakam Sudirman	Jl. Sudirman, Lubuk Pakam	15/59/DPbS/Mdn	20 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 01 November 2018
243.	KC Siantar Kartini	Jl. R.A. Kartini No. 06G Pematang Siantar	14/2323/DPbS	6 November 2012	Sewa sampai tanggal 05 Mei 2018
244.	KCP Rantau Prapat	Jl. Ahmad Yani Rantau Prapat Labuhan Batu	15/2/DPbS/PrzS/Pms	10 April 2013	Sewa sampai tanggal 31 Oktober 2018
245.	KCP Tebing Tinggi Sudirman	Jl. Sudirman No. A24, Tebing Tinggi	S.B.138-MDO/09/2016	20 September 2016	Sewa sampai tanggal 15 Juni 2021
246.	KC Padang Veteran	Jl. Veteran No. 37D, Padang Barat, Padang	5/267/DPbs	18 Desember 2003	Sewa sampai tanggal 21 Juni 2018
247.	KCP Bukittinggi Guru Hamzah	Jalan Guru Hamzah No. 16A, Guguk Panjang, Bukittinggi	14/10/Dpbs/PrzS/Pdg	-	Sewa sampai tanggal 01 Juli 2022
248.	KCP Payakumbuh Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No.125, Payakumbuh	14/6/DPbS/PrzS/PDg	13 Agustus 2012	Sewa sampai tanggal 31 Mei 2018
249.	KCP Dharmasya Pulau Punjung	Jl. Lintas Sumatera Km. 2, Dharmasraya	15/9/DPbS/PrzS/Pdg	20 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 21 Maret 2019
250.	KCP Pasaman Barat Simpang Empat	Jl. Raya Lintas Manggopoh/Ophir, Simop 4, Sumatera Barat	15/2/DPbS/PRBS/Pdg	9 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 30 April 2019
251.	KCP Dharmasya Sungai Rumbai	Jl. Lintas Sumatera - Sungai Rumbai, Jorong Bukit Bunga	15/9/DPbS/PrzS/Pdg	20 Mei 2013	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2019
252.	KC Palembang A. Rivai	Jl. Kapten A Rivai A/1, Palembang	12/7/DPbS/Pg	14 Januari 2010	Sewa sampai tanggal 31 Agustus 2019
253.	KCP Palembang 16 Ilir	Jl. Kebumen Darat No. 835, Palembang	12/18/DPbS/Pg	10 Februari 2010	Sewa sampai tanggal 01 September 2019
254.	KCP Palembang Kenten	Jl. MP Mangkunegara No.5, Kalidoni, Palembang	S-135/KO.532/2015	23 Oktober 2015	Sewa sampai tanggal 15 Juni 2020
255.	KCP Pangkal Pinang Soekarno Hatta	Jl. M. Syarief Rahman No. 6, Bukit Besar, Bukit Intan	S-12/KR.0711/2016	25 Mei 2016	Sewa sampai tanggal 01 April 2021
256.	KCP Bangka Sungai Liat	Jl. Muhidin No.8A, Bangka Belitung	15/74/DPbS/Pg	25 Juli 2017	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2019
257.	KCP Ogan Komering Ilir Tugumulyo	Jl. Lintas Timur Dusun III, Ogan Komering Ilir	S-21/KR.71/2016	16 Februari 2016	Sewa sampai tanggal 01 Maret 2021
258.	KC Prabumulih Sudirman	Jl. Jend. Sudirman Blok A No. 03, Prabumulih Timur, Prabumulih	14/2763/DPbS	27 Desember 2012	Sewa sampai tanggal 01 Mei 2022
259.	KCP Ogan Komering Ulu Baturaja	Jl. Sultan Syahril No. 145 Baturaja	15/74/DPbS/Pg	25 Juli 2013	Sewa sampai tanggal 24 November 2019
260.	KC Pekanbaru Arifin Ahmad	Jl. Arifin Ahmad No. 7-9, Pekanbaru	S-143/PB.131/2014	24 Oktober 2014	Milik Perseroan
261.	KCP Rohil Bagan Batu	Jl. Jend. Sudirman Km 2, Rokan Hilir, Riau	15/3/DPbS/IDAbs/Pbr	28 Februari 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2021
262.	KCP Bengkalis Duri	Jl. Hang Tuah No. 104, Bengkalis, Riau	14/100/DPbS/PAdBS/Pbr	14 September 2012	Sewa sampai tanggal 06 Mei 2020
263.	KCP Kuansing Ahmad Yani	Jl. Ahmad Yani No. 32, Kuantan Singingi, Riau	15/4/DPbS/IDAbs/Pbr	8 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 19 November 2018

No	Nama Kantor	Alamat	Izin Bank Indonesia/Departemen Keuangan/Otoritas Jasa Keuangan (OJK)		Status Kantor
			No.	Tanggal	
264.	KCP Pelalawan Maharaja	Jl. Lintas Timur, Ruko M. Saher No.1, Pangkalan Kerinci, Riau	15/9/DPbS/IDAbs/Pbr	28 Maret 2013	Sewa sampai tanggal 31 Januari 2019
265.	KK Pekanbaru Uinsuska	Gedung PKM UIN Suska Riau Kampus Raja Ali Haji Jl. H.R. Soebrantas, Km.15, Pekanbaru	15/24/DPbS/IDAbs/Pbr	17 Juni 2013	Sewa sampai tanggal 01 Februari 2023
266.	KC Bandar Lampung (Kedaton)	Jl. Teuku Umar, Bandar Lampung	S-186/PB.131/2017	14 November 2017	Milik Perseroan
267.	KCP Lampung Bandar Jaya	Jl. Proklamator No.112, Lampung Tengah	14/43/DPbS/Bdl	28 September 2012	Sewa sampai tanggal 23 Mei 2020
268.	KCP Lampung Metro	Jl. Jend. AH Nasution No. 1, Metro Pusat	S-7/KO.07412/2016	18 Agustus 2016	Sewa sampai tanggal 30 Maret 2021
269.	KCP Lampung Natar	Jl. Raya Natar No. 19, Km. 21, Lampung Selatan	15/14/DPbS/Bdl	21 Agustus 2013	Milik Perseroan
270.	KCP Lampung Pringsewu	Jl. K.H. Gholib, Pringsewu	14/43/DPbS/Bdl	28 September 2012	Sewa sampai tanggal 01 Juni 2018
271.	KCP Lampung Sribhawono	Jl. Raya Srimenanti, Lampung Timur	14/43/DPbS/Bdl	28 September 2012	Sewa sampai tanggal 14 Mei 2020
272.	KCP Tulang Bawang Barat	Jl. Jenderal Sudirman No. 206, Tulang Bawang Barat	15/14/DPbS/Bdl	21 Agustus 2013	Sewa sampai tanggal 31 Maret 2020

*KK Tangerang Pasar Curug sudah tidak beroperasi secara aktif

Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan:

Tahun	Peristiwa Penting
1969	Pendirian Perseroan dengan nama PT Bank Djasa Artha
1994	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Jasa Arta
1997	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Panasia Internasional
2003	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Jasa Arta
2008	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank Syariah BRI pasca akuisisi oleh BRI
2009	Perubahan nama Perseroan menjadi PT Bank BRISyariah

2. Perkembangan Kepemilikan Saham dan Permodalan Perseroan Selama 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tahun 2015

Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 1 tanggal 4 Agustus 2015, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 1/2015**"), sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari sebesar Rp1.479.000.000.000 menjadi sebesar Rp1.979.000.000.000 yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0954202 tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3537574.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3537574.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015.

Dengan adanya peningkatan modal ditempatkan/disetor sebagaimana diuraikan di atas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	10.000.000.000	5.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.957.999.000	1.978.999.500.000	99,99997
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.000	500.000	0,00003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.958.000.000	1.979.000.000.000	100,00000
Jumlah Saham Dalam Portepel	6.042.000.000	3.021.000.000.000	

Selama tahun 2016 dan 2017, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

Tahun 2018

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari sebesar Rp5.000.000.000.000 menjadi Rp7.500.000.000.000 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.

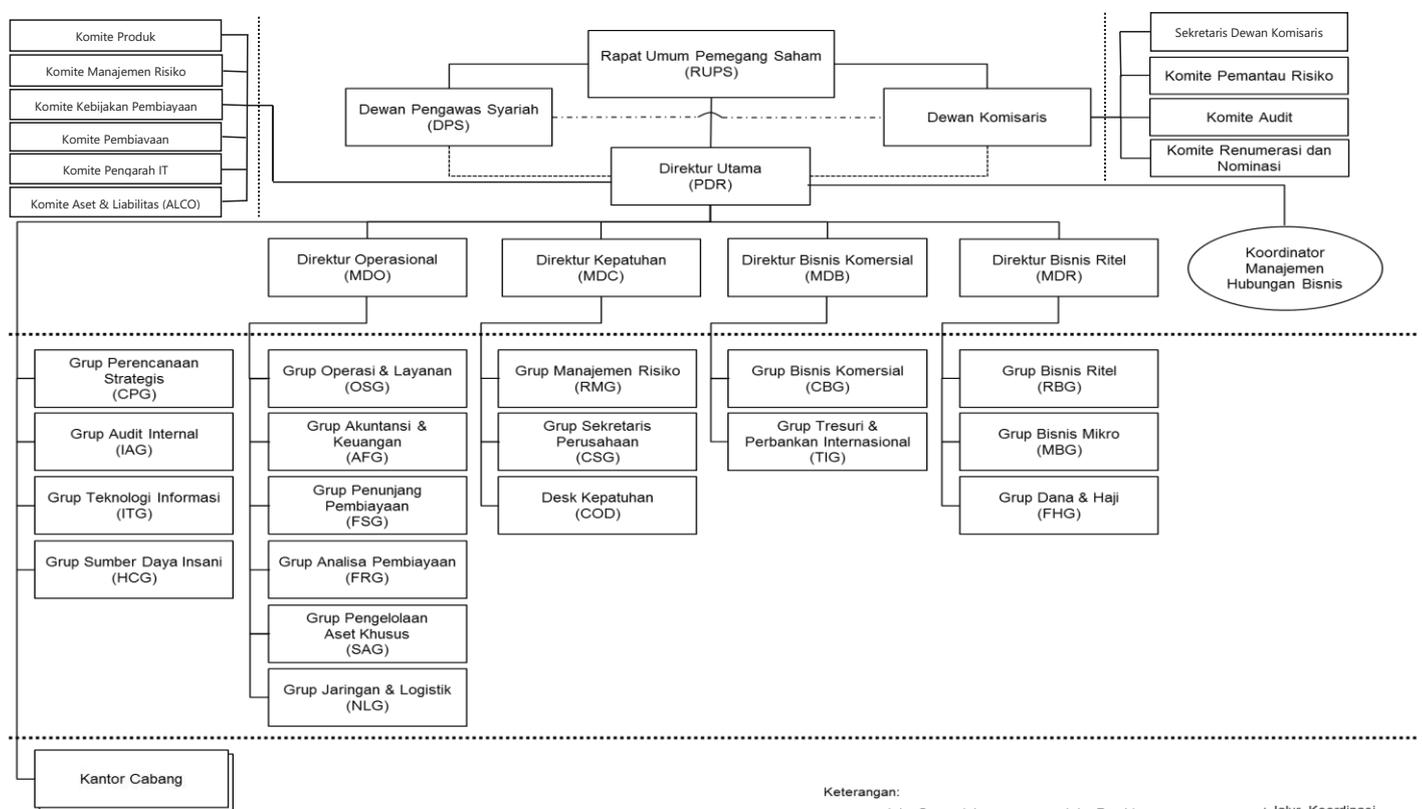
Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.957.999.000	1.978.999.500.000	99,99997
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.000	500.000	0,00003
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.958.000.000	1.979.000.000.000	100,00000
Jumlah Saham Dalam Portepel	11.042.000.000	5.521.000.000.000	

Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 2/2018**") yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018.

Keterangan	Nilai Nominal Rp500 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar			
Jumlah Modal Dasar	15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,99998
2. Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.243	621.500	0,00002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.092.762.898	3.546.381.449.000	100,00000
Jumlah Saham Dalam Portepel	7.907.237.102	3.953.618.551.000	

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan pemegang saham setelah Akta No. 2/2018.

3. Struktur Organisasi Perseroan



4. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Akta No. 8/2018 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0002437 tanggal 10 Januari 2018, yang memuat mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen	:	Hermanto Siregar
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Eko Suwardi*
Komisaris	:	Fahmi Subandi*

Direksi

Direktur Utama	:	Mochammad Hadi Santoso
Direktur	:	Kokok Alun Akbar*
Direktur	:	Widodo Januarso*
Direktur	:	Agus Katon Eko S
Direktur Independen	:	Wildan

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test).

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah diangkat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Bank Indonesia yang berlaku yaitu Peraturan Bank Indonesia No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya (Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar).

Anggota Direksi Perseroan diangkat oleh rapat umum pemegang saham. Pengangkatan anggota Direksi harus mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan mereka, tanpa mengurangi hak rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu (Pasal 12 ayat 2 dan 4 Anggaran Dasar).

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

1. Dewan Komisaris

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

2. Direksi

Direksi merupakan organ yang menjalankan pengelolaan BRISyariah serta bertanggung jawab terhadap pencapaian usaha dan wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan Direktur Utama wajib mempunyai independensi terhadap Pemegang Saham Pengendali. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi mengacu pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan, termasuk rapat gabungan dengan Direksi. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melakukan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, Rapat Koordinasi Dewan Komisaris dan Direksi 12 (dua belas) kali dan rapat dengan pemangku kepentingan lainnya.

Adapun rapat lain yang diadakan Dewan Komisaris selama tahun 2017, antara lain:

- a. Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi dan beberapa komite Perseroan
- b. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang membahas:
 - Pembahasan Laporan Keuangan untuk tahun buku 2016
 - Pergantian Direksi
- c. Pembahasan Usulan RBB Tahun 2018

Rekapitulasi Rapat Dewan Komisaris Tahun 2017:

Nama Rapat	Jumlah Rapat	Peserta Rapat	Presentasi Tingkat Kehadiran
Rapat Dewan Komisaris dengan Direksi	3	Indra Kesuma*	100%
	12	Hermanto Siregar	67%
	12	Komaruddin Hidayat	92%
	6	Anggito Abimanyu*	67%
	12	Eko B Suharno*	100%
	2	Eko Suwardi	100%
Rapat Komite Pemantau Risiko	11	Hermanto Siregar	91%
	4	Komaruddin Hidayat	75%
	1	Anggito Abimanyu*	100%
	11	Eko B Suharno*	100%
	2	Eko Suwardi	100%
Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi	2	Hermanto Siregar	100%
	2	Komaruddin Hidayat	100%
	2	Miftahul Ulum (<i>Human Capital Group Head</i>)	100%
Rapat Komite Audit	4	Indra Kesuma*	100%
	7	Hermanto Siregar	71%
	7	Komaruddin Hidayat	100%
	5	Anggito Abimanyu*	20%
	5	Eko B Suharno*	100%
	2	Eko Suwardi	100%

*) sudah tidak menjabat sebagai anggota Komisaris

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

Sampai dengan 2017, Dewan Komisaris telah menghadiri dan berpartisipasi dalam pelatihan sebagai berikut:

Topik Pelatihan	Tempat dan tanggal	Peserta
Komisaris Profesional "Menjadi Komisaris yang Kompeten dan Bertanggung Jawab"	Jakarta, 4-5 Okt 2017	Hermanto Siregar
		Eko B. Suharno*
		Komaruddin Hidayat
Executive Overview Of Islamic Bank	Jakarta, 27-28 Des 2017	Eko Suwardi
Manajemen Risiko Level 1 Komisaris	Jakarta, 23 Des 2017	Eko Suwardi

*) sudah tidak menjabat sebagai anggota Komisaris

Rapat dan Kehadiran Direksi

Rekapitulasi Rapat Direksi pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Hadir	Presentasi Tingkat Kehadiran
Moch Hadi Santoso	21	19	90%
Agus Katon	21	18	86%
Wildan	21	19	90%
Indra Praseno*	21	15	71%
Erdianto Sigit*	5	2	40%
Hilman Purakusumah*	16	9	56%

*) sudah tidak menjabat sebagai anggota Direksi

Pelatihan untuk Direksi

Sampai dengan 2017, Direksi telah menghadiri dan berpartisipasi dalam pelatihan sebagai berikut:

Topik Pelatihan	Tempat dan tanggal	Peserta
Risk Management Certification Refresher Program : Refocusing On Credit Risk Management, Credit Risk Model, Pricing and Being Prepared For Upcoming Regulations oleh Banker Association for Risk Management (BARa)	Jakarta, 23-24 Maret 2017	Moch Hadi Santoso
Media Skills Training	Jakarta, 14 Nov 2017	Moch Hadi Santoso
Sustainable Finance sebagai Instrumen Kunci Pencapaian Sustainable Development Goals - OJK	Bali, 12 Juli 2017	Agus Katon
Media Skills Training	Jakarta, 14 Nov 2017	Agus Katon
Arah Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) Serta Perlindungan Konsumen di Sektor Perbankan - FKDKP	Jakarta, 07 Des 2017	Agus Katon
Living Wills, Planning for Bank Recovery and Resolution Workshop oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)	London, 10-11 April 2017	Wildan
he Growth Game Changer : Digital Economy, Financial Inclusion, and Accounting Roles oleh International Accounting Conference	Yogyakarta, 27-29 Agustus 2017	Wildan
Media Skills Training	Jakarta, 14 Nov 2017	Wildan
Uji Kompetensi Bidang Manajemen Risiko Level 5	Jakarta, 6 Mei 2017	Hilman Purakusumah*
Media Skills Training	Jakarta, 14 Nov 2017	Hilman Purakusumah*
Risk Management Certification Refresher Program	Jakarta, 23-24 Maret 2017	Indra Praseno*
Treasury Dealer	Jakarta, 25 Maret 2017	Indra Praseno*

*) sudah tidak menjabat sebagai anggota Direksi

Dewan Pengawas Syariah

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 33 tanggal 18 April 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0136-0136847 tanggal 17 Mei 2017 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0063105.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 17 Mei 2017, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc.
 Anggota : M. Gunawan Yasni, SE. Ak., M.M., CIFA, FIIS

Dewan Pengawas Syariah berperan mengawasi agar seluruh produk dan jasa yang ditawarkan serta kegiatan operasi perbankan Perseroan berjalan sesuai dengan ketentuan syariah.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbankan syariah, tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Perseroan ialah sebagai berikut:

- Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Perseroan;
- Mengawasi proses pengembangan produk baru Perseroan agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia;
- Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Perseroan yang belum ada fatwanya;
- Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Perseroan;
- Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Perseroan dalam rangka pelaksanaan tugasnya;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan dewan pengawas syariah secara semesteran;
- Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip syariah di pasar modal;
- Mengawasi pemenuhan penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan usaha Perseroan;
- Melakukan penelaahan secara berkala atas penerapan prinsip syariah di pasar modal terhadap kegiatan usaha Perseroan;
- Memberikan peringatan tertulis kepada Direksi Perseroan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah ditemukannya penyimpangan dan meminta Direksi untuk segera melakukan upaya perbaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya peringatan tertulis tersebut, dengan tembusan kepada OJK dan Dewan Komisaris Perseroan;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan yang diawasi dan diberi nasihat;
- Meminta data dan informasi kepada perusahaan dalam rangka pengawasan pelaksanaan penerapan prinsip syariah di pasar modal;
- Mendampingi perusahaan atau mewakili perusahaan dalam berdiskusi dengan Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia;
- Memberikan pernyataan kesesuaian syariah terhadap prinsip syariah di pasar modal atas produk atau jasa syariah di pasar modal;
- Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah oleh Perseroan; dan
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi Perseroan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah.

Adapun keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS



Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec., Komisaris Utama/Independen, (54 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Pertanian/Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 1986, gelar Master dari Jurusan Agricultural Economics, University of New England, Australia, pada tahun 1991, gelar Ph.D dari Jurusan Economics, Lincoln University, New Zealand, pada tahun 2001.

Pengalaman kerja:

- 2015-2018 : Komisaris Independen Perseroan
- 2014-2015 : Penasihat (Tenaga Ahli) Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia
- 2011-2015 : Komisaris BRI
- 2010-2014 : Anggota Komite Ekonomi Nasional
- 2008-sekarang : Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor
- 2007-2009 : Anggota Forum Masyarakat Statistik, Republik Indonesia
- 2007-2011 : Komisaris Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 2006-2007 : Komisaris Independen PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 2007-sekarang : Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB)
- 1988-sekarang : Dosen Institut Pertanian Bogor

Komaruddin Hidayat, Komisaris Independen, (64 tahun)



Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Master dari Jurusan Filsafat, Middle East Technical University (METU), Turki, pada tahun 1990 dan gelar Doktor dari Jurusan Filsafat, Middle East Technical University (METU), Turki, pada tahun 1992.

Pengalaman kerja:

- 2011-2015 : Komisaris Independen Bank Syariah Mandiri
- 2006-2014 : Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

Eko Suwardi, Komisaris Independen, (54 tahun)



Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017.

Memperoleh gelar Sarjana dari jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 1987, gelar *Master* dari Jurusan *Science in Accountancy*, California State University, Fresno, USA, pada tahun 1994 dan gelar Doktor dari Jurusan *Philosophy in Business (Accounting)*, Queensland University of Technology, Australia, pada tahun 2005.

Pengalaman kerja:

- 2017-sekarang : Ketua ISEI Cabang Yogyakarta
- 2017-sekarang : Chairman of ASEAN University Network “Business and Economics”
- 2017-2018 : Member of Asia Pacific Council of AACSB
- 2016-sekarang : Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- 2015-sekarang : Ketua Forum Dosen Perpajakan Indonesia
- 2012-2016 : Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Sistem Informasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- 2008-2012 : Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
- 2006-sekarang : Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2005-2008 : Kepala Audit Internal Universitas Gadjah Mada

1995-2000 : Wakil Direktur Program Diploma Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada

Fahmi Subandi, Komisaris, (57 tahun)



Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 1987 dan gelar Master dari Jurusan Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Indonesia, pada tahun 1999.

Pengalaman kerja:

2016-2017 : Kepala Divisi Manajemen Risiko PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2014-2016 : Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2013-2014 : Pj. Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2008-2013 : Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2006-2008 : Pj. Wakil Kepala Divisi Akuntansi Manajemen & Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2005-2006 : Kepala Bagian Kebijakan Akuntansi Divisi AMK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2001-2005 : Kepala Bagian Pengawasan dan Pengendalian Akuntansi Divisi AMK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
1991-2001 : Staf Madya 2 Divisi TSI PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

DIREKSI

Mochammad Hadi Santoso, Direktur Utama (60 tahun)



Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2012.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Ekonomi Perusahaan, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Indonesia, pada tahun 1984, gelar Magister Manajemen dari Jurusan Ilmu Manajemen, Universitas Indonesia, Indonesia, pada tahun 1999 dan merupakan kandidat Doktor dari Jurusan Manajemen dan Bisnis pada Institut Pertanian Bogor.

Pengalaman kerja:

2009-2011	: Pemimpin Wilayah, Kantor Wilayah Bandung BRI
2009-2009	: Kepala Divisi, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel Kantor Pusat BRI
2007-2009	: Pj. Kepala Divisi, Divisi Jaringan Kerja Bisnis Ritel Kantor Pusat BRI
2002-2007	: Wakil Pemimpin Wilayah BRI
2001-2002	: Pemimpin Cabang BRI
1999-2001	: Kepala Bagian, Bagian Pembelian & Administrasi Logistik Kantor Pusat BRI
1998-1999	: Kepala Bagian, Bagian Pembelian Kantor Pusat BRI
1995-1998	: Kepala Bagian, Bagian Peng. & Perlengkapan Kantor Pusat BRI
1995	: Wakil Kepala Bagian Memimpin Bagian Kantor Pusat BRI
1992-1995	: Pj. Pemimpin Cabang Batusangkar Kantor Wilayah Padang BRI
1991-1992	: Manajer Operasional II Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung BRI
1991	: Manajer Operasional I Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung BRI
1990-1991	: Staf II Bandung Naripan Kantor Wilayah Bandung BRI
1987-1990	: Staf I Banjarmasin Kantor Wilayah Banjarmasin BRI
1986-1987	: <i>Trainee</i> Banjarmasin Kantor Wilayah Banjarmasin BRI
1985-1986	: Siswa Madiun Kantor Wilayah Surabaya BRI

Kokok Alun Akbar, Direktur Bisnis, (51 tahun)



Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional Veteran di Surabaya, Indonesia, pada tahun 1984.

Pengalaman kerja:

- 2016-2017 : Kepala Divisi Bisnis BUMN 2 – PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 2012-2016 : Wakil Kepala Divisi Bisnis BUMN 2 - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 2010-2012 : *Group Head* Divisi Agribisnis - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 2008-2010 : Pemimpin Cabang KC Muara Teweh - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 2005-2008 : *Senior Account Officer* - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 1999-2004 : *Account Officer Group* Kredit Umum - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 1998-1999 : *Account Officer* Divisi Kredit Korporasi - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 1997-1998 : *Account Officer* KC BRI Jakarta - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 1995-1997 : *Account Officer* KC BRI Surakarta - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 1993-1995 : *Account Officer* KC BRI Balikpapan - PT Bank BRI (Persero) Tbk
- 1992-1993 : *Trainee* KC BRI Majalaya Bandung - PT Bank BRI (Persero) Tbk

Drs. Wildan, Ak., Direktur Operasional, (56 tahun)



Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Andalas Padang, Indonesia, pada tahun 1987.

Pengalaman kerja:

- 2014-2015 : Direktur Kepatuhan Perseroan
- 2012-2014 : *Financing Support Group Head* Perseroan
- 2009-2012 : *Special Asset Management Group Head* Perseroan
- 2008-2009 : *Syariah Branch Channel Head & Trainer for Islamic Banking Course* BII Syariah
- 2006-2007 : *Advisor for Corporate & Commercial Banking Director* BII Syariah
- 2003-2005 : *Deputy Division Head of* BII Syariah Platinum Access
- 2002-2003 : *Main Branch Manager* Bank Syariah Mandiri
- 2001-2002 : *Division Head of Commercial, Medium and Small Business, Branch Supervision and Asset Product Development* Bank Syariah Mandiri
- 2000-2001 : *Deputy Division Head of Commercial, Medium and Small Business* Bank Syariah Mandiri
- 1999-2000 : *Branch Manager* Bank Duta
- 1998-1999 : *Deputy Branch Manager* Bank Duta

- 1997-1998 : *Retail Banking and Remedial Unit Head, Instructor of Account Manager Training, Chairman of Koperasi Mitra Duta Bank Duta*
- 1995-1997 : *Retail Banking Unit Head Bank Duta*
- 1993-1995 : *Account Manager Commercial Bank Duta*
- 1989-1993 : *Account Manager Consumer, Commercial Bank duta*
- 1988-1989 : *Auditor Kantor Akuntan Dr. Mochtar Talib Padang*

Agus Katon, Direktur Kepatuhan, (57 tahun)



Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Ekonomi Manajemen, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 1984 dan gelar Magister Sains dari Jurusan Pertanian Agribisnis, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, pada tahun 2006.

Pengalaman kerja:

- 2012-2015 : Kepala Divisi Kebijakan & Pengembangan Bisnis Mikro BRI
- 2012-2015 : Komisaris PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
- 2011-2012 : Pemimpin Wilayah BRI Semarang
- 2010-2011 : Pemimpin Wilayah BRI Banjarmasin
- 2010-2010 : Inspektur, Kantor Inspeksi Bandung BRI
- 2009-2010 : Kepala Divisi Bisnis Umum Kantor Pusat BRI
- 2008-2009 : Pj. Kepala Divisi Bisnis Umum Kantor Pusat BRI
- 2006-2008 : Inspektur, Kantor Inspeksi Padang BRI
- 2005-2006 : Wakil Pemimpin Wilayah Kantor Wilayah Semarang BRI
- 2004-2005 : Wakil Inspektur, Kantor Inspeksi Surabaya BRI
- 2001-2004 : Pemimpin Cabang Jepara Kantor Wilayah Semarang dan Yogyakarta BRI
- 1999-2001 : Pemimpin Cabang Tabanan Kantor Wilayah Denpasar BRI
- 1997-1999 : Pemimpin Cabang Payakumbuh Kantor Wilayah Padang BRI
- 1996-1997 : Kepala Bagian Pelayanan Pinjaman Kantor Cabang Khusus BRI
- 1992-1996 : Wakil Kepala Bagian Memimpin Bagian Pelayanan Pinjaman Kantor Cabang Khusus BRI
- 1991-1992 : Wakil Kepala Bagian Pelayanan Pinjaman Kantor Cabang Khusus BRI
- 1989-1991 : Asisten Manajer Kredit Umum Kantor Cabang Khusus BRI
- 1986-1989 : Staf 1 & 2 Kredit (*Account Officer*) Umum Kantor Cabang Khusus Jakarta BRI
- 1985-1986 : Siswa Calon Staff (CSP) IX BRI
- 1984 : Staff Divisi Usaha PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT PANN)

Widodo Januarso, Direktur Bisnis Ritel, (55 tahun)



Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Ritel Perseroan sejak tahun 2018.

Memperoleh gelar Sarjana dari Jurusan Akuntansi, Universitas Brawijaya, Indonesia, pada tahun 1987 dan gelar Master dari Jurusan *Managerial Accounting*, Saint Louis University, Amerika Serikat, pada tahun 1994.

Pengalaman kerja:

- 2016-2018 : *Executive Vice President* (EVP) Pimpinan Wilayah BRI Jakarta 3
- 2015-2016 : EVP Pimpinan Wilayah BRI Yogyakarta
- 2014-2015 : EVP Pimpinan Wilayah BRI Denpasar
- 2011-2013 : EVP Kepala Divisi Dana dan Jasa BRI
- 2010-2011 : *Senior Vice President* (SVP) Kepala Desk Priority Banking BRI
- 2007-2009 : *Vice President* (VP) Wakil Kepala Divisi Dana Jasa Konsumer Kantor Pusat BRI
- 2005-2006 : Pimpinan cabang BRI Balikpapan
- 2003-2005 : Pimpinan Cabang BRI Wonogiri
- 2001-2002 : *Senior Manager* Kepala Bagian Pemasaran Divisi Dana Ritel Kantor Pusat BRI
- 1999-2000 : *Manager* Kepala Bagian Hubungan Lembaga Divisi Dana Ritel Kantor Pusat BRI
- 1997-1998 : *Assistant Manager* Divisi Organisasi Kantor Pusat BRI
- 1994-1996 : Tugas Belajar Program *Master Degree* di Saint Louis University Missouri USA, MBA *Concentration in Managerial Accounting*
- 1992-1993 : Wakil Pemimpin Cabang BRI Jakarta Veteran
- 1988-1992 : *Account Officer* Bisnis Komersial Kantor Pusat BRI

DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc., Ketua Dewan Pengawas Syariah, (66 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tahun 2010.

Menyelesaikan studinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan memperoleh gelar Doktor pada Jurusan Ilmu Agama/Pengkajian Islam (Zakat) pada tahun 2001.

Pengalaman kerja:

- 2015-sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani Ventura Syariah
- 2014-sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri AXA General Insurance
- 2010-sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 2010-2015 : Wakil Ketua Pleno DSN MUI
- 2008-2010 : Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank BRISyariah
- 2005-2011 : Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Syarikat Takaful Indonesia
- 2004-2015 : Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI
- 2002-2010 : Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- 2001-2010 : Anggota Pleno DSN MUI
- 2001-2010 : Dosen Institut Pertanian Bogor
- 2000-2008 : Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Bank Bukopin Syariah
- 1992-sekarang : Ketua Dewan Pengawas Syariah PT BPRS Amanah Ummah Bogor
- 1980-sekarang : Guru Besar Institut Pertanian Bogor



Muhammad Gunawan Yasni, SE. Ak., MM., CIFA, FIIS, CRP - Anggota Dewan Pengawas Syariah, (48 tahun)

Warga Negara Indonesia. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan sejak tahun 2008.

Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Akuntansi, Universitas Indonesia, Indonesia, pada tahun 1993, gelar Magister Manajemen (MBA) dari Jurusan Keuangan, Prasetya Mulya Graduate School of Management, Indonesia, pada tahun 1995.

Pengalaman kerja:

- 2015-sekarang : *Sharia Advisor/Expert in Capital Market Manulife Asset Management Indonesia*
- 2015-2017 : *Member of Sharia Supervisory Board Sharia Rural Bank Harta Insan Karimah*
- 2010-sekarang : *Evaluator in fit and proper test conducted by Ministry of Finance/Financial Services Authority for Insurance & Non Banking Industry*
- 2009-2017 : *Advisor-Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking*

2007-2012	: <i>Member of Sharia Supervisory Board</i> Indonesia Exim Bank
2007-2007	: <i>Advisor</i> Batasa Group
2006-sekarang	: <i>Member of National Sharia Board</i>
2006-2016	: <i>Member of Sharia Supervisory Board</i> Jaminan Kredit Indonesia
2006-2009	: <i>Member of Sharia Supervisory Board</i> Deutsche Bank Sharia Custodian & Investment Banking
2004-2005	: <i>Member of Sharia Supervisory Board</i> SIMAS Sharia Insurance
2003-sekarang	: <i>Head of Sharia Supervisory Board</i> Astra Buana Sharia Insurance
2003-sekarang	: <i>Member of National Sharia Board</i> MUI
2003-2007	: <i>Member of Sharia Supervisory Board</i> Batasa Sharia Fund
2003-2003	: <i>Advisor</i> Batasa Capital
2002-2008	: <i>Partner</i> Batasa Tazkia
2001-sekarang	: <i>Lecturer on Various Financial Subjects</i> Universitas Indonesia (<i>Post Graduate Studies</i>)
2000-2002	: <i>Deputy Head of Product Development</i> Bahana Artha Ventura
1999-2000	: <i>Deputy Investment Manager</i> Bahana Artha Ventura

REMUNERASI DAN KOMPENSASI

Total remunerasi yang diterima oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, masing-masing sebesar Rp4.815.499.305,-, Rp 4.464.937.202,-, dan Rp4,709.000.000,- , sedangkan total remunerasi yang diterima oleh Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, masing-masing sebesar 12.095.890.842,- , Rp9.771.717.406,- ,dan Rp7.503.000.000,-.

Pemberian tantiem kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, dan dibayarkan secara tahunan berdasarkan pencapaian target kinerja yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

KOMITE AUDIT

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan yang telah diangkat berdasarkan SK Dewan Komisaris No. KEP.B.047-PDR/10-2017 tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebagai berikut:

Ketua Komite Audit	: Komaruddin Hidayat
Anggota Komite Audit	: Hermanto Siregar

Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2017.

Memperoleh gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1986, Pasca Sarjana dari University of New England (UNE) Fakultas/Jurusan *Agricultural Economic* pada tahun 1991 dan gelar Doktor dari Lincoln University New Zealand fakultas Economics pada tahun 2001.

Ismir Kamili

Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015. Sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan (2014).

Memperoleh gelar Sarjana Teknik dari Jurusan Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung pada tahun 1998.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai *core banking implementator* pada PT Ihsan Solusi Informatika dan sebagai konsultan lepas pada bidang perbankan dan sistem pembayaran.

Widuri Meintari Kusumawati

Ditunjuk sebagai salah satu anggota Komite Audit Perseroan sejak tahun 2015.

Memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2000.

Beliau pernah menjabat sebagai anggota Komite Evaluasi dan Monitoring Perencanaan dan Risiko PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. (2004-2013), Compliance & Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) PT Bank Syariah Mandiri (2002-2004), dan Asisten Staf Ahli Pasar Modal Departemen Keuangan RI (2000-2002).

Pedoman Kerja Komite Audit

Perseroan telah memiliki Pedoman Kerja Komite Audit. Berikut merupakan keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab dari Komite Audit berdasarkan Pedoman Kerja Komite Audit yang telah ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Oktober 2017.

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Pengendalian Internal dan Audit Bank serta pelaksanaannya, membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan yang berkaitan dengan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan antara lain yaitu :

- a. Melaksanakan pemantauan atas tindak lanjut audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan audit dan pemantauan tindak lanjut. Evaluasi dilakukansetiap bulanberdasarkan laporan hasil audit yang disampaikan setiap bulan oleh SKAI kepada Dewan Komisaris;
- c. Mengkaji kecukupan dan fungsi audit internal, termasuk jumlah auditornya, rencana kerja tahunan, dan pekerjaan yang telah dilaksanakan serta tindak lanjut atas setiap temuan audit internal;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku;
- e. Melakukan review tahunan atas kecukupan pengendalian internal dalam *Standar Operation Procedure* atas setiap proses bisnis Perseroan;
- f. Membuat Pedoman Kerja Komite dan menyempurnakan / menyesuaikannya dari waktu ke waktu;
- g. Melakukan penelaahan atas kualitas pengendalian internal / hasil audit yang disampaikan kepada Bank Indonesia / OJK;
- h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia / OJK;
- i. Melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perbankan serta peraturan perundang-undangan lainnya;

- j. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan;
- k. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- l. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- m. Dalam rangka terselenggaranya prinsip *Good Corporate Governance* tugas dan tanggungjawab Komite Audit mencakup:
 - (i) Mendorong upaya yang berkelanjutan penerapan tata kelola perusahaan yang mencakup Kewajaran (*Fairness*), Transparansi (*Transparency*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Pertanggungjawaban (*Accountability*) dan Independensi (*Independency*);
 - (ii) Mengupayakan tetap terselenggaranya Struktur Pengendalian Internal Perseroan yang memadai;
 - (iii) Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan atau non-keuangan Perseroan;
 - (iv) Mengkaji cakupan kerja eksternal audit dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya;
- n. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, laporan tahunan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- o. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- p. Menyiapkan laporan semesteran Dewan Komisaris tentang pengawasan rencana bisnis Perseroan kepada OJK.

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Piagam Komite Audit Perseroan, rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Seluruh rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Daftar Kehadiran dan rapat anggota Komite Audit selama 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Tingkat Kehadiran/Jumlah Rapat (%)
Indra Kesuma*	4	4	100%
Hermanto Siregar	7	5	71%
Komaruddin Hidayat	7	7	100%
Anggito Abimanyu*	5	1	20%
Eko B Suharno*	5	5	100%
Eko Suwardi	2	2	100%

Audit Internal

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyusun Piagam Unit Audit Internal dan ditetapkan berdasarkan Surat Persetujuan Komisaris tertanggal 30 Desember 2015 tentang "Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) PT Bank BRISyariah", dimana isi dari Piagam Unit Audit Internal tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini pada pasar modal yaitu Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

Perseroan telah mengangkat Mohammad Erfan sebagai Pj. Internal Audit Group Head/Kepala Audit Internal terhitung sejak tanggal 8 Desember 2014 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 200-PDR/12-2014 tanggal 15 Desember 2014.

Tanggung jawab Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan.
2. Merencanakan dan melaksanakan audit dengan penekanan pada bidang/aktivitas yang terdapat risiko tinggi serta mengevaluasi efektivitas prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai dengan optimal.
3. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan melaporkan kepada Direktur Utama dan Komisaris Utama.
4. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, teknologi informasi dan kegiatan lainnya, termasuk pemenuhan prinsip syariah melalui pemeriksaan langsung (*on site*) dan pengawasan secara tidak langsung (*off site*).
5. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
6. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
7. Menyampaikan laporan hasil audit kepada :
 - a. Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Auditee dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
 - b. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengenai pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit termasuk hasil audit yang bersifat rahasia setiap akhir bulan Juni dan Desember selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan, yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama.
Dalam hal terdapat kejadian/peristiwa yang berdampak material dan atau signifikan bagi Bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris harus segera melaporkannya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.
Penyampaian laporan audit kepada pihak ketiga hanya dapat diberikan atas permintaan tertulis yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Utama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain mengenai kerahasiaan dan penggunaan data atau informasi nasabah.
8. Satuan Kerja Audit Intern memeriksa dan mengevaluasi atas kecukupan dan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian internal serta penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) termasuk pemenuhan prinsip syariah dan kualitas pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab Manajemen Lini.
9. Memeriksa semua kelemahan dan/atau potensi kelemahan pada Manajemen Lini, meliputi kebijakan, prosedur maupun kegiatan operasional perusahaan dengan memberikan peringkat risiko (*risk rating*), yang terdiri dari peringkat risiko tinggi, risiko sedang atau risiko rendah, yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Jika terdapat kelemahan dan/atau potensi kelemahan yang berisiko tinggi ataupun sedang, diskusikan dengan manajer lini dengan cara:
 - a. Menginformasikan sifat dan dampak dari kelemahan sistem pengendalian internal yang ditemukan terhadap operasional bisnis.
 - b. Memberikan solusi praktis untuk memperbaiki kelemahan tersebut.
10. Memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Fungsional (RKF) Bank untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan bisnis Bank dapat berjalan dengan lancar.
11. Menyerahkan hasil audit kepada pihak internal dan eksternal secara tepat waktu sesuai dengan kebijakan, peraturan dan prosedur yang berlaku.
12. Menjaga hubungan baik dalam rangka koordinasi dengan Auditee, Eksternal Auditor dan pihak ketiga dalam pelaksanaan kerja Audit Intern.

Wewenang Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kewenangan untuk melakukan akses terhadap seluruh informasi dan atau data yang berkaitan dengan catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan audit dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Melakukan komunikasi secara langsung kepada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan atau Komite Audit serta anggota dari Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan atau Komite Audit.
3. Menyusun dan merevisi Kebijakan Dasar Audit Intern, Kebijakan Umum Audit Intern, Pedoman Audit Intern, dan Prosedur Audit Intern sesuai dengan perubahan lingkungan eksternal/internal dan kebutuhan Audit Intern Bank.

4. Melakukan investigasi terhadap kasus atau permasalahan pada setiap aspek, sumber daya dan unsur fraud atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan risiko atau membahayakan bagi Bank dan atau nasabah maupun hilangnya suatu kesempatan bagi Bank.
5. Melakukan pengelolaan Whistle Blowing System (WBS) terhadap seluruh pengaduan terkait dengan kejadian fraud atau hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi Bank dan atau nasabah.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Komite Pemantau Risiko membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG (*Good Corporate Governance*), anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko, yang pada tanggal Prospektus ini susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.KEP:B.042-PDR/09-2017 tanggal 22 September 2017 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Bank BRISyariah, yaitu sebagai berikut:

- Ketua : Hermanto Siregar merangkap sebagai Komisaris Independen
Anggota : Komaruddin Hidayat merangkap sebagai Komisaris Independen

Saiful Anwar

Warga Negara Indonesia, umur 40 tahun. Meraih gelar *Doctor* dari jurusan *Information Science* di Nagaoka University of Technology, Jepang, pada tahun 2012.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai *visiting researcher* di Bank Indonesia (sejak tahun 2012), postgraduate program lecturer (sejak tahun 2012), juga pernah menjabat sebagai *section head of quality assurance at operational and accounting division* pada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2005 - 2008, sebagai officer development program pada PT Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2001 - 2002, dan sebagai junior accounting pada BPPN pada tahun 2000 - 2001.

Tjut Meutia Imelda Tenriwali

Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun. Meraih gelar Magister Sains dari jurusan Perbankan Syariah di Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Beliau pernah menjabat sebagai *Head Division of The Product, Risk Management and Recovery* pada PT Bank Mandiri Taspen Pos pada tahun 2011-2013, sebagai *Retail Audit Team Leader* pada PT Bank BTPN Tbk pada tahun 2011, sebagai *Head Department of Consumer Financing* pada PT Bank Syariah Mandiri pada tahun 2007 - 2010.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Tugas Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen secara tahunan;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
 - c. Melakukan evaluasi atas laporan profil risiko triwulanan Perseroan dan pelaksanaan proses manajemen risiko, untuk selanjutnya memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas kondisi risiko yang dihadapi oleh Perseroan serta usulan langkah-langkah

- untuk mitigasi atas risiko-risiko tersebut sehingga Dewan Komisaris dapat memberikan masukan untuk langkah perbaikan kepada Direksi apabila diperlukan;
- d. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko;
 - e. Mengevaluasi hasil pemantauan Direksi terhadap kegiatan usaha Bank Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
 - f. Mengevaluasi hasil pemantauan atas kepatuhan Perseroan terkait pelaksanaan manajemen risiko terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Direksi kepada Bank Indonesia;
 - g. Melakukan evaluasi dan memberikan masukan dari segi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris terhadap permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar untuk pengambilan keputusan;
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, yang mencakup hal-hal sebagai berikut :
 - i) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management* didalam perusahaan;
 - ii) Melakukan penelaahan atas informasi yang berkaitan dengan manajemen risiko dalam laporan-laporan yang akan dipublikasikan perusahaan;
 - iii) Memberikan masukan dalam proses pelaksanaan seleksi dan mengusulkan calon konsultan manajemen risiko independen, serta mengawasi pekerjaan konsultan manajemen risiko independen termasuk mengusulkan pemberhentiannya apabila dalam pelaksanaan tugasnya dianggap tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku.
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 - j. Melakukan *self-evaluation* terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan memutakhirkan secara periodik Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko.
2. Tanggung jawab Komite Pemantau Risiko mencakup :
- a. Melakukan evaluasi tentang kebijakan manajemen risiko;
 - b. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa Perseroan telah mengelola risiko-risiko secara memadai;
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, untuk selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.

KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

Komite Remunerasi dan Nominasi merupakan Komite di tingkat Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya hal-hal terkait dengan kebijakan remunerasi dan nominasi.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang GCG, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan karyawan.

Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen. Tidak ada anggota Direksi yang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi. Susunan, komposisi dan kriteria independensi dari Komite Remunerasi dan Nominasi telah sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada

tanggal 8 Desember 2014 dan Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah, susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan sebagai berikut:

Ketua : Hermanto Siregar merangkap sebagai Komisaris Independen
Anggota : 1. Komaruddin Hidayat merangkap sebagai Komisaris Independen
2. Miftahul Ulum sebagai *Human Capital Group Head*

Tugas utama dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi :
 - a. Melakukan evaluasi terhadap sistem/kebijakan remunerasi.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - c. Bukan merupakan pemilik, pengurus atau karyawandari perusahaan, badan ataupun lembaga yang memberikan jasa kepada Perseroan atau memiliki hubungan bisnis dengan Perseroan.
 - d. Bukan merupakan karyawan Perseroan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris menjadi anggota Komite.
2. Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi :

Melakukan evaluasi serta menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan secara menyeluruh.

Piagam Komite Remunerasi & Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Remunerasi & Nominasi didasarkan kepada Piagam Komite Remunerasi & Nominasi yang diterbitkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. KEP.B.001-KOM/02/2016 tanggal 10 Februari 2016. Piagam Komite Remunerasi & Nominasi ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara transparan, kompeten, objektif dan independen sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KMR)

Komite Manajemen Risiko (KMR) merupakan komite independen di Perseroan yang memiliki fungsi dan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank BRISyariah No. 002-MDC/05-2017 tanggal 31 Mei 2017 yang telah menetapkan pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua : Direktur Utama
Ketua I : Direktur Kepatuhan
Ketua II : Direktur Operasional
Sekretaris I : Kepala Grup Manajemen Risiko
Sekretaris II : Kepala Grup Analisa Pembiayaan
Anggota Tetap : 1. Direktur Bisnis Ritel dan Komersial
2. Direktur Bisnis Mikro dan Pendanaan
3. Kepala Grup Bisnis Komersial
4. Kepala Grup Bisnis Ritel
5. Kepala Grup Bisnis Mikro
6. Kepala Grup Internal Audit
7. Kepala Grup Penunjang Pembiayaan
8. Kepala Grup Treasuri dan Perbankan Internasional
9. Kepala Grup Operasi dan Layanan
Anggota Tidak Tetap : Kepala Grup yang disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam Komite Manajemen Risiko

Tugas utama dan tanggung jawab Komite Kebijakan dan Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama, atas hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyusunan kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko.
 - b. Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dimaksud.
 - c. Penetapan *Justification* hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal/irregularities. Termasuk dalam keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal antara lain pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan rencana
2. Melakukan pembahasan atas laporan profil risiko yang disampaikan oleh *Risk Management Group* sekali dalam 3 (tiga) bulan, atau lebih apabila terjadi perubahan kondisi eksternal
3. Melakukan pembahasan atas rekomendasi dari *Risk Management Group* mengenai penetapan limit, untuk selanjutnya disampaikan kepada Direktur Utama untuk dimintakan persetujuannya.
4. Melakukan monitoring bahwa posisi yang melampaui limit yang ditetapkan telah mendapat perhatian.
5. Melakukan evaluasi atas laporan eksposur risiko sebagai salah satu output sistem informasi manajemen risiko yang disampaikan secara berkala oleh *Risk Management Group* atau unit kerja lain yang berwenang.
6. Merekomendasikan hasil identifikasi dan pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan/atau aktivitas baru kepada Direktur Utama untuk diambil keputusan.
7. Melakukan pembahasan mengenai laporan mengenai kerugian dari risiko operasional dan hasil review kepatuhan audit internal secara berkala

ASSETS AND LIABILITIES COMMITTEE (ALCO)

Salah satu komponen kunci dalam pengelolaan bank adalah *Assets Liabilities Management* (ALMA). ALMA merupakan unit kerja yang secara operasional berada di Departemen *Business Services and Support Treasury & International Banking Group*, yang terdiri dari manajer dan beberapa staf yang bertugas untuk menyiapkan materi ALCO.

ALCO (*Assets & Liabilities Committee*) merupakan wadah utama untuk mencapai tujuan dari ALMA. ALMA bertanggung jawab untuk pengembangan dan implementasi dari strategi ALM bank.

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Direksi Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi Perseroan No.KEP.B.005-MDB/11-2017 tanggal 21 November 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja, *Asset & Liability Committee* (ALCO) PT Bank BRISyariah, Perseroan telah menetapkan Organisasi dan Tata Kerja *Asset & Liability Committee* (ALCO) dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Ketua	(Merangkap Anggota)	: Direktur Utama
Ketua Pengganti I	(Merangkap Anggota)	: Direktur Bisnis
Ketua Pengganti II	(Merangkap Anggota)	: Direktur Operasional
Sekretaris	(Merangkap Anggota)	: Group Tresuri &Perbankan Internasional
Anggota		:
		1. Direktur
		2. Kepala Group Akuntansi & Keuangan
		3. Kepala Group Analisa Pembiayaan
		4. Kepala Group Bisnis Komersial
		5. Kepala Group Bisnis Mikro
		6. Kepala Group Bisnis Ritel
		7. Kepala Group Dana & Haji
		8. Kepala Group Jaringan & Logistik
		9. Kepala Group Manajemen Risiko
		10. Kepala Group Operasi & Layanan
		11. Kepala Group Perencanaan Strategis
		12. Kepala Group Penunjang Pembiayaan
		13. Kepala Group Pengelolaan Aset Khusus
		14. Kepala Group Teknologi Informasi

15. Kepala Group Tresuri & Perbankan Internasional
16. Kepala Desk Kepatuhan

Asset & Liability Committee (ALCO) memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menetapkan kebijakan pengelolaan Aset dan Liabilitas secara terpadu.
2. Menetapkan besaran imbal hasil untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) dan sumber pendanaan lainnya sesuai karakteristik produknya masing-masing.
3. Menetapkan *Fund Transfer Price (FTP)* atau Indeks Bagi Hasil (IBH).
4. Menetapkan besaran imbal hasil (*pricing*) untuk produk pembiayaan sesuai karakteristiknya masing-masing.
5. Menetapkan kewenangan untuk memberikan imbal hasil khusus (nisbah & bonus negosiasi) untuk produk DPK kepada pejabat pemutus.
6. Menetapkan kewenangan untuk memberikan imbal hasil khusus (*special pricing*) produk pembiayaan kepada pejabat pemutus.
7. Mengelola dan menetapkan struktur *balance sheet* (Aset & Liabilitas).
8. Memastikan pengelolaan Aset & Liabilitas telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan hasil rapat ALCO.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Untuk memenuhi Keputusan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan melalui Surat Direksi Perseroan No. 005-PDR/01-2018 tanggal 30 Januari 2018 telah mengangkat Indriati Tri Handayani sebagai *Corporate Secretary Group Head* yang berlaku sejak tanggal 1 Februari 2018.

Indriati Tri Handayani

Warga Negara Indonesia, umur 45 tahun. Meraih gelar Magister Kenotariatan dari Universitas Indonesia pada tahun 1999.

Beliau juga pernah menjabat sebagai Deputy Corporate Secretary Group pada Perseroan (2015-2016) merangkap Pgs. dan Pj. Corporate Secretary Group Head (2016-2017), Department Head Corporate Legal pada Perseroan (2014-2015), Department Head Divisi Legal pada PT Bank Mutiara Tbk (2010-2014), Legal Manager pada PT Salindo Perdana Finance (2000-2010), dan Senior Lawyer pada Minangwarman Law Firm (1999-2000).

Fungsi pokok Sekretaris Perusahaan antara lain:

- a. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- b. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 1. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan atau Perusahaan Publik;
 2. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 3. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 4. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 5. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Perseroan masih tetap berkewajiban untuk mengungkapkan pelaksanaan fungsi sekretaris perusahaan dan informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti sekretaris perusahaan dalam laporan tahunan guna memenuhi Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi pada nomor telepon +62 21 345 0226/0227 atau email csg@brisyariah.co.id atau pada Kantor Pusat Perseroan yang berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat 10160.

5. Sumber Daya Manusia

Seiring dengan perkembangan operasional Perseroan serta dalam rangka mengantisipasi persaingan yang semakin kompetitif, maka Perseroan senantiasa berupaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang handal dan profesional untuk mengelola berbagai fungsi organisasi serta untuk menghadapi berbagai tantangan. Perseroan menyadari bahwa peran sumber daya manusia sangat menentukan tingkat keberhasilan suatu organisasi dan merupakan aset penting perusahaan sehingga harus dikelola secara profesional dan berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi sumber daya manusia secara konsisten dan berkesinambungan.

Perseroan telah melaksanakan berbagai macam Program Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Kompetensi seluruh Karyawan. Program Pendidikan dan Pelatihan dikategorisasikan dalam beberapa segman, yaitu :

1. Segmen Bisnis
2. Segmen Penunjang Bisnis
3. Segmen Operasional
4. Segmen Risiko, Kepatuhan dan Pemeriksaan (Audit)
5. Segmen Pengembangan Sumber Daya Manusia Umum (*General*)
6. Segmen Program Pengembangan (*Development Programme*)

Dalam merencanakan dan mengembangkan Program Pendidikan dan Pelatihan, Perseroan senantiasa menyelaraskan dengan strategi Bisnis dan arahan Manajemen Puncak. Adapun bentuk implementasi Program Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

No.	Tujuan	Program Pendidikan dan Pelatihan
1.	Penguatan Pengetahuan Perbankan Syariah	1. Forum Diskusi Syariah <i>Online</i> 2. Refreshment <i>Fiqh Muamalah</i> 3. Pendidikan Dasar Perbankan Syariah (Level 1 dan 2) 4. GLOPIS (<i>Glossary</i> Perbankan Islam) 5. Training Eksternal Tematik
2.	Peningkatan Akselerasi Bisnis	1. Training Pembekalan dan Penyegaran (<i>Refreshment</i>) Untuk Jabatan Tenaga Pemasar 2. Training Bank Devisa 3. <i>Product Knowledge</i> 4. <i>Selling Skill</i> 5. <i>Syariah Collection Skill</i> 6. <i>Marketing Communication & Brand Management</i> 7. Training Analisa Pembiayaan & Proses Putusan Pembiayaan 8. Training Eksternal Tematik
3.	Peningkatan Kualitas Aset dan Proses Operasional	1. Training Pembekalan dan Penyegaran (<i>Refreshment</i>) Untuk Jabatan Operasional dan Penunjang Bisnis 2. Audit Syariah 3. <i>IT Based Training</i> 4. Training Eksternal Tematik
4.	Peningkatan Kesadaran (<i>Awareness</i>) Terhadap Manajemen Risiko, Regulasi dan Kepatuhan Syariah	1. Manajemen Risiko (Sertifikasi Level 1 s.d 4) 2. <i>Asset Management</i> 3. Training Eksternal Tematik
5.	Pemenuhan SDM Berkualitas dan Peningkatan Kompetensi SDM Secara Berkelanjutan	1. <i>Sharia Officer Development Program</i> 2. <i>IT Officer Development Program</i> 3. <i>Account Officer Development Program</i> 4. <i>Leadship Program</i> 5. Mitra Pengubah Budaya Kerja 6. <i>Induction Program (General Banking)</i>

Selama tahun 2017, jumlah program pendidikan dan pelatihan adalah sebanyak 157 program. Seluruh program tersebut dilakukan bertujuan untuk mempersiapkan kualitas SDM guna mencapai visi misi dan rencana jangka panjang Perseroan. SDM merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa perbankan seperti Perseroan.

Profil Karyawan

Per 31 Desember 2017, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 4.971 karyawan, yang terdiri dari 3.052 karyawan tetap dan 1.919 karyawan kontrak.

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Eselon	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
I	17	0,31%	15	0,29%	13	0,26%
II	8	0,14%	12	0,23%	19	0,38%
III	102	1,84%	111	2,16%	114	2,29%
IV	673	12,13%	585	11,37%	583	11,73%
V	1.454	26,20%	1.556	30,23%	1.478	29,73%
VI	3.296	59,39%	2.868	55,72%	2.764	55,60%
Total	5.550	100,00%	5.147	100,00%	4.971	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
S3	1	0,02%	1	0,02%	1	0,02%
S2	118	2,13%	128	2,49%	119	2,39%
S1	4.595	82,79%	4.350	84,52%	4.158	83,65%
D3	770	13,87%	655	12,73%	613	12,33%
SMA	66	1,19%	13	0,25%	80	1,61%
Total	5.550	100,00%	5.147	100,00%	4.971	100%

Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Jenjang Usia	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
< 25 tahun	691	12,45%	517	10,04%	535	10,76%
26 - 30 tahun	1.899	34,22%	1.683	32,70%	1.486	29,89%
31 - 35 tahun	1.584	28,54%	1.414	27,47%	1.308	26,31%
36 - 40 tahun	895	16,13%	978	19,00%	1.009	20,30%
41- 45 tahun	294	5,30%	349	6,78%	394	7,93%
46 - 50 tahun	133	2,40%	140	2,72%	164	3,30%
> 50 tahun	54	0,97%	66	1,28%	75	1,51%
Total	5.550	100%	5.147	100,00%	4.971	100,00%

Komposisi Karyawan Menurut Status

Status Karyawan	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
Tetap	2.938	41,62%	3.126	47,51%	3.052	48,57%
Kontrak	2.612	37,00%	2.021	30,71%	1.919	30,54%
Alih Daya	1.509	21,38%	1.433	21,78%	1.313	20,89%
Total	7.059	100,00%	6.580	100,00%	6.284	100,00%

Komposisi Pegawai Yang Ditugaskan Menurut Aktivitas Utama Perseroan

Aktivitas Utama	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
Retail Business Commercial Business	2.343	42,22%	2.661	51,70%	2.402	48,32%
Operasional	143	2,58%	121	2,35%	113	2,27%
Kepatuhan	3.051	54,97%	2.351	45,68%	2.440	49,08%
	13	0,23%	14	0,27%	16	0,32%
Total	5550	100,00%	5.147	100,00%	4.971	100,00%

Komposisi Pegawai Yang Ditugaskan Menurut Lokasi

Lokasi	31-Des					
	2015		2016		2017	
	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase	Jumlah Total	Persentase
Jabodetabek	1.634	29%	1.683	33%	1.626	32,71%
Jawa Barat	668	12%	604	12%	566	11,39%
Jawa Tengah	643	12%	546	11%	549	11,04%
Jawa Timur	819	15%	745	14%	715	14,38%
Bali	33	1%	29	1%	25	0,50%
Nusa Tenggara	141	3%	125	2%	120	2,41%
Sulawesi	242	4%	219	4%	221	4,45%
Kalimantan	420	8%	363	7%	342	6,88%
Sumatera	950	17%	833	16%	807	16,23%
Total	5.550	100%	5.147	100%	4.971	100%

Tenaga Kerja Asing

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memperkerjakan tenaga kerja asing.

Kesejahteraan Karyawan

Sistem pembayaran gaji/upah bagi karyawan Perseroan telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Rata-rata (UMR) yang tertera dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Selain itu, dalam rangka memantapkan dan menunjang semangat, etos, motivasi dan produktivitas kerja, Perseroan senantiasa mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi karyawannya, antara lain dengan:

- Remunerasi dalam bentuk variable sesuai dengan kinerja karyawan
- Gaji ke -13 (Tunjangan Hari Raya) dan ke-14 (Tunjangan Cuti Tahunan)
- Tunjangan Cuti Besar setiap masa kerja 6 (enam) tahun sekali
- Fasilitas *Car Ownership Program* (COP) untuk jabatan tertentu
- Fasilitas Sewa Rumah Dinas & Bantuan Uang Sewa untuk jabatan tertentu serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku
- Fasilitas asuransi jiwa, kesehatan dan kecelakaan
- Fasilitas pembiayaan Karyawan
- Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)
- BPJS Ketenagakerjaan
- BPJS Kesehatan

Dana Pensiun Perseroan

Mempertimbangkan kelangsungan penghasilan karyawan di hari tua, Perseroan memberikan fasilitas pensiun kepada segenap karyawan. Fasilitas pensiun yang diterima karyawan meliputi: Pesangon, Penghargaan Masa kerja, Penggantian Hak, Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK), Jamsostek, Kesehatan, Penghargaan Masa Bakti dan uang cuti (diberikan secara proporsional).

Program Pemeliharaan Kesehatan

Untuk mendukung kinerja karyawan, Perseroan mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program pemeliharaan kesehatan meliputi asuransi kesehatan, jiwa, dan kecelakaan. Adapun pengelolaan asuransi kesehatan dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ditunjuk melalui beberapa tahapan proses.

Koperasi Karyawan Perseroan

Koperasi Karyawan Perseroan dibentuk tanggal 1 November 2012 dan disahkan berdasarkan Akta No. 01 tanggal 1 November 2012. Anggota Koperasi Karyawan Perseroan adalah pegawai tetap Perseroan, Pensiunan Perseroan dan pegawai *Outsourcing* yang dipekerjakan di Perseroan. Total anggota per tanggal 31 Desember 2017 adalah sebanyak 1.031 karyawan.

Serikat Pekerja

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak mempunyai Serikat Pekerja. Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan memiliki hubungan baik dengan semua karyawan dan tidak pernah mengalami pemogokan kerja atau demonstrasi sejak berdirinya Perseroan.

6. Keterangan Ringkas Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum Dengan Kepemilikan di Atas 50% (Lima Puluh Persen)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Riwayat Singkat

BRI didirikan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Akta No. 133 tanggal 31 Juli 1992 dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (d/h Menteri Kehakiman) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992 tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan No.3A. Akta pendirian BRI tersebut merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 671/KMK.013/1992 tanggal 30 Juni 1992 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia.

Akta pendirian tersebut yang di dalamnya memuat anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan anggaran dasar terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa No. 54 Tanggal 27 Oktober 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 54/2017**"). Akta No. 54/2017 telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0139372.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 3 November 2017.

Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BRI, maksud dan tujuan BRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI pada saat saat Prospektus ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta No. 54/2017 yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing di bawah 5%)	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan dan Luar Biasa No. 55 tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0190414 tanggal 14 November 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0143665.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 14 November 2017, susunan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/	
Komisaris Independen	: Andrinof A. Chaniago
Wakil Komisaris Utama	: Gatot Trihargo
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim*
Komisaris Independen	: Ahmad Fuad Rahmany
Komisaris Independen	: A. Sonny Keraf
Komisaris	: Vincentius Sonny Loho
Komisaris	: Jeffry J. Wurangian
Komisaris Independen	: Mahmud

Direksi

Direktur Utama	: Suprajarto
Direktur Human Capital	: R. Sophia Alizsa*
Direktur Jaringan dan Layanan	: Mohammad Irfan
Direktur Digital Banking dan Layanan Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Kepatuhan	: Susy Liestiwaty
Direktur Manajemen Risiko	: Donsuwan Simatupang
Direktur Strategi Bisnis dan Keuangan	: Haru Koesmahargyo
Direktur Kredit Menengah, Korporasi dan BUMN	: Kuswiyoto
Direktur Konsumer	: Handayani*
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Sis Apik Wijayanto
Direktur Kredit Mikro dan Ritel	: Priyastomo

*) Efektif setelah mendapat persetujuan dari OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test).

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2015	2016	2017
Total Aset	878.426.312	1.003.644.426	1.126.248.442
Total Liabilitas	765.299.133	856.831.836	958.900.948
Total Ekuitas	113.127.179	146.812.590	167.347.494
Pendapatan bunga	83.007.745	92.151.312	100.080.250
Pendapatan syariah	2.426.292	2.636.677	2.819.042
Beban bunga	(26.141.100)	(27.541.214)	(28.652.214)
Beban syariah	(1.013.170)	(1.035.502)	(1.241.591)
Laba Operasional	31.959.350	33.964.542	36.805.834
Laba Tahun Berjalan	25.410.788	26.227.991	29.044.334
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	24.872.130	41.380.007	30.877.015

Keterangan Kontak BRI

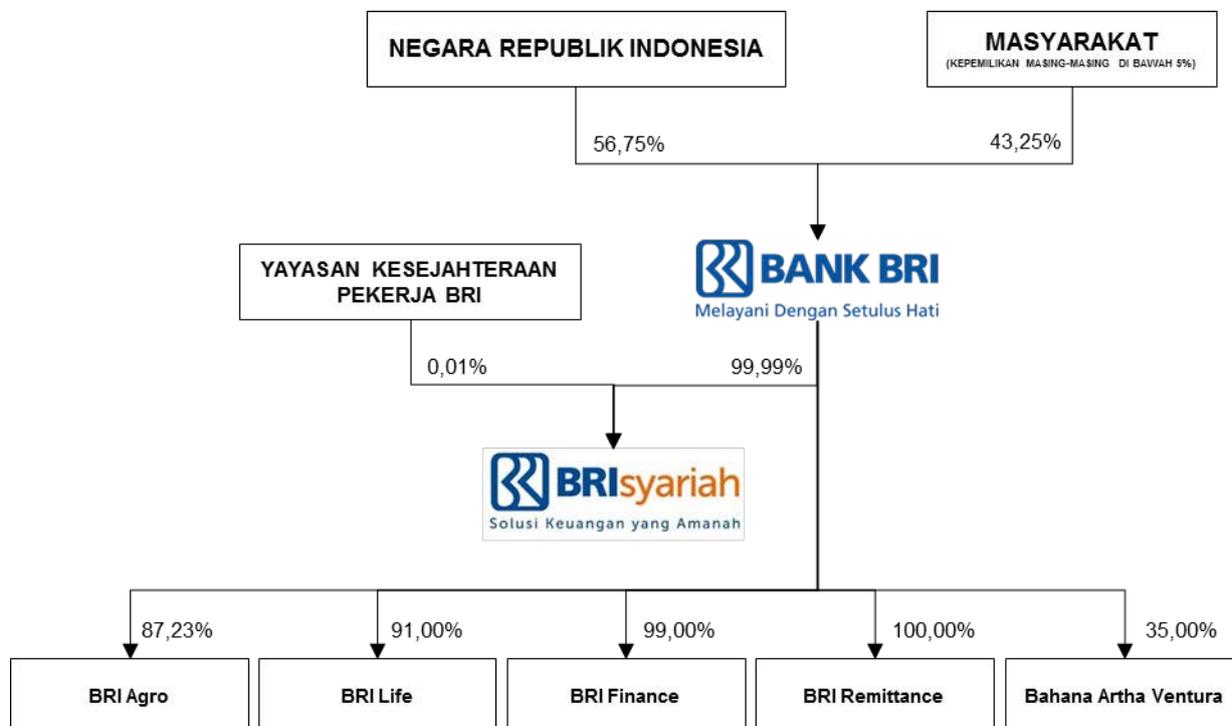
No. Tel. : (62-21) 251-0244, 251-0254, 251-0264, 251-0269, 251-0279

No. Fax : (62-21) 250-0077

Email : humas@bri.co.id

Website : www.bri.co.id

7. Diagram Kepemilikan Perseroan



8. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kesamaan/rangkap jabatan Pengurus dan Pengawas Perseroan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum dengan kepemilikan di atas 50% yaitu BRI.

9. Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut dengan pihak ketiga:

1. Perseroan terikat dalam Perjanjian Penggunaan Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement No. 17/131/DPSP tanggal 16 November 2015 dengan Bank Indonesia yang berlaku hingga waktu yang tak ditentukan. Perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan sarana dan prasarana sistem BI-RTGS untuk pelaksanaan transfer dana elektronik dan melakukan transaksi lainnya.
2. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan ATM Bersama untuk *Principle Member* No. 003/BRIS/PKS/05/2009 dan No. 033/PKS.BRIS/AJ/000/2009 tanggal 29 Mei 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama No. B.052-BRIS/09-2016 tanggal 1 September 2016 dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("**Artajasa**") yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Perjanjian ini bertujuan untuk menggunakan layanan ATM Bersama sebagai *principle member* yang layanannya disediakan oleh Artajasa.

3. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Perseroan sebagai Acquirer Bank No. 005/BRIS/PKS/06/2009 dan No. PKS/RS-BRIS/002/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum IV Perjanjian Kerjasama No. PKS.B.012-BRIS/02-2017 dan No. RS-LGL-1702-0004 tanggal 14 Februari 2017 dengan PT Rintis Sejahtera ("**Rintis**") yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Perjanjian ini mengatur penggunaan perangkat switching Rintis sehingga nasabah issuer bank dapat menggunakan fasilitas ATM yang disediakan Perseroan.
4. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Perseroan sebagai Issuer Bank No. 004/BRIS/PKS/06/2009 dan No. PKS/RS-BRIS/001/VI/2009 tanggal 24 Juni 2009 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum I Perjanjian Kerjasama No. RS-SWC-1311-0002 dan No. 066/BRIS/ PKS/11/2013 tanggal 26 November 2013 dengan Rintis yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Berdasarkan perjanjian ini, Perseroan sepakat bekerjasama dengan Rintis sehingga ATM acquirer dan EDC acquirer dapat digunakan nasabahnya untuk mengadakan transaksi.
5. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Tagihan Pelanggan Indosat Postpaid dan Pembelian Pulsa Isi Ulang Indosat Prepaid secara Online No. 038/E00-E0BC/LGL/10-PKS dan No. 015/BRIS/ PKS/10/2010 tanggal 28 Oktober 2010 dengan PT Indosat Tbk ("**Indosat**") yang berlaku hingga seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak. Perjanjian ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama menegenai penerimaan pembayaran tagihan pelanggan Indosat serta pembayaran transaksi pulsa isi ulang dari pelanggan Indosat melalui fasilitas perbankan yang disediakan oleh Perseroan.
6. Pada tanggal 25 Maret 2010, Perseroan mengadakan Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan SMS Banking No. 043/BA0-BA0A/LGL/10 dan No. 06/BRIS/PKS/03/2010 tanggal 25 Maret 2010 dengan Indosat yang bertujuan untuk mengimplementasikan dan mengoperasikan layanan SMS Banking. Meski perjanjian ini telah habis masa berlakunya sejak 25 Maret 2011, tetapi Perseroan dan Indosat sepakat untuk menundukkan diri terhadap ketentuan di dalamnya secara bersamaan dengan proses perpanjangan perjanjian yang sedang berlangsung.
7. Perseroan terikat dalam Surat Perintah Kerja No. SPK.236-NLG/11/2016 tanggal 3 November 2016 dengan PT Juke Solusi Teknologi ("**JST**") yang berlaku hingga tanggal 24 Maret 2019. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan menunjuk JST untuk melakukan pengadaan *renewal* dan penambahan *storage* EMC di *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*.
8. Perseroan terikat dalam Surat Perintah kerja No. SPK.91-NLG/04/2016 tanggal 28 April 2016 dengan PT Dinamika Berkah Solusindo ("**DBS**") yang berlaku hingga tanggal 28 April 2019. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan menugaskan DBS untuk melaksanakan pengadaan *maintenance* server IBM P770 SYIAR di lokasi *Data Center* dan *Disaster Recovery Center* termasuk, namun tidak terbatas pada, untuk menyediakan *back-up unit*, melaksanakan *on-site visit* preventive maintenance secara berkala di lokasi *Data Center* Ragunan dan *Disaster Recovery Center Tabanan* sebanyak 1 (satu) kali tiap bulan.
9. Perseroan terikat dalam Surat Perintah Kerja No. SPK.145-NLG/07/2016 tanggal 18 Juli 2016 dengan PT Bringin Gigantara ("**BG**") yang berlaku hingga seluruh kewajiban Perseroan dan BG telah terpenuhi. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan menugaskan BG untuk melaksanakan pengadaan *storage* untuk virtualisasi *server* di *Data Center* dan *Disaster Recovery Center*.
10. Perseroan terikat dalam Surat Perintah Kerja No. SPK.207-NLG/07/2017 tanggal 18 Juli 2017 dengan PT Bercahardaya Perkasa ("**BP**") yang berlaku hingga seluruh kewajiban Perseroan dan BP telah terpenuhi. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan menugaskan BP untuk melaksanakan pengadaan *notebook* 40 unit dan RAM 70 unit.
11. Perseroan terikat dalam Surat Perintah Kerja No. SPK.345-NLG/12/2017 tanggal 21 Desember 2017 dengan PT Anabatic Technologies Tbk ("**Anabatic**") yang berlaku hingga tanggal 20 Desember 2018. Berdasarkan surat perintah kerja ini, Perseroan mendapatkan pengadaan jasa lisensi produk Temenos oleh Anabatic.

12. Perseroan terikat dalam Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Layanan SMS Bulk No. 009/BRIS/PKS/ 08/2009 dan No. 307/VIII/PKS/ME-2009 tanggal 28 Agustus 2009 jo. Surat Perintah Kerja No. SPK.304-NLG/10/2017 tanggal 23 Oktober 2017 dengan PT Mitracomm Eksarana ("**Mitracomm**") yang berlaku hingga seluruh kewajiban Perseroan dan Mitracomm telah terpenuhi. Berdasarkan perjanjian ini, Mitracomm memberikan layanan SMS Bulk kepada Perseroan yang mencakup beberapa operator yakni Telkomsel, Indosat, XL dan Telkom Flexi.

10. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting sebagai berikut dengan pihak terafiliasinya:

1. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Penggunaan ATM Interkoneksi Host to Host pada Jaringan ATM Bank BRI No. 001/BRIS/PKS/III/2012 dan No. B.18-DJS/BPS/02/2012 tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum Keempat Perjanjian Kerjasama No. PKS.B.038-BRIS/04-2017 dan No. B.127-TRB/BPS/04/2017 tanggal 6 April 2017. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 1 Juni 2018 ini dibuat agar Perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur pada jaringan ATM BRI sebagai sarana untuk memberikan layanan transaksi kepada nasabah Perseroan di jaringan ATM BRI.
2. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Penerbitan BRI Corporate Card No. 038/BRIS/PKS/10-2011 tanggal 19 Oktober 2011. Perjanjian yang berlaku seterusnya kecuali diakhiri oleh para pihak ini dibuat untuk memberikan fasilitas *credit line* kepada Perseroan untuk selanjutnya didistribusikan melalui BRI *Corporate Card* bagi pegawai Perseroan yang telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai pemegang kartu.
3. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Jasa Kustodian No. PKS.B.124-BRIS/12-2017 dan No. 723-DIS/CUS/12/ 2017 tanggal 21 Desember 2017. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 1 Desember 2019 ini mengatur tentang penunjukan BRI oleh Perseroan untuk menyediakan jasa kustodian.
4. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Layanan Haji Pada Jaringan Unit Kerja BRI No. B.75A-MSB/PPM/03/2014 dan No. B.050-BRIS/11/2014 tanggal 25 Maret 2014. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 1 April 2018 ini dibuat agar Perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur pada jaringan unit kerja BRI untuk memberikan layanan transaksi haji kepada nasabah Perseroan yang meliputi setoran awal, setoran pelunasan dan pembatalan.
5. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Layanan Syariah pada Jaringan Unit Kerja Bank BRI No. B.748-DIR/TRY/11/2011 dan No. 042/BRIS/PKS/11/2011 tanggal 25 November 2011 sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Perjanjian Kerja Sama No. B.1455-DIR/DIS/11/2016 dan B.076a-BRIS/11/2016 tanggal 23 November 2016. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 25 November 2021 ini dibuat agar Perseroan dapat memanfaatkan infrastruktur pada jaringan unit kerja BRI sebagai sarana untuk memberikan layanan transaksi Perseroan kepada nasabah Perseroan yang meliputi: (i) pembukaan rekening, (ii) penerimaan setoran, (iii) penarikan tunai, (iv) transfer antara BRI dan Perseroan dan sebaliknya, (v) layanan haji, serta (vi) layanan transaksi Perseroan lainnya yang disepakati oleh BRI dan Perseroan.
6. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Kantor Jalan Abdul Muis No. B.05-DML/PAT/05/2012 dan No. 021/BRIS/PKS/04/2012 tanggal 2 April 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir berdasarkan Addendum Ketiga No. 10-K-MAT/PPO/11/2017 dan PKS.B.108-BRIS/11-2017 tanggal 10 November 2017. Perjanjian ini berlaku hingga tanggal 31 Desember 2018.
7. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Penggunaan Kartu Debit BRISyariah pada Jaringan EDC *Merchant* Bank BRI No. B.021-/KKD/07/2016 dan No. PKS.B.043-BRIS/ 07-2016 tanggal 1 Juli 2016. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 1 Juli 2020 ini mengatur tentang pemanfaatan infrastruktur pada jaringan *Electronic Data Capture* (EDC) BRI sebagai sarana untuk memberikan layanan transaksi kepada nasabah Perseroan di jaringan EDC BRI.

8. Perseroan dan BRI terikat dalam Perjanjian Kerja Sama Penempatan Perangkat *Disaster Recovery Center* (DRC) dan Penggunaan *Data Center* No. PKS.B.013-PKS/04-2013 dan No. B.100-TSI/04/2013 tanggal 2 April 2013. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 2 April 2018 ini dibuat agar Perseroan dapat menggunakan sebagian sumber daya *Data Centre* milik BRI untuk kepentingan *Disaster Recovery Centre* milik Perseroan berupa ruangan dan infrastruktur pendukung untuk menempatkan perangkat teknologi informasi *Disaster Recovery Center* milik Perseroan di lokasi *Data Center* milik BRI.
9. Perseroan dan PT Bringin Sejahtera Makmur terikat dalam Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Jasa Pialang dalam Pengelolaan Asuransi Aset Tetap dan Kendaraan Bermotor No. PKS.B.107-BRIS/11-2017 dan No. 025.17.02.0011.00 tanggal 30 November 2017. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 30 November 2018 ini mengatur tentang penunjukan PT Bringin Sejahtera Makmur sebagai pialang asuransi yang akan bertindak mewakili Perseroan dalam hal pemanfaatan jasa pialang.
10. Perseroan dan PT Bringin Sejahtera Makmur terikat dalam Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Uang *Online* No. PKS.B.073-BRIS/08-2017 dan No. PKS.024A-DIR/SYR/08/2017 tanggal 16 Agustus 2017. Perjanjian yang berlaku hingga tanggal 2 Januari 2020 ini mengatur tentang Penutupan asuransi uang *online* pada unit kerja Perseroan yang ditanggung oleh PT Bringin Sejahtera Makmur.

11. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan

Perseroan memiliki dan/atau menguasai tanah dan bangunan di atasnya yang tersebar di berbagai wilayah di Republik Indonesia dengan total luas keseluruhan berjumlah kurang lebih 7.917,06 m² dengan bukti kepemilikan berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHMSRS), Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) dan Hak Pakai Toko dengan perincian sebagai berikut:

No.	Sertifikat	Bidang	Luas (m ²)
1.	HGB	34	7.745,00
2.	SHMSRS	3	48,95
3.	SHPTU	1	111,11
4.	Hak Pakai Toko	1	12,00
TOTAL		39	7.917,06

Jumlah aset tetap Perseroan per tanggal 31 Desember 2017 setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp177.935 juta.

Berikut ini adalah uraian bidang-bidang tanah milik Perseroan yang di atasnya berdiri bangunan yang digunakan sebagai kantor cabang Perseroan.

Hak Guna Bangunan

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Atas Nama	Penggunaan
1.	Jalan Raya Kalimalang Pekav PTB. Kav No.4 Blok A-2, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur	HGB 8974	25-04-2013	08-03-2045	89	Perseroan	KCP Jakarta Kalimalang
2.	Jalan Raya Kalimalang Pekav PTB. Kav No.4 Blok A-2 Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur	HGB 8975	25-04-2013	08-03-2045	92	Perseroan	KCP Jakarta Kalimalang
3.	Sangiang Jaya, Tangerang, Banten	HGB 1236	13-08-2014	07-04-2045	87	Perseroan	KCP Tangerang Jatiuwung
4.	Jalan Citarum No. 4, Cihapit, Bandung, Jawa Barat	HGB 408	15-09-2009	03-09-2039	779	Perseroan	KC Bandung Citarum
5.	Karangmalang, Indramayu, Jawa Barat	HGB 10	07-12-2007	23-10-2037	66	Perseroan	KCP Indramayu Suprpto

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Atas Nama	Penggunaan
6.	Jalan Daan Mogot, Sukarasa, Tangerang, Banten	HGB 183	28-07-1987	27-07-2027	630	Perseroan	KC Tangerang Daan Mogot
7.	Jalan Raya Jatiwaringin No. 89, Pondok Gede, Bekasi	HGB 1636	30-04-2015	05-06-2045	146	Perseroan	KCP Bekasi Jatiwaringin
8.	Bekasi Square Ruko No. 61, Pekayon Jaya, Bekasi	HGB 8050	20-06-2007	05-09-2026	75	Perseroan	KC Bekasi Square
9.	Bekasi Square Ruko No. 60, Pekayon Jaya, Bekasi	HGB 8051	20-06-2007	05-09-2026	85	Perseroan	KC Bekasi Square
10.	Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat	HGB 69	30-09-2014	21-04-2044	849	Perseroan	KC Bogor Ahmad Yani
11.	Depok, Pancoran Mas, Jawa Barat	HGB 08745	24-09-2014	09-10-2039	68	Perseroan	KC Depok Margonda
12.	Depok, Pancoran Mas, Jawa Barat	HGB 08748	24-09-2014	09-10-2039	68	Perseroan	KC Depok Margonda
13.	Blok A No. 3, Kuningan, Jawa Barat	HGB 1081	27-02-2012	24-09-2033	67	Perseroan	KCP Kuningan Veteran
14.	Merak Batin, Natar, Lampung Selatan	HGB 18	18-08-2009	28-07-2043	146	Perseroan	KCP Lampung Natar
15.	Desa Sumbergedang, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur	HGB 546	18-09-2012	10-05-2045	106	Perseroan	KCP Malang Pandaan
16.	Desa Sumbergedang, Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur	HGB 547	15-08-2012	10-05-2045	107	Perseroan	KCP Malang Pandaan
17.	Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat	HGB 07	07-06-2011	17-09-2033	106	Perseroan	KC Mataram Pejanggik
18.	Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat	HGB 08	07-06-2011	17-09-2033	97	Perseroan	KC Mataram Pejanggik
19.	Pejanggik, Mataram, Nusa Tenggara Barat	HGB 9	07-06-2011	17-09-2033	97	Perseroan	KC Mataram Pejanggik
20.	Jl. Let. Jend. S. Parman, Petisah Hulu, Medan Baru, Medan, Sumatera Utara	HGB 696	02-03-2006	29-03-2030	489	Perseroan	KC Medan S. Parman
21.	Sidomulyo Timur, Pekan Baru, Riau	HGB 805	01-03-2013	11-12-2043	205	Perseroan	KC Pekanbaru Arifin Ahmad
22.	Sidomulyo Timur, Pekan Baru, Riau	HGB 806	01-03-2013	11 -12-2043	212	Perseroan	KC Pekanbaru Arifin Ahmad
23.	Sidomulyo Timur, Pekan Baru, Riau	HGB 807	01-03-2013	11 -12-2043	205	Perseroan	KC Pekanbaru Arifin Ahmad
24.	Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kalimantan Barat	HGB 2023	09-01-2007	08-02-2042	134	Perseroan	KCP Pontianak Siantan
25.	Braga, Sumur Bandung, Jawa Barat	HGB 686	18-01-2007	14-01-2037	808	Perseroan	KC Bandung Suniaraja
26.	Jl. Wahid Hasyim No.228, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta	HGB 966	26-09-2002	25-09-2032	243	Perseroan	KC Jakarta Wahid Hasyim
27.	Sidokumpul, Sidoarjo, Jawa Timur	HGB 380	08-06-2005	02-03-2027	169	Perseroan	KC Sidoarjo Ahmad Yani
28.	Sidokumpul, Sidoarjo, Jawa Timur	HGB 379	08-06-2005	02-03-2027	176	Perseroan	KC Sidoarjo Ahmad Yani
29.	Jatimulyo, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur	HGB 801	03-11-2017	12-02-2026	217	Perseroan	KC Malang Soekarno Hatta
30.	Ruko Tol Boulevard Blok D.20, Tangerang	HGB 10373	18-08-2017	17-05-2033	95	Perseroan	KC Tangerang Bumi Serpong Damai (BSD)
31.	Ruko Tol Boulevard Blok D.21, Tangerang	HGB 10374	07-09-2017	17-05-2033	95	Perseroan	KC Tangerang Bumi Serpong Damai (BSD)
32.	Sokanegara, Jawa Tengah	HGB 00271	20-10-2017	06-09-2047	435	Perseroan	KC Purwokerto Karang Kobar
33.	Sokanegara, Jawa Tengah	HGB 00272	20-10-2017	07-09-2047	203	Perseroan	KC Purwokerto Karang Kobar
34.	Kedaton, Bandar Lampung	HGB 39	26-05-2017	04-05-2037	299	Perseroan	KC Bandar Lampung (Kedaton)

Hak Pakai Toko

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Atas Nama	Keterangan
1.	Pasar Curug Kabupaten Tangerang	Hak Pakai Toko/Kios No. 503/CRG/KVI/H/Reg.560-PD.P/2017	20-06-2017	20-06-2021	12	Perseroan	-

Hak Pakai Tempat Usaha

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Atas Nama	Penggunaan
1.	Pasar Jatinegara, Jakarta	SHPTU 042509	14-04-2014	31-12-2032	111,11	Perseroan	KCP Jakarta Jatinegara

Hak Milik atas Satuan Rumah Susun

No.	Alamat	Sertifikat	Tanggal Sertifikat	Tanggal Berakhir Hak	Luas (m ²)	Atas Nama	Penggunaan
1.	Rumah Susun Non Hunian JITC Blok IA Lantai III Jl. Raya Mangga Dua, Jakarta	HMSRS No. 224/111/IA	14-11-1994	16-07-2028	15,98	Perseroan	KCP Jakarta ITC Mangga Dua
2.	Rumah Susun Non Hunian JITC Blok IA Lantai III Jl. Raya Mangga Dua, Jakarta	HMSRS No. 225/111/IA	14-11-1994	16-07-2028	15,98	Perseroan	KCP Jakarta ITC Mangga Dua
3.	Rumah Susun Non Hunian JITC Blok IA Lantai III Jl. Raya Mangga Dua, Jakarta	HMSRS No. 226/111/IA	14-11-1994	16-07-2028	16,99	Perseroan	KCP Jakarta ITC Mangga Dua

Perseroan juga memiliki dan/atau menguasai bidang-bidang tanah yang berasal dari Agunan Yang Diambilalih ("AYDA") dari beberapa debitur sebagai akibat dari eksekusi barang jaminan debitur yang telah menerima fasilitas pembiayaan dari Perseroan akan tetapi gagal dalam memenuhi kewajiban debitur kepada Perseroan.

Jumlah luas bidang tanah AYDA yang dikuasai oleh Perseroan dan telah melewati jangka waktu pencairan yang ditentukan tersebut adalah seluas 237.075 m² dengan status kepemilikan berupa HGB, HM maupun HMSRS.

Uraian mengenai AYDA oleh Perseroan yang telah melewati jangka waktu pencairan yang ditentukan sampai dengan tanggal Propektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Jumlah Sertipikat	Luas (m ²)	Tanggal Pengambilalihan
1.	PT Pandu Sarana Global	HMSRS : 1 HM : 3	HMSRS : 108 HM : 679	31 Agustus 2015
2.	PT Bayu Aji Mandiri	HM : 2 HGB : 1	HM : 28.667 HGB : 5.590	29 September 2015
3.	PT Mitra Sukses Banua	HM : 6 HGB : 1	HM : 2.007 HGB : 311	28 Juni 2016
4.	PT Nichiwa Kemala Sakti	HGB : 2 HM : 14	HGB : 2.025 HM : 60.212	28 Juni 2016
5.	PT Nani Wahyuni Industries	HGB : 16 HM : 1	HGB : 52.246 HM : 337	23 Desember 2016
6.	PT Shuket Engineering	HM : 2 HGB : 4	HM : 322 HGB : 7.277	23 Desember 2016
7.	PT Providensia	HM : 18	HM : 1.967	23 Desember 2016
8.	PT Alpindo Mitra Baja	HM : 27	HM : 75.327	30 Desember 2016
TOTAL			237.075	

Berdasarkan pernyataan Perseroan, Perseroan menyatakan bahwa terhadap seluruh aset AYDA tersebut akan secepatnya dilakukan upaya penyelesaian dengan mengacu pada harga pasar wajar sebagaimana ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Asuransi

Perseroan dalam menjalankan usahanya telah mengadakan perjanjian pertanggungan asuransi dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Bringin Sejahtera Makmur untuk kegiatan operasional Perseroan yang mencakup:

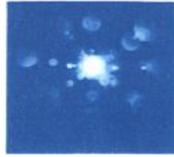
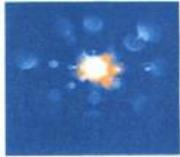
1. Asuransi atas segala kerugian properti, termasuk gempa bumi, erupsi vulkanik dan tsunami dan penyewaan (*all risks insurance plus earthquake, volcanic eruption and tsunami and rent*).
2. Asuransi Uang yang terdiri atas:
 - a. Uang dalam ATM (Cash in ATM Insurance);
 - b. Uang dalam Ruang Penyimpanan (Cash in Safe Insurance);
 - c. Uang dalam Tempat Penyimpanan Kasir (Cash in Cashier Box Insurance);
 - d. Uang dalam Transit (Cash in Transit);
 - e. Uang dalam Pengambilan Tunai (Cash Pick Up and Collection); dan
 - f. Mobile banking
3. Asuransi Aset Tetap.
4. Asuransi Kendaraan Bermotor.

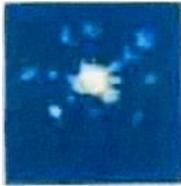
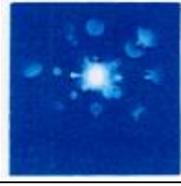
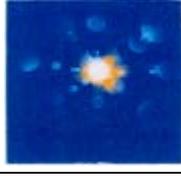
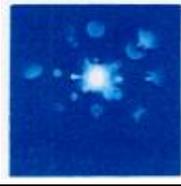
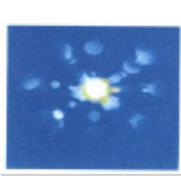
Perjanjian pertanggungan asuransi dengan PT Bringin Sejahtera Makmur berakhir pada tanggal 30 November 2018, sedangkan perjanjian pertanggungan asuransi dengan PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur berakhir pada tanggal 23 Januari 2019 dan 2 Januari 2020.

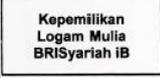
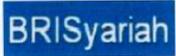
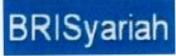
Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan telah memiliki asuransi dengan nilai pertanggungan yang cukup untuk mengganti aset yang diasuransikan atau menutupi kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungan. Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi dimana Perseroan mengasuransikan asetnya, dimana hubungan afiliasi tersebut timbul karena PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur dan PT Bringin Sejahtera Makmur dimiliki oleh BRI secara tidak langsung.

13. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Perseroan telah mendaftarkan mereknya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Nomor Registrasi
1.		16	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00388745
2.		16	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00388743
3.		16	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00388733

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Nomor Registrasi
4.		09	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00403793
5.		36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402012
6.		36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402009
7.		42	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402008
8.		36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402005
9.		16	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM000456268
10.		16	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM000456270
11.		16	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM000456269
12.		16	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000394804
13.		36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00389332

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Nomor Registrasi
14.		36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402006
15.		36	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00402010
16.		38	29 Juli 2011	10 Tahun	IDM00411004
17.		36	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM00411821
18.		36	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM00411822
19.		36	20 Juli 2011	10 Tahun	IDM00411823
20.		36	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000500472
21.		36	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000500470
22.		36	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000500706
23.		36	15 Maret 2011	10 Tahun	IDM000500471

Selain merek-merek di atas, berdasarkan surat permintaan pendaftaran merek, Perseroan dan BRI sedang dalam proses pendaftaran merek di Kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Kelas	Tanggal Permohonan	Status
1.		9	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
2.		16	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
3.		35	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
4.		36	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
5.		38	16 November 2016	Dalam tahap pemeriksaan
6.	SOLUSI KEUANGAN YANG AMANAH	36	15 Januari 2017	Dalam tahap pemeriksaan
7.		41	13 Februari 2017	Dalam tahap pemeriksaan

Berdasarkan surat tanggal 25 September 2012, BRI setuju untuk memberikan hak bagi Perseroan untuk memanfaatkan aset HAKI berupa logo BRI yang dimiliki oleh BRI.

Perseroan juga memiliki aset HAKI dalam bentuk ciptaan sebagai berikut yang telah secara sah dimiliki oleh Perseroan:

No.	Judul Ciptaan	Jenis Ciptaan	Tanggal Pendaftaran	Jangka Waktu Perlindungan	Nomor Registrasi
1.	Ringan Bersama	Sinematografi	27 Agustus 2015	50 Tahun	C000201502593

14. Perijinan

Perseroan telah memperoleh ijin untuk kantor pusat sebagai berikut:

- a. Ijin usaha pertama Perseroan (dahulu ketika bernama PT Bank Djasa Arta) adalah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. D.14.6.1.4.40 tanggal 7 Maret 1969 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Djasa Arta di Jakarta.
- b. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- c. Surat No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009 dikeluarkan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia menetapkan bahwa Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah BRI menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank BRISyariah.
- d. Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/139/KEP.GBI/DpG/2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing (Bank Devisa) Kepada PT Bank BRISyariah.

15. Perkara Material yang Sedang Dihadapi Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di Badan Arbitrase Nasional dan/atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif. Selain itu, tidak terdapat somasi dari pihak ketiga manapun kepada Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif. Meski demikian, Perseroan sedang terlibat dalam 42 perkara perdata yang sedang berjalan saat ini dimana Perseroan bertindak sebagai penggugat, tergugat dan/atau turut tergugat. Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata maupun pidana.

16. Kegiatan Usaha Perseroan serta Kecenderungan dan Prospek Usaha

16.1. Umum

Visi Perseroan

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah, untuk kehidupan yang lebih bermakna.

Misi Perseroan

- Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- Menyediakan aksesibilitas ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun, dimanapun.
- Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

16.2. Nilai – Nilai Budaya Kerja

- **Profesional** : Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.
- **Antusias**: Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.
- **Penghargaan terhadap SDM**: Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal sejak perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.
- **Tawakkal**: Optimisme yang diawali dengan doa dan dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

- **Integritas:** Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya juga senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
- **Orientasi Bisnis:** Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.
- **Kepuasan Pelanggan:** Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.

16.3. Keunggulan Kompetitif

Penilaian keunggulan kompetitif Perseroan dilakukan dengan memperhatikan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kondisi di dalam perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Apabila kondisi internal menjadi faktor pendorong keberhasilan perusahaan, maka merupakan kekuatan (*strength*). Faktor eksternal adalah kondisi di luar perusahaan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Apabila kondisi eksternal menjadi pendorong keberhasilan perusahaan, maka merupakan peluang (*opportunity*).

Faktor kekuatan (*strength*) yang menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif diantaranya:

- a. Salah satu bank syariah yang dikenal luas di Indonesia dengan memiliki fokus pada segmen *retail*.
- b. Bergerak di dalam industri yang berpotensi bertumbuh pesat dan memiliki potensi pasar yang luas.
- c. Dukungan kuat dari induk usaha yaitu Bank BRI dan bersinergi dengan Bank BRI dalam hal infrastruktur jaringan, seperti Kantor Layanan Syariah (KLS) dan *electronic banking* (EDC, ATM, dll).
- d. Berpeluang untuk memanfaatkan jaringan BUMN yang kuat untuk memacu pertumbuhan usaha pada segmen komersial dan konsumen.
- e. Memiliki pendanaan yang kuat bersumber dari dana haji dan pertumbuhan CASA yang baik.
- f. Menawarkan beragam produk syariah yang menjadikan Perseroan sebagai *one stop islamic banking solutions*.
- g. Manajemen yang berpengalaman panjang dalam bidang perbankan dan memiliki keahlian dalam bidang perbankan syariah.

Faktor peluang (*opportunity*) yang menjadikan Perseroan memiliki keunggulan kompetitif diantaranya:

- a. Regulasi yang lebih fleksibel dari regulator (OJK) dalam penerbitan produk syariah baru dan pembukaan jaringan kantor baru.
- b. Peluang bisnis dan jaringan bersinergi dengan induk perusahaan.
- c. Mulai banyak berjalannya belanja negara dibidang infrastruktur.
- d. Memiliki skim pembiayaan yang tidak dimiliki perbankan konvensional, misalnya : IMBT/leasing, gadai, dll.

16.4. Kegiatan Usaha

Produk Pembiayaan

a. Bisnis Mikro

Perseroan terus melakukan terobosan dan inovasi guna memenuhi kebutuhan nasabah dalam bertransaksi dan berbisnis secara mudah. Strategi ini juga diterapkan dalam pengelolaan segmen usaha mikro, yang diyakini masih memiliki potensi sangat besar untuk terus digarap. Upaya ini tentunya tidak terlepas dari dukungan penuh perusahaan induk (BRI) yang telah dikenal lama sebagai pemimpin pasar di segmen ini. Di samping terus mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam/syar'i, Perseroan menerapkan beberapa strategi jitu dalam mempertahankan keunggulan bisnis yakni dengan mengedepankan kecepatan, kemudahan, kenyamanan, dan keberlangsungan pada setiap layanan yang diberikan. Upaya pendekatan terhadap pasar yang dituju terus dilaksanakan dengan beragam cara. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk kerja sama dengan BRI sebagai entitas induk dan BRI Agro dalam penyelenggaraan acara Pasar Keuangan Rakyat 2015 di Surabaya dengan tagline "Menuju Indonesia Cerdas Keuangan", di samping program-program sejenis di wilayah-wilayah lain. Pada tahun 2016 dilakukannya kerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAFT) dan Alfamart. Kerjasama tersebut meliputi pemberian fasilitas pembiayaan kepada UMKM / industri kreatif binaan BEKRAFT dan pemberian fasilitas pembiayaan mikro kepada Outlet Binaan Alfamart.

Jaringan Layanan

Terkait pengembangan jaringan, Perseroan saat ini telah memiliki sebanyak 364 Unit Mikro Syariah, meningkat 5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 347 unit. Menghadapi tantangan ke depan, Perseroan memiliki rencana untuk melakukan konsolidasi Unit Mikro dengan melakukan penggabungan Unit Mikro yang memiliki area pemasaran yang berdekatan. Untuk melayani masyarakat yang belum mengakses layanan perbankan, tahun ini Perseroan turut bergabung dengan Program Laku Pandai yang diprakarsai oleh OJK. Perseroan adalah bank syariah pertama yang meluncurkan sebuah program layanan keuangan tanpa kantor yang dinamai BRISSMART. Dalam proses bisnis, Perseroan terus mengkinikan sistem analisa pembiayaan berbasis teknologi informasi yang dikerjakan sendiri oleh tim IT & Mikro Banking Group. Tujuan pelaksanaannya untuk memfasilitasi kebutuhan konsumen yang lebih kompleks seiring dengan ekspansi bisnis yang dilakukan.

Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro telah menjadi salah satu pilar pertumbuhan bisnis Perseroan. Pada tahun 2017 total pembiayaan Mikro yang disalurkan sebesar Rp3.551.874 juta atau turun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp3.861.785 juta. Sedangkan rata-rata pertumbuhan majemuk segmen Mikro per tahun selama tiga tahun terakhir sekitar 1,31%. Melalui upaya yang konsisten, pembiayaan saat ini masih disalurkan pada sektor-sektor produktif. Sasaran pembiayaan mikro adalah para pedagang kebutuhan pokok dan pakaian serta barang dagangan lainnya. Seperti halnya tahun lalu, pembiayaan mikro juga tetap didukung oleh program “Serbu Pasar & *Open Table*”, yang masing-masing telah menyerap sekitar 75% dan 25% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan.

Pembiayaan mikro di Perseroan bertujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan modal kerja, investasi dan konsumsi. Pembiayaan mikro tersebut dikemas menjadi beberapa tipe produk yang tersedia dalam tiga besaran plafon pinjaman sesuai dengan nama yang diberikan, yaitu KUR Mikro iB, Mikro 25iB, Mikro 75iB, Mikro 200iB, IMBT Mikro 75 dan IMBT Mikro 200. Jangka waktu pembayaran pembiayaan bervariasi dari mulai 6 bulan hingga 5 tahun. Komposisi terbesar pembiayaan Mikro saat ini adalah plafon di bawah Rp200 juta. Mengingat besaran pembiayaan maupun ketahanan segmen mikro terhadap perubahan situasi ekonomi, maka seluruh produk pembiayaan mikro ini dengan persyaratan yang sangat mudah, hanya melampirkan foto kopi KTP, kartu keluarga, dan surat izin usaha atau surat keterangan usaha. Khusus bagi nasabah KUR Mikro iB dan mikro 25iB nasabah tidak dimintai jaminan ataupun NPWP. Namun tentunya kemudahan ini diimbangi dengan studi kelayakan yang dilakukan secara mendalam terhadap setiap nasabah pelaku bisnis yang menerima pinjaman.

Pembiayaan mikro KUR Mikro iB di Perseroan saat ini merupakan satu-satunya pembiayaan KUR di Bank Syariah yang dapat menyalurkan pembiayaan KUR. Dapat membiayai usaha yang baru berjalan minimal 6 bulan serta diperbolehkan tanpa agunan dengan margin 9% efektif p.a. Realisasi KUR Mikro iB pada tahun 2017 sebesar Rp463,5 miliar atau sebesar 13,05% dari total pembiayaan mikro yang disalurkan di tahun 2017. Dengan kuota pembiayaan KUR yang diberikan pemerintah sebesar Rp500 miliar, Perseroan telah mencapai 93% dari target kuota pembiayaan KUR yang telah diberikan. Untuk tahun 2018, kuota pembiayaan KUR meningkat 10% menjadi Rp550 miliar.

Saat ini, porsi pembiayaan yang disalurkan melalui bisnis mikro terhadap total pembiayaan yang disalurkan Perseroan adalah 19,29%. Dari sisi kualitas pembiayaan yang disalurkan, tingkat NPF (*Non Performing Financing*) segmen Mikro dikisaran angka 6,95%, dengan *Repayment Rate* (tingkat kelancaran pembayaran angsuran) masih diangka 85,2%.

b. Pembiayaan Ritel (UKM) dan Kemitraan

Pembiayaan Ritel (UKM)

Pembiayaan ritel Perseroan adalah pembiayaan produktif kepada UKM dengan plafon antara Rp200 juta sampai dengan Rp5 miliar. Pembiayaan ritel Perseroan menyasar pada pelaku usaha kecil menengah yang memiliki potensi untuk berkembang dan memiliki kredibilitas yang baik. Di samping itu, pertumbuhan bisnis pembiayaan ritel juga dapat dicapai dengan melakukan pemantauan khusus terhadap pelaku bisnis mikro nasabah Perseroan yang berdasarkan evaluasi kinerja memiliki potensi besar untuk berkembang serta catatan pengembalian pembiayaan yang baik, sehingga untuk selanjutnya dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha UKM dengan besaran plafon yang dapat ditingkatkan secara bertahap.

Perseroan juga telah menerapkan strategi lain dengan mengembangkan pola *value chain*, di mana melalui pola ini target pembiayaan adalah para *supplier* dan *distributor* dari nasabah komersial Perseroan yang memiliki reputasi baik dan kredibilitas tinggi. Ekspansi pembiayaan retail diimbangi dengan terus memperhatikan prinsip kehati-hatian guna menghindari terjadinya peningkatan angka pembiayaan bermasalah (NPF) terutama dalam situasi ekonomi yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan seperti yang sedang terjadi saat ini.

Selain itu pembiayaan nasabah ritel wajib *discover* dengan agunan tanah bangunan yang memadai dan diarahkan menggunakan skema angsuran. Hal ini dilakukan untuk lebih mengendalikan risiko pembiayaan yang terjadi.

Pada tahun 2017, pembiayaan ritel BRISyariah meningkat 1,12% (Rp25.200 juta) menjadi sebesar Rp2.266.684 juta dibandingkan posisi 31 Desember 2016 yang mencapai Rp2.241.484 juta.

Kemitraan

Adapun pembiayaan *linkage* (kemitraan) adalah pembiayaan kepada lembaga keuangan (*multifinance*, koperasi karyawan, koperasi jasa keuangan syariah (KJKS/BMT), dan BPR Syariah. Pembiayaan kemitraan merupakan suatu langkah strategis yang dilakukan Perseroan dalam rangka menangkap peluang pembiayaan di sektor yang lebih efisien untuk digarap melalui kerja sama dengan mitra.

Keputusan untuk menjalin suatu kemitraan tentunya didasarkan atas evaluasi kelayakan terhadap sektor usaha yang akan dibiayai serta pemilihan mitra yang kapabel, berpengalaman, dan memiliki reputasi yang baik sesuai analisa bank. Strategi yang diterapkan dalam rangka pencapaian target kinerja pembiayaan kemitraan diantaranya:

1. Fokus pengembangan ke nasabah *existing* dengan *track record* dan potensi yang baik.
2. Pengembangan skema pembiayaan channeling untuk menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku terkait pembiayaan kepada Kopkar yang belum memiliki Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS).
3. Pengembangan pembiayaan modal kerja maupun investasi kepada Koperasi Karyawan (Kopkar) dari perusahaan induk yang bonafid (BUMN dan Koorporasi), termasuk juga mensupport Kopkar dalam menyediakan sarana dan prasarana kebutuhan perusahaan induknya.
4. Meningkatkan disiplin administrasi dan monitoring pembiayaan di seluruh unit kerja.
5. Pengembangan pada ke nasabah non-*multifinance* (Inkopsyah/ Puskopsyah, KJKS/BMT dan ventura syariah).

Total Pembiayaan Kepada Lembaga Keuangan

No	Lembaga Keuangan	2015		2016		2017	
		Jumlah Lembaga	Rp juta	Jumlah Lembaga	Rp juta	Jumlah Lembaga	Rp juta
1.	Koperasi Karyawan	343	886.206	384	1.224.481	333	856.009
2.	BMT	8	110.108	9	132.662	6	83.752
3.	<i>Multifinance Company</i>	22	1.052.251	19	657.948	15	321.860
4.	BPR Syariah	7	88.195	8	96.235	6	88.602
	Total	380	2.136.760	420	2.111.326	360	1.350.023

Selama tahun 2017, portofolio pembiayaan kemitraan sebesar Rp1.350.023 juta menurun sebesar Rp761.303 juta (36,06%) dibandingkan posisi 31 Desember 2016 sebesar Rp2.111.326 juta. Hal ini sehubungan dengan penurunan portofolio *multifinance* dan adanya regulasi terkait penyaluran pembiayaan melalui Koperasi Karyawan.

c. Pembiayaan Komersial

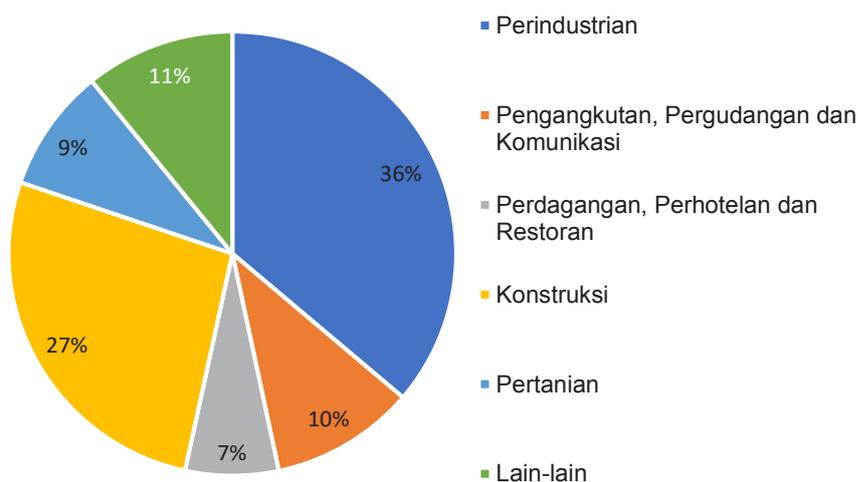
Pembiayaan komersial Perseroan adalah pembiayaan kepada perusahaan berskala besar, baik BUMN maupun milik swasta, dengan plafon antara Rp5 miliar sampai dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit. Pembiayaan ini berskala besar, sehingga mungkin saja Perseroan akan bersinergi dengan Bank lain untuk membentuk *Loan Syndication* dalam rangka memenuhi kebutuhan dana nasabah untuk membiayai proyek berskala besar, sebagai contoh pembiayaan terkait proyek infrastruktur.

Perseroan senantiasa memperhatikan segmentasi bisnis yang menjadi sasaran, di mana pembiayaan komersial menjadi salah satu fokus manajemen dalam upaya untuk terus mengembangkan bisnis secara berkelanjutan. Hingga saat ini, kinerja pembiayaan segmen komersial menunjukkan tren yang terus meningkat, seiring dengan peningkatan kinerja pembiayaan Perseroan secara keseluruhan.

Manajemen Perseroan telah menerapkan cara-cara yang lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Strategi yang digunakan mencakup penyeleksian yang ketat terhadap nasabah komersial berdasarkan *Know Your Customer* (KYC), dan dengan memprioritaskan ekspansi pembiayaan kepada nasabah yang ada dan telah menunjukkan catatan pengembalian pinjaman yang baik. Strategi ini didukung dengan pemantauan yang lebih ketat lagi terhadap pembiayaan yang telah disalurkan untuk menahan munculnya *Non Performing Financing* (NPF) baru akibat tekanan kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Sementara itu, Perseroan juga telah melakukan proses percepatan restrukturisasi fasilitas pembiayaan bagi nasabah yang teridentifikasi telah terkena dampak dari perlambatan ekonomi.

Dengan tetap diimbangi oleh pengelolaan risiko yang baik dan terukur, total pembiayaan komersial Perseroan mencapai Rp6.067.050 juta di tahun 2017, meningkat 20,68% dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp5.027.182 juta. Dari sisi kontribusi, pembiayaan komersial memberikan kontribusi terbesar yakni 32,93%. Komposisi ini sejalan dengan kebijakan manajemen terkait prinsip penyebaran risiko, dimana manajemen Perseroan melakukan distribusi portofolio segmentasi pembiayaan secara lebih terjaga.

Penyebaran Pembiayaan Komersial berdasarkan sektor industri



Berdasarkan konsep *spreading risk* dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) pada sektor Perindustrian memiliki porsi terbesar, yaitu sebesar Rp2.196.942 juta atau sebesar 36,21% dari portofolio pembiayaan komersial yang sebesar Rp6.067.050 juta. Urutan berikutnya ditempati oleh pembiayaan untuk sektor Pengangkutan, Pergudangan dan Komunikasi yang mencapai Rp634.660 juta (10,46%), lalu kemudian sektor Perdagangan, Perhotelan dan Restoran sebesar Rp408.451 juta (6,73%), sektor Konstruksi sebesar Rp1.625.656 juta (26,79%), Pertanian yang sebesar Rp544.575 juta (8,98%). Sedangkan pembiayaan untuk lain-lain dalam kategori pembiayaan komersial tercatat sebesar Rp656.766 juta (10,83%).

Dilihat dari tujuan pembiayaan, penyebaran pembiayaan komersial kepada pembiayaan modal kerja dan investasi. Pembiayaan modal kerja ini umumnya menggunakan produk pembiayaan *Musyarakah* sebesar Rp3.075.376 juta, dan produk pembiayaan *Qard Value Chain* Sebesar Rp338.943 juta. Sedangkan untuk pembiayaan investasi umumnya menggunakan produk *Murabahah* sebesar Rp1.232.900 juta dan *Ijarah Muntahiyah bit tamlik* (IMBT) sebesar Rp145.435 juta.

d. Pembiayaan Konsumer

Pembiayaan Konsumer selama tiga tahun berturut-turut terus memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan bisnis Perseroan.

Saat ini produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah di segmen ini difokuskan pada 2 produk utama yakni:

1. KPR (Kepemilikan Rumah),
2. KMF (Kepemilikan Multi Faedah)

Selain dua produk di atas, terdapat beberapa produk pembiayaan konsumer lainnya antara lain :

3. Gadai
4. Lainnya :
 - a. Dana Talangan Haji
 - b. KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor)
 - c. PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas)
 - d. KLM (Kepemilikan Logam Mulia)

Kinerja Pembiayaan Konsumer selama tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah)

Produk Konsumer	Outstanding		
	2015	2016	2017
KPR	2.344.945	2.675.677	4.041.748
KMF	781.745	871.298	887.902
Gadai	172.877	162.323	142.394
Lainnya	232.742	305.712	113.647
Total	3.532.310	4.015.010	5.185.691

1. KPR BRISyariah iB

Produk KPR BRISyariah iB mempunyai 2 (dua) skema produk :

a. KPR Faedah

Merupakan produk pembiayaan BRISyariah yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. KPR Faedah selain dapat digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah dapat juga digunakan untuk renovasi rumah, pembelian tanah kavling serta fitur *refinancing* aset untuk tujuan konsumtif. Produk ini ditawarkan dengan skema akad *murabahah* dengan *wakalah* dan akad *ijarah muntahiyah bit tamlil*.

Pada pertengahan tahun 2016, BRISyariah meluncurkan *rebranding* KPR BRISyariah menjadi KPR Faedah, diantara fitur keunggulan KPR Faedah antara lain :

- a. Margin yang kompetitif
- b. Tujuan penggunaan *flexible* dengan akad IMBT, dimana nasabah dapat mengajukan pembiayaan *refinancing asset* dan juga untuk top up pembiayaan *existing*. Akad IMBT ini juga baru diluncurkan di tahun 2016.

Dengan fitur unggulan tersebut membuat masyarakat semakin mudah dan murah mengajukan KPR BRISyariah iB.

Penyaluran KPR Faedah selama 2017 yaitu sebesar Rp2.643.431 juta per 31 Desember 2017 meningkat sebesar Rp768.907 juta atau 41,02% jika dibandingkan dengan penyaluran 2016 yang sebesar Rp1.874.524 juta.

b. KPR Sejahtera

Selain KPR untuk masyarakat umum, Perseroan juga menyediakan produk khusus bagi nasabah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRISyariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

KPR Sejahtera BRISyariah iB memiliki beberapa keunggulan yang salah satu di antaranya adalah uang muka yang ringan yang selama ini selalu menjadi kendala bagi masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk menyisihkan uang dalam jumlah yang besar dalam waktu yang relatif singkat. Pengguna KPR BRISyariah juga dipermudah dengan cicilan tetap yang meringankan dengan tenor maksimal 15 tahun. BRISyariah mengeluarkan Program Uang Muka 5%, sebagai *gimmick marketing* bagi KPR Sejahtera BRISyariah iB, selain itu juga Pemerintah memberikan dana Subsidi Bantuan Uang Muka bagi nasabah KPR Sejahtera, sehingga Nasabah hanya membayar Uang Muka sekitar 1%. Perseroan juga ikut serta pada Pameran Rumah Rakyat yang diselenggarakan oleh KEMENPUPERA bekerjasama dengan instansi pemerintahan di beberapa kota KPR Sejahtera juga menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar dari total pembiayaan yang disalurkan Perseroan di segmen Konsumer dimana selama 2017 pembiayaan KPR Sejahtera yang disalurkan mencapai Rp1.398.317 juta, meningkat sebesar Rp597.164 juta atau 74,54% jika dibandingkan dengan penyaluran selama 2016 yang mencapai Rp801.153 juta.

2. KMF BRISyariah iB

KMF BRISyariah iB dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan tetap baik yang masih aktif sebagai karyawan maupun yang sudah purna bakti. Produk ini menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian barang-barang konsumtif dan akad *ijarah* untuk pembelian paket jasa. Pembiayaan KMF untuk karyawan aktif ditujukan untuk karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) di Perseroan. EmBP adalah program kerja sama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam sebuah MoU berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada Karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Perseroan, dengan persyaratan yang relatif mudah/ringan bagi Karyawan. KMF mendapat sambutan hangat dari karyawan dan terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan sejak diperkenalkan pertama kali.

Selain untuk karyawan aktif, BRISyariah membidik segmen purna bakti melalui kerja sama dengan PT Taspen sebagai mitra bayar pensiun PNS. Dengan adanya kerja sama sebagai mitra bayar Taspen ini maka BRISyariah memproyeksikan pertumbuhan yang cukup signifikan dari pembiayaan KMF Purna.

Di tahun 2017, KMF BRISyariah mencapai angka sebesar Rp887.902 juta atau mengalami peningkatan sebesar Rp16.604 juta atau 1,91% jika dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2016 yang tercatat sebesar Rp871.298 juta. Hal ini ditunjang oleh semakin banyaknya kerja sama EMBP dengan Perusahaan/instansi sebagai perpanjangan tangan Perseroan untuk akuisisi nasabah, di samping terus melakukan pembenahan di sisi internal seperti simplifikasi proses dan penggunaan Aplikasi Penunjang Pembiayaan Elektronik (APPEL), selain itu hadirnya produk baru yaitu KMF Purna BRISyariah iB, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pensiunan, juga turut mendorong pertumbuhan pembiayaan KMF. Fitur Produk KMF Purna BRISyariah iB memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan produk sejenis, diantaranya dapat membiayai calon nasabah hingga maksimal usia 75 tahun saat jatuh tempo pembiayaan, jangka waktu pembiayaan hingga 180 bulan (15 tahun), dan memberikan nilai pembiayaan hingga Rp500 juta.

Posisi nilai *outstanding* pembiayaan per 31 Desember berdasarkan segmen untuk tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Mikro	3.460.690	21,30%	3.861.785	22,38%	3.551.874	19,28%
Konsumer	3.532.310	21,75%	4.015.010	23,27%	5.185.691	28,15%
Ritel dan Kemitraan	4.407.609	27,13%	4.352.810	25,22%	3.616.706	19,63%
Komersial	4.843.429	29,82%	5.027.182	29,13%	6.067.050	32,93%
Total	16.244.038	100,00%	17.256.787	100,00%	18.421.321	100,00%

e. Treasury & International Banking Group

Treasury & International Banking Group memiliki beberapa tugas utama yaitu melakukan pengelolaan likuiditas, pengelolaan asset & liabilitas, manajemen *pricing* & penentuan tingkat imbal hasil, optimalisasi pendapatan, peningkatan *fee based income* dan pengelolaan risiko terkait antara lain risiko likuiditas, risiko pasar berupa Posisi Devisa Netto (PDN) dan perubahan nilai tukar.

Seiring dengan perkembangan bisnis sebagai bank devisa, maka *Treasury & International Banking Group* juga melakukan pengembangan dan penyediaan produk serta layanan bisnis devisa untuk mendukung bisnis utama BRISyariah antara lain bisnis pertukaran valas, *remittance dan trade finance*. Selain itu bisnis devisa terkait layanan Haji dan Umrah juga sudah dilakukan dimana BRISyariah telah mendapatkan kepercayaan dari pemerintah sebagai salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH) untuk calon Jamah Haji regular dan khusus.

Sampai dengan Desember 2017, total portofolio yang dikelola Treasury sebesar Rp7.661.068 juta terdiri dari penempatan pada Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp6.895.346 juta, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebesar Rp250.000 juta dan Sukuk Korporasi senilai Rp515.722 juta.

Melalui upaya pengelolaan likuiditas yang baik selama tahun 2017 Treasury & International Banking Group mampu menjaga kestabilan dan penyediaan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan bisnis pembiayaan, menurunkan beban atas dana dengan tingkat imbal hasil yang efisien serta menjaga indikator kinerja antara lain terlihat dalam rasio likuiditas seperti rasio pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM), Posisi Devisa Netto (PDN), *Cash Ratio*, sesuai aturan dari regulator yang berlaku.

Rencana bisnis kedepannya yang akan dilakukan oleh Treasury & International Banking untuk mendukung pencapaian bisnis bank antara lain yaitu:

1. Strategi pendanaan tetap diutamakan berasal dari dana berbiaya murah (*CASA*) dan berbasis nasabah ritel. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat imbal hasil yang murah, sehingga beban dana secara keseluruhan akan semakin efisien.
2. Pengembangan produk sumber pendanaan yang disesuaikan (*matching*) dengan jangka waktu umur pembiayaan sehingga memperkecil risiko *maturity dan pricing mismatch*.
3. Strategi *yield enhancement* yaitu optimalisasi kelebihan likuiditas (*excess liquidity*) jangka pendek untuk mendapatkan *yield* yang lebih tinggi. Dilakukan melalui penataan kembali portofolio aktiva produktif dengan tingkat imbal hasil yang rendah ke tingkat imbal hasil yang lebih tinggi dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)
4. Meningkatkan pendapatan operasional lainnya melalui berbagai aktivitas antara lain: trading surat berharga, pertukaran valas untuk nasabah *wholesales*, agen penjual Sukuk Ritel, *hedging* syariah dan Layanan *remittance, trade finance* ekspor impor serta SKBDN.
5. Meningkatkan aktivitas pemasaran produk Treasury & International Banking yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan nasabah, seperti layanan transaksi surat berharga di *secondary market, hedging* syariah, pertukaran valas dan produk bank devisa lainnya. Strategi yang dilakukan yaitu:
 - a. Pengembangan *delivery channel* layanan devisa untuk memperluas jangkauan layanan kepada nasabah.
 - b. Perluasan *counterpart* khususnya dalam hal pengadaan *banknotes* SAR untuk memenuhi kebutuhan nasabah akan denominasi tertentu khususnya denominasi kecil sehingga dapat memberikan harga yang lebih kompetitif.
 - c. Penambahan bank koresponden dan bank depository koresponden yang didukung pengembangan aplikasi khusus untuk mengembangkan layanan *remittance* dengan cakupan yang lebih luas.

Produk Pendanaan

Perseroan mengelompokkan produk pendanaannya menjadi sebagai berikut:

a. Tabungan

Tabungan BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB mencakup Tabungan Faedah BRISyariah iB, Tabungan Haji BRISyariah iB, TabunganKu BRISyariah iB, Tabungan Impian BRISyariah iB, Tabungan Faedah Mikro BRISyariah iB dan yang terakhir SimPel (Simpanan Pelajar) iB. Tabungan Faedah BRISyariah iB sendiri terbagi menjadi beberapa segmen yaitu segmen Individu, Bisnis Non-Individu, Co-Branding, dan Payroll.

Tabungan Faedah BRISyariah iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 Faedah yang ditawarkan yakni: Setoran awal yang ringan minimal Rp100.000, Gratis biaya administrasi bulanan Tabungan, Gratis biaya administrasi bulanan Kartu ATM, Murah biaya tarik tunai di Jaringan ATM Bersama/ATM Prima /ATM BRI, Murah biaya cek

saldo di Jaringan ATM Bersama/ATM Prima / ATM BRI, Murah biaya Transfer di Jaringan ATM Bersama/ATM Prima / ATM BRI, Murah biaya transaksi belanja di jaringan Debit Prima/EDC BRI bagi nasabah dengan saldo sebelum transaksi di atas Rp500.000,-. Semua faedah yang ditawarkan tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRISyariah iB dan menjadikannya produk yang paling banyak diminati.

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad *Mudharabah* Mutlaqah. Seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, volume Tabungan Haji BRISyariah iB selalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Nasabahnya dengan terencana dengan menggunakan mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

Tabungan Faedah Mikro BRISyariah iB merupakan tabungan dengan akad *wadi'ah* yang diperuntukkan bagi nasabah yang menerima fasilitas pembiayaan mikro untuk mempermudah transaksi usaha nasabah.

Simpanan Pelajar (SimPel) iB merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi siswa PAUD sampai dengan SMA atau sederajat yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Pada tahun 2017, produk Tabungan BRISyariah mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp6.020.136 juta atau tumbuh sebesar 16,67%, meningkat dari tahun sebelumnya Rp5.159.882 juta pada tahun 2016.

Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Perseroan maka segmen mikro masih merupakan potensi yang besar sehingga laju pertumbuhannya pun diharapkan akan terus meningkat. Saat ini Perseroan telah menawarkan produk Tabungan Mikro kepada para nasabah yang tergolong dalam segmen ini. Sepanjang tahun 2017, pendanaan Mikro mencapai Rp2,346 triliun, penghimpunan dana di segmen Mikro secara konsisten terus meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini ditujukan agar UMS (Unit Mikro Syariah) dapat berdiri secara mandiri. Ke depannya, manajemen telah mempersiapkan berbagai inovasi produk agar dapat lebih melayani segmen Mikro di masa mendatang.

b. Giro

Giro BRISyariah iB

Adalah bentuk simpanan yang diterima luas di kalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Giro Faedah BRISyariah iB diperuntukkan baik untuk perseorangan maupun non-perseorangan dimana Nasabah dapat memilih penempatan dalam akad *Wadi'ah* maupun *Mudharabah*. Pada akhir tahun 2016, produk Giro BRISyariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp1.129.560 juta atau tumbuh sebesar 20,32% meningkat dari tahun sebelumnya Rp938.831 juta pada tahun 2015.

Pada tahun 2017, produk Giro BRISyariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan Rp1.908.879 juta atau tumbuh sebesar 68,99% meningkat dari tahun sebelumnya Rp1.129.560 juta pada tahun 2016.

c. Deposito

Deposito BRISyariah iB

Adalah produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Produk Deposito BRISyariah iB mencakup Deposito BRISyariah iB, Deposito Pesat BRISyariah iB dan Simpanan Faedah BRISyariah iB.

Deposito BRISyariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp2.500.000,- dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Deposito Pesat BRISyariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp50.000.000,- yang memberikan bagi hasil yang lebih besar. Sedangkan Simpanan Faedah BRISyariah iB merupakan produk deposito baru dari BRISyariah dengan minimal penempatan Rp500.000.000 dan jangka waktu kurang dari 1 bulan. Produk-produk ini ditawarkan dengan berbagai fasilitas yaitu ARO (Automatic Roll Over) dimana terdapat pilihan untuk ARO secara kapitalisasi dan nonkapitalisasi. Keunggulan dari produk ini mencakup nisbah bagi hasil yang kompetitif. Pada akhir tahun 2016, produk Deposito BRISyariah mampu terhimpun sebesar Rp15,7 triliun atau tumbuh sebesar 9% meningkat dari tahun sebelumnya Rp14,4 triliun pada tahun 2015.

Pada tahun 2017, produk Deposito BRISyariah mampu terhimpun sebesar sebesar Rp18.430.069 juta atau tumbuh sebesar 17,17% meningkat dari tahun sebelumnya Rp15.729.625 juta pada tahun 2016.

Kerjasama dengan sejumlah institusi

Perseroan terus mengembangkan layanan di bidang pendanaan komersial. Pada tahun 2015 sampai dengan 2017, beberapa kerja sama baru dengan sejumlah institusi ternama maupun milik pemerintah telah berhasil diperoleh, diantaranya melalui:

1. Kerjasama dengan Institusi Pendidikan, Perusahaan, Komunitas dll untuk kerjasama layanan dan jasa perbankan syariah yaitu Layanan gaji secara terpusat, Layanan SPP Online, Virtual Account, Giro perusahaan, layanan CMS, Tabungan Siswa, Simpel PIP, Tabungan Haji baik di institusi pemerintah maupun swasta.
2. BRIS sebagai Bank penerima setoran pajak dan bukan pajak (Bank Persepsi) melalui MPN Gen 2 (Modul Penerimaan Negara Generasi 2).
3. BRIS sebagai Bank Pengelola Rekening khusus (Reksus) SBSN (Surat Berharga Syariah Negara).
4. BRIS sebagai Bank Induk PLN untuk penampungan dana receipt .
5. Pelimpahan Jasa Giro Rekening-rekening Pemerintah ke Kas Negara yang diikutsertakan dalam Program Treasury Notional Pooling (TNP).
6. Laboratorium perbankan syariah (SALAM) pada lebih dari 50 Perguruan Tinggi.

Posisi nilai *outstanding* pendanaan per 31 Desember untuk tiga tahun terakhir

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	2015		2016		2017	
	Rp	%	Rp	%	Rp	%
Giro	938.831	4,67	1.129.560	5,13	1.908.879	7,24
Tabungan	4.412.127	21,93	5.159.882	23,43	6.020.136	22,84
Deposito	14.772.700	73,40	15.729.625	71,44	18.430.069	69,92
Total	20.123.658	100,00	22.019.067	100,00	26.359.084	100,00

Pertumbuhan jumlah nasabah untuk tiga tahun terakhir

	Posisi per 31 Desember		
	2015	2016	2017
Nasabah Pembiayaan			
Jumlah Rekening (<i>Number of Account</i>)	106.006	114.414	137.215
Jumlah Nasabah (<i>Number of Customers</i>)	86.003	92.525	115.978
Nasabah Pendanaan			
Jumlah Rekening (<i>Number of Account</i>)	1.867.739	2.033.691	2.427.072
Jumlah Nasabah (<i>Number of Customers</i>)	1.738.702	1.896.216	2.286.414

Selama tiga tahun terakhir, Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah nasabahnya, baik yang merupakan nasabah pembiayaan maupun nasabah pendanaan. Pada tahun 2017, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,93% dan 25,35% untuk jumlah rekening dan jumlah nasabah pembiayaan, dan sebesar 19,34% dan 20,58% untuk jumlah rekening dan jumlah nasabah pendanaan. Hal tersebut merupakan peningkatan pertumbuhan yang

cukup tajam dibandingkan dengan peningkatan dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kegiatan pemasaran Perseroan secara efektif telah berhasil menumbuhkan *customer base*, dimana *customer base* merupakan salah satu landasan Perseroan dalam mengembangkan bisnisnya dan merupakan indikator kepercayaan masyarakat kepada layanan Perseroan.

16.5. Jaringan Kantor

Per 31 Desember 2017, Perseroan memiliki 54 kantor cabang, 207 kantor cabang pembantu, 11 kantor kas dan 1.044 kantor layanan syariah.

16.6. Strategi Pengembangan

a. Kantor Layanan Syariah

Pengembangan jaringan fisik di samping pembukaan kantor cabang baru juga mencakup pembukaan kantor layanan syariah baru. Sampai dengan tahun 2017, BRISyariah telah memiliki 1.044 Kantor Layanan Syariah (KLS) termasuk menjadi salah satu layanan yang tersedia pada Sentra Layanan Keuangan Bank BRI. Jumlah transaksi di Kantor Layanan Syariah pada tahun 2017 mencapai 57.506 transaksi dengan nominal transaksi sebesar Rp772,2 miliar. Sedangkan untuk jumlah *outstanding* tabungan yang dicapai pada tahun 2017 adalah *Number of Accounts* (NOA) sebanyak 17.892 rekening dan volume Rp42,2 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu NOA sebanyak 13.184 rekening dan volume Rp34,7 miliar.

Sementara itu, transaksi terkait dana Haji pada KLS khususnya setoran awal dana Haji, tercatat pada posisi 31 Desember 2016 sejumlah 470 transaksi senilai Rp11,8 miliar, dan pada posisi 31 Desember 2017 sejumlah 2.653 transaksi senilai Rp66,3 miliar. Peningkatan secara signifikan tersebut terjadi karena pada tahun 2017 bank yang diizinkan oleh pemerintah untuk melayani nasabah Haji (bank transit) adalah bank syariah.

b. Jaringan Elektronik

Pengembangan jaringan elektronik terus dilakukan dengan memperbesar kapasitas jaringan, selain melalui penyempurnaan fitur-fitur yang telah ada. Perseroan juga menambah jumlah ATM on site dan off site dari sebanyak 504 unit di akhir tahun 2016, menjadi 553 unit di akhir tahun 2017. Selain itu, bagi mitra yang bekerja sama dengan Perseroan, kartu ATM Perseroan juga dapat dipergunakan di jaringan ATM Bersama dan Prima tanpa dibebankan biaya tarik tunai, biaya transfer, biaya cek saldo dan pembelian (melalui jaringan ATM Prima) dengan subsidi biaya 50% jika saldo nasabah di atas sama dengan Rp 500.000,-.

E-Banking BRISyariah

Perseroan senantiasa memiliki komitmen yang tinggi terhadap setiap layanan perbankan yang diberikan. Komitmen ini sejalan dengan visi Perseroan untuk menjadi bank ritel modern dengan menawarkan layanan e-banking yang luas kepada para nasabahnya. Dengan dukungan kemampuan Divisi TI yang andal, Perseroan terus mengembangkan produk berbasis elektronik yang dimiliki saat ini di samping mengembangkan fitur-fitur layanan baru sesuai dengan kondisi dan permintaan pasar.

Layanan e-banking Perseroan bertujuan memberikan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan beragam transaksi perbankan seperti transfer dana dari dan ke rekening nasabah, pembayaran tagihan, melakukan isi ulang, dan cek saldo tanpa harus antri di kantor cabang. Di tahun 2017, e-banking Perseroan berhasil mencatatkan kinerja yang sangat baik. Beberapa layanan maupun fitur elektronik baru berhasil diimplementasikan di sepanjang tahun, termasuk di antaranya Layanan BRISSMART yang merupakan layanan keuangan tanpa kantor pertama yang berhasil diluncurkan oleh sebuah bank syariah.

Pada tahun 2017, Perseroan juga telah mengembangkan fitur-fitur layanan baru yang dapat memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, seperti transaksi transportasi *online*, *e-commerce*, dan pengembangan fitur multi rekening (dalam hal nasabah memiliki lebih dari satu rekening, maka nasabah dapat memilih untuk menggunakan rekening yang diinginkan pada internet dan *mobile banking*). Selain itu, Perseroan juga telah mengembangkan *platform* aplikasi *smart phone* yang

terintegrasi yang bernama “BRIS Online” untuk memberi kenyamanan bagi nasabah dalam bertransaksi secara *mobile*.

EDC (Electronic Data Capture)

BRIS EDC yang dioperasikan Perseroan memiliki multi fungsi yang disesuaikan dengan kebutuhan Nasabah, yaitu:

1. EDC Mini Banking, berfungsi sebagai pengganti layanan finansial dan non finansial ATM.
2. EDC Mikro, membantu layanan bisnis mikro dalam proses penagihan.
3. EDC Mitra Payment Point, layanan bagi nasabah Perseroan yang ingin menggunakan EDC Perseroan sebagai sarana *payment point*.
4. EDC Purchase, layanan kepada mitra *merchant* Perseroan untuk memudahkan proses pembayaran. Jumlah mesin EDC per 31 Desember 2017 sebanyak 978 unit.

Mitra Bisnis Payment Point Online Bank (PPOB)

Jumlah mitra PPOB terus meningkat dan saat ini Perseroan telah membuka sebanyak lebih dari 39.000 loket *payment point* serta melakukan kerjasama strategis dalam hal penerimaan pembayaran tagihan listrik PLN dengan Alfa Group.

Cash Management System (CMS)

Cash Management System (CMS) Perseroan menawarkan layanan manajemen keuangan yang ditujukan untuk membantu nasabah institusi/korporasi mengendalikan dan mengefektifkan pengelolaan keuangannya. Sistem ini memungkinkan Nasabah korporat untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan secara elektronik secara langsung, real time online, dari manapun dan kapanpun selama 24 jam. Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web dengan dukungan keamanan SSL (*Secure Socket Layer*) bersertifikat Verisign 128 bit dan harus di akses menggunakan *Virtual Private Network*. Dalam rangka melindungi transaksi nasabah, sistem ini juga dilengkapi dengan hard token BRIS dan Multi Layer User untuk mencegah user yang tidak berkepentingan melakukan transaksi. Sejak diimplementasikan pada tahun 2011, institusi pengguna CMS semakin meningkat dengan jumlah pengguna di akhir tahun 2017 sebanyak 1.206 institusi dibandingkan dengan tahun 2016 sebanyak 1.002 institusi.

smsBRIS & mobileBRIS

Layanan smsBRIS adalah layanan perbankan 24 jam bagi nasabah Perseroan melalui telepon seluler (ponsel) dengan cara mengetikkan perintah SMS dan mengirimkan SMS ke *short dial code* Perseroan, yaitu: 3338. Perseroan juga menyediakan layanan mobileBRIS sebagai aplikasi berbasis SMS dan GPRS dari Perseroan yang dapat digunakan untuk mengakses rekening Tabungan Faedah BRISyariah iB kapanpun dan dimanapun.

Fasilitas layanan mobileBRIS dapat memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi finansial dan non finansial dan didukung oleh platform sistem operasi utama smartphone seperti Android, Blackberry, iOS dan Windows. Nasabah telah dapat menikmati tambahan menu konten yang diluncurkan di tahun 2014 seperti waktu sholat, arah kiblat, hadits pilihan, digital tasbih serta *juz amma*. Dengan menu konten ini pula, Nasabah lebih mudah untuk mengetahui lokasi ATM dan kantor Cabang Perseroan serta informasi promo merchant yang sedang berlaku. Layanan smsBRIS dan mobileBRIS mendapat sambutan yang hangat dari nasabah. Pada akhir tahun 2017, jumlah pengguna layanan SMS/Mobile Banking sekitar 1.345.489 pengguna, dengan jumlah frekuensi mencapai hampir 1.333.804 transaksi. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 110% dibandingkan dengan jumlah pengguna dan transaksi pada tahun 2016 yaitu 630.912 pengguna dan 621.284 transaksi.

Solusi Pendidikan BRISyariah

Sebagai salah satu bentuk perhatian pada dunia pendidikan, Perusahaan telah menyiapkan layanan solusi pendidikan khususnya untuk memudahkan proses pembayaran biaya pendidikan mulai dari tingkat pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dengan menyesuaikan kondisi lembaga pendidikan, Perusahaan menyiapkan beragam solusi pembayaran seperti mekanisme *host to host*, *point to host*, *auto debit* atau *virtual account*. Akses pembayaran pun telah ditambahkan tidak hanya di counter

Perseroan, namun pada e-channel seperti ATM, EDC dan mobile banking, serta melalui mekanisme *virtual account online* dari jaringan ATM Bersama & Prima. Di samping layanan pembayaran, kerja sama Perseroan dengan lembaga pendidikan juga mencakup penyediaan kartu identitas siswa yang juga berfungsi sebagai kartu CoBranding ATM BRIS, layanan cash management hingga penyediaan aplikasi mini banking untuk sarana pembelajaran siswa.

Selain itu, Perseroan juga ikut serta memperkenalkan produk tabungan dan menumbuhkan budaya menabung Siswa. Bentuk terobosan yang berhasil dilaksanakan di tahun 2015 adalah kerja sama Perseroan dengan 50 Perguruan Tinggi dalam penyediaan laboratorium perbankan syariah (*SALAM*), dan dalam pengelolaan pembayaran SPP serta layanan keuangan lain. Khusus untuk layanan pembayaran SPP, Perseroan kini telah melayani pembayaran SPP untuk 65 institusi.

Internet Banking BRISyariah

Layanan Internet Banking BRISyariah yang diluncurkan pada akhir tahun 2014, mulai mendapatkan perhatian dari nasabah, dan di tahun 2017 menjangkau sebanyak 10.614 pengguna dengan jumlah volume dan jumlah transaksi mencapai 28.221. Fasilitas ini merupakan layanan transaksi perbankan melalui jaringan internet yang dapat diakses selama 24 jam, kapan dan di manapun nasabah berada menggunakan *personal computer*, *notebook* atau *smartphone* selama terdapat koneksi jaringan internet. Nasabah akan semakin menikmati kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi.

Dengan Internet Banking BRISyariah, nasabah dapat melakukan transaksi non finansial, seperti informasi saldo dan mutasi rekening, dan transaksi finansial, seperti transfer antarrekening BRISyariah, transfer *Online* Antar Bank, SKN (Kliring) dan RTGS. Untuk kenyamanan dan keamanan bertransaksi, Internet Banking BRISyariah dilengkapi dengan dukungan keamanan jaringan SSL (*Secure Socket Layer*) bersertifikat Verisign 128 bit dan e-token BRISyariah.

Kartu ATM CoBranding Host To Host

Fitur layanan dari *CoBranding* kartu ATM Perseroan yang diluncurkan pada tahun 2014 terus dikembangkan sampai dengan saat ini. Bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM), fitur ini memungkinkan terjadinya mekanisme pertukaran data transaksi antara Perseroan dan LKM secara *host to host* dan *real time*. Saat ini, nasabah LKM sudah dapat melakukan beberapa transaksi tambahan yakni transfer *online* dan fungsi kartu pembayaran di EDC jaringan Prima di samping transaksi awal saat diperkenalkan seperti ganti PIN, *inquiry* saldo dan tarik tunai di jaringan ATM Perseroan, Bersama dan Prima.

Virtual Account Online

Perseroan juga telah mengimplementasikan fitur *Virtual Account Online*. Fitur ini memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transfer *real time online* ke rekening nasabah menggunakan jaringan ATM Perseroan, Bersama & Prima. Fitur *Virtual Account Online* ini dijadikan sebagai dasar untuk pengembangan solusi bisnis e-banking lainnya semisal pembayaran biaya pendidikan dan layanan pembayaran e-commerce yang dapat diakses melalui jaringan ATM Bersama dan Prima. Saat ini terdapat sebanyak ± 50 Institusi pengguna *Virtual Account* BRISyariah.

Layanan Pembayaran Rumah Sakit

Mulai tahun 2017, Perseroan telah mengembangkan layanan pembayaran tagihan rumah sakit yang terintegrasi secara *host to host* dengan internal sistem rumah sakit. Perseroan menempatkan petugas yang dapat beroperasi selama 24 jam di lingkungan rumah sakit. Layanan ini bertujuan untuk memudahkan pihak rumah sakit dalam penerimaan pembayaran dan *cash handling*. Saat ini layanan pembayaran telah beroperasi di 2 rumah sakit.

E-Banking BRISyariah:

1. E-channel BRISyariah

Pertumbuhan e-banking Perseroan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan / E Channel	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
	Layanan E-Banking			
1	ATM BRIS			
	- Mesin	504	504	553
	- Transaksi Pengguna ATM BRIS	15.596.037	15.837.408	16.622.571
	- Nasabah pemegang kartu ATM	1.359.278	1.642.420	1.844.462
2	EDC			
	- Mesin	1.116	1.021	978
	- Transaksi pengguna EDC	4.764.858	88.888	787.781
3	PPOB			
	- Mitra	22	17	13
	- Loket	38.760	38748	39494
	- Volume Transaksi PPOB	7 juta/bln	8 juta/bln	8,5 juta/bln
4	Cash Management System			
	- Institusi	849	1.002	1.206
	- Transaksi Pengguna CMS	200.005	16.286	343.856
5	Internet Banking			
	- Pengguna	18.349	3.815	12.000
	- Jumlah transaksi	35.593	-	342.563
6	SMS/ Mobile Banking			
	- Pengguna/ user	292.172	630.912	1.345.489
	- Jumlah Transaksi	525.295	621.284	1.333.804
7	Co Branding			
	- Institusi	291	286	296
	- Jumlah Kartu Co Branding	241.811	296.853	314.832

2. Banking Solution

No	Banking Solution	Jumlah
1	SPP BRISyariah	± 50 Institusi Pendidikan
2	Virtual Account	± 54 Institusi
3	Layanan Pembayaran RS	±2 institusi Rumah Sakit

16.7. Strategi usaha

Perseroan telah membuat beberapa strategi untuk memenangkan persaingan usaha dan meningkatkan pangsa pasarnya, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi Pendanaan

Kelompok Dana Haji:

- menjadi bank pilihan utama untuk penempatan dana haji yang dikelola oleh Pemerintah.
- pengembangan jaringan melalui pembukaan KLS di kantor-kantor unit kerja BRI untuk melayani calon jamaah haji.

Kelompok Dana Non Haji:

- menjadi bank syariah pilihan bagi penyaluran gaji PNS, dan TNI/POLRI.
- menjadi bank syariah pembayar pensiun pilihan.
- mengoptimalkan KLS sebagai sarana *cross selling* dan pertumbuhan dana murah.
- menjadi bank unggulan untuk pembayaran SPP institusi pendidikan.

2. Strategi Pembiayaan

Jangka Pendek:

- penyaluran pembiayaan kepada perusahaan BUMN dan turunannya.
- peningkatan produk dan layanan komprehensif dalam rangka peningkatan *fee based income* khususnya untuk pembiayaan komersial dan bisnis valuta asing.

Jangka Panjang:

- meningkatkan *market share* perbankan ritel melalui inovasi pengembangan produk program Pemerintah.
- meningkatkan pembiayaan berbasis *payroll* dan pensiun.

3. Operasional dan Teknologi Informasi

Jaringan Kantor dan Sumber Daya:

- ekspansi jaringan dengan optimalisasi sinergi dengan induk melalui program KLS.
- peningkatan kemampuan tenaga pemasar pembiayaan khususnya untuk segmen konsumen dan mikro.
- peningkatan sistem KPI untuk mendukung percepatan bisnis dan sinergi dengan perusahaan induk BRI.

Perbankan Digital:

- pengembangan dan peningkatan metode pembayaran QR-Code and NFC-based (BRIZZI) melalui sinergi dengan BRI sebagai bagian dari pengembangan strategi digital banking.
- mengadopsi sistem pembiayaan "BRISpot" dan "MY BRI" sebagai strategi akselerasi pertumbuhan bisnis

4. Perbaikan Kualitas Aset Produktif

Mitigasi Risiko Pembiayaan

- pengkinian sistem rating risiko pembiayaan.
- evaluasi kebijakan pembiayaan secara berkala sebagai mitigasi risiko pembiayaan langsung dan tidak langsung.
- kecukupan pencadangan sebagai bagian yang terintegrasi dalam manajemen risiko pembiayaan.
- independensi Analis Pembiayaan dan Auditor untuk pengelolaan portofolio yang efektif.

Perbaikan Kualitas Aset

- fokus pada penyelesaian 25 nasabah bermasalah terbesar.
- percepatan proses eksekusi jaminan pembiayaan bermasalah.
- monitoring kualitas aset produktif harian secara terintegrasi.

16.8. Prospek Usaha

Perseroan masih tetap optimis dalam menghadapi usaha di tahun 2018 meskipun mulai memasuki tahun politik diantaranya pemilihan daerah serentak 2018 dan persiapan pemilihan umum tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan indikator baik finansial maupun non finansial di tahun 2017. Secara finansial antara lain dengan adanya pertumbuhan pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta laba bersih juga meningkat dari tahun 2016. Namun demikian pemberian pembiayaan tetap dilakukan secara selektif dan hati-hati, kualitas pembiayaan selalu dijaga dan tetap meminimalkan hapus buku, mengingat kondisi makro ekonomi di tahun 2017.

Pembiayaan Mikro

Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah diyakini masih akan terus meningkat lagi ke depannya. Potensi yang sangat menjanjikan ini akan berdampak positif terhadap kinerja Perseroan dalam menjalankan roda usahanya untuk membantu para pelaku usaha mikro, baik dari segi pembiayaan maupun dari segi pendanaan. Dalam hal ini, penerapan model bisnis baru bisnis mikro akan memainkan peran penting, sehingga pengelolaan bisnis mikro diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal bagi pertumbuhan bisnis Perseroan.

Fokus pembiayaan mikro di tahun 2018 yaitu dalam hal kualitas pembiayaan dan produktifitas tinggi dengan menerapkan visi dan misi bisnis mikro. Visi yang akan dijalankan bisnis mikro perseroan yaitu: Menjadi bisnis mikro syariah yang menguntungkan dengan ragam produk dan istiqomah memuaskan nasabah.

Misi bisnis mikro perseroan yaitu :

1. Memberikan pelayanan mikro terbaik dengan didukung SDI yang profesional, teknologi yang handal, penerapan prinsip GCG terbaik serta berlandaskan prinsip syariah
2. Memberikan keuntungan dan kontribusi yang positif kepada masyarakat, perusahaan, karyawan dan pihak yang berkepentingan
3. Meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan pengusaha mikro yang sehat untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional

Strategi pendukung untuk dapat melaksanakan visi, misi bisnis mikro perseroan di atas dibagi menjadi 6 strategi yaitu :

- A. Strategi *Good Corporate Governance* dan Manajemen Risiko
 - a. Mendorong pelaksanaan GCG dalam setiap proses bisnis mikro (*Transparansi, Akuntabilitas, Responsible, Independen dan Fairness*).
 - b. Mendorong penerapan sistem manajemen risiko dalam proses pembiayaan mikro untuk mengurangi risiko *fraud* dan kerugian
 - c. Penerapan prinsip syariah secara konsisten dalam setiap transaksi pembiayaan mikro
- B. Strategi Perbaikan Kualitas Pembiayaan
 - a. Pengawasan & *monitoring* pembayaran mikro secara konsisten (perubahan struktur organisasi pembiayaan, pembentukan komite pembiayaan mikro, monitoring putusan pembiayaan)
 - b. Mendorong restrukturisasi pembiayaan mikro yang sehat dan hati-hati
 - c. Mendorong pelaksanaan BWPP (Batas Wewenang Putusan Pembiayaan) dilaksanakan sesuai kompetensinya
 - d. Mengembangkan kompetensi seluruh karyawan mikro dengan pendidikan, *job enlargement, coaching* dan *mentoring*.
- C. Strategi Peningkatan Produktifitas
 - a. Mendorong *reward* dan *punishment* secara konsisten (Mapping SDM Mikro, ITP, Promosi, Mutasi dan Demosi)
 - b. Mendorong implementasi disiplin proses dalam proses pembiayaan mikro (*pipeline, DSAR, laporan pencapaian target, LKN, monitoring harian, dll*)
 - c. Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan tenaga pemasaran
- D. Strategi Pertumbuhan Bisnis Mikro
 - a. Memperbanyak jenis akad pembiayaan mikro disesuaikan dengan segmen bisnis yang dituju baik produktif, konsumtif dan segmen penghasilan tetap (IMBT, Murabahah, MMQ, dll)
 - b. Mengoptimalkan KUR sebagai awal pembiayaan mikro regular
 - c. Mengembangkan konsep value chain dan pemasaran secara agresif (grebek pasar, sekolah, masjid, dll)
 - d. Menyederhanakan dan mempercepat proses pembiayaan mikro
- E. Strategi Keuntungan dan Optimalisasi Jaringan Mikro
 - a. Mendorong, memetakan dan mengevaluasi keuntungan bisnis mikro secara konsisten
 - b. Mengoptimalkan jaringan mikro dan redefinisi mikro disesuaikan kebutuhan nasabah dan prinsip kehati-hatian
- F. Strategi Pendidikan Syariah ke Masyarakat
Mendorong berjalannya perekonomian secara syariah dengan aktif melakukan sosialisasi ke seluruh masyarakat

Pembiayaan Konsumer

Potensi pembiayaan multiguna di tahun 2018 diyakini masih sangat besar, dapat dilihat dari trend kelas menengah Indonesia yang cenderung konsumtif, kelas menengah ini memiliki komposisi terbesar dari komposisi kelas penduduk di Indonesia. Strategi Perseroan dalam pencapaian target KMF antara lain dengan memperbanyak kerjasama dan utilisasi instansi EMBP seperti dengan instansi Pemerintah maupun swasta, peningkatan proses SLA, memperluas segmen dengan meluncurkan produk KMF Non EmBP yang dapat dijual tanpa melalui EMBP, sedangkan untuk KMF Purna BRISyariah di tahun 2018 berusaha untuk menjadi salah satu mitra bayar PT TASPEN dan ASABRI sehingga dapat langsung membidik para pensiunan.

Prospek bisnis KPR di tahun 2018 juga diproyeksikan tetap prospektif, apalagi dengan adanya rencana Bank Indonesia menerapkan kebijakan Financial to value (FTV) secara spasial, dimana kebijakan FTV disesuaikan dengan kemampuan daya beli di masing-masing daerah. Sehingga kebijakan ini dapat menutup dalam hal susahnya memenuhi uang muka, dimana kemampuan pasar di tiap daerah berbeda-beda. Selain itu, Perseroan masih tetap menjadi partner Pemerintah untuk mensukseskan program 1 juta rumah melalui melalui produk KPR Sejahtera. Untuk KPR regular, di tahun 2018 ini Perseroan juga masih menjual program KPR Faedah dengan *special margin* yang sangat kompetitif.

Sehingga dengan dukungan KPR Sejahtera dan program KPR faedah, diharapkan dapat meningkatkan portofolio KPR BRISyariah di tahun 2018.

Pembiayaan Komersial

Guna mempertahankan ekspansi pembiayaan komersial yang berkualitas tetap terjaga dalam menghadapi tantangan di tahun 2018 dimana kondisi makro ekonomi belum stabil maka pemilihan sektor industri yang tepat masih sangat diperlukan, salah satunya fokus pada infrastruktur dan turunannya sejalan dengan program pemerintah saat ini.

Selain itu sinergi dengan induk usaha - dalam hal ini PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.- juga menjadi alternatif strategi yang baik bagi ekspansi pembiayaan komersial. Sinergi dengan induk ini telah mulai dilakukan oleh Grup Pembiayaan Komersial pada tahun 2017 ini. Karena masih pada tahapan awal pelaksanaan, volume pembiayaan yang disalurkan melalui sinergi ini masih belum optimal, yaitu sebesar Rp512,37 miliar. Namun manajemen berkeyakinan bahwa pada tahun 2018 dan tahun tahun selanjutnya sinergi ini akan semakin baik dan memberikan kontribusi pembiayaan yang lebih signifikan terhadap pembiayaan komersial Perseroan secara keseluruhan khususnya di bidang infrastruktur, energi dan agribisnis.

Pada tahun 2018, Grup Pembiayaan Komersial memiliki beberapa fokus target pasar yaitu :

1. Fokus pada pembiayaan ke:
 - a. BUMN : dengan segmen :
 - i. Energi dan Kelistrikan.
 - ii. Konstruksi.
 - iii. Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan.
 - iv. Industri Pengolahan.
 - b. Anak perusahaan BUMN.
2. Pembiayaan kepada supplier dan bowheer BUMN (*supply chain financing*).
3. Pengembangan debitur.

Bisnis Haji dan Umrah

Alhamdulillah, di tahun 2017 Layanan Haji & Umrah BRISyariah telah menunjukkan kinerja yang menggembirakan. Nasabah yang memberikan kepercayaan untuk membuka Tabungan Haji, melakukan Setoran Awal Pendaftaran Haji Reguler maupun Pelunasan Haji Reguler & Khusus mengalami kenaikan yang signifikan. Sejalan dengan itu, volume Tabungan Haji BRISyariah iB 2017 juga mengalami kenaikan sebesar 30,27% dibandingkan tahun 2016 yaitu dari Rp935.774,- miliar menjadi Rp1.219.005,- triliun. Sedangkan Jumlah nasabah mengalami kenaikan sebesar 137% dari 222.000 nasabah menjadi 525.900 nasabah. Jumlah calon jamaah yang melakukan pendaftaran dan pembayaran Setoran Awal Haji Reguler di Perseroan meningkat sebesar 98%.

Sesuai ketentuan dari Kementerian Agama RI, pelunasan haji mulai tahun 2015 mesti dilakukan di Bank Syariah. Di tahun 2017, Perseroan melayani pelunasan calon jamaah haji sejumlah 55 ribu orang, baik nasabah Perseroan maupun nasabah migrasi dari BRI. Alhamdulillah, tingkat pelunasan di Perseroan mencapai 77%, dan merupakan prosentase pelunasan tertinggi di antara Bank-bank syariah lainnya. Untuk tahun 2018, Perseroan menargetkan volume Tabungan Haji BRISyariah iB menjadi sebesar Rp1.5 triliun atau meningkat sebesar 80% dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, jumlah jamaah yang melakukan pendaftaran Setoran Awal Haji Reguler ditargetkan sebanyak 100 ribu dan Setoran Awal Haji Khusus sebanyak 1.000 jamaah.

Strategi untuk mencapai target tersebut antara lain dengan mengembangkan Layanan dan produk terkait Haji & Umrah yang lebih lengkap baik untuk jamaah dan untuk Travel Haji & Umrah. Selain itu, Perseroan akan melanjutkan Program pembukaan Tabungan Haji Berhadiah Umrah. Untuk mencapai target ini, Perseroan akan memperluas jaringan pelayanan melalui 1.044 Kantor Layanan Syariah (KLS) BRI dan Layanan Satu Atap di Kantor Kementerian Agama RI di beberapa kota. Perseroan juga telah bekerja sama dengan beberapa asosiasi penyelenggara Ibadah Haji & Umrah yaitu AMPHURI, HIMPURH, KESTURI dan ASPHURINDO serta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH).

16.9. Persaingan Usaha

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Desember 2017 Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Tinjauan Kebijakan Moneter Desember 2017 yang menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 diperkirakan sekitar 5,10%. Data BI tersebut menunjukkan, posisi Indonesia jauh berada di atas pertumbuhan ekonomi dunia yang diperkirakan tumbuh sebesar 3,0%. Indonesia berada jauh di atas negara besar lain seperti Uni Eropa (2,4%), Inggris (1,6%), Amerika Serikat (2,3%) dan Jepang (1,7%).

Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poors (S&P) menaikkan peringkat Indonesia menjadi layak investasi atau *Investment Grade* (BBB). Kenaikan peringkat oleh S&P ini mengikuti apa yang telah dilakukan oleh dua perusahaan pemeringkat internasional, Moody's Investors Service dan Fitch Ratings memberikan penilaian positif terhadap utang Indonesia. Untuk perkembangan perbankan syariah sampai Oktober 2017 dari segi aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 19,60% (yoy). Dengan pertumbuhan aset itu, posisi pangsa pasar bank syariah, sampai dengan Oktober 2017 masih berada pada kisaran 5,51%.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, Perseroan menyakini perkembangan perbankan syariah tetap meningkat tahun demi tahun dan memperbesar *market share* di perbankan Nasional. Peluang untuk merebut pasar terbuka luas yang menjadi disebabkan penduduk Indonesia mayoritas muslim. Perseroan harus bersiap dengan kondisi persaingan yang makin ketat. Perseroan harus terus mengupayakan menjaga kinerja yang baik, mengembangkan produk dan layanan yang inovatif dan makin kompetitif, serta diminati oleh nasabah. Sampai dengan posisi November 2017, Perseroan berdasarkan aset berada pada posisi keempat diantara bank umum syariah nasional setelah Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat dan BNI Syariah. Pada tanggal 01 September 2016 Bank Aceh telah bergabung dengan melakukan konversi menjadi bank syariah dan menjadi bank syariah terbesar kelima. Di tahun 2018 persaingan perbankan syariah akan semakin ketat dengan hadirnya Bank Umum Syariah baru yang berasal dari konversi dari bank pembangunan daerah dan spin off dari unit Usaha Syariah.

16.10. Pelanggan Utama

Bersinergi dengan Bank BRI sebagai induk perusahaan yang merupakan salah satu BUMN terbesar, Perseroan memiliki keuntungan tersendiri dalam mengakses jaringan Bank BRI yang mempunyai banyak portofolio nasabah BUMN. Per 31 Desember 2017, nasabah yang mendapatkan pembiayaan terbesar dari Perseroan adalah salah satu anak perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang infrastruktur dengan *plafond* pembiayaan lebih dari Rp500 miliar.

16.11. Tingkat Kesehatan

Penilaian penerapan GCG Perseroan berlandaskan pada ketentuan yang berlaku, khususnya terkait dengan GCG, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam ketentuan tersebut, Perseroan setiap semester dan tahunan melakukan *self assessment* untuk mengukur tata kelola struktur, proses dan hasil, kemudian melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untuk periode semester II tahun 2017, Perseroan menyimpulkan pelaksanaan GCG dengan predikat "Baik" yang mencerminkan keberhasilan yang baik pada semua faktor pelaksanaan GCG.

Tingkat kesehatan Perseroan untuk periode 5 tahun terakhir berdasarkan hasil penilaian dari OJK adalah PK (Peringkat Komposit) 2 (sehat).

16.12. Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko secara konsisten dilaksanakan di seluruh kegiatan/aktivitas operasional perbankan. Kelangsungan manajemen risiko merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan Perseroan dalam mencapai target kinerja dan mencapai bank yang sehat, berkualitas dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Manajemen Perseroan berperan secara proaktif dalam proses pengelolaan risiko dan mendorong seluruh karyawan untuk berperan aktif dalam mengelola risiko sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing. Perseroan memandang bahwa peningkatan kesadaran risiko sangat penting bagi seluruh karyawan. Sejalan dengan itu peningkatan pemahaman dan kemampuan karyawan senantiasa diperbaharui dan ditingkatkan melalui sosialisasi kesadaran risiko, serta pelatihan-pelatihan terkait yang dilakukan di kantor pusat dan seluruh cabang.

Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam mencapai perihal di atas melakukan program untuk meningkatkan kesadaran risiko pada setiap unit kerja dan memberdayakan mereka sebagai pertahanan pertama, dengan melakukan langkah-langkah, antara lain:

1. Penerapan RCSA (*Risk & Control Self Assessment*) untuk memberikan kesadaran risiko atas potensi risiko di unit kerjanya.
2. Melakukan sosialisasi atas buku saku yang berisi mengenai panduan praktis pengelolaan risiko operasional dan risiko kredit Pada Jaringan Kantor Cabang BRISyariah.
3. Melakukan kajian/analisa risiko atas seluruh kegiatan operasional dan bisnis bank, termasuk pada produk dan aktivitas baru dan menyampaikannya kepada segenap unit kerja terkait baik KP maupun KC.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Risiko

Perseroan dalam pengelolaan risiko menerapkan prinsip *three line of defense* dalam memperkuat sistem pengendalian risiko secara menyeluruh dan handal.

1. Unit bisnis dan unit support berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab terhadap eksposur risiko bisnis mereka dari hari ke hari. Unit bisnis dan unit support wajib untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengontrol dan memitigasi risiko yang melekat pada bisnisnya masing-masing.
2. Satuan kerja Manajemen Risiko dan satuan kerja Kepatuhan merupakan unit kunci yang berperan dalam memberikan pertahanan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. Unit manajemen risiko melakukan review dan merekomendasikan batasan dan mitigasi risiko terhadap produk dan aktivitas bisnis, selanjutnya bekerja sama dengan unit bisnis dan unit support memastikan bahwa risiko yang diambil oleh unit bisnis dan unit support telah teridentifikasi secara tepat, terukur dan dikelola sesuai dengan parameter yang telah disetujui dan dilaporkan kepada para pihak terkait. Unit Kepatuhan mengelola risiko kepatuhan dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan otoritas lainnya yang memiliki kewenangan menerbitkan peraturan telah disosialisasikan dan diikuti oleh seluruh unit bisnis dan unit support terkait di seluruh aktivitas bank dan tingkatan organisasi.
3. Satuan Kerja Audit Internal berperan sebagai pertahanan tingkat ketiga dalam kerangka kerja manajemen risiko. SKAI bertugas untuk melakukan kontrol melalui pengujian dan audit secara independen atas ketepatan proses unit bisnis dan unit support memastikan bahwa mereka telah melakukan fungsi dan tanggung jawabnya serta mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku.
4. Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memegang peranan yang aktif dalam struktur pengelolaan risiko. Struktur organisasi pada tingkat Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dibentuk dengan tanggung jawab, batas kewenangan, dan akuntabilitas yang jelas sesuai dengan kebutuhan bisnis dan operasional serta didukung dengan pengendalian internal yang kuat.

Profil Risiko

Perseroan melakukan penilaian profil risiko secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia. Dari hasil penilaian profil Risiko TW III 2017, risiko komposit untuk Perseroan berada pada predikat "*Low to Moderate*".

16.13. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, Perseroan telah melakukan langkah-langkah evaluasi baik tingkat kesehatan Bank maupun perbaikan aktivitas tata kelola yang meliputi kelengkapan struktur dan infrastruktur tata kelola (*governance structure*), efisiensi proses tata kelola (*governance process*) dan kualitas hasil tata kelola (*governance outcome*). Dari sisi pengelolaan risiko, pengawasan dilakukan secara lebih efektif pada lini pertahanan pertama (*1st lines of defense*), lini pertahanan kedua (*2nd lines of defense*) dan lini pertahanan ketiga (*3rd lines of defense*).

Penerapan tata kelola yang dilakukan Perseroan dijiwai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu:

Pertama: Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan prinsip ini menuntut bank untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholders*-nya.

Kedua: Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan, serta pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Penerapan prinsip ini secara efektif menyebabkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab di antara pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi dan jajaran yang ada di bawahnya.

Ketiga: Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat, diantaranya; masalah pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif bersama masyarakat dan sebagainya. Dengan demikian, bank menyadari bahwa dalam kegiatan operasionalnya, bank bertanggung jawab tidak hanya kepada shareholder tetapi juga kepada *stakeholders*-lainnya.

Keempat: Profesional (*Professional*), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan dan memajukan bank syariah.

Kelima: Kewajaran (*Fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan prinsip ini dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

Dalam rangka mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) terintegrasi, Perseroan telah melaksanakan tata kelola yang bersifat konsolidasi dengan Entitas Induk (PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.)

Mitigasi Risiko

Perseroan dalam upaya untuk mengelola risiko, melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Risiko Kredit

Untuk mengurangi risiko kredit yang mungkin akan timbul, Perseroan telah melakukan langkah-langkah penting seperti menyiapkan strategi, kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko kredit yang dinilai efektif seperti *screening* dan *scoring* untuk menilai kelayakan pemberian pembiayaan kepada calon debitur, membuat sistem peringatan dini (*early warning system*) dan *traffic light* terhadap kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan risiko kredit dan risiko konsentrasi kredit. Upaya pemantauan kredit dengan pola penagihan yang efektif, disiplin pegawai perkreditan dalam proses kredit serta pengawasan atas kepatuhan terhadap aturan perkreditan baik internal maupun regulator menjadi fokus tenaga perkreditan dalam meminimumkan potensi kredit macet.

Selain upaya untuk meminimalisir risiko kerugian akibat timbulnya *Non-Performing Financing* (NPF), Perseroan juga berupaya untuk melakukan *post booking review* (PBR), pengembalian pendapatan perseroan dengan cara meningkatkan penagihan atas kredit/pembiayaan yang bermasalah (*remedial & recovery*) di mana Perseroan telah membentuk *special asset management* untuk melakukan fungsi tersebut, memastikan nilai jaminan memadai, monitoring terhadap kualitas agunan/jaminan, dan melakukan pengikatan atas seluruh jaminan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta asuransi kredit secara syariah atas beberapa jenis kredit. Selain itu, sebagian eksposur pembiayaan Perseroan juga di cover oleh Lembaga Penjaminan Kredit Syariah

2. Risiko Investasi

Sebagai Bank Umum Syariah, Perseroan berpotensi ikut menanggung penurunan pendapatan apabila usaha nasabah mengalami kemunduran. Untuk mengurangi risiko tersebut, maka Perseroan menjalankan prosedur ketat untuk melakukan *screening* dan *scoring* atas kesehatan keuangan nasabah baik sekarang maupun untuk periode yang akan datang.

Perseroan juga mendiversifikasi portofolio pembiayaannya kepada berbagai nasabah yang bergerak di berbagai sektor usaha, sehingga jika salah satu sektor usaha secara umum mengalami penurunan, masih dapat ditopang oleh pertumbuhan sektor usaha lainnya.

3. Risiko Operasional

Perseroan dalam mengelola risiko operasional, telah mengembangkan sistem manajemen risiko berupa *Key Risk Indicator* dan *Risk Control Self Assessment*, Saat ini perseroan juga sedang mengembangkan *Tools Loss Event Database*.

Untuk meminimalkan risiko operasional dari penggunaan sistem Teknologi Informasi (TI) Perseroan telah melakukan pengelolaan TI antara lain dengan adanya Prosedur Pengembangan Sisyem yang antara lain mengatur tahapan didalam pengembangan aplikasi atau biasa disebut juga dengan *System Development Life Cyle*.

Untuk meminimalisir risiko operasional jika terjadi kondisi darurat atau bencana, Perseroan telah menerapkan manajemen kelangsungan usaha/ *Business Continuity Management* (BCM) di segenap unit. Dalam kondisi bencana (*disaster*), Perseroan telah menyiapkan organisasi spesifik berupa *Crisis Management Team* (CMT) dan *Emergency Task Force* (ETF). Perseroan juga telah memiliki infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi BCM seperti *Disaster Recovery Center* (DRC), *Data Center* (DC), Lokasi Alternatif Gedung BCM dan *Command Center* yang secara rutin dikelola kesiapannya.

4. Risiko Likuiditas

Pengelolaan risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas, dan membangun kekuatan likuiditas struktural neraca bank untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang yang berkesinambungan, menjaga *primary reserve* (kas dan GWM) dan menjaga serta mempertahankan *secondary reserve* untuk memastikan likuiditas berada pada level yang aman. Sebagai cadangan *secondary reserve*, Perseroan menjaga dan mempertahankan *tertiary reserve*.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan menggunakan proyeksi arus kas harian dan profil maturitas bulanan, baik secara kontraktual maupun behavioral, agar dapat menetapkan strategi yang sesuai dan akurat untuk mengantisipasi kondisi likuiditas Perseroan di masa mendatang. Perseroan senantiasa melakukan uji coba ketahanan likuiditas secara periodik ketika kondisi krisis likuiditas terjadi dan mengkinikan *contingency funding plan* menyesuaikan kondisi internal dan kondisi eksternal Perseroan termasuk perubahan regulasi, agar Perseroan dapat mengurangi risiko likuiditas ketika krisis ekonomi terjadi.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas jangka pendek, Perseroan memelihara *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang memadai untuk memenuhi kebutuhan likuiditasnya selama periode 30 hari ke depan dalam skenario *stress*, dengan mengelola rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio/LCR*) sesuai ketentuan *regulator*.

5. Risiko Pasar

Pada risiko pasar, Bank terekspos risiko valuta asing dan risiko *benchmark* suku bunga. Risiko valuta asing adalah potensi kerugian yang akan dialami Bank akibat fluktuasi nilai tukar mata uang. Bank Syariah dalam aktivitasnya tidak menggunakan suku bunga, sehingga bank tidak menghadapi risiko pasar yang diakibatkan perubahan suku bunga. Namun bagaimanapun perubahan suku bunga dipasar berpotensi menimbulkan risiko terhadap pendapatan bank, terutama pada akad murabahah yang memiliki pendapatan tetap. Ketika suku bunga *benchmark* mengalami perubahan, maka pendapatan

dari akad-akad berbasis pendapatan tetap tidak dapat disesuaikan. Kondisi inilah yang memunculkan bank terekspos terhadap risiko dari perubahan suku bunga.

Risiko Valuta asing muncul seiring peran bank sebagai bank devisa. Dalam pengelolaan risiko valuta asing, bank menjaga rasio PDN berada jauh di bawah ketentuan OJK (PDN <20%). Bank melakukan monitoring secara harian terhadap eksposur valuta asing dalam bentuk laporan PDN harian. Untuk mengantisipasi kerugian yang muncul di masa yang akan datang, Bank secara rutin melakukan *stress test* terhadap eksposur valuta asing yang dimiliki.

Dalam pengelolaan Risiko *benchmark* suku bunga, bank melakukan perhitungan analisa GAP margin (*Re-pricing GAP*) setiap bulan. Hasil analisa disampaikan dalam rapat ALCO sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penentuan margin.

6. Risiko Strategik

Untuk pengelolaan Risiko Strategik, Bank telah memiliki Unit kerja yang melakukan pemantauan secara bulanan terhadap pencapaian RBB yang telah ditetapkan. Dan setiap peluncuran untuk produk atau aktivitas baru bank terlebih dahulu meneliti dan mempertimbangkan potensi eksposur risiko yang dapat ditimbulkan, cost and benefit yang akan timbul serta memastikan ketersediaan prosedur pemantauan dan pengendalian risiko pada produk atau aktivitas baru tersebut.

7. Risiko Reputasi

Untuk pengelolaan Risiko Reputasi, Bank telah menerapkan mekanisme *Complain Handling System* (CHS). Dimana terdapat unit kerja yang melakukan monitoring terhadap complain nasabah yang timbul, baik melalui call center, langsung ke unit kerja maupun melalui media massa. Penanganan dilakukan mulai sejak complain diterima sampai progres penyelesaiannya.

8. Risiko Kepatuhan

Untuk pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank telah memiliki Unit kerja kepatuhan yang salah satu fungsinya adalah melakukan uji kepatuhan terhadap setiap kebijakan atau prosedur yang akan dikeluarkan oleh Bank. Uji kepatuhan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan atau prosedur yang akan diterbitkan sudah sesuai dengan regulasi eksternal.

Perseroan telah melakukan sosialisasi dan Sidak tilik untuk memastikan budaya kepatuhan telah terimplementasi di Unit Kerja Perseroan dan *warning* terhadap kewajiban kepada pihak ketiga

9. Risiko Hukum

Untuk pengelolaan Risiko Hukum, Bank sudah memiliki Unit kerja bidang Hukum yang antara lain bertugas untuk melakukan Legal Review terhadap Perjanjian Kerjasama Sama (PKS) ataupun dokumen perjanjian lainnya yang dibuat oleh Bank.

Jika ada Cabang yang terkait permasalahan Hukum, maka akan didampingi oleh Unit Hukum/Legal untuk membantu mengatasi permasalahan Hukum yang terjadi.

10. Risiko Imbal Hasil

Risiko imbal hasil muncul akibat imbal hasil yang diberikan/dibayarkan Bank kepada nasabah mengalami perubahan sehingga mempengaruhi perubahan perilaku nasabah Dana Pihak Ketiga. Perubahan imbal hasil ini berpotensi keluarnya Dana Pihak Ketiga Bank. Dalam mengelola risiko imbal hasil bank telah menerapkan *Profit Equalization Reserve* (PER/dana cadangan). Penerapan PER ini membantu bank dalam menstabilkan imbal hasil yang diberikan kepada nasabah, sehingga tidak terjadi fluktuasi yang signifikan dalam pemberian imbal hasil kepada nasabah Dana Pihak Ketiga.

Bank secara rutin melakukan rapat ALCO untuk menentukan besarnya imbal hasil yang akan diberikan kepada nasabah Dana Pihak Ketiga. Dalam penentuan besarnya imbal hasil telah memasukan faktor *benchmark* imbal hasil kepada bank syariah umum antara lain: analisa *historical* pendapatan bank dan analisa *historical* biaya imbal hasil pada bulan-bulan sebelumnya.

11. Risiko Konsentrasi Dana Haji

Risiko konsentrasi Dana haji timbul seiring dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 34 tahun 2014 yang mewajibkan dana haji dikelola oleh bank syariah. Untuk memecah konsentrasi Dana haji bank secara aktif terus menerus meningkatkan sumber dana pihak ketiga dari sumber lainnya, seperti Kerja sama payroll perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, perusahaan BUMN dan lembaga-lembaga lainnya.

Bank melakukan komunikasi aktif dengan Kementerian Agama terutama pada saat akan terjadi penarikan ataupun penyetoran dalam jumlah besar.

12. Risiko Gangguan Sistem Teknologi Informasi

Bank telah memiliki perangkat *Disaster Recovery Center* (DRC) yang berada di Tabanan – Bali. DRC merupakan satu kesatuan dengan sistem DRC induk (Bank BRI), sehingga pengelolaannya lebih prudent.

Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam menghadapi gangguan dari perangkat teknologi. Bank secara aktif juga melakukan kajian dan monitoring terhadap sistem perangkat IT melalui forum ITSC (*Information Technology Steering Committee*).

13. Risiko Persaingan

Dalam menghadapi persaingan baik jasa perbankan maupun jasa perbankan syariah, Bank telah melakukan sinergi produk dengan induk perusahaan (Bank BRI) seperti Kantor Layanan Syariah, Penggunaan ATM BRI untuk nasabah BRIS, Penggunaan EDC BRIS, pembiayaan join financing (memberikan pelayanan secara lengkap dan menyeluruh baik untuk kebutuhan nasabah syariah maupun non syariah).

Industri perbankan di Indonesia memiliki relatif cukup banyak institusi yang menjalankan kegiatan usaha utama yang serupa, baik jasa perbankan maupun jasa perbankan syariah. Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya, baik dalam upaya memperoleh dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan kepada institusi lainnya, harus memiliki daya saing yang relatif baik agar dapat menarik minat para nasabah maupun peminjam dana.

Jika Perseroan lalai dalam mengembangkan kualitas layanan dan SDM, inovasi produk, dan kapasitas dalam mengikuti perkembangan di industri perbankan untuk tetap dapat bersaing dengan kompetitor, maka hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

14. Risiko Perubahan Teknologi

Bank senantiasa memonitor perubahan teknologi terutama yang terkait langsung dengan produk dan layanan nasabah. Bank senantiasa mengupdate setiap perangkat teknologi sesuai kebutuhan kegiatan operasional Bank. Selain itu, dalam rangka memberikan layanan dan produk terbaik kepada nasabah, maka bank senantiasa mempertimbangkan faktor perubahan teknologi untuk menjamin bahwa layanan dan produk yang diberikan dapat berkelanjutan.

16.14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Sebagai institusi yang berpedoman pada ketentuan *syar'i* dalam melakukan aktivitas bisnisnya, Perseroan memiliki kepedulian yang besar terhadap masyarakat sekitar sekaligus menyadari bahwa hubungan baik yang dibangun bersama masyarakat dan hubungan dengan lingkungan di sekitarnya untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga mendukung dalam pencapaian bisnis. Oleh karena itu, Perseroan telah memiliki kebijakan CSR yang berorientasi pada pembangunan masyarakat dan lingkungan secara umum. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, Perseroan bekerjasama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan YBM-BRI (Yayasan Baitul Maal BRI) dengan mengedepankan *ashnaf* (golongan orang yang berhak menerima zakat).

Berlandaskan kebijakan ini, Perseroan memperhatikan secara langsung perkembangan perkembangan yang terjadi di masyarakat, sehingga benar-benar memahami apa yang diperlukan untuk membantu mereka dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian, kegiatan CSR di Perseroan dilaksanakan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan di tahun 2017 difokuskan pada beberapa bidang:

- Di bidang Pendidikan, Perseroan selalu berkomitmen dalam mendukung segala aktivitas yang berkenaan dengan pendidikan. Di bawah slogan Faedah Pendidikan BRIS, Perseroan telah memberikan beasiswa selama setahun kepada siswa/siswi dari tingkat SD/Mi, SMP/MTs, di desa Conto dan Genengrejo terkait dengan program penghijauan di bukit Gendol, Jatisrono-Jawa Tengah. BRISyariah juga memberikan beasiswa SMA/MA melalui program BRIS Mengajar yang diadakan di kota Pontianak, Samarinda, Kendari, Jambi, Bengkulu, Palembang, Balikpapan, bantuan beasiswa untuk jenjang Perguruan Tinggi dan tingkat SMA/SMK/MAN/MA dalam rangka Launching Kantor Cabang Aceh, maupun program beasiswa yang disandingkan dengan kegiatan CSR lainnya serta institusi pendidikan yang sudah bekerjasama secara bisnis dengan BRISyariah. Hal ini dilakukan untuk mendukung kegiatan Pemerintah dalam hal mencerdaskan bangsa melalui pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan khususnya bagi kaum dhuafa yang memiliki prestasi akademik.
- Di bidang Kesehatan, melalui program Faedah Kesehatan BRIS, Perseroan secara rutin 3 bulanan mengadakan kegiatan Donor Darah yang diikuti oleh karyawan dan manajemen di Kantor Pusat bekerjasama dengan PMI Pusat; dukungan dana kegiatan Bhakti Sosial yang dilakukan oleh mahasiswa FKG Universitas Indonesia; mendukung kegiatan CSR yang dilakukan oleh Kantor Cabang BRISyariah dalam membina hubungan baik dengan warga/instansi setempat seperti sunatan massal dalam rangka HARLAH IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Regional I-Sumatera Utara kerjasama dengan Kantor Cabang Medan; operasi katarak kerjasama antara Klinik Mata Tambun Bungai dengan Kantor Cabang Palangkaraya; kegiatan Donor Darah kerjasama OJK dengan Kantor Cabang Malang; sunatan massal dalam rangka haul Milad Pondok Pesantren Terpadu Nuurusshiddiq kerjasama dengan Kantor Cabang Cirebon. Dalam hal internal membantu karyawan yang memerlukan biaya pengobatan bagi anggota keluarganya.
- Di bidang Pemberdayaan ekonomi, melalui program Faedah Pemberdayaan Ekonomi BRIS sebagai salah satu bank yang ditunjuk oleh OJK sebagai Green Banking dengan mengadakan kegiatan bersifat sustainability/berkelanjutan, melalui program santripreneur dengan memberikan pengetahuan dan pembekalan peternakan burung puyuh di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat ekonomi mandiri yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup baik bagi operasional pesantren maupun para santri kelak ketika terjun di tengah masyarakat.
- Di bidang Dakwah dan Pembangunan Sarana Ibadah, Perseroan mendukung dana pembangunan dan pengembangan Masjid Abdurrohman Al Athiq di desa Sasak Panjang Tanjur Halang-Bogor; mensukseskan kegiatan Amaliyah Ramadhan di Masjid Istiqlal 1438 H/2017 M dan bantuan pembelian kendaraan operasional bagi Pesantren Ar Rahman bekerjasama dengan Kantor Cabang Cilegon-Jawa Barat.
- Di bidang Sosial, melalui program Faedah Sosial BRIS, Perseroan memberikan apresiasi kepada mbah Sadiman tokoh pelopor penghijauan di bukit Gendol, Jatisrono-Jawa Tengah; dana CSR yang diberikan dalam rangka launching Sukuk Ritel 009 tahun 2017 di Samarinda; kegiatan Bersih-Bersih Masjid yang rutin diselenggarakan setiap tahun menjelang hari Idul Fitri yang dilaksanakan oleh Kantor Cabang BRISyariah di seluruh Indonesia sebagai bentuk kepedulian terhadap sarana ibadah dan menjalin silaturahmi dengan Pengurus dan Jamaah masjid yang berlokasi di sekitar kantor. Pelaksanaan kegiatan buka puasa; pemberian santunan dan paket sembako serta Nonton Bareng Film bernuansa dakwah bersama anak yatim dan dhuafa serta Safari Ramadhan yang dilakukan oleh manajemen BRISyariah di beberapa kantor cabang, dimana dalam kesempatan tersebut diserahkan santunan biaya pendidikan bagi putera/puteri Pekerja Dasar BRISyariah. Melalui kerjasama dengan PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk melaksanakan kegiatan Mudik Bareng dengan kota tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang diikuti oleh nasabah, karyawan dan keluarga BRISyariah. Bekerjasama dengan Kantor Cabang Cirebon dalam pengadaan ambulance jenazah untuk Masjid Al Husna Cirebon. Dan dalam rangka Milad BRISyariah ke-9 di bulan

November 2017, bekerjasama dengan Baznas dalam hal pengadaan mobil ambulance yang dapat dimanfaatkan oleh manajemen, karyawan beserta keluarga dan warga sekitar Kantor Pusat BRISyariah serta kunjungan ke Panti Werdha Budi Mulia 1 – Cipayung Jakarta Timur sebagai wujud kepedulian kepada lansia dengan memberikan bantuan berupa santunan dan barang-barang kebutuhan operasional panti jompo. Serta turut berpartisipasi dalam bantuan kemanusiaan untuk muslim Rohingya dan pengungsi erupsi Gunung Agung di Bali.

- Di bidang Lingkungan Hidup, melalui Program Faedah Lingkungan Hidup BRIS, Perseroan sebagai wujud sedekah bumi telah diluncurkan program BRIS Menanam bekerjasama dengan Yayasan Kehati dimana nasabah dapat berpartisipasi mendonasikan dana melalui ATM maupun Mobile Banking yang akan digunakan untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menghijaukan Bumi. Serta mendukung program Kebersihan kota yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bantul - Yogyakarta dalam hal penyediaan mesin pencacah sampah bekerjasama dengan Kantor Cabang Yogyakarta.

Realisasi Biaya *Corporate Social Responsibility/CSR* dan Dana Kebajikan

Pada tahun 2017, Perseroan telah menyalurkan dana sebesar Rp2,31 miliar untuk program-program CSR dan Dana Kebajikan.

Realisasi Biaya CSR dan Dana Kebajikan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)
1	Bantuan Pendidikan	251.800.000	577.790.000	1.119.350.000
2	Bantuan Kesehatan	204.555.365	413.467.103	94.500.000
3	Bantuan Sarana publik dan Lingkungan Hidup	-	9.805.000	67.159.000
4	Bantuan Santunan, Musibah, dan Bencana	296.915.816	327.524.000	802.956.580
5	Da'wah serta Bantuan sarana ibadah	598.203.000	396.039.900	115.374.995
6	Pemberdayaan ekonomi	22.994.000	-	109.050.000
Total		1.374.468.181	1.724.626.003	2.308.390.575

16.15. Teknologi Informasi

Dalam dunia perbankan saat ini, perkembangan Teknologi Informasi (TI) membuat perusahaan mengubah strategi bisnis dengan menempatkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses inovasi produk dan layanan. Hal ini juga dilakukan oleh Perseroan yang sejak awal berdirinya di tahun 2008, telah menetapkan visi untuk “menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna”.

Dipicu oleh perkembangan internet, makin meningkatnya kemampuan hardware dan software dengan kecepatan tinggi serta tingkat penyebaran penggunaan komputer termasuk mobile gadget, makin menyadarkan nasabah Perseroan akan berbagai kemudahan yang didapatkan dengan ketersediaan layanan *on-line banking/electronic banking*.

Merespon hal tersebut, Perseroan telah memiliki layanan *on-line banking/electronic banking* yang dipersembahkan untuk nasabah Perseroan diantaranya *Automatic Teller Machine (ATM)*, *Electronic Data Capture (EDC)*, *SMS Banking*, *Mobile Banking*, *Internet Banking*, *Cash Management System (CMS)* dan *Open-Table Online*. Perseroan sangat mengutamakan unsur kepercayaan dan efisiensi serta layanan berkualitas, sehingga selalu menyesuaikan bisnisnya dengan mencermati ketersediaan inovasi teknologi serta dampaknya bagi kelangsungan dan pertumbuhan bisnisnya.

Teknologi Informasi sebagai “*Business Enabler*” Perseroan

Percepatan bisnis yang dilakukan Perseroan seluruhnya didukung dengan penggunaan Teknologi Informasi. Bentuk-bentuk baru dari pelayanan bank yang mengubah transaksi manual menjadi pelayanan transaksi yang berbasis teknologi telah dilakukan Perseroan. Pembayaran SPP universitas/ sekolah, pembayaran gaji (*payroll*), pembayaran PBB, pendaftaran/ pembayaran/ pelunasan haji, rekening koran online, serta implementasi layanan Devisa, adalah beberapa bentuk baru bisnis berbasis TI yang dikembangkan Perseroan di tahun 2015. Dan di tahun 2016 sampai dengan 2017 Perseroan meningkatkan pelayanan berbasis TI yang bekerja sama dengan Kementerian Keuangan yaitu Pembayaran Gaji (*Payroll*) Pegawai Negeri Sipil (PNS) (BO2), Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat), Pembayaran Penerimaan Negara / MPN Gen 2 (Pajak, Cukai, dan Pasport), Penyaluran Dana Kementerian Keuangan kepada pihak ke-3 (SPAN Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)) dan Pembayaran Gaji (*Payroll*) Pensiunan (Taspen). Selain dengan pihak luar, Perseroan meningkatkan pelayanan berbasis TI untuk kebutuhan Internal yaitu Portal HC (e-cuti, data presensi, perjalanan dinas, smk online, pengelolaan PHK, dan pencairan lembur) dan aplikasi elektronik nota dinas. Penambahan fitur juga dilakukan pada beberapa layanan berbasis TI yang dimiliki. Salah satunya adalah penambahan fitur pendaftaran, pembayaran dan pelunasan haji dan pembukaan, setoran dan tarik tunai tabungan faedah di Kantor Layanan Syariah (KLS) BRI. Hingga saat ini telah terdapat 1044 lokasi KLS yang tersebar di kantor-kantor cabang Bank BRI, sehingga nasabah Perseroan tetap dapat menikmati layanan syariah pada lokasi-lokasi yang belum terdapat kantor cabang Perseroan namun terdapat kantor Bank BRI. Penambahan fitur layanan nasabah juga dilakukan berupa pengembangan BRIS Online, Mobile BRIS, Internet Banking, E-Form BRIS, Appel Mobile BRIS, Website Laku Pandai dan New Website BRISyariah. Pengembangan aplikasi pembiayaan Perseroan telah mengembangkan berbagai fitur pembiayaan dengan akad *murabahah / musyarakah, mudharabah, IMBT, MMQ, serta QARD*. Kemajuan bisnis Perseroan tidak lepas dari pengambilan keputusan strategis bisnis yang dilakukan berdasarkan informasi yang diolah menggunakan TI. Pengolahan informasi yang dimiliki Perseroan merupakan hasil kemajuan teknologi yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan bisnis untuk menjalankan operasional bank secara sistematis dan Perseroan telah mengimplementasikan sistem yang berfungsi untuk menangani, memilih, menghitung, menyusun, melaporkan, dan mengirimkan informasi-informasi strategis tersebut sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan strategis bisnis Perseroan. Perseroan menyadari betul bahwa tantangan kedepan sangat berat, sehingga kehandalan TI sangat diperlukan. Belum lagi perkembangan Fintech akhir-akhir ini yang dianggap sebagai ancaman pada dunia perbankan, yang mengharuskan Perseroan untuk terus berinovasi. Perseroan memandang Fintech bukan sebagai ancaman namun lebih sebagai Mitra.

Oleh karena itu di tahun 2018 hingga 2020 Perseroan mencanangkan untuk pengembangan Digital Banking dan Big Data untuk mensupport bisnis Perseroan. Untuk mencapai target itu semua Perseroan telah melakukan perencanaan dan pengembangan TI sebagai berikut :

1. Pengembangan Infrastruktur Data Center dan Disaster Recovery Center.
2. Pengembangan Perangkat Jaringan (Network) Data Center maupun Disaster Recovery Center.
3. Pengadaan Upgrading Database Core Banking untuk menunjang Digital Banking.
4. Upgrade CoreBanking Sistem.
5. Pengadaan Office Automation, Upgrade PC, Software dan Perangkat Pendukung Cabang.
6. Upgrade Virtualisasi Surrounding.
7. Pengembangan Aplikasi Digital Banking .dan Big Data.
8. Pengembangan Aplikasi E-Money.
9. Pengembangan Aplikasi Colection Management System.
10. Pengembangan Aplikasi Data Analytic.
11. Pengembangan Aplikasi E-FAM (Elektronik Fixed Asset Management)
12. Pengembangan Aplikasi Union Pay
13. Pengembangan Aplikasi Pelaporan Pajak Internasional
14. Pengembangan Portal APU-PPT (LTKT, LTKM, PEPs, DTTOT, BO, LTKL)
15. Pengembangan Payment On-Line
16. Pengembangan Aplikasi Debit Bersama
17. Pengembangan Aplikasi E-Promotion dan Training Automation
18. Pengembangan SDM TI

Penggunaan TI di Perseroan yang menyeluruh berdampak langsung pada peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional bisnis serta pengelolaan informasi kegiatan usaha perbankan sehingga dapat memberikan hasil yang akurat, benar, tepat waktu, dan dapat menjamin kerahasiaan informasi.

Sumber Daya Teknologi Informasi Perseroan

Penerapan teknologi informasi menuntut sumber daya insani yang memadai. Jika sumber daya insani yang ada tidak menguasai teknologi tersebut, hal ini akan menjadi suatu pemborosan semata, karena mahalnnya teknologi yang telah dibeli jika tidak terpakai dengan maksimal merupakan hal yang sia-sia. Berbagai layanan perbankan berbasis teknologi yang dipersembahkan Perseroan untuk nasabahnya, adalah bukti dari kemampuan sumber daya insani TI yang dimiliki Perseroan, karena hampir seluruh layanan tersebut dikembangkan dan dioperasikan sendiri oleh internal Perseroan. Hal ini menjadikan Perseroan percaya diri untuk memberikan solusi layanan perbankan berbasis TI terbaik untuk nasabahnya.

Sebelum sebuah solusi layanan perbankan berbasis teknologi diterapkan, Perseroan telah melakukan kajian menyeluruh terhadap kemampuan perusahaan, apakah sesuai teknologi tersebut diterapkan, apakah sumber daya insaninya memadai, dan apakah teknologi tersebut mempunyai *features* yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Karena penerapan suatu sistem teknologi informasi merupakan salah satu aktivitas investasi jangka panjang bagi perusahaan. Hal ini menjadi perhatian khusus Perseroan sebagai lembaga keuangan syariah untuk merealisasikan bentuk-bentuk layanan perbankan terkini dengan menggunakan seluruh sumber daya teknologi informasi yang dimiliki.

Infrastruktur TI khususnya Data Center sebagai pusat pemrosesan data merupakan sumber daya TI yang juga tidak lepas dari perhatian Perseroan. Di tahun 2015, Perseroan berhasil memindahkan operasional *Data Center*-nya dari Menara Jamsostek ke Gedung TSI BRI di Ragunan. Hal ini tidak lepas dari dukungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebagai bentuk sinergi antara induk dengan anak perusahaan. Dengan dipindahkannya data center ini, Perseroan dapat meningkatkan kapasitas data centernya yang tidak dapat dilakukan di lokasi data center sebelumnya. Penyelenggaraan operasional data center tetap dilakukan oleh pihak internal Perseroan.

Komitmen TI Perseroan Untuk Dunia Pendidikan

Sebagai sebuah lembaga keuangan “syariah”, Perseroan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis perbankannya, namun juga memiliki komitmen untuk memajukan ekonomi syariah. Hal ini dibuktikan dengan berbagai bentuk kerja sama antara Perseroan dengan universitas/lembaga pendidikan, salah satunya adalah dengan bantuan aplikasi laboratorium perbankan syariah, “SALAM BRIS” (Sistem Aplikasi Laboratorium Minibanking BRISyariah). Dengan SALAM BRIS ini, Perseroan turut memberikan kontribusi di dunia pendidikan, dengan pengenalan operasional bisnis bank syariah, mulai dari front office, back office, jurnal akuntansi, hingga pelaporannya. Diharapkan kedepannya, tercipta sumber daya insani lulusan universitas/lembaga pendidikan yang siap pakai apabila nantinya terjun ke dunia perbankan, khususnya perbankan syariah.

16.16. Penghargaan

Berikut merupakan keterangan mengenai penghargaan yang berhasil diperoleh Perseroan dalam kurun 3 (tiga) tahun terakhir:

No	Pemberi Penghargaan	Penghargaan
2017		
1	Frontier Consulting Group dan majalah marketing	In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand Category Tabungan Syariah - Top Brand Award 2017
2	Infobank	Peringkat 3 Digital Brand Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand Awards 2017
3	Infobank	Peringkat 2 Digital Brand Tabungan Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand Awards 2017
4	Infobank	Peringkat 2 Digital Brand KPR Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand Awards 2017
5	Infobank	Peringkat 1 Digital Brand Kartu Debit Bank Umum Syariah - Infobank Digital Brand Awards 2017
6	LPPI, Stabilitas, Kinerja Unggul Nusantara	Achievement in Overall Favorability Index Employee Engagement Survey as Silver - 2016 Indonesia Employee Engagement Award
7	Infobank & MRI	Peringkat 4 - Kategori Overall Sharia Commercial Banking - Banking Service Excellence 2017

No	Pemberi Penghargaan	Penghargaan
8	Infobank & MRI	Peringkat 1 ATM - Kategori Sharia Commercial Banking - Banking Service Excellence 2017
9	Infobank & MRI	Peringkat 1 Fisik - Kategori Sharia Commercial Banking - Banking Service Excellence 2017
10	Indonesia Banking School	Penghargaan Indonesia banking Award sebagai "The Most Efficient Bank" - Indonesian Banking Award 2017
11	Indonesia Banking School	Penghargaan Indonesia Banking Award sebagai "The Most Reliable Bank" - Indonesian Banking Award 2017
12	Majalah SWA dan MARS Research Specialist	Penghargaan The Most Valuable Brand in Indonesia Product Category Sharia Banking - Indonesia Best Brand Award 2017
13	BAZNAS	Penghargaan Khusus Perusahaan Pembayar Zakat Terbaik - BAZNAS Award 2017
14	BAZNAS	Penghargaan Khusus UPZ BAZNAS Terbaik - BAZNAS Award 2017
2016		
1	Frontier Consulting Group dan majalah marketing	In Recognition of Outstanding Achievement in Building the Top Brand - Category Sharia Bank - Top Brand Award 2016
2	Infobank	Peringkat II Kategori Digital Brand Kartu Debet Bank Umum Syariah - 5th Infobank Digital Brand of The Year 2016
3	Karim Consulting Indonesia	1st Rank The Biggest Contributor Funding Islamic Full Pledge Bank - The 12th Islamic Finance Award 2016
4	Karim Consulting Indonesia	1st Rank The Most Expansive Funding Islamic Full Pledge Bank : Equity Idr 1-5 Tn (Buku 2) - The 12th Islamic Finance Award 2016
5	Tera Foundation dan Koran Sindo	Bank Syariah Pertama dengan Software Mini Banking untuk CSR Peduli Pendidikan - Rekor Bisnis Award 2016
6	Infobank & MRI	3rd Best Customer Service - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
7	Infobank & MRI	3rd Best Overall Performance - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
8	Infobank & MRI	1st Best Satpam - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
9	Bisnis Indonesia	1st Rank Bank Umum Swasta Non Devisa Terbaik - Bisnis Indonesia Award 2016
10	Infobank & MRI	3rd Best ATM - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
11	Infobank & MRI	2nd Best Phone - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2016
12	Majalah SWA	1st Champion of Indonesia Original Brand - Product Category Sharia Bank - Indonesia Original Brand 2016
13	Warta Ekonomi	Digital Innovation for Sharia Banking - Special Mention for Digital Strategy - Indonesia Digital Innovation Award for Banking 2016
14	Infobank	Predikat Sangat Bagus - Kinerja Keuangan Tahun 2015 - Infobank Award 2016
15	Tempo Media Group & Indonesia Banking School	The Most Efficient Bank - Kategori Bank Syariah Aset di Atas 10 T - Indonesia Banking Award 2016
16	Tempo Media Group & Indonesia Banking School	The Most Reliable Bank - Kategori Bank Syariah Aset di Atas 10 T - Indonesia Banking Award 2016
17	Tempo Media Group & Indonesia Banking School	The Best Bank in Retail Banking Services - Kategori Bank Syariah - Indonesia Banking Award 2016
18	Committee of Global Islamic Finance Awards & EdBiz Corporation	GIFA Financial Inclusion Award 2016 - Global Islamic Finance Awards (GIFA) 2016
19	Infobank	Predikat Sangat Bagus - Kinerja Keuangan Tahun 2015 - Infobank Sharia Fnanace Awards 2016
20	Business News Indonesia	Tabungan Haji BRISyariah iB for Achieving in Category Top Tabungan Haji 2016 - Top Bank 2016
21	Business News Indonesia	KPR BRISyariah iB for Achieving in Category Top KPR Syariah 2016 - Top Bank 2016
22	MarkPlus Inc	Bronze Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2016 - Category : Islamic Bank - Region : Bali & Kalimantan - Indonesia WOW Service Excellence Award 2016

No	Pemberi Penghargaan	Penghargaan
23	MarkPlus Inc	Bronze Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2016 - Category : Islamic Bank - Region : Sumatera - Indonesia WOW Service Excellence Award 2016
24	MarkPlus Inc	Gold Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2016 - Category : Islamic Bank - Region : Jawa - Indonesia WOW Service Excellence Award 2016
25	Warta Ekonomi	The Winner of Best Banking Brand 2016 for Best Digital and Most Reliable Title - Category : Syariah - Indonesia Best Banking Brand Award 2016
2015		
1	Majalah SWA	The Net Promoter Score (NPS) Excellence for Sharia Banking Category - Customer Loyalty Award 2015
2	Infobank	Peringkat II Kategori Tabungan Bank Umum Syariah - 4th Infobank Digital Brand of The Year 2015 - 4th Infobank Digital Brand of The Year 2015
3	Infobank & MRI	3rd Best Customer Service - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2015
4	Infobank & MRI	3rd Best Overall Performance - Islamic Commercial Bank - Banking Service Excellence 2015
5	Majalah SWA dan invent.ure	Consumers' Choice for Product Category Sharia KPR - Indonesia Middle Class Brand Champion 2015
6	Majalah SWA dan invent.ure	Consumers' Choice for Product Category Sharia Savings - Indonesia Middle Class Brand Champion 2015
7	MarkPlus	Bronze Champion of Indonesia WOW Brand 2015 - Category : Saving Account, Islamic Bank - Indonesia Wow Brand 2015
8	Majalah Marketing	Predicate : Excellent - Category : Marketing Campaign - Marketing Award 2015
9	Suara Merdeka	Pencapaian Tertinggi - Category : Bank Syariah - Satria Brand Award 2015
10	MarkPlus	Consolation Prize Winner of Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 - Category : Islamic Bank - Region : Jawa Bali - Indonesia WOW Service Excellence Award 2015
11	MarkPlus	Consolation Prize Winner of Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 - Category : Islamic Bank - Region : Kalimantan - Indonesia WOW Service Excellence Award 2015
12	MarkPlus	Consolation Prize Winner of Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 - Category : Islamic Bank - Region : Sumatera - Indonesia WOW Service Excellence Award 2015
13	MarkPlus	Bronze Champion of Indonesia WOW Service Excellence Award 2015 - Category : Islamic Bank - Region : Sulampapua - Indonesia WOW Service Excellence Award 2015
14	Otoritas Jasa Keuangan	Bank dengan Transaksi NoA Terbanyak 2015 - iB Vaganza Award

IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan, yang bersumber dari laporan keuangan auditan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasi. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Ekuitas Perseroan

Keterangan	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>		
	31 Desember		
	2015	2016	2017
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.979.000	1.979.000	1.979.000
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	11.722	11.715	3.451
Cadangan umum	13.614	25.878	42.899
Saldo laba	335.476	493.421	577.491
Jumlah Ekuitas	2.339.812	2.510.014	2.602.841

Setelah tanggal Laporan Keuangan terakhir Perseroan, terdapat perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan, dengan kronologis sebagai berikut:

1. Modal dasar Perseroan per 31 Desember 2017 sejumlah 10.000.000.000 saham atau senilai Rp5.000.000.000.000, mengalami peningkatan menjadi 15.000.000.000 saham atau senilai Rp7.500.000.000.000, yang telah disetujui dalam RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sehubungan dengan peningkatan modal dasar dari sebesar Rp5.000.000.000.000 menjadi Rp7.500.000.000.000 yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 10 Januari 2018.
2. Setelah itu modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan juga mengalami peningkatan dari sejumlah 3.958.000.000 saham atau senilai Rp1.979.000.000.000, menjadi 7.092.762.898 saham atau senilai Rp3.546.381.449.000. Adapun hal tersebut terjadi karena Bank BRI melakukan penyetoran modal sejumlah 2.000.000.000 saham atau senilai Rp1.000.000.000.000 dan kapitalisasi laba sejumlah 1.134.762.898 saham atau senilai Rp567.381.449.000. Hal ini telah disetujui dalam RUPS berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 2/2018**") yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018.

Tabel Proforma Ekuitas

Dengan asumsi perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak-banyaknya 2.623.350.600 saham biasa dengan nilai nominal Rp500 per saham, dan Harga Penawaran Rp● per saham, terjadi pada tanggal 31 Desember 2017, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2017	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
Modal ditempatkan dan disetor penuh	1.979.000	●	●
Agio saham	-	●	●
Pengukuran kembali program imbalan pasti – setelah pajak tangguhan	3.451	-	3.451
Cadangan umum	42.899	-	42.899
Saldo laba	577.491	-	577.491
Total Ekuitas	2.602.841	●	●

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UUPT pasal 72 adalah sebagai berikut: (1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan; (2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; (3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan; (4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3); (5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan; (6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan bermaksud membayarkan dividen dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun berjalan mulai tahun 2019 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2018, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku. Penentuan jumlah dan pembayaran dividen akan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain (i) hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; (ii) hukum; dan (iii) prospek masa depan Perseroan. Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, yang tunduk pada persetujuan oleh pemegang saham pada saat RUPS. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk pembayaran secara tunai, penerbitan saham dividen atau kombinasi dari keduanya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen tunai, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku. Dividen yang diterima oleh pemegang saham berkebangsaan negara lain akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan masing-masing negara.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak dengan syarat:

- dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham, telah ditetapkan sebagai berikut:

- atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan yang bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (setengah persen) dari nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana.
- pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai dengan ketentuan di atas. Dalam hal ini, pemilik saham pendiri untuk kepentingan perpajakan dapat menghitung final atas dasar anggapannya sendiri bahwa sudah ada penghasilan. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memanfaatkan kemudahan tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilannya dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 *juncto* Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri *juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf angka 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf pertama di atas) dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (sebagaimana disebutkan pada paragraf keempat di atas).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Dalam hal dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya dilakukan kepada penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia dan memenuhi ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010, dipotong dengan tarif yang lebih rendah sesuai dengan P3B.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib pajak, Perseroan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku untuk tiga tahun terakhir yaitu tahun 2015, 2016 dan 2017.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 37 tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 19 Maret 2018, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) berdasarkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) dan mengikatkan diri untuk membeli seluruh sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Efek adalah sebagai berikut:

No	Keterangan	Porsi Penjaminan		
		Saham	(Rp)	%
	Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1.	PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi)			
2.	PT CLSA Sekuritas Indonesia			
3.	PT Danareksa Sekuritas (Terafiliasi)			
4.	PT Indo Premier Sekuritas			
	Penjamin Emisi Efek:			
	Akan ditentukan kemudian			
	Total			100,00

Selanjutnya Para Penjamin Emisi Efek yang turut berpartisipasi dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal yang dimaksud dengan Afiliasi adalah Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek adalah pihak yang terafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan melalui kepemilikan saham oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, sedangkan PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

BAE : **PT Datindo Entrycom**
Puri Datindo – Wisma Sudirman
Jl. Jend. Sudirman Kav. 34
Jakarta 10220
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Izin usaha sebagai BAE : Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Datindo Entrycom
Surat penunjukan : Surat No. SPK.287-NLG/10/2017 tanggal 17 Oktober 2017

Tugas Pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (“DPPS”) dan FPPS yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana diisyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapatkan persetujuan dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (“FKP”) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai peraturan yang berlaku.

Notaris : **Fathiah Helmi, S.H.**
Graha Irama Lt. 6c
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 1&2
Kuningan, Jakarta Selatan 12950
Nomor STTD : 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Tanggal STTD : 12 Februari 1996
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958
Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia
Surat penunjukan : Surat Instruksi Kerja No. B.3610NLG/09/2017 tanggal 29 September 2017.

Tugas Pokok:

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, serta akta-akta pengubahannya.

Akuntan Publik : **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, firma anggota jaringan Ernst & Young Global Limited**
Bursa Efek Indonesia, Tower II, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Nama Rekan : Danil Setiadi Handaja, CPA

Nomor STTD : 04/PM.22/STTD-AP/2014
Tanggal STTD : 7 Mei 2014
Asosiasi Profesi : Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.1843
Surat Penunjukan : SPK No. 310-NLG/11/2017 tanggal 16 November 2017

Tugas Pokok:

Tugas pokok akuntan publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan akuntan publik, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, akuntan publik mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Konsultan Hukum : Hadiputranto, Hadinoto & Partners

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II, Lantai 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

No. STTD : No. 93/STTD-KH/PM/1996 tanggal 22 Juli 1996
atas nama Indah Nurwitri Respati, S.H.
No. Anggota HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
No. 89021 atas nama Indah Nurwitri Respati, S.H.
Pedoman kerja : Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar
Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan
Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan HKHPM
No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005
sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM
No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember
2012 dan Keputusan HKHPM No. Kep.
01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014
Surat penunjukan : Surat Instruksi Kerja No. SB-PDR/10-2017 tanggal
4 Oktober 2017.

Tugas Pokok:

melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara Objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan

1. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha:

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip Syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama

- 1) Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 3) Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 5) Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 6) Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarahmuntahiyah bit tamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 7) Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- 8) Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- 9) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain: a) *Wakalah*; b) *Hawalah*; c) *Kafalah*; d) *Rahn*;
- 10) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah;
- 11) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- 12) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- 13) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- 14) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- 15) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *Wadi'ah yad Amanah* atau prinsip lain berdasarkan prinsip syariah;
- 16) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak berdasarkan prinsip syariah;
- 17) Memberikan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) berdasarkan prinsip syariah;
- 18) Memberikan fasilitas garansi bank berdasarkan prinsip syariah;
- 19) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan Akad *Wakalah*;
- 20) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh OJK dan mendapat fatwa Dewan Syariah Nasional.

B. Selain melakukan kegiatan usaha di atas, Perseroan juga dapat menjalankan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- 1) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan prinsip syariah;
- 2) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank umum syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- 3) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- 4) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syariah;
- 5) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- 6) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- 7) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berjangka pendek berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar uang;
- 8) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah, baik secara langsung atau tidak langsung, melalui pasar modal;
- 9) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank umum syariah lainnya yang berdasarkan prinsip syariah.

2. Ketentuan yang mengatur mengenai perubahan permodalan:

Perseroan, dengan memperhatikan Undang-Undang serta peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang berlaku, dapat mengubah permodalan sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- Dalam hal dilakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor, akan mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku di Indonesia.
- Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih, dengan wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.
- Penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) benda yang dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut; (b) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga; (c) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam anggaran dasar; (d) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan (e) dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK.
- Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), kepada pemegang saham wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar Berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa dan situs web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.
- Dalam setiap pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, Perseroan akan memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang berlaku.

- Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang: (a) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar; (b) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; (c) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau penggantinya; (d) dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam butir c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam butir c tidak terpenuhi; (e) persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir a, termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam butir d;
- Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Pasar Modal.

3. Ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan RUPS Tahunan dan RUPSLB.

RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun, dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.

Direksi Perseroan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPSLB atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang serta peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang berlaku, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi Perseroan dengan surat tercatat disertai alasannya.

Dalam RUPS Tahunan diputuskan hal-hal sebagai berikut:

- Laporan Tahunan diajukan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan.
- Penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
- Penunjukan akuntan publik yang terdaftar di OJK, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.
- Pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, jika diperlukan.
- Hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya sesuai dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

RUPSLB dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

4. Hak, preferensi, dan pembatasan yang terdapat pada masing-masing jenis saham, yang meliputi:

- hak atas dividen, termasuk batas waktu hilangnya hak atas dividen
Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen.

Dividen untuk suatu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham dengan memperhatikan anggaran dasar Perseroan, yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan dari peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan.

Dalam hal pembagian dividen tunai, Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai.

Jika perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus.

Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau akan menjadi hak Perseroan.

- hak suara;
Dalam RUPS, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Dalam memberikan suara, pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
- hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi
Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan otoritas yang berwenang, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan otoritas yang berwenang tidak menunjuk likuidator lain. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian

berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asas Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Anggaran Dasar Perseroan beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.

Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

- hak memesan Efek terlebih dahulu.
Perseroan dapat meningkatkan modal ditempatkan dan disetor dengan cara mengeluarkan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain Obligasi Konversi atau Waran) yang dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

5. Ringkasan ketentuan berkaitan dengan Direksi:

Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan perbankan syariah, yang salah satu diantaranya sebagai Direktur Utama.

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar Perseroan, untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Perbuatan hukum untuk menyewakan atau melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang yang tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan serta tidak lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak yang melebihi nilai yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- b. Menjadikan harta kekayaan Perseroan sebagai obyek hak tanggungan atau menyediakannya sebagai jaminan dalam bentuk apapun yang nilainya tidak lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan.
- c. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan yang tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
- d. Berinvestasi dalam perusahaan lain atau mendirikan perusahaan baru yang nilainya tidak lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan atau yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dan tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan dalam Perseroan atau badan-badan lain yang nilainya tidak lebih dari 50% dari kekayaan bersih Perseroan atau yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dan tidak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
- f. Direksi harus pula mendapat persetujuan dari RUPS dalam hal investasi/divestasi yang dilakukan Perseroan adalah material bagi Perseroan.
- g. Tidak menagih lagi pokok piutang macet yang telah dihapusbukkan yang jumlahnya melebihi jumlah yang ditentukan oleh Dewan Komisaris.

ketentuan mengenai periode jabatan anggota Direksi.

Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Direksi harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia).

Pengangkatan anggota Direksi untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-4 (empat) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dan dapat diangkat kembali sesuai dengan perautran perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

6. Ringkasan ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama dan 2 (dua) orang Komisaris atau lebih. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, maka 2 (dua) diantaranya adalah Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang anggota atau lebih, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 50% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris diangkat untuk satu periode masa jabatan dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang (Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia).

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-4 pada akhir 1 periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun demikian anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS sebelum masa jabatannya berakhir, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan anggaran Perseroan serta ketentuan anggaran dasar dan keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

7. Ringkasan ketentuan yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah:

a. Dewan Pengawas Syariah ditempatkan pada Perseroan atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan memperhatikan ketentuan OJK atau penggantinya, ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut.

- b. Tugas dan fungsi utama Dewan Pengawas Syariah adalah (i) sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Perseroan; (ii) bertugas sebagai pengawas kegiatan Syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip Syariah; (iii) berfungsi sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip Syariah; dan (iv) berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.
- c. Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syariah wajib mengikuti fatwa DSN dan wajib melaporkan kegiatan usaha Perseroan kepada OJK atau penggantinya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK atau penggantinya.
- d. Anggota Dewan Pengawas Syariah diangkat (atas rekomendasi MUI) dan diberhentikan oleh RUPS. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah harus mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang.
- e. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-4 (empat) pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Pasar Modal, dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh RUPS. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat ketentuan penting lainnya terkait pemegang saham yang mengatur tentang pembatasan hak untuk memiliki saham termasuk hak bagi pemegang saham asing untuk memiliki atau melaksanakan hak suara, atau tentang perjanjian atau peraturan yang dapat berpengaruh terhadap perubahan pengendalian Perseroan, penggabungan usaha, akuisisi, atau restrukturisasi Perseroan, maupun tentang kewajiban pengungkapan kepemilikan saham dengan batasan tertentu.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

15.1 Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham, para pemesan yang berhak dapat melakukan pemesanan pembelian saham selama jam kerja yang ditentukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau Penjamin Emisi Efek di mana FPPS diperoleh, yaitu mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

15.2 Persyaratan Pemesanan Yang Dapat Diterima

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPS dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) dan membawa tanda jati diri asli (KTP/paspor bagi perorangan, dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPS wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pemesanan.

Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila FPPS tidak diisi dengan lengkap atau bila persyaratan pemesanan pembelian saham termasuk persyaratan pihak yang berhak melakukan pemesanan, tidak terpenuhi. Sedangkan pemesan, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya apabila telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian.

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau lembaga/badan usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7.

15.3 Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

15.4 Penyerahan Formulir Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus ini dan FPPS. Pemesanan pembelian saham dilakukan dengan menggunakan FPPS asli yang dikeluarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Setelah FPPS dilengkapi oleh pemesan, pemesanan wajib disampaikan melalui anggota sindikasi Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum pada Bab XII dalam Prospektus ini. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan saham harus memiliki rekening efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI.

15.5 Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018, mulai pukul 10.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

15.6 Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Mei 2018.

15.7 Kriteria dan Persyaratan Pemesanan Khusus oleh Karyawan Perseroan

Karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan), selama Masa Penawaran dapat melakukan pemesanan sebanyak-banyaknya 2,50% (dua koma lima nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Kriteria yang harus dipenuhi oleh karyawan Perseroan untuk dapat melakukan pemesanan, dapat dilihat pada Bab Penawaran Umum Perdana Saham, subbab Program Pemberian Saham Penghargaan dalam Program *Employee Stock Allocation* (ESA).

15.8 Persyaratan Pembayaran

Pembayaran dapat dilakukan dengan uang tunai, cek pemindahbukuan atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada waktu FPPS diajukan. Semua setoran harus dimasukkan ke dalam rekening Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada :

PT Bank BRISyariah Tbk
Cabang Jakarta Abdul Muis
Atas nama : PT Danareksa Sekuritas IPO BRISyariah
No. A/C : 1037657545

Apabila pembayaran menggunakan cek, maka cek tersebut harus merupakan cek atas nama/milik pihak yang mengajukan (menandatangani) FPPS. Cek milik/atas nama pihak ketiga tidak dapat diterima sebagai pembayaran. Seluruh pembayaran harus sudah diterima (*in good fund*) oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dari sindikasi, nasabah retail dan institusi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2018 pukul 15.00 WIB pada rekening tersebut di atas. Apabila pembayaran tidak diterima pada tanggal dan jam tersebut di atas maka FPPS yang diajukan dianggap batal dan tidak berhak atas penjatahan. Sedangkan untuk nasabah internasional yang melakukan pemesanan dengan mekanisme penjatahan pasti dapat melakukan pembayaran dan "*in good fund*" paling lambat pada Tanggal Distribusi.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan pembayaran tersebut menjadi tanggung jawab pemesan. Semua cek dan bilyet giro akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek atau bilyet giro ditolak oleh bank tertarik, maka pemesanan saham yang bersangkutan otomatis menjadi batal. Untuk pembayaran melalui *transfer account* dari bank lain, pemesan harus melampirkan fotokopi Nota Kredit Lalu Lintas Giro (LLG) dari bank yang bersangkutan dan menyebutkan nomor FPPS/DPPS-nya.

15.9 Tanda Terima untuk FPPS

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang menerima pengajuan FPPS akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari FPPS lembar kelima sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian saham. Bukti tanda terima pemesanan pembelian saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan dan harus disimpan dengan baik agar dapat diserahkan kembali pada saat pengembalian sisa uang pemesanan dan/atau penerimaan FKPS atas pemesanan pembelian saham.

15.10 Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Danareksa Sekuritas selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7.

a. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti dibatasi sebesar-besarnya ●% (● persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan, yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, yayasan, institusi bentuk lain, baik domestik maupun luar negeri.

Dalam hal penjatahan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem penjatahan pasti, maka penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

- (1) Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak-pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum Perdana Saham. Penentuan besarnya persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
- (2) Jumlah penjatahan pasti sebagaimana dimaksud pada butir (1) termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- (3) Penjatahan pasti dilarang diberikan kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi, yaitu:
 - i) direktur, komisaris, karyawan atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham;
 - ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; dan
 - iii) Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (1) dan butir (2), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

b. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan terpusat dibatasi minimum sebesar ●% (● persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Jika jumlah efek yang dipesan melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan melalui suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Manajer Penjatahan yang bersangkutan harus melaksanakan prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- (1) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga dan terdapat sisa saham yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka: (i) pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan; dan (ii) dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa saham, maka sisa saham tersebut dibagikan secara proporsional kepada Pemesan Saham Yang Terafiliasi
- (2) Jika setelah mengecualikan Pemesan Saham Yang Terafiliasi dan terdapat sisa saham yang jumlahnya lebih kecil dari jumlah yang dipesan, maka penjatahan bagi pemesan yang tidak dikecualikan itu akan dialokasikan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - para pemesan yang tidak dikecualikan akan memperoleh satu satuan perdagangan di Bursa Efek, jika terdapat cukup satuan perdagangan yang tersedia. Dalam hal jumlahnya tidak mencukupi, maka satuan perdagangan yang tersedia akan dibagikan dengan diundi. Jumlah saham yang termasuk dalam satuan perdagangan dimaksud

adalah satuan perdagangan terbesar yang ditetapkan oleh Bursa Efek di mana saham tersebut akan tercatat; dan

- apabila masih terdapat saham yang tersisa, maka setelah satu satuan perdagangan dibagikan kepada pemesan yang tidak dikecualikan, pengalokasian dilakukan secara proporsional, dalam satuan perdagangan menurut jumlah yang dipesan oleh para pemesan.

Sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan No.IX.A.7, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan saham melalui lebih dari satu FPPS untuk setiap Penawaran Umum Perdana Saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu FPPS yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam suatu Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang membeli atau memiliki saham untuk portofolio saham mereka sendiri.

Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum Perdana Saham, maka Penjamin Emisi Efek, atau Afiliasi dari Penjamin Emisi Efek dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan sesuai dengan Peraturan No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No.IX.A.7 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak akhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

15.11 Pembatalan Pemesanan

Para pemesan yang telah melakukan pemesanan dan telah memenuhi persyaratan pemesanan pembelian, tidak dapat membatalkan pembelian sahamnya.

15.12 Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal terdapat persyaratan permohonan pembelian, sebagaimana tercantum pada poin 15.2 tentang Persyaratan Pemesanan Yang Dapat Diterima, yang tidak terpenuhi oleh pemesan Saham Yang Ditawarkan, maka Penjamin Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan berhak untuk menolak pemesanan tersebut. Dalam hal dana pemesanan tersebut telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan, apabila terjadi kelebihan pemesanan, maka masing-masing Penjamin Emisi Efek bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan kepada siapa FPPS diajukan oleh pemesan. Dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan atas Penawaran Umum Perdana Saham, maka apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan sebelum Tanggal Pembayaran, maka

pengembalian atas uang pemesanan merupakan tanggung jawab dari para Penjamin Emisi Efek. Pengembalian atas uang pemesanan oleh Penjamin Emisi Efek dalam hal terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini sebelum Tanggal Pembayaran tidak termasuk pengembalian kepada Peserta Program ESA. Namun, apabila pengumuman penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham ini dilaksanakan setelah Tanggal Pembayaran, maka tanggung jawab untuk mengembalikan pembayaran pemesanan akan berada pada pihak Perseroan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Efek yang relevan kepada siapa FPPS semula diajukan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Saham Yang Ditawarkan dan bukti tanda jati diri.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan, yang telah menyampaikan pesan kepada pihak tersebut, sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut, wajib membayar ganti rugi kepada para pemesan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan yang dihitung berdasarkan nilai realisasi imbal hasil terendah untuk produk simpanan akad mudharabah yang berlaku pada Bank Penerima dari dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak Hari Kerja ke-1 sejak Tanggal Pengembalian, secara prorata untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Bank Penerima adalah bank di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek membuka rekening IPO atas namanya yang akan menerima uang pemesanan Saham Yang Ditawarkan dengan Harga Penawaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan perubahan-perubahannya.

Apabila pengembalian atas pembayaran pemesanan Saham Yang Ditawarkan sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Pengembalian maka hal itu bukan kesalahan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Perseroan, sehingga tidak ada kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan ketentuan di atas.

15.13 Distribusi Saham dan Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham

Distribusi saham ke masing-masing rekening efek di KSEI atas nama Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pemesan saham untuk kepentingan pemesan saham akan dilaksanakan selambat-lambatnya dua Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. FKPS atas pemesanan pembelian saham tersebut dapat diambil pada kantor BAE yang ditunjuk, dengan menunjukkan tanda jati diri asli pemesan dan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan pembelian saham.

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- (1) Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam rekening efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal 8 Mei 2018 setelah menerima konfirmasi registrasi saham tersebut atas nama KSEI dari Perseroan atau BAE.

- (2) Sebelum saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini dicatatkan di Bursa Efek, pemesan akan memperoleh bukti kepemilikan saham dalam bentuk FKPS yang sekaligus merupakan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas saham-saham dalam Penitipan Kolektif.
 - (3) KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
 - (4) Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara rekening efek di KSEI.
 - (5) Pemegang saham yang tercatat dalam rekening efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
 - (6) Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki/membuka rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
 - (7) Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
 - (8) Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
 - (9) Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
 - (10) Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana FPPS yang bersangkutan diajukan.

15.14 Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
- (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - (2) bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
 - (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :
- (1) dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Saham di Indonesia sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI SAHAM

**PT Bahana Sekuritas
(terafiliasi)**
Graha Niaga 19th Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Tel. (021) 250 5081
Fax. (021) 250 5071
www.bahana.co.id

Divisi Investment Banking
bs_ibcm@bahana.co.id

**PT CLSA Sekuritas
Indonesia**
Wisma GKBI Suite 901
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel: (021) 2554 8888
Fax. (021) 570 8134
www.clsa.com

Divisi Corporate Finance
and Capital Markets
ibk.jakarta@cls.com

**PT Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)**
Gedung Danareksa Lantai 1
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110
Telepon: (021) 2955-5777
Faksimili: (021) 350-1725
www.danareksa.com

Divisi Investment Banking
IB-Group1@danareksa.co.id

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia
Tel. (021) 5793 1168
Fax. (021) 5793 1167
www.indopremier.com

Divisi Investment Banking
corfin@ipc.co.id

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang telah dibuat oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

20 Maret 2018

Our Ref: 792635-v2

Kepada Yth.
PT Bank BRISyariah Tbk
Jalan Abdul Muis No. 2-4, Gambir
Jakarta 10160, Indonesia

U.p. : Direksi

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana PT Bank BRISyariah Tbk

Dengan hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor Konsultan Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, dalam hal ini diwakili oleh Indah Nurwitri Respati, SH, yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi penunjang Pasar Modal No. 93/STTD-KH/PM/1996 tanggal 22 Juli 1996 dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 89021, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT Bank BRISyariah Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat Penunjukan No. SB-PDR/10-2017 tanggal 4 Oktober 2017 untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan Laporan Uji Tuntas serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUPS**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan dinyatakan efektifnya pernyataan pendaftaran atas dokumen PUPS oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum dengan No. 792635-v1 tanggal 22 Februari 2018 yang telah disampaikan ke OJK.

A. URAIAN TRANSAKSI

Perseroan, melalui PUPS, berencana untuk menawarkan sebanyak 2.623.350.600 saham biasa atas nama yang seluruhnya dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nominal Rp500 setiap saham yang mewakili 27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah penawaran umum yang merupakan saham baru yang ditawarkan kepada masyarakat. PUPS

telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 8 tanggal 8 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) berdasarkan Keputusan Menkumham No. AHU-0000386.AH.01.02.Tahun2018 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 10 Januari 2018 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 sebagaimana telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 10 Januari 2018 ("**Akta No. 8/2018**"). Akta No. 8/2018 juga menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- (a) Program alokasi saham untuk karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "**ESA**") yang dilaksanakan pada saat PUPS dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam PUPS atau sebesar 65.583.700 saham. Syarat dan ketentuan lebih lanjut atas program ESA ditentukan oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. B.004-PDR/01-2018 tanggal 23 Januari 2018.
- (b) Program opsi saham untuk manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "**MESOP**") yang dilaksanakan setelah PUPS dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya sebesar 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PUPS atau sebesar 300.498.300 saham. Syarat dan ketentuan lebih lanjut atas program MESOP ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat dan ketentuan lebih lanjut atas program MESOP ditentukan oleh Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. B.001-KOM/01-2018 tanggal 23 Januari 2018.

Saham-saham dari program ESA dan MESOP di atas memiliki hak yang sama dengan saham Perseroan lainnya.

Dalam rangka PUPS ini, sebanyak 99% saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI, sedangkan sebanyak 1% saham Perseroan yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak dicatatkan pada BEI sebagaimana diwajibkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani sehubungan dengan PUPS ini adalah sebagai berikut:

- (a) Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 37 tanggal 21 Februari 2018 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum No. 31 tanggal 19 Maret 2018 antara Perseroan, Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");
- (b) Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Perusahaan No. 38 tanggal 21 Februari 2018 antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Administrasi Efek**");

- (c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-006/SHM/KSEI/0118 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran di KSEI**"); dan
- (d) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek tanggal 15 Maret 2018 yang dibuat antara Perseroan dan BEI ("**Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek**").

Seluruh penggunaan dana yang diperoleh dari PUPS, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sebagai berikut:

- (a) Sekitar 80% akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan,
- (b) Sekitar 12,5% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi yang meliputi pengembangan pada *core banking system*, *electronic channel*, infrastruktur jaringan, *support system*, *digital banking* dan *big data*.
- (c) Sekitar 7,5% akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor dengan membuka sejumlah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas pada wilayah Sumatera dan/atau Jawa & Bali dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi dan/atau Nusa Tenggara, Maluku & Papua,

selanjutnya disebut sebagai ("**Rencana Penggunaan Dana**").

Sehubungan dengan PUPS, Perseroan juga akan melakukan penawaran terbatas di luar negeri, yakni Malaysia, Hongkong dan Singapura.

B. DEFINISI

"**Anggaran Dasar**" berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

"**BANI**" berarti Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

"**BI**" berarti Bank Indonesia.

"**BMPK**" berarti Batas Maksimum Pemberian Kredit.

"**Basyarnas**" berarti Badan Arbitrase Syariah Nasional.

"**Bapepam-LK**" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia.

"**BEI**" berarti PT Bursa Efek Indonesia.

"**Biro Administrasi Efek**" berarti PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.

"**BPJS**" berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

"**BNRI**" berarti Berita Negara Republik Indonesia.

"**BRI**" berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

"**Dewan Komisaris**" berarti Dewan Komisaris dari suatu PT.

"**Direksi**" berarti Direksi dari suatu PT.

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**KSEI**" berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas.

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan (dahulu dikenal sebagai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia atau Bapepam-LK).

"**PBI**" berarti Peraturan Bank Indonesia.

"**PBI 11/2009**" berarti PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 2009.

"**PBI 7/2005**" berarti PBI No. 7/3/PBI/2005 tentang BMPK Bank Umum yang diundangkan pada tanggal 20 Januari 2005 sebagaimana diubah dengan PBI No 8/13/PBI/2006 yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2006.

"**Penjamin Emisi Efek**" berarti PT Bahana Sekuritas, PT CLSA Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas serta para penjamin emisi efek lainnya yang dapat ditunjuk oleh Perseroan.

"**Penjamin Pelaksana Emisi Efek**" berarti PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, PT CLSA Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas.

"**Peraturan No. IX.J.1**" berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-179/BL/2008, tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 14 Mei 2008.

"**Perjanjian Material**" berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus dan LUT.

"**Perizinan Operasional**" berarti perizinan operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan.

"**Perizinan Umum**" berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan.

"**Periode Uji Tuntas**" berarti periode terhitung sejak tanggal pendiriannya Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

"**POJK 17**" berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah yang diundangkan pada tanggal 10 November 2015.

"**POJK 21**" berarti Peraturan OJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah yang diundangkan pada tanggal 19 November 2014.

"**POJK 25**" berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017.

"**POJK 32**" berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 yang diundangkan pada tanggal 14 Maret 2017.

"**POJK 33**" berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

"**POJK 34**" berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Komite Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

"**POJK 35**" berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang diundangkan pada tanggal 8 Desember 2014.

"**POJK 55**" berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.

"**POJK 56**" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 2015.

"**POJK 56/2016**" berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum yang diundangkan pada tanggal 9 Desember 2016.

"**POJK 65**" berarti Peraturan OJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016.

"**POJK 8**" berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang diundangkan pada tanggal 13 Juni 2014.

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas.

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham.

"**Standar HKHPM**" berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Keputusan HKHPM

No. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014.

"**Surat Pernyataan**" berarti surat-surat pernyataan yang ditandatangani oleh Perseroan pada tanggal 19 Maret 2018.

"**Tanggal Pendapat Hukum**" berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 20 Maret 2018.

"**Uji Tuntas**" berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUPS oleh Perseroan, dengan memperhatikan Ruang Lingkup, Pembatasan dan Asumsi dari LUT.

"**WLTK**" berarti Wajib Laporkan Tenaga Kerja.

"**YKP BRI**" berarti Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATAAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;
2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain; dan
4. seluruh ruang lingkup dan pembatasan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang, semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. bahwa Perseroan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan yang tidak atau

belum diberikan atau diberitahukan kepada kami sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

3. bahwa seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. bahwa dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;
5. bahwa dokumen-dokumen tersebut mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan untuk kepentingannya masing-masing;
6. bahwa untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut;
7. bahwa untuk setiap dokumen dimana Perseroan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
8. bahwa setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
10. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pegawai Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. *PENDAPAT HUKUM*

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Utara, adalah sebuah PT yang didirikan dan diatur menurut Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 4 tanggal 3 April 1969, yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 serta telah didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Bandung No. 186/1970 tanggal 1 Juli 1970 dan diumumkan dalam BNRI No. 43 tanggal 28 Mei 1971 Tambahan No. 242 ("**Akta Pendirian**").

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir ialah sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan yakni berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 2 tanggal 2 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Akta No. 2/2018**") yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0091716 tanggal 2 Maret 2018 sebagaimana didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030131.AH.01.11.Tahun2018 tanggal 2 Maret 2018.

(Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian beserta perubahan-perubahannya selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan beserta seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk Peraturan No. IX.J.1, POJK 32 dan POJK 33.

2. Susunan permodalan Perseroan sejak pendiriannya hingga saat ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, setiap peningkatan modal Perseroan yang dilakukan oleh pemegang saham Perseroan telah disetor secara penuh.

Berdasarkan Akta No. 2/2018, susunan permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal dasar : Rp 7.500.000.000.000

Modal ditempatkan/disetor : Rp 3.546.381.449.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 15.000.000.000 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp500.

Modal ditempatkan/disetor Perseroan selama Periode Uji Tuntas telah disetor secara penuh sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia.

3. Sehubungan dengan saham yang diterbitkan oleh Perseroan sebelum PUPS, ketentuan POJK 25 berlaku bagi Perseroan dimana apabila BRI dan YKP BRI memperoleh

saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga PUPS dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK, maka BRI dan YKP BRI dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

4. Berdasarkan Akta No. 2/2018, susunan pemegang saham Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham		Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar		15.000.000.000	7.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
1.	BRI	7.092.761.655	3.546.380.827.500	99,999
2.	YKP BRI	1.243	621.500	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor		7.092.762.898	3.546.381.449.000	100
Saham dalam Portepel		7.907.237.102	3.953.618.551.000	

Per Tanggal LUT, Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham yang mencerminkan susunan pemegang saham Perseroan serta Daftar Khusus Perseroan dimana setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini beserta anggota keluarganya tidak memiliki saham dalam Perseroan.

5. Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini berdasarkan Akta No. 8/2018 yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0009250 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0002437 tanggal 10 Januari 2018, yakni sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Moh. Hadi Santoso
Direktur	:	Widodo Januarso
Direktur Independen	:	Wildan
Direktur	:	Agus Katon Eko S.
Direktur	:	Kokok Alun Akbar

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Hermanto Siregar
Komisaris	:	Fahmi Subandi
Komisaris Independen	:	Komaruddin Hidayat
Komisaris Independen	:	Eko Suwardi

Susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan saat ini berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Tahunan No. 33 tanggal 18 April 2017 yang dibuat di hadapan

Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan atas perubahan data perseroan dari Menkumham No. AHU-AH.01.03-0136-0136847 tanggal 17 Mei 2017 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0063105.AH.01.11.Tahun2017 tanggal 17 Mei 2017, yakni sebagai berikut:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Didin Hafidhuddin

Anggota : Muhammad Gunawan Yasni

Perseroan telah memiliki Daftar Khusus yang mencerminkan kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini.

Pengangkatan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum Indonesia, kecuali khusus untuk pengangkatan (i) Fahmi Subandi sebagai Komisaris, (ii) Eko Suwardi sebagai Komisaris Independen, (iii) Widodo Januarso sebagai Direktur, (iv) Kokok Alun Akbar sebagai Direktur dan (v) Hermanto Siregar sebagai Komisaris Utama yang sampai Tanggal Pendapat Hukum masih dalam proses persetujuan atas uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari OJK.

Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan pribadi dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 Maret 2018, seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan POJK 33. Perseroan telah memiliki Direktur Independen sebagai pemenuhan persyaratan Peraturan BEI No. I-A Lampiran Keputusan Direksi BEI No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat ("**Peraturan BEI No. I-A**"). Perseroan telah mengangkat Komisaris Independen sebagai pemenuhan persyaratan POJK 33 dan Peraturan BEI No. I-A.

Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 35.

Perseroan telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 34.

Perseroan telah memiliki Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 55. Perseroan telah memiliki Unit Audit Internal sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 56. Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit dan Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan telah memiliki Komite Manajemen Risiko serta Komite Aset dan Liabilitas sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 65.

Perseroan telah memiliki Komite Pemantau Risiko sebagaimana dipersyaratkan oleh PBI 11/2009.

6. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, Perseroan akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Sekitar 80% akan digunakan untuk penyaluran pembiayaan.
- (b) Sekitar 12,5% akan digunakan untuk pengembangan sistem teknologi informasi yang meliputi pengembangan pada *core banking system*, *electronic channel*, infrastruktur jaringan, *support system*, *digital banking* dan *big data*.
- (c) Sekitar 7,5% akan digunakan untuk pengembangan jaringan kantor dengan membuka sejumlah Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas pada wilayah Sumatera dan/atau Jawa & Bali dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi dan/atau Nusa Tenggara, Maluku & Papua.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil PUPS kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 6 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"). Apabila terdapat perubahan dari Rencana Penggunaan Dana, sebagaimana diwajibkan dalam POJK No. 30/2015, Perseroan wajib: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUPS bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

- 7. Dalam rangka PUPS, tidak terdapat kewajiban perizinan atau persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang dan/atau pihak ketiga. Meski demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan wajib:
 - (a) menyampaikan laporan tertulis terkait rencana PUPS kepada OJK sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan surat Perseroan tanggal 12 Januari 2018;
 - (b) mencantumkan rencana PUPS dalam rencana bisnis bank Perseroan serta menyampaikannya kepada OJK sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan rencana bisnis bank periode tahun 2018-2020 yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 27 November 2017; dan
 - (c) mengajukan pernyataan pendaftaran kepada OJK dan pernyataan pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.
- 8. Berdasarkan pemeriksaan kami, Surat Pernyataan dan Anggaran Dasar, kegiatan usaha utama Perseroan saat ini adalah berusaha di bidang perbankan syariah, dan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, berdasarkan Surat Pernyataan, saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan syariah.

Pengungkapan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1. Berdasarkan Surat Pernyataan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- 9. Kecuali sebagaimana diungkapkan di dalam LUT, Perseroan telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan Umum yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia, dan Perizinan Operasional dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum. Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban pelaporan berkala kepada instansi terkait sesuai dengan seluruh izin yang dimilikinya.

10. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, Perseroan tidak memiliki anak perusahaan.
11. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan-peraturan sebagai berikut:
 - (a) Sehubungan dengan penilaian sendiri (*self assessment*) atas tingkat kesehatan bank syariah, yakni POJK 8 yang mengatur antara lain perihal kewajiban penyampaian hasil penilaian sendiri atas tingkat kesehatan Perseroan. Berdasarkan pelaporan periode semester II tahun 2017, peringkat Perseroan ialah sebagai berikut.

Faktor	Peringkat
Profil risiko (<i>risk profile</i>)	2 (<i>low to moderate</i>)
<i>Good corporate governance</i>	2 (baik)
Rentabilitas (<i>earnings</i>)	3 (cukup memadai)
Permodalan (<i>capital</i>)	2 (memadai)
Peringkat tingkat kesehatan bank	2 (sehat)

- (b) Sehubungan dengan BMPK Perseroan, yakni ketentuan PBI 7/2005.
 - (c) Sehubungan dengan pelaksanaan *good corporate governance* bank syariah, yakni PBI 11/2009 yang mengatur antara lain pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.
 - (d) Sehubungan dengan kepemilikan saham bank umum, ketentuan POJK 56/2016 yang mengatur batas maksimum kepemilikan saham bank tidak berlaku bagi Perseroan mengingat Perseroan dimiliki secara tidak langsung melalui badan hukum yang dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia (dalam hal ini BRI).
 - (e) Sehubungan dengan penerbitan dan persyaratan efek syariah berupa saham, yakni POJK 17 yang mengatur antara lain Perseroan sebagai perusahaan publik syariah dan Dewan Pengawas Syariah.
 - (f) Sehubungan dengan kewajiban penyediaan modal minimum bank syariah, yakni POJK 21 yang mengatur antara lain modal minimum bagi bank syariah.
12. Seluruh Perjanjian Material dari Perseroan masih berlaku dan mengikat Perseroan serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasarnya dan ketentuan Hukum Indonesia dan tidak terdapat pembatasan atau larangan bagi Perseroan untuk melakukan PUPS maupun menggunakan dana hasil PUPS sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana serta ketentuan yang merugikan pemegang saham publik.
13. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, Perseroan saat ini tidak terikat dalam perjanjian kredit dengan pihak ketiga dan/atau pihak terafiliasi dimana

Perseroan merupakan debitur, kecuali bahwa Perseroan pada saat ini merupakan debitur berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Subordinasi I tanggal 2 September 2016 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Subordinasi I tanggal 26 September 2016, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang dibuat antara Perseroan dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai wali amanat ("**Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Subordinasi**"). Perjanjian ini tidak memiliki ketentuan yang membatasi Perseroan untuk melakukan PUPS maupun menggunakan dana hasil PUPS sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana serta ketentuan yang merugikan pemegang saham publik.

14. Aset-aset atas nama Perseroan yang bersifat material terhadap kegiatan usaha Perseroan, termasuk aset berupa hak atas kekayaan intelektual, telah dimiliki oleh Perseroan dengan didukung dokumen yang sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga dan tidak sedang dalam sengketa.
15. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, Perseroan telah memenuhi ketentuan sehubungan dengan upah minimum, peraturan perusahaan, WLTK, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
16. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan telah menutup asuransi atas aset-asetnya yang bernilai material.
17. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi anggaran dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, perizinan, perjanjian-perjanjian material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.
18. Sesuai ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUPS, Perseroan telah menandatangani (i) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, (ii) Perjanjian Administrasi Efek, (iii) Perjanjian Pendaftaran di KSEI dan (iv) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek. Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal. Berdasarkan keterangan Perseroan, Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan PT Bahana Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek sekaligus Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu sama-sama dikendalikan oleh Negara Republik Indonesia. Sedangkan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT CLSA Sekuritas Indonesia dan PT Indo Premier Sekuritas sebagai Penjamin Emisi Efek sekaligus Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
19. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan Surat Pernyataan, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan saat ini tidak sedang menjadi pihak baik dalam perkara perdata, perkara hubungan industrial, perkara pajak, perkara tata usaha negara, tidak sedang terdaftar sebagai pihak di dalam register perkara pidana, tidak sedang terlibat dalam perkara di BANI dan/atau Basyarnas, dan tidak sedang menjadi termohon dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga, serta tidak terdapat somasi dari pihak ketiga yang secara material dan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha utama Perseroan secara negatif.
20. Berdasarkan pemeriksaan kami yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 19 Maret 2018, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan yang sedang mendapat somasi dari pihak

ketiga manapun dan terlibat dalam perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana atau perselisihan/tuntutan di pengadilan atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing atau dalam perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan atau diajukan untuk kepailitan oleh pihak ketiga atau tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu perusahaan mengalami kepailitan dan perselisihan lain di luar pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

HHP Law Firm.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak, serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

HADIPUTRANTO, HADINOTO & PARTNERS



Indah Nurwitri Respati, S.H.

STTD: No. 93/STTD-KH/PM/1996

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja ("PSS"), akuntan publik independen (partner penanggung jawab: Danil Setiadi Handaja), berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini audit tanpa modifikasian. Laporan audit KAP PSS tersebut juga berisi hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dan penerbitan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
 TENTANG TANGGUNG JAWAB
 ATAS LAPORAN KEUANGAN
 PT BANK BRISYARIAH**
 tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah)
 Kecuali dinyatakan lain)

**BOARD OF DIRECTOR'S STATEMENT
 REGARDING THE RESPONSIBILITY
 FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
 PT BANK BRISYARIAH**
 as of December 31, 2017, 2016 and 2015
 For the Year then ended
 (Expressed in million of Rupiah,
 unless otherwise stated)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

Nama	Moch. Hadi Santoso	Name
Alamat Kantor	Jln. Abdul Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160	Office Address
Alamat Rumah	Jln. Malaka Hijau Raya No. 10-12 Malaka Country, Pondok Kopi, Duren Sawit Jakarta Timur	Domicile Address
Nomor Telepon Jabatan	021-345 0226 Direktur Utama/Chief Executive Officer	Phone Number Title

Nama	Wildan	Name
Alamat Kantor	Jln. Abd. J Muis No. 2-4 Jakarta Pusat 10160	Office Address
Alamat Rumah	Kav. DKI Blok E.5 No.12 RT.003/RW 011, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur	Domicile Address
Nomor Telepon Jabatan	021-345 0226 Direktur Operasi/Managing Director Operation	Phone Number Title

menyatakan bahwa :

declare that :

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Bank BRISyariah (Bank); | 1. <i>We are responsible for the preparation and the presentation of the financial statements of PT Bank BRISyariah (Bank).</i> |
| 2. Laporan keuangan Bank telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The Bank's financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bank telah diungkapkan secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information in the Bank's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;</i> |
| b. Laporan keuangan Bank tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The Bank's financial statements do not contain any material incorrect information or fact nor do they omit material information or fact;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Bank. | 4. <i>We are responsible for the Bank's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement has been made truthfully

Jakarta, Maret 2018/March , 2018
 Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Board of Directors



Moch. Hadi Santoso
 Direktur Utama/
 Chief Executive Officer

Wildan
 Direktur Operasi/
 Managing Director Operation

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-5883/PSS/2018

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank BRISyariah**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank BRISyariah terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-5883/PSS/2018

**The Shareholders, Board of Commissioners and
Directors
PT Bank BRISyariah**

We have audited the accompanying financial statements of PT Bank BRISyariah, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2017, 2016 and 2015, and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-5883/PSS/2018 (lanjutan)

Report No. RPC-5883/PSS/2018 (continued)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Auditors' responsibility (continued)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Bank BRISyariah tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 serta kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat, dan sumber dan penggunaan dana kebajikannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Bank BRISyariah as of December 31, 2017, 2016 and 2015, and its financial performance, cash flows, reconciliation of income and revenue sharing, sources and distribution of zakat funds, and sources and uses of qardhul hasan funds for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.



The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Independent Auditors' Report (continued)

Laporan No. RPC-5883/PSS/2018 (lanjutan)

Report No. RPC-5883/PSS/2018 (continued)

Hal-hal lain

Other matters

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank BRISyariah di Bursa Efek Indonesia (Catatan 49) serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of PT Bank BRISyariah in Indonesia Stock Exchange (Note 49), and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan auditor independen No. RPC-5656/PSS/2018 tertanggal 9 Februari 2018 atas laporan keuangan PT Bank BRISyariah tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Sehubungan dengan proses Penawaran Umum Perdana Saham PT Bank BRISyariah di Indonesia, PT Bank BRISyariah telah menerbitkan kembali laporan keuangannya tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang disertai dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan tertentu.

We have previously issued independent auditors' report No. RPC-5656/PSS/2018 dated February 9, 2018 on the financial statements of PT Bank BRISyariah as of December 31, 2017, 2016 and 2015 and for the years then ended. In connection with the process of Initial Public Offering of equity securities of PT Bank BRISyariah in Indonesia, PT BRISyariah has reissued its financial statements as of December 31, 2017, 2016 and 2015 and the years then ended, which contain certain updates and additional disclosures.

Purwantono, Sungkoro & Surja

Danil Setiadi Handaja, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1008/Public Accountant Registration No. AP.1008

13 Maret 2018/March 13, 2018

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
ASET					ASSETS
KAS	2a,2v,3	347.997	318.105	279.855	CASH
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA	2a,2c2d,2v,4	4.015.626	3.814.178	4.769.138	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA
GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN	2a,2b,2c, 2e,2v,5,41	245.821	453.391	130.417	CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS
INVESTASI PADA SURAT BERTAGIH	2b,2c,2f, 2v,6,41	7.411.068	4.706.065	2.181.054	INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES
PIUTANG	2b,2c,2g, 7,41				RECEIVABLES
Piutang <i>murabahah</i>		10.886.965	10.782.243	10.003.275	<i>Murabahah receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(429.948)	(281.710)	(222.925)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		10.457.017	10.500.533	9.780.350	
Piutang <i>istishna</i>		4.421	5.900	7.428	<i>Istishna receivables</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai		(112)	(140)	(187)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		4.309	5.760	7.241	
		10.461.326	10.506.293	9.787.591	
PINJAMAN QARDH	2b,2c,2h, 8,41	538.243	295.388	398.874	FUNDS OF QARDH
Cadangan kerugian penurunan nilai		(14.142)	(2.269)	(11.339)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		524.101	293.119	387.535	
PEMBIAYAAN MUDHARABAH	2b,2c,2i, 9,41	858.019	1.285.582	1.121.467	MUDHARABAH FINANCING
Cadangan kerugian penurunan nilai		(17.045)	(14.097)	(14.901)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		840.974	1.271.485	1.106.566	
PEMBIAYAAN MUSYARAKAH	2b,2c,2i 10,41	5.577.220	5.379.830	5.082.963	MUSYARAKAH FINANCING
Cadangan kerugian penurunan nilai		(129.222)	(193.940)	(120.617)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		5.447.998	5.185.890	4.962.346	
ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - NETO	2b,2c,2j, 11,41	1.146.920	286.181	46.259	ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET
ASET TETAP - NETO	2k,12	177.935	140.816	156.188	PREMISES AND EQUIPMENT - NET
ASET PAJAK TANGGUHAN	2t,20d	140.883	52.152	28.186	DEFERRED TAX ASSETS
ASET LAIN-LAIN	2b,2c,2l, 13,41	1.100.422	746.514	407.022	OTHER ASSETS
Cadangan kerugian penurunan nilai		(317.687)	(87.001)	(11.910)	<i>Allowance for impairment losses</i>
		782.735	659.513	395.112	
JUMLAH ASET		31.543.384	27.687.188	24.230.247	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN POSISI KEUANGAN (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (continued)
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016	31 Desember/ December 31, 2015	
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS					LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
LIABILITAS SEGERA	2m,14	86.752	86.911	48.237	OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY
BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN	2q,15	35.683	34.991	34.776	UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING
SIMPANAN	2b,2n,2v,41				DEPOSITS
Giro wadiah	16	1.769.344	1.129.560	938.831	Wadiah demand deposits
Tabungan wadiah	17	4.749.652	4.176.761	3.715.929	Wadiah saving deposits
		<u>6.518.996</u>	<u>5.306.321</u>	<u>4.654.760</u>	
SIMPANAN DARI BANK LAIN	2b,2n,18,41	14.333	972.719	890.852	DEPOSITS FROM OTHER BANKS
PINJAMAN YANG DITERIMA	2b,2w,19,41	-	100.000	100.000	FUND BORROWING
UTANG PAJAK	2t,20a	40.391	49.613	56.416	TAXES PAYABLE
ESTIMASI KERUGIAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI	2c,38c	2.134	895	1.242	ESTIMATED LOSSES ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES
LIABILITAS LAIN-LAIN	2s,21	1.402.166	912.978	635.254	OTHER LIABILITIES
SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI	2x,22	1.000.000	1.000.000	-	SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH
JUMLAH LIABILITAS		<u>9.100.455</u>	<u>8.464.428</u>	<u>6.421.537</u>	TOTAL LIABILITIES
DANA SYIRKAH TEMPORER	2b,2o,2v				TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
Giro mudharabah	23	139.535	-	-	Mudharabah demand deposits
Tabungan mudharabah	24	1.270.484	983.121	696.198	Mudharabah savings deposits
Deposito mudharabah	25,41	18.430.069	15.729.625	14.772.700	Mudharabah time deposits
JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER		<u>19.840.088</u>	<u>16.712.746</u>	<u>15.468.898</u>	TOTAL TEMPORARY SYIRKAH FUNDS
EKUITAS					EQUITY
MODAL SAHAM - nilai nominal Rp500 (nilai penuh) per saham					SHARE CAPITAL - Rp500 (full amount) par value per share
Modal dasar - 10.000.000.000 (nilai penuh) saham					Authorized share capital - 10,000,000,000 (full amount) shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.958.000.000 (nilai penuh) saham	1a,26	1.979.000	1.979.000	1.979.000	Issued and fully-paid share capital - 3,958,000,000 (full amount) shares
Pengukuran kembali program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan	2s,39	3.451	11.715	11.722	Remeasurement of defined benefit plan - net of deferred tax
Cadangan Umum		42.899	25.878	13.614	General Reserve
Saldo laba		577.491	493.421	335.476	Retained earnings
EKUITAS		<u>2.602.841</u>	<u>2.510.014</u>	<u>2.339.812</u>	EQUITY
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		<u>31.543.384</u>	<u>27.687.188</u>	<u>24.230.247</u>	TOTAL LIABILITIES, TEMPORARY SYIRKAH FUNDS AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN LABA RUGI
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
		2017	2016	2015	
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA SEBAGAI MUDHARIB	2p				REVENUE FROM FUND MANAGEMENT AS MUDHARIB
Pendapatan dari jual beli	27	1.508.223	1.534.570	1.461.483	Income from sales and purchases
Pendapatan bagi hasil	28	670.205	693.611	642.005	Income from profit sharing
Pendapatan usaha utama lainnya	30	544.757	393.188	306.378	Other main operating income
Pendapatan dari <i>ijarah</i> - neto	29	93.339	12.832	14.886	Income from <i>ijarah</i> - net
		2.816.524	2.634.201	2.424.752	
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL	2q,31	(1.193.918)	(1.035.501)	(1.027.442)	THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN
HAK BAGI HASIL MILIK BANK		1.622.606	1.598.700	1.397.310	BANK'S SHARE IN PROFIT SHARING
PENDAPATAN USAHA LAINNYA	2r,32	149.003	127.967	130.460	OTHER OPERATING INCOME
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Gaji dan tunjangan	2s,34	(522.067)	(538.227)	(509.098)	Salaries and benefits
Umum dan administrasi	35	(500.278)	(489.747)	(471.061)	General and administrative
Administrasi ATM		(66.705)	(62.692)	(79.937)	ATM administrative
Bonus <i>wadiah</i>	2n	(35.326)	(27.193)	(25.667)	Wadiah bonus
Lain-lain		(54.367)	(50.565)	(51.675)	Others
		(1.178.743)	(1.168.424)	(1.137.438)	
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - neto	2c,33	(453.372)	(319.011)	(231.353)	Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net
LABA USAHA		139.494	239.232	158.979	INCOME FROM OPERATION
PENDAPATAN (BEBAN) NON-USAHA - NETO	36	11.463	(623)	10.090	NON-OPERATING INCOME (EXPENSE) - NET
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		150.957	238.609	169.069	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	2t,20b	(49.866)	(68.400)	(46.432)	TAX EXPENSE
LABA BERSIH		101.091	170.209	122.637	NET INCOME
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:					OTHER COMPREHENSIVE INCOME:
Akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali program imbalan pasti	39	(11.020)	(7)	3.580	Remeasurement of defined benefit plan
Pajak penghasilan terkait akun-akun yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		2.756	-	(895)	Income tax related to item that will not be reclassified to profit or loss
Jumlah penghasilan komprehensif lain bersih setelah pajak		(8.264)	(7)	2.685	Total other comprehensive income net of tax
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		92.827	170.202	125.322	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (dalam Rupiah Penuh)	2z,37	25,54	43,00	36,34	BASIC EARNINGS PER SHARE (in Full Rupiah)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully- Paid Share Capital	Pengukuran Kembali Program Imbalan Pasti Setelah Pajak/ Remeasurement of Defined Benefit Plan- Net of Tax	Cadangan Umum/ General Reserve	Saldo Laba/ Retained Earnings	Ekuitas/ Equity	Balance as of December 31, 2014
Saldo 31 Desember 2014		1.479.000	9.037	12.956	213.497	1.714.490	Balance as of December 31, 2014
Tambahan modal	1a,26	500.000	-	-	-	500.000	Additional paid in capital
Laba tahun berjalan		-	-	-	122.637	122.637	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya		-	2.685	-	-	2.685	Other comprehensive income
Penambahan cadangan umum	26	-	-	658	(658)	-	Additional to general reserve
Saldo 31 Desember 2015		1.979.000	11.722	13.614	335.476	2.339.812	Balance as of December 31, 2015
Laba tahun berjalan		-	-	-	170.209	170.209	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya		-	(7)	-	-	(7)	Other comprehensive income
Penambahan cadangan umum	26	-	-	12.264	(12.264)	-	Additional to general reserve
Saldo 31 Desember 2016		1.979.000	11.715	25.878	493.421	2.510.014	Balance as of December 31, 2016
Laba tahun berjalan		-	-	-	101.091	101.091	Income for the year
Penghasilan komprehensif lainnya		-	(8.264)	-	-	(8.264)	Other comprehensive income
Penambahan cadangan umum	26	-	-	17.021	(17.021)	-	Additional to general reserve
Saldo 31 Desember 2017		1.979.000	3.451	42.899	577.491	2.602.841	Balance as of December 31, 2017

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
		2017	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan bagi hasil, <i>margin</i> , pendapatan <i>ijarah</i> dan pendapatan usaha utama lainnya		2.795.605	2.601.681	2.403.709	Receipt of profit sharing, margin, <i>ijarah</i> income and other main operating income
Pembayaran bagi hasil dana <i>syirkah</i> temporer		(1.193.226)	(1.035.502)	(1.036.512)	Payment of profit sharing for temporary <i>syirkah</i> funds
Penerimaan pendapatan usaha lainnya		149.003	127.967	130.460	Receipt of other operating income
Beban usaha		(1.501.122)	(1.348.586)	(1.172.328)	Payment Operating expenses
Pendapatan non-usaha - neto		11.183	(957)	10.022	Receipt (payment) Non-operational income (expense) - net
Pembayaran pajak penghasilan badan		(143.178)	(102.766)	(34.354)	Payment of corporate income tax
Pembayaran zakat		(8.933)	(6.998)	(4.242)	Payment of zakat
Penyaluran dana kebajikan		(2.308)	(783)	(1.374)	Distribution of <i>qardhul hasan</i> funds
Arus kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		107.024	234.056	295.381	Cash flows before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:					Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) aset operasi:					Decrease (increase) in operating assets:
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		1.400.000	(300.000)	55.645	Current accounts and placements with Bank Indonesia and other banks
Piutang		(103.243)	(777.440)	20.419	Receivables
Pinjaman <i>qardh</i>		(242.855)	103.486	192.975	Funds of <i>qardh</i>
Pembiayaan syariah		230.173	(460.982)	(1.227.847)	Sharia financing
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>		(933.030)	(141.910)	(827)	Assets acquired for <i>ijarah</i>
Aset lain-lain		(332.986)	(306.975)	(82.281)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:					Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera		(158)	38.674	(1.017)	Obligations due immediately
Simpanan dari nasabah		1.223.916	659.342	735.726	Deposits from customer
Simpanan dari bank lain		(958.386)	81.868	(76.011)	Deposits from other banks
Utang pajak		(2.535)	448	(5.209)	Taxes payable
Liabilitas lain-lain		478.170	277.718	147.923	Other liabilities
Kenaikan dana <i>syirkah</i> temporer		3.127.341	1.243.848	2.442.082	Increase temporary <i>syirkah</i> funds
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi		3.993.431	652.133	2.496.959	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan kembali investasi pada surat berharga		79.071	2.644.031	121.859	Proceeds from investments in marketable securities
Hasil penjualan aset tetap	12	280	335	68	Proceeds from disposal of premises and equipment
Perolehan aset tetap	12	(64.937)	(21.193)	(49.770)	Acquisition of premises and equipment
Perolehan surat berharga		(2.784.075)	(5.169.042)	(1.635.061)	Acquisition of marketable securities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(2.769.661)	(2.545.869)	(1.562.904)	Net Cash Used in Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
		2017	2016	2015	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan (pembayaran) pinjaman yang diterima	19	(100.000)	-	500.000	Proceed from (payment) funds Borrowing
Pendapatan Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	22	-	1.000.000	-	Proceed from Subordinated sukuk <i>mudharabah</i>
Arus kas bersih diperoleh atau dipergunakan dari aktivitas pendanaan		(100.000)	1.000.000	500.000	Net cash provided by/(used in) financing activities
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		1.123.770	(893.736)	1.434.055	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		3.235.674	4.129.410	2.695.355	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		4.359.444	3.235.674	4.129.410	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR
Kas dan setara kas akhir tahun terdiri dari:					Cash and cash equivalents at end of the year consist of:
Kas	3	347.997	318.105	279.855	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4	3.765.626	2.464.178	3.719.138	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	5	245.821	453.391	130.417	Current accounts and placements with other banks
Jumlah		4.359.444	3.235.674	4.129.410	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN
DAN BAGI HASIL
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF RECONCILIATION
OF INCOME AND REVENUE SHARING
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
		2017	2016	2015	
Pendapatan Pengelolaan Dana Sebagai <i>Mudharib</i> (Akrual)	2a	2.816.524	2.634.201	2.424.752	Revenue from fund management in <i>Mudharib</i> (Accrual)
Pengurangan					Deduction
Pendapatan tahun berjalan, kas atau setara kas yang belum diterima:					Current year income, in which cash and cash equivalents have not been received:
Pendapatan <i>margin murabahah</i> dan <i>istishna</i>		66.571	68.345	64.006	<i>Murabahah</i> and <i>istishna</i> margin income
Hak bagi hasil pembiayaan		1.823	1.623	2.109	Profit sharing share
Pendapatan usaha utama lainnya		124.666	102.173	73.507	Other main operating income
	13	193.060	172.141	139.622	
Penambahan					Addition
Pendapatan periode sebelumnya yang kasnya diterima pada periode berjalan:					Previous period income in which cash were received during current period:
<i>Margin murabahah</i> dan <i>istishna</i>		68.345	64.006	58.624	<i>Murabahah</i> and <i>istishna</i> margin
Bagi hasil pembiayaan		1.623	2.109	4.845	Profit sharing share
Pendapatan usaha utama lainnya		102.173	73.507	55.110	Other main operating income
		172.141	139.622	118.579	
Pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil		2.795.605	2.601.682	2.403.709	Available income for profit sharing
Bagi hasil yang menjadi hak Bank		1.601.687	1.566.181	1.376.267	Bank's share from profit sharing
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	31	1.193.918	1.035.501	1.027.442	Third parties' share on return
Dirinci atas:					Details to:
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan		1.158.235	1.000.510	992.666	Fund owners' share on distributed profit sharing
Hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan	15	35.683	34.991	34.776	Fund owners' share on undistributed profit sharing
Jumlah		1.193.918	1.035.501	1.027.442	Total

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN
DANA ZAKAT
Untuk Tahunyang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND DISTRIBUTION
OF ZAKAT FUNDS
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Sumber Dana Zakat				<i>Sources of Zakat Funds</i>
Internal Bank	8.559	7.228	4.001	<i>Internal Bank</i>
Eksternal Bank	240	195	278	<i>External Bank</i>
	8.799	7.423	4.279	
Penyaluran Dana Zakat				<i>Distribution of Zakat Funds</i>
Disalurkan ke lembaga lain	8.933	6.998	4.242	<i>Distributed to other institutions</i>
(Defisit) Surplus	(134)	425	37	<i>(Deficit) Surplus</i>
Sumber Dana Zakat pada Awal Tahun	500	75	38	<i>Sources of Zakat Funds at Beginning of the Year</i>
Sumber Dana Zakat pada Akhir Tahun	366	500	75	<i>Sources of Zakat Funds at End of the Year</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN
DANA KEBAJIKAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2017, 2016 dan 2015
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
STATEMENTS OF SOURCES AND USES
OF QARDHUL HASAN FUNDS
For the Years Ended
December 31, 2017, 2016 and 2015
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Sumber Dana Kebajikan				<i>Sources of Qardhul Hasan Funds</i>
Infaq dan shadaqah	1.794	602	1.158	<i>Infaq and shadaqah</i>
Denda	270	220	256	<i>Penalty</i>
Pendapatan non-halal	533	129	166	<i>Non-halal income</i>
	<u>2.597</u>	<u>951</u>	<u>1.580</u>	
Penggunaan Dana Kebajikan				<i>Uses of Qardhul Hasan Funds</i>
Sumbangan	2.308	783	1.374	<i>Donation</i>
Surplus	289	168	206	<i>Surplus</i>
Dana Kebajikan pada Awal Tahun	679	511	305	<i>Qardhul Hasan Funds at Beginning of the Year</i>
Dana Kebajikan pada Akhir Tahun	<u>968</u>	<u>679</u>	<u>511</u>	<i>Qardhul Hasan Funds at End of the Year</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum

PT Bank BRISyariah ("Bank") berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta (BJA) berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat dihadapan Liem Toeng Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI) didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang selanjutnya diubah dengan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH 2009 tanggal 5 November 2009 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009.

1. GENERAL

a. Bank Establishment and General Information

PT Bank BRISyariah (the "Bank") is located in Jakarta, Indonesia, and initially established under the name of PT Bank Jasa Arta (BJA) based on the Deed of Establishment No. 4 dated April 3, 1969 of Liem Toeng Kie, S.H., Notary in Jakarta. The deed has been approved by the Minister of Law of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. J.A.5/70/4 dated May 28, 1970 and has been published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 43, dated May 28, 1971, Supplement No. 242/1971.

The changes in name and business activity based on sharia principles from BJA to PT Bank Syariah BRI (BSBRI) was based on BJA Shareholders' Decision Statement, as stated in the Deed No. 45 dated April 22, 2008 of Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta.

In 2009, PT Bank Syariah BRI changed its name to PT Bank BRISyariah based on PT Bank BRISyariah Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 18 dated April 14, 2009 of Notary Fathiah Helmi, S.H., subsequently was amended by PT Bank Syariah BRI Shareholders' Decision Statement, as stated in Notarial Deed No. 20 dated September 17, 2009 of Notary Fathiah Helmi, S.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-53631.AH.01.02.TH2009 dated November 5, 2009 which has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 96 dated December 1, 2009, Supplement No. 27908 and Decision Letter from the Governor of Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 dated December 15, 2009.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 28 tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham memutuskan untuk menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Bank dari sejumlah 966.750.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp483.375 menjadi 958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp479.000, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33517.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59 tanggal 26 Juli 2011, Tambahan No. 21333.

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 15 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari 958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp479.000 menjadi 1.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp979.000, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20012 tanggal 5 Agustus 2010 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2012, Tambahan No. 1521/L.

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 113 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari 1.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp979.000 menjadi 2.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp1.479.000, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40622.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 76 tanggal 20 September 2013, Tambahan No. 113984.

1. GENERAL (continued)

a. Bank Establishment and General Information (continued)

The Bank's Articles of Association have been amended several times. According to PT Bank BRISyariah Shareholders' Decision Statement, Deed No. 28 dated June 14, 2010 of Notary Fathiah Helmi, S.H., shareholders decided to approve the reduction of issued and fully-paid share capital of the Bank from 966,750,000 shares (full amount) or Rp483,375 to 958,000,000 shares (full amount) or Rp479,000, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-33517.AH.01.02.Year 2010 dated July 2, 2010 and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 59 dated July 26, 2011, Supplement No. 21333.

Subsequently, this was again amended by PT Bank BRISyariah Shareholders' Decision Statement, Deed No. 15 dated July 19, 2010 of Notary Fathiah Helmi, S.H., decided to increase the issued and fully-paid share capital of the Bank from 958,000,000 shares (full amount) or Rp479,000 to 1,958,000,000 shares (full amount) or Rp979,000, which was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.10-20012 dated August 5, 2010, and which has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 57 dated July 17, 2012, Supplement No. 1521/L.

Subsequently, this was again amended by PT Bank BRISyariah Shareholders' Decision Statement, Deed No. 113 dated June 26, 2013 of Notary Fathiah Helmi, S.H., decided to increase the issued and fully-paid share capital of the Bank from 1,958,000,000 shares (full amount) or Rp979,000 to 2,958,000,000 shares (full amount) or Rp1,479,000, which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-40622.AH.01.02. Year 2013 dated July 25, 2013, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 76 dated September 20, 2013, Supplement No. 113984.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 1 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari 2.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp1.479.000 menjadi 3.958.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp1.979.000, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0954202 Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 (Catatan 26).

Perubahan terakhir dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 52 tanggal 31 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, mengenai perubahan masa jabatan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah. Perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0076528 tanggal 1 September 2016.

BJA memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.1-4-40 tanggal 3 Juli 1969. Sejak tanggal 16 Oktober 2008, BJA telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia.

Pada tanggal 27 Desember 2013, Bank mendapatkan izin sebagai bank devisa berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/139/KEP.GBI/DpG/2013.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

1. GENERAL (continued)

a. Bank Establishment and General Information (continued)

Subsequently, this was again amended by PT Bank BRISyariah Shareholders' Decision Statement, Deed No. 1 dated August 4, 2015 of Notary Fathiah Helmi, S.H., decided to increase the issued and fully-paid share capital of the Bank from 2,958,000,000 shares (full amount) or Rp1,479,000 to 3,958,000,000 shares (full amount) or Rp1,979,000, which was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0954202 Year 2015 dated August 4, 2015 (Note 26).

Latest amendment was documented in PT Bank BRISyariah's Shareholders' Statements of Agreement as stated in notarial deed No. 52 dated August 31, 2016 of Notary Fathiah Helmi, SH., notary in Jakarta, regarding the change in the term of service of Directors, Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board. The amendment was accepted and recorded by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0076528 dated September 1, 2016.

BJA obtained its business license to operate as a commercial bank from the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. D.15.1-4-40 dated July 3, 1969. Since October 16, 2008, BJA has obtained license from Bank Indonesia to change its business activities, from a conventional sharia bank into a commercial bank based on sharia principles.

On December 27, 2013, the Bank obtained a license to operate as foreign exchange bank based on the Decision Letter of the Governor of Bank Indonesia No. 15/139/KEP.GBI/DpG/2013.

According to Article 3 of the Bank's latest Articles of Association, the Bank's scope of business is to conduct banking activities based on Sharia principles.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Bank dan Informasi Umum (lanjutan)

Kantor pusat Bank berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Bank memiliki jaringan unit kerja dengan rincian sebagai berikut (tidak diaudit):

**Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
 Years Ended December 31**

	2017	2016	2015	
Kantor Cabang	54	54	52	Branch Offices
Kantor Cabang Pembantu	207	206	208	Sub-Branch Offices
Kantor Kas	11	11	11	Cash Offices
Kantor Layanan Syariah	1044	1044	675	Sharia Service Offices

Entitas induk Bank adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas.

b. Struktur dan Manajemen

Susunan Dewan Komisaris masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham Bank No.32 dan 33 tanggal 18 April 2017, No.48 tanggal 26 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H., pada tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank No. 12 dan 13 tanggal 11 Maret 2016, Notaris Fathiah Helmi, S.H. dan pada tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Bank No 26 tanggal 8 April 2015, Notaris Fathiah Helmi, S.H., adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	2017	2016	2015	Board of Commissioners
Komisaris Utama	Eko Bambang Suharno	Indra Kesuma	Indra Kesuma	President Commissioner
Komisaris	Hermanto Siregar	Hermanto Siregar	-	Commissioner
Komisaris	Komaruddin Hidayat	Komaruddin Hidayat	Komaruddin Hidayat	Commissioner
Komisaris	Eko Suwardi*	Anggito Abimanyu	Anggito Abimanyu	Commissioner
Komisaris	-	Eko Bambang Suharno	Eko Bambang Suharno	Commissioner

*) Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

1. GENERAL (continued)

a. Bank Establishment and General Information (continued)

Currently, the Bank's head office is located at Jl. Abdul Muis No. 2-4, Central Jakarta.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the Bank has network business unit with detail as follows (unaudited):

The Bank's parent entity is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk which is owned by the Government of the Republic of Indonesia as the majority shareholder.

b. Structure and Management

The composition of the Bank's Board of Commissioners, as of December 31, 2017, which was determined based on Bank Shareholders' Decision Statement No. 32 and 33 dated April 18, 2017, No 48 dated October 26, 2017, Notary Fathiah Helmi, S.H., as of December 31, 2016 which was determined based on Bank Shareholders' Decision Statement No. 12 and 13 dated March 11, 2016, Notary Fathiah Helmi, S.H., and as of December 31, 2015 which were determined based on Bank Shareholders' Decision Statement No 26 dated April 8, 2015, Notary Fathiah Helmi, S.H., are as follows:

*) Will be effective upon approval from Financial Service Authority (OJK)

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Direksi Bank masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Bersama Seluruh Pemegang Saham Bank No.32 dan 33 tanggal 18 April 2017, No. 48 tanggal 26 Oktober 2017, Notaris Fathiah Helmi, S.H., pada tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 12 dan 13 tanggal 11 Maret 2016, Notaris Fathiah Helmi, S.H., dan pada tanggal 31 Desember 2015 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 25 dan 26 tanggal 8 April 2015, Notaris Fathiah Helmi, S.H, adalah sebagai berikut:

Direksi	2017	2016	2015	Board of Directors
Direktur Utama	Mochammad Hadi Santoso	Mochammad Hadi Santoso	Mochammad Hadi Santoso	President Director
Direktur	Agus Katon Eko S.	Agus Katon Eko S.	Agus Katon Eko S.	Director
Direktur	Hilman Purakusumah	Erdianto Sigit Cahyono	Pardiman	Director
Direktur	Indra Praseno	Indra Praseno	Indra Praseno	Director
Direktur	Wildan	Wildan	Wildan	Director

Susunan Dewan Pengawas Syariah Bank masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham No. 48 tanggal 26 Oktober 2017, Notaris Fahiah Helmi, S.H., tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2015 ditetapkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 26 tanggal 8 April 2015, Notaris Fathiah Helmi, S.H, adalah sebagai berikut:

Ketua	Didin Hafidhuddin	Chairman
Anggota	Muhammad Gunawan Yasni	Member

1. GENERAL (continued)

b. Structure and Management (continued)

The composition of the Bank's Board of Directors as of December 31, 2017, which was determined based on Bank Shareholders' Decision Statement Notarial Deed No. 32 and 33 dated April 18, 2017, Notarial Deed No. 48 dated October 26, 2017, Notary Fathiah Helmi, S.H., as of December 31, 2016, which was determined based on PT Bank BRISyariah Shareholders' Decision Statement, Notarial Deed No. 12 and 13 dated March 11, 2016, Notary Fathiah Helmi, S.H., as of December 31, 2015, which was determined based on PT Bank BRISyariah Shareholders' Decision Statement, Notarial Deed No. 25 and 26 dated April 8, 2015, of Notary Fathiah Helmi, S.H., are as follows:

The composition of the Bank's Sharia Supervisory Board as of December 31, 2017, which was determined based on Shareholders' Decision Statement Notarial Deed No. 48 dated October 26, 2017, Notary Fathiah Helmi, S.H., and as of December 31, 2016 and December 31, 2015, respectively, which was determined based on PT Bank BRISyariah Shareholders' Decision Statement, Notarial Deed No. 26 dated April 8, 2015, Notary Fathiah Helmi, S.H., are as follows:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

b. Struktur dan Manajemen (lanjutan)

Susunan Komite Audit Bank masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP: B.047-PDR/10-2017 tanggal 27 Oktober 2017 dan Surat Dewan Komisaris No.S.B.31-KOM/10-2017 tanggal 26 Oktober 2017, dan pada tanggal 31 Desember 2016 ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. KEP:B.031-PDR/07-2015 tanggal 10 Juli 2015 dan Surat Dewan Komisaris No. S.B.31-KOM/04-2015 tanggal 29 April 2015, adalah sebagai berikut:

Komite Audit	2017	2016	2015	Audit Committee
Ketua	Komaruddin Hidayat	Indra Kesuma	Indra Kesuma	Chairman
Anggota	Hermanto Siregar	Anggito Abimanyu	Anggito Abimanyu	Member
Anggota	Ismir Kamili	Ismir Kamili	Ismir Kamili	Member
Anggota	Irdam Halim	Irdam Halim	Irdam Halim	Member
Anggota	Widuri Meintari Kusumawati	Widuri Meintari Kusumawati	Widuri Meintari Kusumawati	Member

Pada tanggal 31 Desember 2017, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Indriati Tri Handayani sesuai dengan Surat Keputusan Direksi 012-PDR/02-2017 tanggal 23 Februari 2017, pada tanggal 31 Desember 2016, Sekretaris Perusahaan Bank adalah Indriati Tri Handayani sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.KEP: 014-PDR/02-2016 tanggal 10 Februari 2016, dan pada tanggal 31 Desember 2015, Sekretaris Perusahaan adalah Lukita T. Prakarsa sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.KEP: 04/DIR/HRD/XI/2008 tanggal 17 November 2008.

Berdasarkan kebijakan Bank, manajemen kunci Bank mencakup anggota dewan komisaris, direksi, komite audit, dewan pengawas syariah, komite remunerasi, kepala grup dan kepala cabang.

Gaji dan kompensasi lainnya yang dibayarkan kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah adalah sebagai berikut

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Direksi	12.096	9.772	7.503	Board of Directors
Dewan Komisaris	4.816	4.465	4.709	Board of Commissioners
Dewan Pengawas Syariah	1.368	1.126	770	Sharia Supervisory Board
Jumlah	18.280	15.363	12.982	Total

Jumlah karyawan tetap Bank pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, masing-masing adalah sebesar 3.048, 3.091 dan 2.929 orang (tidak diaudit).

1. GENERAL (continued)

b. Structure and Management (continued)

The composition of the Audit Committee of the Bank as of December 31, 2017, which was determined based on Decision letter of Directors No. KEP: B.047-PDR/10-2017 dated October 27, 2017 and Decision letter of Board of Commissioners No S.B.31-KOM/10-2017 dated October 26, 2017 and December 31, 2016, which was determined based on Decision letter of Directors No. KEP:B.031-PDR/07-2015 dated July 10, 2015 and Decision letter of Board of Commissioners No. S.B.31-KOM/04-2015 dated April 29, 2015, are as follows:

As of December 31, 2017, the Corporate Secretary of the Bank is Indriati Tri Handayani based on Decision letter of Directors No.KEP:012-PDR/02-2017 dated February 23, 2017, as of December 31, 2016, the Corporate Secretary of the Bank is Indriati Tri Handayani based on Decision letter of Directors No.KEP: 014-PDR/02-2016 dated February 10, 2016, and as of December 31, 2015, the Corporate Secretary of the Bank is Lukita T. Prakarsa based on Decesion letter of Director No.KEP: 004/DIR/HRD/XI/2008 dated November 17, 2008.

Based on the Bank's policies, key management of the Bank consists of members of the board of commissioners, directors, audit committee, Sharia Supervisory Board, remuneration committee, group heads and branch heads.

Salaries and other compensation paid to the Board of Directors, Commissioners and Sharia Supervisory Board are as follows:

As of December 31, 2017, 2016 and, 2015, the Bank has 3,048, 3,091 and 2.929 employees, respectively (unaudited).

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Pernyataan Kepatuhan

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bank adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK"), yaitu PSAK No. 101 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK No. 102 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK No. 105 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK No. 106 tentang "Akuntansi Musyarakah", PSAK No. 107 (Revisi 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK No. 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013). Bank juga menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Peraturan Bapepam dan LK No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan PSAK No. 101 (Revisi 2016), laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut:

- (i) Laporan posisi keuangan;
- (ii) Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;
- (iii) Laporan perubahan ekuitas;
- (iv) Laporan arus kas;
- (v) Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
- (vi) Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
- (vii) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- (viii) Catatan atas laporan keuangan.

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas merupakan laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial Bank sesuai prinsip syariah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of Financial Statements Presentation

Statement of Compliance

The principal accounting policies adopted in preparing the Bank's financial statements are set out below:

The financial statements have been prepared and presented in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards ("SFAS"), namely: SFAS No. 101 (Revised 2016), "Presentation of Sharia Financial Statements", SFAS No. 102 (Revised 2016), "Accounting for Murabahah", SFAS No. 105, "Accounting for Mudharabah", SFAS No. 106, "Accounting for Musyarakah", and SFAS No. 107 (Revised 2016), "Accounting for Ijarah", SFAS No. 110 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk" and Indonesia Sharia Banking Accounting Guidelines (PAPSI Revised 2013). The Bank also applied generally accepted accounting principles issued by The Indonesian Institute of Accountants (IAI) and BAPEPAM and LK regulation No. VIII.G.7 Attachment of the Chairman of BAPEPAM and LK's decree No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012, "Guidelines for Financial Statements Presentation and Disclosure for Issuer or Public Companies".

Based on SFAS No. 101 (Revised 2016), a complete sharia bank financial statements consist of the following components:

- (i) Statement of financial position;
- (ii) Statement of profit or loss and other comprehensive income;
- (iii) Statement of changes in shareholders' equity;
- (iv) Statement of cash flows;
- (v) Statement of reconciliation of income and revenue sharing;
- (vi) Statement of sources and distribution of zakat funds;
- (vii) Statement of sources and uses of qardhul hasan funds; and
- (viii) Notes to the financial statements.

Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of cash flow and statements of changes in shareholders' equity are the financial statements reflecting the Bank's commercial activities in accordance with sharia principle.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Laporan keuangan disajikan berdasarkan nilai historis, kecuali disebutkan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut, dan disusun dengan dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Untuk penyajian laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan dari tanggal akuisisi.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) dengan pendapatan yang dibagihasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas (*cash basis*).

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat dalam jangka waktu tertentu, serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan dalam jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

Zakat adalah sebagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* (pembayar zakat) untuk diserahkan kepada *mustahiq* (penerima zakat). Sumber dana zakat, infak dan *shadaqah* berasal dari Bank dan pihak lain yang diterima Bank untuk disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai dengan prinsip syariah.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Financial Statements Presentation (continued)

Statement of Compliance (continued)

The financial statements are presented on a historical cost basis unless stated otherwise as described in the accounting policy for each account, and prepared on accrual basis.

The statements of cash flows are prepared using the direct method by classifying cash flows into operating, investing and financing activities. For the presentation of statement of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash, current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts with other banks and placements with other banks with maturities of 3 (three) months from the date of acquisition.

Statements of reconciliation of income and revenue sharing represents the reconciliation between income of sharia bank under accrual basis and income distributed to funds owners under cash basis.

Statements of sources and distribution of zakat funds and statement of sources and uses of qardhul hasan funds represent the financial statements reflecting the Bank's role as the mandate holder of social activity funds which are separately managed.

Statements of sources and distribution of zakat funds show the sources and distribution of zakat funds for a certain period, and the undistributed zakat funds in a particular date.

Statements of sources and uses of qardhul hasan funds show the sources and uses of qardhul hasan funds for a certain period, and qardhul hasan funds balance in a particular date.

Zakat is part of the wealth which must be taken out by muzakki (the zakat payer) to be given to mustahiq (the zakat receiver). The sources of zakat, infaq and shadaqah funds are derived from the Bank and other parties to be distributed to parties eligible in accordance with sharia principle.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan (lanjutan)

Pernyataan Kepatuhan (lanjutan)

Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat dan dana kebajikan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp). Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan, kecuali bila dinyatakan secara khusus, adalah dibulatkan dalam jutaan Rupiah.

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana yang didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika:

- (1) langsung, atau tidak langsung yang melalui satu atau lebih perantara, suatu pihak (i) mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan Bank; (ii) memiliki kepentingan dalam Bank yang memberikan pengaruh signifikan atas Bank; atau (iii) memiliki pengendalian bersama atas Bank;
- (2) suatu pihak yang berada dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank;
- (3) suatu pihak adalah ventura bersama di mana Bank sebagai *venturer*;
- (4) suatu pihak adalah anggota dari personil manajemen kunci Bank;
- (5) suatu pihak adalah anggota keluarga dekat dari individu yang diuraikan dalam butir (1) atau (4);
- (6) suatu pihak adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama atau dipengaruhi signifikan oleh atau untuk pihak yang memiliki hak suara signifikan pada beberapa entitas, langsung maupun tidak langsung, yaitu individu seperti diuraikan dalam butir (4) atau (5);

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of Financial Statements Presentation (continued)

Statements of Compliance (continued)

The Bank is not directly involved in the management of zakat and qardhul hasan funds.

The reporting currency used in the financial statements is Rupiah (Rp). The figures presented in the financial statements, unless otherwise stated, are rounded in millions of Rupiah.

b. Transaction with Related Parties

Bank entered into transactions with parties which are defined as related parties in accordance with SFAS No. 7 (Revised 2015) regarding "Related Party Disclosure".

A party is considered as a related party of the Bank if:

- (1) *directly or indirectly through one or more intermediaries, a party (i) controls, or controlled by, or under common control with the Bank; (ii) has an interest in the Bank that provides significant influence to the Bank, or (iii) has joint control over the Bank;*
- (2) *it is a member of the same group as the Bank;*
- (3) *it is a joint venture in which the Bank acts as a venturer;*
- (4) *it is a member of the key management personnel of the Bank;*
- (5) *it is a close family member of an individual as described in point (1) or (4);*
- (6) *it is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by or for whom has significant voting rights in several entities, directly or indirectly, by the individuals described in point (4) or (5);*

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Suatu pihak dianggap pihak berelasi dengan Bank jika (lanjutan):

- (7) suatu pihak adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Bank atau entitas yang terkait dengan Bank.

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan dengan syarat dan kondisi yang sama dengan transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan dan rinciannya telah disajikan dalam Catatan 41 atas laporan keuangan.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif

Aset produktif terdiri dari giro dan penempatan pada Bank Indonesia dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), giro dan penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, piutang *murabahah*, piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi.

Aset non-produktif adalah aset Bank selain aset produktif yang memiliki potensi kerugian, antara lain dalam bentuk rekening antar kantor, agunan yang diambil alih dan *suspense accounts*.

Aset produktif atas piutang *murabahah* sesuai dengan PSAK No. 50, 55 dan 102 (Revisi 2013) "Akuntansi *Murabahah*", dan aset produktif atas giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain dan investasi pada surat berharga mengacu pada PAPSI 2013.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Transaction with Related Parties (continued)

A party is considered as a related party of the Bank if (continued):

- (7) it is a post-employment benefit plan program for the employee benefit of either the Bank or entities related to the Bank;

Transaction with related parties conducted under terms and conditions that similar with third party transactions.

All material transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements and the details are presented in Note 41 of the financial statements.

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets

Earning assets consist of current accounts and placements with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS), current accounts and placements with other banks, investments in marketable securities, *murabahah* receivables, *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, assets acquired for *ijarah*, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees.

Non-earning assets are the Bank's assets other than the earning assets which have potential loss, consist of inter-office accounts, foreclosed collaterals and *suspense accounts*.

Earning assets for *murabahah* receivables accordance with SFAS No. 50, 55 and 102 (Revised 2013) "Accounting for *Murabahah*" and earning assets for current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks and investment in marketable securities accordance with PAPSI 2013.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kriteria yang digunakan oleh Bank untuk menentukan bukti obyektif dari penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- (1) kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- (2) pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau *margin*;
- (3) pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- (4) terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- (5) hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- (6) data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:
- (7) memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan
- (8) kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The Bank assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired at each statements of financial position date.

Financial assets are impaired when an objective evidence demonstrates that a loss event has occurred after the initial recognition of the asset and that the loss event has an impact on the future cash flows of the financial asset that can be estimated reliably.

The criteria used by the Bank to determine objective evidence of impairment are as follows:

- (1) significant financial difficulty of the issuer or obligor;
- (2) a breach of contract, such as a default or delinquency in margin or principal payments;
- (3) the lender, for economic or legal reasons relating to the debtor's financial difficulty, grants the debtor a concession that the lender would not otherwise consider;
- (4) it becomes probable that the debtor will enter into bankruptcy or other financial reorganization;
- (5) the disappearance of an active market of financial assets due to financial difficulties; or
- (6) observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet identified individually in the portfolio, including:
- (7) adverse changes in the payment status of debtors in the portfolio; and
- (8) national or local conditions that correlate with breach of contract of the assets in the portfolio.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian ditentukan oleh manajemen untuk setiap portofolio yang diidentifikasi. Pada umumnya, periode tersebut bervariasi antara 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, untuk kasus tertentu diperlukan periode yang lebih lama.

Bank pertama kali menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan, dan secara individual atau kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Jika Bank menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Bank memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang serupa dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset keuangan yang penurunan nilainya dilakukan secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai telah diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan dan memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
2. Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Berdasarkan kriteria di atas, Bank melakukan penilaian secara individual untuk: (a) piutang *murabahah* dengan plafond lebih besar dari Rp1.000 dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet; atau (b) piutang *murabahah* yang diberikan dengan plafond lebih besar dari Rp1.000 yang direstrukturisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The estimated period between the occurrence of an event and loss identification is determined by the management for each identified portfolio. In general, the period varies from 3 (three) months to 12 (twelve) months, in exceptional cases, longer period are necessary.

The Bank first assesses whether an objective evidence of impairment for financial assets that are individually significant and individually or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the Bank determines that there is no objective evidence of impairment for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar financing risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Financial assets that are individually assessed for impairment, and for which an impairment loss is or continues to be recognized is excluded in the collective assessment of impairment.

The Bank determines murabahah receivables to be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criteria is met:

1. *Murabahah receivables which individually have significant value with objective evidence of impairment;*
2. *Restructured murabahah receivables which individually have significant value.*

Based on the above criteria, the Bank performs individual assessment for: (a) murabahah receivables with limit greater than Rp1,000 with collectibility classification of substandard, doubtful and loss; or (b) Restructured murabahah receivables with credit limit greater than Rp1,000.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Bank menetapkan piutang *murabahah* yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- (1) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai signifikan namun tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai;
- (2) Piutang *murabahah* yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan;
- (3) Piutang *murabahah* yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara kolektif dikelompokkan berdasarkan karakteristik risiko piutang yang sama dengan mempertimbangkan segmentasi piutang berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu (probability of default).

Bank menggunakan metode *migration analysis* yang merupakan suatu metode analisis statistik, untuk menilai cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang diberikan secara kolektif. Bank menggunakan data historis minimal 3 (tiga) tahun dalam menghitung *Probability of Default* (PD) dan *Loss of Given Default* (LGD).

Bank menggunakan nilai wajar agunan sebagai dasar arus kas masa datang apabila memenuhi salah satu kondisi berikut:

- (1) Piutang dan pembiayaan bersifat *collateral dependent*, yaitu jika pelunasan pembiayaan hanya bersumber dari agunan;
- (2) Pengambilalihan agunan kemungkinan besar terjadi dan didukung dengan perjanjian legal pengikatan agunan.

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan tingkat *margin* efektif awal dari aset keuangan tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The Bank determines *murabahah* receivables to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criteria is met:

- (1) *Murabahah* receivables which individually have significant value but there is no objective evidence of impairment;
- (2) *Murabahah* receivables which individually have insignificant value;
- (3) Restructured *murabahah* receivables which individually have insignificant value.

The calculation of allowance for impairment losses on financial assets which are evaluated collectively, grouped based on similar receivable risk characteristics and taking into account the receivable segmentation on the basis of historical loss experience (probability of default).

The Bank uses the *migration analysis* method which is a statistical model analysis method to assess allowance for impairment losses on collective receivables. The Bank uses minimal 3 (three) years historical data to compute for the *Probability of Default* (PD) and *Loss of Given Default* (LGD).

The Bank uses the fair value of collateral as the basis for future cash flow if one of the following conditions is met:

- (1) Loans and receivables are *collateral dependent*, i.e. if the source of loans repayment is made only from the collateral;
- (2) Foreclosure of collateral is most likely to occur and supported by legally binding collateral agreement.

Impairment losses on financial assets carried at amortized cost are measured as the difference between the carrying amount of the financial assets and present value of estimated future cash flows discounted at the financial assets original effective margin rate.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dicatat pada akun cadangan kerugian penurunan nilai sebagai pengurang terhadap aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

Penghapusbukuan kredit dilakukan apabila:

- a) Kolektibilitas pembiayaannya sudah tergolong macet dari laporan keuangan bank (neraca)
- b) Penyisihan pencadangan aset produktif telah terbentuk 100%
- c) Adanya putusan dari Manajemen untuk pelaksanaan hapusbuku.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang diberikan yang telah dihapusbukukan, pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas pinjaman yang diberikan yang telah dihapusbukukan pada tahun-tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain *margin*.

Aset produktif atas piutang *istishna*, pinjaman *qardh*, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, aset yang diperoleh untuk *ijarah*, serta komitmen dan kontinjensi yang memiliki risiko pembiayaan seperti bank garansi, Bank menerapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2015 dan POJK No.12/POJK.03/2015 tanggal 21 Agustus 2015 tentang "Ketentuan Kehati-hatian dalam Rangka Stimulus Perekonomian Nasional bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku sampai dengan 24 Agustus 2017. Penilaian sebelum tanggal 1 Januari 2015 menggunakan PBI No. 13/13/PBI/2011 tanggal 24 Maret 2011 tentang "Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

Losses are recognized in statements of profit or loss and other comprehensive income and reflected in an allowance for impairment losses account against financial assets carried at amortized cost.

The credit write-off is done if:

- a) The collectibility of the financing is classified as loss from the bank's financial report (balance sheet)
- b) The provision for productive assets has been established 100%
- c) The existence of a decision from Management for the implementation of write-off.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off loans from previous years are recorded as operational income other than *margin* income.

Earning assets for *istishna* receivables, funds of *qardh*, *mudharabah* financing, *musyarakah* financing, assets acquired for *ijarah*, and commitments and contingencies which carry financing risk, such as bank guarantees, Bank implement Regulation of the Financial Services Authority (POJK) No.16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Ratings for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which was effective on January 1, 2015 and POJK No.12/POJK.03/2015 dated August 21, 2015 on "Prudential Provisions in relation to the National Economic Stimulus for Sharia Bank and Sharia Business Unit" which is valid until August 24, 2017. Assessment prior to January 1, 2015 is using PBI No. 13/13/PBI/2011 dated March 24, 2011 regarding "Asset Quality Rating for Sharia Bank and Sharia Business Units".

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

Cadangan kerugian minimum yang harus dibentuk sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai berikut:

- 1) Cadangan umum, ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar diluar giro dan penempatan pada Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah dan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai.
- 2) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
 - a) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan;
 - b) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan;
 - c) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi nilai agunan.

Kriteria penilaian nilai agunan yang dapat dikurangkan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Atas aset non produktif, manajemen Bank menentukan cadangan kerugian penurunan nilai pada nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya pelepasan.

Atas pembiayaan yang di restrukturisasi, restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar, yaitu nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh tidak termasuk pemberian potongan tagihan Murabahah dalam rangka apresiasi untuk nasabah yang membayar cicilan tepat waktu; dan

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

The minimum allowance to be provided in accordance with Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulation is as follows:

- 1) General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current, excluding current accounts and placements with Bank Indonesia, and securities issued by the government based on sharia principles and part of earning assets guaranteed cash collateral.
- 2) Special reserves, shall be at least:
 - a) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducting the collateral value;
 - b) 15% of earning assets classified as Substandard after deducting the collateral value;
 - c) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducting the collateral value; and
 - d) 100% of earning assets classified as Loss after deducting the collateral value.

The criterias for assessment of the value of collateral that can be deducted in the calculation of allowance for impairment losses are based on Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regulations.

For non-earning assets, the management of Bank determine the impairment losses at the lower amount between the carrying value and fair value after deducting cost of disposal.

For restructured financing, restructuring is only applicable for customers who meet the following criteria:

- a) Customers who suffer from a decrease in their ability to pay, whereby the customers can not fully fulfill their obligations, excluding those who were given discount on their Murabahah receivables as a form of appreciation for the timely payment of installment.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif dan Aset Non-Produktif (lanjutan)

- b) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.

d. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia

Giro dan penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro *wadiah* pada Bank Indonesia dan penanaman dana pada Bank Indonesia berupa Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).

FASBIS dan SBIS merupakan sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip masing-masing adalah *wadiah* dan *jualah*. Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia disajikan sebesar saldo penempatan.

e. Giro dan Penempatan pada Bank Lain

Giro pada bank lain dinyatakan sebesar saldo giro dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bonus yang diterima Bank dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha lainnya. Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tidak diakui sebagai pendapatan Bank dan digunakan untuk dana kebajikan (*qardhul hasan*).

Penerimaan jasa giro dari bank non-syariah tersebut sebelum disalurkan dicatat sebagai liabilitas Bank.

Penempatan pada bank lain merupakan penanaman dana pada bank lain yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dalam bentuk Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA) dan deposito berjangka. Penempatan pada bank lain disajikan sebesar saldo penempatan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Allowance for Impairment Losses on Earning and Non-Earning Assets (continued)

- b) Customers with a good business prospect and are able to fulfill the obligations after restructuring

d. Current Accounts and Placements with Bank Indonesia

Current accounts and placements with Bank Indonesia consist of/ *wadiah* current accounts with Bank Indonesia and placements of funds with Bank Indonesia in the form of Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS) and Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS).

FASBIS and SBIS are certificates issued by Bank Indonesia as a proof of short term fund deposits under *wadiah* and *jualah* principles, respectively. Current accounts and placements with Bank Indonesia are stated at their outstanding balances of placements.

e. Current Accounts and Placements with Other Banks

Current accounts with other banks are stated at their outstanding balances net of allowance for impairment losses. Bonuses received by the Bank from commercial banks based on sharia principles are recognized as other operating income. Proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks are not recognized as the Bank's income but are recorded as part of the *qardhul hasan* fund.

The proceeds of interest on current accounts from non-sharia banks will be recorded as the Bank's liabilities before distributed to the fund.

Placements with other banks is placements of funds with other bank which operate under sharia principle in the form of *Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)* and time deposit. Placements with other banks is stated at their outstanding balances, net of allowance for impairment losses.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Investasi pada Surat Berharga

f. Investments in Marketable Securities

Surat berharga syariah adalah surat bukti penanaman dalam surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang syariah dan/atau pasar modal syariah, antara lain obligasi syariah (sukuk).

Sharia marketable securities are proof of investments under sharia principles commonly traded in sharia money market and/or sharia stock exchange, such as sharia bonds (sukuk).

Sejak 1 Januari 2016, saat pengakuan awal, Bank menentukan klasifikasi investasi pada sukuk sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

At initial recognition, the Bank determines the classification of investments in sukuk either measured at cost, fair value through other comprehensive income or fair value through profit or loss.

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut:

Sukuk classifications are as follows:

a. Diukur pada biaya perolehan

a. *Measured at amortized cost*

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost.*
- *The difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and recognized in profit or loss.*

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

b. *Measured at fair value through other comprehensive income*

- Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk, terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu atas pembayaran pokok dan atau hasilnya.
- Biaya perolehan sukuk termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi komprehensif.

- *The investment is held in a business model whereby the primary goal is to obtain contractual cash flows and to sell the Sukuk, and has contractual terms in determining the specific date of principal payments and or the results.*
- *Sukuk acquisition cost includes transaction cost.*
- *The difference between acquisition cost and the nominal value is amortized on a straight-line basis over the period of the sukuk and is recognized in comprehensive income.*

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

f. Investasi pada Surat Berharga (lanjutan)

Klasifikasi sukuk adalah sebagai berikut (lanjutan):

b. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (lanjutan)

- Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan dan kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya. Ketika investasi sukuk dihentikan pengakuannya, akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

c. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

- Biaya perolehan sukuk tidak termasuk biaya transaksi.
- Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

g. Piutang

Piutang terdiri dari piutang *murabahah* dan piutang *istishna*.

Murabahah adalah akad jual beli antara nasabah dengan Bank, dimana Bank membiayai kebutuhan konsumsi, investasi dan modal kerja nasabah yang dijual dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diketahui dan disepakati bersama. Pembayaran atas pembiayaan ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan.

Piutang *murabahah* pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan merupakan biaya tambahan untuk memperoleh aset keuangan tersebut dan setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode *margin* efektif dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Investments in Marketable Securities (continued)

Sukuk classifications are as follows (continued):

b. *Measured at fair value through other comprehensive income (continued)*

- *Gain or loss from changes of fair value is recognized in other comprehensive income after considering unamortized difference of acquisition cost and nominal value and accumulated gain or loss of fair value which has previously recognized in other comprehensive income. When sukuk is derecognized, accumulated gain or loss which has previously recognized in other comprehensive income is reclassified to profit or loss as reclassification adjustment.*

c. *Measured at fair value through profit or loss*

- *Sukuk acquisition cost excludes transaction cost.*
- *The difference between fair value and the carrying value is recognized in profit or loss.*

g. Receivables

Receivables consist of murabahah receivables and istishna receivables.

Murabahah is a sale and purchase contract between the customer and Bank, whereby Bank finances the consumption, investment and working capital needs of the customer sold with a principle price plus a certain margin that is mutually informed and agreed. Repayment on this financing is made in installments within a specified period.

Murabahah receivables are initially measured at fair value plus direct attributable transaction costs and is an additional cost to obtain the respected financial assets and after the initial recognition are measured at amortized cost using the effective margin method less any allowance for impairment losses value.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

g. Piutang (lanjutan)

Istishna adalah akad penjualan antara *al-mustashni* (pembeli) dan *al-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang diisyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

Piutang *istishna* disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli akhir dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. *Margin istishna* yang ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang *istishna*.

h. Pinjaman Qardh

Pinjaman *qardh* adalah penyaluran dana dengan akad *qardh*.

Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

Pinjaman *qardh* meliputi pembiayaan dengan akad *hawalah* dan *rahn*. Akad *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang (nasabah) kepada pihak lain (Bank) yang wajib menanggung atau membayar. Atas transaksi ini Bank mendapatkan imbalan (*ujrah*) dan diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Akad *rahn* merupakan transaksi menggadaikan barang atau harta dari nasabah kepada Bank dengan uang sebagai gantinya. Barang atau harta yang digadaikan tersebut dinilai sesuai harga pasar dikurangi persentase tertentu dan sebagai imbalannya Bank mendapatkan *ujrah* (imbalan) dan diakui berdasarkan basis akrual.

Pinjaman *qardh* diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas *qardh* yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pinjaman *qardh* dinyatakan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Receivables (continued)

Istishna is a sale and purchase contract between *al-mustashni* (buyer) and *al-shani* (manufacturer also acting as the seller). Based on the contract, the buyer orders the manufacturer to produce or to supply *al-mashnu* (goods ordered) according to the specifications required by the buyer and to sell them at agreed price.

Istishna receivables are stated at the amount billed to customer less allowance for impairment losses. Deferred *istishna* margin is presented as a contra account of *istishna* receivables.

h. Funds of Qardh

Funds of qardh represents a distribution of funds with *qardh* agreement.

Qardh contract is a borrowing agreement with the condition that the borrower should repay the loan at a specified period of time.

Qardh receivables includes *hawalah* and *rahn* financing agreement. *Hawalah* is transfer of debts from debtors to other party (Bank) which obligate to shouldered or paid. The Bank will obtain a fee (*ujrah*) from this transaction, which is recognized as income when receipt.

Rahn contract is the pawn of goods or assets by customers to the Bank with the money as compensation. Goods or assets being pawned are valued in accordance with the market price less a certain percentage and the Bank gets *ujrah* (benefits) in return which are recognized on an accrual basis.

Qardh receivables is recognized at the same amount of funds lent when these occur. Any excess amount paid by the borrower in repaying a *qardh* is recognized as revenue when these are incurred. On the statements of financial position date, fund of *qardh* is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

i. Pembiayaan

Mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah sebagai pelaksana usaha (mudharib) selama jangka waktu tertentu. Pembagian hasil keuntungan dari proyek atau usaha tersebut ditentukan sesuai dengan *nisbah* (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *mudharabah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

Musarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra *musarakah*) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan *nisbah* pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Pada tanggal laporan posisi keuangan, pembiayaan *musarakah* dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk berdasarkan hasil *review* oleh manajemen terhadap kualitas pembiayaan yang ada.

j. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* merupakan aset yang menjadi objek transaksi sewa (*ijarah*) dan dicatat di laporan posisi keuangan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis, sedangkan objek sewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) pada saat tertentu sesuai akad sewa.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Financing

Mudharabah is a joint financing made between Bank as the owner of the funds (*shahibul maal*) and the customer as a business executor (*mudharib*) during a certain period. The profit sharing from the project or the business is determined in accordance with the mutually agreed *nisbah* (*pre-determined ratio*). On the statements of financial position date, *mudharabah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review of the financing quality.

Musarakah is a partnership contract among fund's owners (*musarakah partners*) to contribute funds and conduct a business on a joint basis through partnership with the profit sharing based on a predetermined ratio, while the losses are borne proportionally based on the capital contribution. On the statement of financial position dates, *Musarakah* financing is stated at the outstanding financing balance less allowance for impairment losses which is provided based on the management's review on the financing quality.

j. Assets Acquired for Ijarah

Assets acquired for *ijarah* represent object of leased assets and are recorded in the statements of financial position at the acquisition cost, net of accumulated depreciation.

Leased object in *ijarah* transaction is depreciated based on the depreciation policy for similar assets, while leased object in *ijarah muntahiyah bittamlik* transaction is depreciated based on leased term.

Ijarah muntahiyah bittamlik is a lease transaction between the lessor and lessee to obtain fee from the object leased with the option of transferring the title through purchase or grant at a certain time in accordance with the lease agreement.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

j. Aset yang Diperoleh untuk Ijarah (lanjutan)

Perpindahan hak milik objek sewa kepada penyewa dalam *ijarah muntahiyah bittamlik* dapat dilakukan dengan cara:

- (i) hibah;
- (ii) penjualan sebelum akad berakhir sebesar harga yang sebanding dengan sisa cicilan sewa;
- (iii) penjualan pada akhir sewa dengan pembayaran tertentu yang disepakati pada awal akad; dan
- (iv) penjualan secara bertahap sebesar harga tertentu yang disepakati dalam akad.

k. Aset Tetap

Aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset tetap yang diperoleh dalam pertukaran aset non-moneter atau kombinasi aset moneter dan non-moneter diukur pada nilai wajar, kecuali:

- (i) transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial, atau
- (ii) nilai wajar dari aset yang diterima dan diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi umur manfaat ekonomis sebagai berikut:

	Tahun/Years
Bangunan	20
Kendaraan bermotor	8
Komputer dan mesin	4
Inventaris lainnya	4

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

j. Assets Acquired for Ijarah (continued)

The transfer of title of the leased object to the lessee in *ijarah muntahiyah bittamlik* can be conducted through:

- (i) a grant;
- (ii) sale prior to the end of agreement for an amount equivalent to the remaining lease installments;
- (iii) sale prior to the end of the agreement at a specified amount as agreed at the inception of the agreement; and
- (iv) installment sales at a specific price as agreed in the agreement.

k. Premises and Equipment

Premises and equipment are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

Subsequent to initial recognition, premises and equipment are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Premises and equipment acquired in exchange for a non-monetary asset or for a combination of monetary and non-monetary assets are measured at fair values, unless:

- (i) the exchange transaction lacks commercial substance, or
- (ii) the fair value of neither the assets received nor the assets given up can be measured reliably.

Depreciation of fixed asset starts when it is available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated economic useful lives of the assets as follows:

	Persentase/Percentage	
	5,0%	<i>Buildings</i>
	12,5%	<i>Vehicles</i>
	25,0%	<i>Computers and machines</i>
	25,0%	<i>Other equipments</i>

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomis masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan maupun pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun dimana penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Jika biaya perolehan tanah termasuk biaya pembongkaran, pemindahan dan restorasi lokasi, serta manfaat yang diperoleh dari pembongkaran, pemindahan dan pemugaran tersebut terbatas, maka biaya tersebut disusutkan selama periode manfaat yang diperolehnya. Dalam beberapa kasus, tanah itu sendiri memiliki umur manfaat yang terbatas, dalam hal ini, tanah tersebut disusutkan dengan cara yang mencerminkan manfaat yang diperoleh dari tanah tersebut.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar sebagai bagian dari jumlah tercatat aset tetap terkait bila besar kemungkinan bagi Bank manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset tetap terkait.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Premises and Equipment (continued)

The carrying amounts of premises and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be fully recoverable.

The carrying amount of an item of premises and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset is directly included in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the year in which the derecognition is done.

Land are stated at cost and not depreciated.

The asset residual values, useful life and depreciation method are evaluated at each year end and adjusted prospectively if necessary.

If the cost of land includes the costs of site dismantlement, removal and restoration, and the benefits from the site dismantlement, removal and restoration is limited, that portion of the land asset is depreciated over the period of benefits obtained by incurring those costs. In some cases, the land itself may have a limited useful life, in which case it is depreciated in a manner that reflects the benefits to be derived from it.

Repairs and maintenance are taken to the profit or loss when these are incurred. The cost of major renovation and restoration is capitalized as part of carrying amount of the related premises and equipment when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

The legal cost of land rights in the form of Business Usage Rights ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was initially acquired are recognized as part of the cost of the land under the "Premises and Equipment".

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi sepanjang umur hak hukum atau umur ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

l. Aset Lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari biaya dibayar dimuka, pendapatan yang masih akan diterima dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA).

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

Agunan yang diambil alih sehubungan dengan penyelesaian piutang dan pembiayaan syariah diakui sebesar nilai neto yang dapat direalisasi atau sebesar nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan syariah, maksimal sebesar nilai kewajiban nasabah. Nilai neto yang dapat direalisasi adalah nilai wajar agunan setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan. Kelebihan saldo piutang dan pembiayaan syariah, yang belum dilunasi oleh debitur diatas nilai dari agunan yang diambil alih, dibebankan sebagai penyelesaian bermasalah piutang dan pembiayaan syariah pada tahun berjalan. Selisih antara nilai agunan yang diambilalih dengan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Penyisihan kerugian agunan yang diambil alih dibentuk berdasarkan penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Beban perbaikan (*reconditioning cost*) yang timbul setelah pengambilalihan agunan dikapitalisasi dalam akun agunan yang diambil alih tersebut.

m. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank kepada pemberi amanat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

k. Premises and Equipment (continued)

The extension or the legal renewal costs of land rights were recognized as intangible assets and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

l. Other Assets

Other assets consist of prepaid expense, income receivables and foreclosed collaterals.

Prepaid expenses are amortized over the useful life using the straight-line method.

Foreclosed collaterals acquired in settlement of sharia receivables and financing are recognized at net realizable values or sharia receivables and financing carrying amount, the maximum amount of customer liabilities. Net realizable value is the fair value of the collateral after deducting the estimated costs of disposal. The excess in sharia receivables and financing balances which has not been paid by debtors over the value of foreclosed collaterals is charged to allowance for possible losses on sharia receivables and financing in the current year. The difference between the value of the collateral and the proceeds from sale thereof is recognized as a gain or loss at the time of sale of the collateral.

Management evaluates the value of foreclosed collaterals periodically. Allowance for losses foreclosed collaterals is provided based on the impairment of foreclosed collaterals.

Reconditioning costs arising after foreclosure capitalized in the accounts of the foreclosed collaterals.

m. Obligations Due Immediately

Obligations due immediately represent the Bank's obligations to other parties which should be settled immediately based on predetermined instructions by those having the authority. Obligations due immediately are stated at the amounts of the Bank's liabilities to the entrustee.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Simpanan dari Nasabah dan Bank Lain

n. Deposits from Customers and Other Banks

Simpanan merupakan simpanan pihak lain dalam bentuk giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (SIMA). Simpanan dari bank lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban Bank kepada bank lain.

Deposits represent other parties' deposits in the form of wadiah demand deposits, wadiah savings deposits and Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA). Deposits from other banks are stated at the amounts payable to other banks.

Giro *wadiah* digunakan sebagai instrumen pembayaran dan dapat ditarik setiap saat melalui cek dan bilyet giro, serta mendapatkan bonus sesuai dengan kebijakan Bank. Giro *wadiah* dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Wadiah demand deposits are used as payment instruments and available for withdrawal at any time through cheque and demand deposit drafts, and receive bonuses according to the Bank's policies. Wadiah demand deposits are stated at the amount entrusted by depositors.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana nasabah pada Bank, yang bersifat titipan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Terhadap titipan tersebut, Bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela. Tabungan *wadiah* dinyatakan sebesar liabilitas Bank.

Wadiah savings deposits are customers' deposits in the Bank, which can be withdrawn at any time. For these deposits, the Bank is not required to give any benefits except in terms of voluntary bonuses. Wadiah deposits are stated at the amount payable to customers.

SIMA merupakan penanaman dana dari bank lain dengan sistem bagi hasil. SIMA dinyatakan sebesar liabilitas Bank kepada bank lain.

SIMA is investment funds from other banks with profit sharing scheme. SIMA is stated at the amount due payable to other banks.

o. Dana Syirkah Temporer

o. Temporary Syirkah Funds

Dana *syirkah* temporer adalah investasi yang diterima oleh Bank. Bank mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana, baik sesuai dengan kebijakan Bank atau kebijakan pembatasan dari pemilik dana, dengan keuntungan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dana *syirkah* temporer terdiri dari giro *mudharabah*, tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

Temporary syirkah funds represent investment received by the Bank. The Bank has the rights to manage and invest the funds in accordance with either the Bank's policy or restriction set by the depositors with the agreed profit sharing. Temporary syirkah funds consist of mudharabah demand deposit, mudharabah savings deposits and mudharabah time deposits.

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya. Tabungan *mudharabah* dicatat sebesar nilai simpanan dari nasabah.

Mudharabah savings deposits represent funds from other parties which receive predetermined and pre-agreed profit sharing (nisbah) based on income derived by the Bank from the use of such funds. Mudharabah savings deposits are stated based on the customer's savings deposit balance.

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan pihak lain yang hanya bisa ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Mudharabah time deposits represent third party funds that can be withdrawn only at a certain point in time based on the agreement between the depositors and the Bank.

Deposito *mudharabah* dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito *mudharabah* dengan Bank.

Mudharabah time deposits are stated at nominal amount based on the agreement between the depositors and the Bank.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

o. Dana Syirkah Temporer (lanjutan)

Dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak berkewajiban untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi ketika mengalami kerugian.

Di sisi lain dana *syirkah* temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak *voting* dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non-investasi.

Dana *syirkah* temporer merupakan salah satu unsur laporan posisi keuangan, hal tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang memberikan hak kepada Bank untuk mengelola dan menginvestasikan dana, termasuk untuk mencampur dana dimaksud dengan dana lainnya.

Pemilik dana *syirkah* temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana *syirkah* temporer dapat dilakukan dengan konsep bagi hasil atau bagi keuntungan.

p. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib*

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai *mudharib* terdiri dari pendapatan dari transaksi piutang *murabahah*, *istishna*, pendapatan dari *ijarah*, pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dan pendapatan usaha utama lainnya.

Pendapatan atas piutang *murabahah* menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (margin efektif). *Margin* efektif adalah *margin* yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang *murabahah*.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Temporary Syirkah Funds (continued)

Temporary *syirkah* funds cannot be classified as liability. This was due to the Bank does not have any liability to return the fund to the owners, except for losses due to the Bank's management negligence or misrepresentation.

On the other hand, temporary *syirkah* funds cannot also be classified as equity, because of the existence of maturity period and the depositors do not have the same rights as the shareholders, such as voting rights and the rights to realized gain from current assets and other non-investment assets.

Temporary *syirkah* funds represent one of the statement of financial position accounts which is in accordance with sharia principles that provide rights to the Bank to manage and invest funds, including mixing of one fund with the other funds.

The owners of temporary *syirkah* funds receive parts of profit in accordance with the agreement and receive loss based on the proportion of fund from each parties. The profit distribution of temporary *syirkah* funds might be based on profit sharing or revenue sharing concept.

p. Revenue from Fund Management by the Bank as *Mudharib*

Revenue from fund management by the Bank as *mudharib* consists of income from *murabahah* receivables transactions, *istishna* receivables, income from *ijarah*, profit sharing from *mudharabah* and *musyarakah* financing and other main operating income.

Income from *murabahah* receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the *murabahah* receivables.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai *Mudharib* (lanjutan)

Pada saat menghitung *margin* efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari *margin* efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan *istishna* diakui apabila telah terjadi penyerahan barang.

Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan usaha *musyarakah* yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.

Pendapatan usaha *mudharabah* diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai *nisbah* yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*.

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari pendapatan dari pinjaman *qardh*, pendapatan dari SBIS, pendapatan dari FASBIS, pendapatan dari penempatan pada bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil investasi pada surat berharga.

q. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana *Syirkah* Temporer

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana *syirkah* temporer merupakan bagian bagi hasil milik pihak ketiga yang didasarkan pada prinsip *mudharabah mutlaqah* atas pengelolaan dana mereka oleh Bank. Pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang telah diterima (*cash basis*).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Revenue from Fund Management by the Bank as *Mudharib* (continued)

When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future. This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Income from *istishna* is recognized at the date of transfer of assets.

Income from *ijarah* is recognized proportionately over the agreement period.

Musyarakah revenue which is distributed to active partners is recognized in accordance with the agreement, while *musyarakah* revenue which is distributed to passive partners is recognized as right of the passive partner to profit sharing and liability.

Revenue from *mudharabah* is recognized during the period of profit sharing in accordance with the agreed *nisbah*, while recognition based on projected income is not allowed. Loss occurred due to negligence on the part of fund manager is charged to fund manager and shall not reduce the *mudharabah* investment.

Other main operating income consists of income derived from funds of *qardh*, SBIS, FASBIS, placements with other sharia banks and profit sharing from investment in marketable securities.

q. Third Parties' Share on Returns of Temporary *Syirkah* Funds

Third parties' share on returns of temporary *syirkah* funds represents third parties' share on the income of the Bank derived from managing of such funds by the Bank under *mudharabah mutlaqah* principles. The profit sharing is distributed on the cash basis.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

q. Hak Pihak Ketiga atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer (lanjutan)

Bagian laba Bank yang dibagikan kepada pemilik dana dihitung dari pendapatan yang telah diterima.

Jumlah pendapatan *margin* dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan dari aset produktif lainnya yang akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Bank menghitung secara proporsional sesuai dengan alokasi dana nasabah dan Bank yang dipakai dalam pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang disalurkan.

Dari jumlah pendapatan *margin* dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut kemudian dibagihasilkan kepada nasabah penabung dan deposan sebagai *shahibul maal* dan Bank sebagai *mudharib* sesuai dengan porsi *nisbah* bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya, sedangkan untuk nasabah giro dan tabungan dengan akad *wadiah* dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pendapatan *margin* dan bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan dan aset produktif lainnya yang didapatkan melalui penggunaan dana Bank, seluruhnya menjadi milik Bank, termasuk pendapatan dari investasi Bank berbasis imbalan.

r. Pendapatan Imbalan Jasa Perbankan

Pendapatan imbalan jasa perbankan pada umumnya diakui pada saat kas diterima.

s. Imbalan Kerja

Imbalan kerja jangka pendek

Imbalan kerja jangka pendek seperti upah, iuran jaminan sosial, cuti jangka pendek dan tunjangan hari raya diakui selama periode jasa diberikan. Imbalan jangka pendek dihitung sebesar jumlah yang tidak didiskontokan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

q. Third Parties' Share on Returns of Temporary Syirkah Funds (continued)

The profit sharing distributed to fund owners is calculated based on the revenue of the Bank.

Margin income and profit sharing on financing facilities and other earning assets are distributed to fund owners. The Bank computes proportionately based on the allocation of funds from owners and the Bank which was used in financing and other earning assets granted.

The total available margin and profit sharing are distributed to customers and depositors as *shahibul maal* and to the Bank as *mudharib* in accordance with a predetermined *nisbah*, while for customers of demand deposits and savings deposits under *wadiah* agreement might be granted bonuses according to the Bank's policy.

Margin income and profit sharing from financing and other earning assets which earned through the use of Bank's funds, are entirely entitled to the Bank, including income from the Bank's fee-based investments.

r. Fee Based Income from Banking Services

Fee based income from banking services are generally recognized when cash is received.

s. Employee Benefits

Short-term employee benefits

Short-term employee benefits such as salaries, social security contributions, short-term leaves and allowance of feast day are recognized during the period when services have been rendered. Short-term employee benefits are measured using undiscounted amounts.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program pensiun iuran pasti

Iuran kepada dana pensiun sebesar persentase tertentu gaji pegawai yang menjadi peserta program pensiun iuran pasti Bank. Iuran dicadangkan dan diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai-pegawai tersebut dan pembayarannya dikurangkan dari utang iuran. Iuran terhutang dihitung berdasarkan jumlah yang tidak didiskontokan.

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya

Imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya seperti cuti besar diakui sebagai biaya ketika jasa telah diberikan oleh pegawai yang memenuhi syarat. Imbalan kerja ditentukan berdasarkan peraturan Bank dan persyaratan minimum Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003.

Imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya secara aktuaris ditentukan berdasarkan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri atas:

- (i) Keuntungan dan kerugian aktuarial.
- (ii) Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).
- (iii) Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset).

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Untuk imbalan kerja jangka panjang lain atas biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto langsung diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Employee Benefits (continued)

Defined contribution plan

Contribution payable to the pension fund equivalent to a certain percentage of salaries for qualified employees under the Bank's defined contribution plan. The contribution is accrued and recognized as expense when services have been rendered by qualified employees and actual payments are deducted from the contribution payable. Contribution payable is measured using undiscounted amounts.

Defined benefit plan and other long-term employee benefits

The post-employment benefits and other long-term employee benefits such as grand leaves recognized as expense when services have been rendered by qualified employees. The benefits are determined based on Bank regulations and the minimum requirements of Labor Law No. 13/2003.

The post-employment benefits and other long-term employee benefits are actuarially determined using the *Projected Unit Credit Method*.

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) net, which is recognized as other comprehensive income consist of:

- (i) Actuarial gain and losses.
- (ii) Return on plan assets, excluding amounts that is included in net interest on liabilities (assets).
- (iii) The effect of the asset ceiling, excluding amounts included in the net interest of liabilities (assets).

Remeasurement of defined benefit liabilities (assets) - net, which is recognized as other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

For other long-term employee benefits: current service cost, net interest expense of net defined benefit assets liabilities (assets), and remeasurement of liability (asset) is recognized immediately in the current year statements of profit or loss and other comprehensive income.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

s. Imbalan Kerja (lanjutan)

Program imbalan pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya (lanjutan)

Biaya jasa lalu diakui sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amandemen atau kurtailmen program terjadi, dan ketika biaya restrukturisasi atau pesangon diakui, sehingga biaya jasa lalu yang belum *vested* tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode *vesting* masa depan.

t. Perpajakan

Beban pajak tahun berjalan ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer aset dan liabilitas antara pelaporan komersial dan pajak pada setiap tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan saldo rugi fiskal yang belum dikompensasikan, sepanjang perbedaan temporer dan rugi fiskal yang belum dikompensasikan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal posisi keuangan dan nilai tercatat aset pajak tangguhan tersebut diturunkan apabila tidak lagi terdapat kemungkinan besar bahwa laba fiskal yang memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan.

Perubahan terhadap liabilitas pajak diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima, atau apabila diajukan keberatan dan atau banding oleh Bank, pada saat telah ada keputusan atas banding dan atau keberatan tersebut.

Aset dan liabilitas atas pajak tangguhan dan pajak kini dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Employee Benefits (continued)

Defined benefit plan and other long-term employee benefits (continued)

Past service costs are recognized as expense at the earlier date between the amendments or curtailment program occurs, and when the costs of restructuring or severance is recognized, therefore, unvested past service cost can no longer be deferred and recognized over the future vesting period.

t. Taxation

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and the tax bases of assets and liabilities at each reporting date.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to the extent that it is probable for temporary differences and carry forward of uncompensated tax losses to be utilized in deducting future taxable profit.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at each reporting date and is reduced when it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to compensate part or all of the benefit of the deferred tax assets.

Amendment to tax obligation is recorded when an assessment letter is received or, if objected to or appealed against by the Bank, when the result of such appeal or objection is determined.

Assets and liabilities on deferred tax and current tax can be offset if there is a legal enforceable right to offset.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

t. Perpajakan (lanjutan)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur berdasarkan tarif pajak yang akan berlaku pada tahun saat aset direalisasikan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang telah secara substantif diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan untuk dan/atau pembalikan seluruh perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, diakui sebagai "Manfaat/(Beban) Pajak Penghasilan" dan termasuk dalam laba atau rugi neto tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan ke laba komprehensif lainnya dan dilaporkan ke ekuitas.

u. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi dan Akuntansi yang Signifikan

Penyusunan laporan keuangan Bank mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian yang melekat dalam melakukan estimasi, dapat menyebabkan jumlah sesungguhnya yang dilaporkan pada periode yang akan datang berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Bank yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan Bank sebagai berikut:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Bank telah melakukan penilaian atas kemampuannya untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

t. Taxation (continued)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled based on tax laws that have been enacted or substantively enacted as at statements of financial position reporting dates. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are recognized as "Income Tax Benefit/(Expense)" and included in of net profit or loss for the year, except to the extent that they relate to items previously charged to other comprehensive income and reported to equity.

u. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates

The preparation of the Bank's financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period.

Due to inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods might be based on amounts which differ from those estimates.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying Bank's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in Bank's financial statements as follows:

Going concern

The Bank's management has made an assessment of its ability to continue as a going concern and is satisfied that the Bank has the resources to continue its business for the foreseeable future.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi dan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

Usaha yang berkelanjutan (lanjutan)

Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Nilai wajar instrumen keuangan

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

Level 1 : harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.

Level 2 : input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.

Level 3 : input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Kontinjensi

Bank sedang terlibat dalam proses hukum. Perkiraan biaya kemungkinan bagi penyelesaian klaim telah dikembangkan melalui konsultasi dengan bantuan konsultan hukum Bank didasarkan pada analisis hasil yang potensial.

Manajemen tidak berkeyakinan bahwa hasil dari hal ini akan mempengaruhi hasil usaha. Besar kemungkinan, bagaimanapun, bahwa hasil operasi di masa depan dapat secara material terpengaruh oleh perubahan dalam estimasi atau efektivitas dari strategi yang terkait dengan hal tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Judgments (continued)

Going concern (continued)

Futhermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Fair value of financial instruments

All assets and liabilities in which fair value is measured or disclosed in the financial statements can be classified in fair value hierarchy levels, based on the lowest level of input that is significant to the overall fair value measurement:

Level 1: quoted prices (without adjustments) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.

Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.

Level 3 : inputs that are not observable for the assets and liabilities.

Contingency

The Bank is currently involved in legal proceedings. The estimate of the probable cost for the resolution of claims has been developed in consultation with the aid of the external legal counsel handling the Bank's defense in this matter and is based upon an analysis of potential results.

Management does not believe that the outcome of this matter will affect the results of operations. It is probable, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates or in the effectiveness of the strategies relating to these proceedings.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi dan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko untuk dapat menyebabkan penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Bank berdasarkan asumsi dan estimasi yang digunakan pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah akibat perubahan pasar atau situasi yang timbul di luar kendali Bank. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi yang digunakan pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai dari piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan

Manajemen Bank menelaah portofolio piutang, pinjaman *qardh* dan pembiayaan setiap periode untuk menilai penurunan nilai dengan memperbaharui cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk selama periode yang diperlukan berdasarkan analisis berkelanjutan dan pemantauan terhadap rekening individual oleh petugas.

Estimasi tersebut didasarkan pada asumsi mengenai sejumlah faktor dan hasil aktual yang dapat berbeda, yang mengakibatkan perubahan terhadap jumlah cadangan kerugian di masa yang akan datang.

Penurunan nilai investasi pada surat berharga

Manajemen Bank menentukan bahwa investasi pada surat berharga memiliki kriteria penurunan nilai yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimating uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year/period are disclosed below. The Bank based its assumptions and estimates on parameters available when the financial statements were prepared.

Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Bank. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Allowance for impairment losses on receivables, funds of *qardh* and financing

The Bank's management reviews its receivables, funds of *qardh* and financing portfolio to assess impairment on a period basis with updating provisions made during the intervals as necessary based on the continuing analysis and monitoring of individual accounts by officers.

Such estimates are based on assumptions of several factors and actual results may differ, resulting to future changes in the amount of allowance for losses.

Impairment of investment in marketable securities

The Bank's management determines that investment in marketable securities are impaired based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHFTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi dan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Umur ekonomis aset tetap

Manajemen Bank memperkirakan masa manfaat aset tetap berdasarkan periode dimana aset diharapkan akan tersedia untuk digunakan.

Masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau secara berkala dan diperbarui jika memiliki ekspektasi yang berbeda dari perkiraan sebelumnya, karena kerusakan secara fisik dan teknis, atau keusangan secara komersial dan legal atau batasan lainnya atas penggunaan aset tersebut. Selain hal tersebut, estimasi masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada penilaian secara kolektif dengan menggunakan praktik industri, teknik evaluasi internal dan pengalaman dengan aset serupa.

Tetap dimungkinkan, bagaimanapun, bahwa hasil masa depan dapat secara material dipengaruhi oleh perubahan estimasi yang disebabkan oleh perubahan faktor-faktor tersebut di atas. Jumlah dan saat pencatatan biaya untuk setiap periode akan dipengaruhi oleh perubahan dari faktor dan keadaan saat pencatatan. Pengurangan dari taksiran masa manfaat dari aset tetap akan meningkatkan beban usaha.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Useful lives of premises and equipment

The Bank's management estimates the useful lives of premises and equipment based on the period over which the assets are expected to be available for use.

The estimated useful lives of premises and equipment are reviewed periodically and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the assets. In addition, estimation of the useful lives of premises and equipment is based on collective assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in estimates brought about by changes in the factors mentioned above. The amounts and timing of recorded expenses for any period are affected by changes of those factors and circumstances during recording. A reduction in the estimated useful lives of premises and equipment increases the recorded operating expenses.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from deductible temporary difference. Management's judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future tax planning strategics.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Penggunaan Pertimbangan dan Estimasi dan Akuntansi yang Signifikan (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penurunan nilai aset non-keuangan

Manajemen Bank mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Faktor-faktor penting yang dapat menyebabkan penelaahan penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) performa yang tidak tercapai secara signifikan terhadap ekspektasi historis atau proyeksi hasil operasi di masa yang akan datang;
- b) perubahan yang signifikan dalam cara penggunaan aset atau strategi bisnis secara keseluruhan; dan
- c) industri atau tren ekonomi yang secara signifikan bernilai negatif.

Bank mengakui kerugian penurunan nilai apabila nilai tercatat aset melebihi nilai yang dapat dipulihkan. Jumlah terpulihkan adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dengan nilai pakai aset (atau unit penghasil kas). Jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual atau, jika tidak memungkinkan, untuk unit penghasil kas yang mana aset tersebut merupakan bagian daripada unit tersebut.

Estimasi liabilitas imbalan kerja

Estimasi liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan perhitungan dari aktuaria. Perhitungan aktuaria menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian investasi, tingkat kenaikan gaji, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri dan lain-lain.

Karena program tersebut memiliki sifat jangka panjang, maka perkiraan tersebut memiliki ketidakpastian yang signifikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Use of Significant Accounting Judgment and Estimates (continued)

Estimates and Assumptions (continued)

Impairment of non-financial assets

The Bank's management assesses impairment of non-financial assets whenever events or changes in circumstances indicate that the carrying amount of non-financial asset may not be recoverable.

The factors that the Bank considers important which may lead to impairment assessment are the following:

- a) significant underperformance related to historical expectation or projected future operating results;
- b) significant changes in the manner of use of the assets or the overall business strategy; and
- c) significant negative industry or economic trends.

The Bank recognizes an impairment loss whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount. The recoverable amount is the higher amount between fair value less costs of disposal using the asset value in use (or cash generating unit). Recoverable amounts are estimated for individual assets or, if not possible, for the cash-generating unit to which the asset belongs.

Estimated liabilities for employee benefits

Estimated liabilities for employee benefits are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on investments, future salary increase, mortality rate, resignation rate and others.

Due to the long-term nature of this plan, such estimates are subject to significant uncertainty.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Transaksi dan Saldo Mata Uang Asing

Bank menyelenggarakan catatan akuntansinya dalam Rupiah. Transaksi yang melibatkan mata uang asing dicatat pada nilai tukar pada saat terjadinya transaksi.

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs Reuters pada pukul 16:00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

Kurs mata uang asing yang digunakan untuk penjabaran mata uang asing terhadap Rupiah adalah sebagai berikut (Rupiah penuh):

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
1 Dolar Amerika Serikat	13.567,50	13.472,50	13.785,00	1 United States Dollar
1 Riyal Arab Saudi	3.617,71	3.591,20	3.672,48	1 Saudi Arabian Riyal

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan liabilitas pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diakui sebesar biaya perolehan.

x. Sukuk Mudharabah Subordinasi

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I diakui sebesar nilai wajar pada awalnya dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan garis lurus. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal dan biaya transaksi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Transaction and Balance in Foreign currency

The Bank maintains its accounting records in Indonesian Rupiah. Transactions in foreign currencies are recorded at the prevailing exchange rates in effect on the date of the transactions.

At statements of financial position dates, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into Rupiah using the Reuters spot rates at 16:00 WIB (Western Indonesian Time) issued by Bank Indonesia.

The resulting gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income for the current year.

The exchange rates used in translating foreign currency amounts into Rupiah are as follows (full Rupiah):

w. Fund borrowing

Fund borrowing are funds received from other party with payment based on borrowings agreement.

Fund borrowing are initially recognized at acquisition cost.

x. Subordinated Sukuk Mudharabah

Subordinated Sukuk *Mudharabah* I are initially recognized at fair value and subsequently measured at amortized cost using straight line method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium associated related to the initial recognition and transaction cost.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2017, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu:

- Amandemen PSAK No.102 (2016), Akuntansi Murabahah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 107 (2016), Akuntansi Ijarah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 101 (2016), Penyajian Laporan Keuangan Syariah tentang penyajian laporan keuangan asuransi syariah.
- Amandemen PSAK No. 103 (2016), Akuntansi Salam tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 104 (2016), Akuntansi Istishna' tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.
- Amandemen PSAK No. 108 (2016), Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah tentang penyesuaian atas definisi nilai wajar selaras dengan PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Changes in accounting policies and disclosures

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2017, which is considered relevant to the Bank's financial statements, as follows:

- Amendments to SFAS No. 102 (2016), Murabahah Accounting regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.
- Amendments to SFAS No. 107 (2016), Ijarah Accounting regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.
- Amendments to SFAS No. 101 (2016), Presentation of Shariah Financial Statement regarding Presentation of Sharia Insurance Financial Statement.
- Amendments to SFAS No. 103 (2016), Salam Accounting regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.
- Amendments to SFAS No. 104 (2016), Istishna' Accounting regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.
- Amendments to SFAS No. 108 (2016), Accounting for Sharia Insurance Transaction regarding adjustment to fair value definition in line with PSAK 68: Fair Value Measurement.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

y. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapan (lanjutan)

Bank telah menerapkan standar akuntansi pada tanggal 1 Januari 2017, yang dianggap relevan dengan laporan keuangan Bank, yaitu (lanjutan):

- Amandemen PSAK No. 3, Penyajian Laporan Keuangan tentang Laporan Keuangan Interim.

Penerapan PSAK diatas tidak menimbulkan perubahan yang signifikan terhadap pelaporan keuangan dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

z. Laba per saham

Laba per lembar saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.

aa. Provisi

Provisi diakui jika Bank memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang, akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibalik.

ab. Segmen operasi

Segmen adalah bagian yang dapat dibedakan dari Bank yang terlibat baik dalam menyediakan produk tertentu (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan segmen lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

y. Changes in accounting policies and disclosures (continued)

The Bank adopted the revised accounting standard on January 1, 2017, which is considered relevant to the Bank's financial statements, as follows (continued):

- Amendments to SFAS No. 3, Presentation of Financial Statements regarding Interim Financial Report

Implementation of SFAS above did not result in significant changes to the financial reporting and disclosure in the financial statements.

z. Earnings per share

Basic earnings per share is calculated by dividing income for the year by the weighted average number of issued and fully paid shares during the related year.

aa. Provisions

Provisions are recognized when the Bank has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

ab. Operating segment

A segment is a distinguishable component of the business unit that is engaged either in providing certain products (business segment), or in providing products within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and rewards that are different from those of other segments.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

ab. Segmen operasi (lanjutan)

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen mencakup hal-hal yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Bank menyajikan segmen operasi berdasarkan laporan internal yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional dan keuangan yaitu Direksi.

Bank telah mengidentifikasi dan mengungkapkan informasi keuangan berdasarkan kegiatan bisnis utama (segmen usaha) yang terbagi atas kelompok komersil, ritel kemitraan, konsumen, mikro dan lainnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ab. Operating segment (continued)

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

The Bank presents segments operation based on Bank's internal report that is presented to the Board of Directors as the chief operating decision maker (CODM).

The Bank has identified and disclosed financial information based on main business (business segment) classified into commercial, retail linkage, consumer, micro and others.

3. KAS

3. CASH

	31 Desember/December 31						
	2017		2016		2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah/ Equivalent	
Rupiah		336.774		313.977		277.665	Rupiah
Mata Uang Asing							Foreign Currencies
Riyal Arab Saudi	2.705.674	9.788	972.291	3.492	309.601	1.137	Saudi Arabian Riyal
Dolar Amerika Serikat	105.800	1.435	47.200	636	76.250	1.053	United States Dollar
Jumlah		347.997		318.105		279.855	Total

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016, dan 2015, saldo dalam mata uang Rupiah tersebut, sudah termasuk uang pada mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing sebesar Rp83.053, Rp78.751 dan Rp78.752.

As of December 31, 2017, 2016, and 2015, the Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounted to Rp83,053, Rp78,751 and Rp78,752, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Bank tidak terdapat kas yang dibatasi penggunaannya oleh Bank.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, there are no restricted funds to be used by the Bank.

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA

a. Berdasarkan mata uang:

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA

a. By currencies:

	31 Desember/December 31						
	2017		2016		2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	
Rupiah		4.010.199		3.811.012		4.765.003	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	400.000	5.427	235.000	3.166	300.000	4.135	United States Dollar
Jumlah		4.015.626		3.814.178		4.769.138	Total

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

b. Berdasarkan jenis:

b. By type:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
Rupiah					Rupiah
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	1.968.000	963.000	2.422.000		Bank Indonesia Sharia Certificates Facilities (FASBIS)
Giro pada Bank Indonesia	1.792.199	1.198.012	993.003		Current account with Bank Indonesia
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	250.000	1.650.000	1.350.000		Bank Indonesia Sharia Deposit (SBIS)
	4.010.199	3.811.012	4.765.003		
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
Giro pada Bank Indonesia	5.427	3.166	4.135		Current account with Bank Indonesia
Jumlah	4.015.626	3.814.178	4.769.138		Total

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By time period:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
Rupiah					Rupiah
≤ 1 bulan	3.760.199	2.161.012	3.415.003		≤ 1 month
> 3 - ≤ 12 bulan	250.000	1.650.000	1.350.000		> 3 - ≤ 12 months
	4.010.199	3.811.012	4.765.003		
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
≤ 1 bulan	5.427	3.166	4.135		≤ 1 month
Jumlah	4.015.626	3.814.178	4.769.138		Total

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
Rupiah					Rupiah
≤ 1 bulan	3.910.199	2.361.012	3.415.003		≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	100.000	100.000	300.000		> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	-	1.350.000	1.050.000		> 3 - ≤ 12 months
	4.010.199	3.811.012	4.765.003		
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
≤ 1 bulan	5.427	3.166	4.135		≤ 1 month
Jumlah	4.015.626	3.814.178	4.769.138		Total

e. Rasio Giro Wajib Minimum (GWM) adalah sebagai berikut:

e. The Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) ratio are as follows:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
Rasio GWM					Minimum Statutory Reserve Requirement (GWM) Ratio
Rupiah	7,03%	5,02%	5,05%		Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1,70%	1,13%	3,74%		United States Dollar

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 15/16/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013, setiap Bank diwajibkan memelihara Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah dan valuta asing yang besarnya ditetapkan sebesar 5% dan 1% dari dana pihak ketiga (DPK) dalam Rupiah dan valuta asing.

Selain ketentuan di atas, Bank yang memiliki rasio Pembiayaan dalam Rupiah terhadap DPK dalam Rupiah kurang dari 80% dan memiliki DPK dalam Rupiah lebih besar dari Rp10 triliun sampai dengan Rp 50 triliun wajib memelihara tambahan Giro Wajib Minimum (GWM) dalam Rupiah sebesar 2% dari DPK dalam Rupiah.

Saldo giro pada Bank Indonesia disediakan untuk memenuhi persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dari Bank Indonesia.

Bank telah memenuhi ketentuan OJK tentang Giro Wajib Minimum (GWM) per tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

- f. Rata-rata tingkat bonus tahunan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	3,50%	4,0%	5,52%
Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	6,00%	6,23%	6,96%

Bank Indonesia
 Sharia Deposit Facilities
 (FASBIS)
 Bank Indonesia Sharia
 Certificates (SBIS)

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN

- a. Berdasarkan mata uang:

	31 Desember/December 31					
	2017		2016		2015	
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Angka penuh/ Full amount)	Ekuivalen Rupiah/ Rupiah Equivalent
Pihak ketiga Rupiah		34.500		314.037		40.256
Pihak Berelasi (Catatan 41) Rupiah		120.074		45.313		67.345
Riyal Arab Saudi	16.760.932	60.636		-		-
Dolar Amerika Serikat	2.256.235	30.611	6.980.247	94.041	1.655.167	22.816
		211.321		139.354		90.161
Jumlah		245.821		453.391		130.417

Third parties
 Rupiah
 Related Parties (Note 41)
 Rupiah
 Saudi Arabian Riyal
 United States Dollar

Total

4. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH BANK INDONESIA (continued)

Based on Bank Indonesia Regulation No. 15/16/PBI/2013 dated December 24, 2013, each bank is required to maintain Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) in Rupiah and foreign currencies equivalent to 5% and 1% of its third parties funds denominated in Rupiah and foreign currencies.

Aside from the above regulation, every Bank that has Financing to Deposits Ratio in Rupiah less than 80% and collects more than Rp10 trillion until Rp50 trillion third parties funds must maintain additional 2% Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) (central bank minimum account reserve) from total third parties funds in Rupiah.

The balance of current accounts with Bank Indonesia is maintained to meet the Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) of Bank Indonesia.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015 the Bank has complied with the Financial Services Authority regulations regarding the Minimum Statutory Reserve Requirements (GWM) with Bank Indonesia

- f. The average annual bonus rate are as follows:

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS

- a. By currencies:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN
(lanjutan)

b. Berdasarkan jenis dan bank:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
Rupiah				Rupiah
SIMA				SIMA
PT Bank Aceh Syariah	-	200.000	-	PT Bank Aceh Syariah
PT Bank Panin Dubai				PT Bank Panin Dubai
Syariah	-	70.000	-	Syariah
PT Bank Victoria Syariah	-	20.000	-	PT Bank Victoria Syariah
Giro				Current account
PT Bank Central Asia Tbk	34.500	24.037	40.256	PT Bank Central Asia Tbk
	34.500	314.037	40.256	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
Rupiah				Rupiah
Giro				Current accounts
PT Bank Rakyat				PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	119.101	44.351	66.396	Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri				PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
(Persero) Tbk	973	962	949	
	120.074	45.313	67.345	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Giro				Current account
PT Bank Rakyat				PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	30.611	94.041	22.816	Indonesia (Persero) Tbk
Riyal Saudi Arabia				Saudi Arabia Riyal
Giro				Current account
PT Bank Rakyat				PT Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk	60.636	-	-	Indonesia (Persero) Tbk
	211.321	139.354	90.161	
Jumlah	245.821	453.391	130.417	Total

c. Berdasarkan kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 seluruh giro dan penempatan pada bank lain diklasifikasikan "Lancar".

d. Berdasarkan jatuh tempo:

Giro dan penempatan pada bank lain memiliki sisa umur jatuh tempo kurang dari 1 (satu) bulan.

e. Bank melakukan penilaian giro dan penempatan pada bank lain secara individual dengan mempertimbangkan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, karena manajemen berkeyakinan bahwa giro dan penempatan pada bank lain dapat tertagih.

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat giro dan penempatan pada bank lain yang dijadikan jaminan.

b. By type and bank:

c. By collectibility:

As of December 31, 2017, 2016 and 2015 all current accounts and placements with other banks are classified as "Current".

d. By maturity:

Current accounts and placements with other banks have remaining period to maturity less than 1 (one) month.

e. The Bank assessed current accounts and placements with other banks individually for impairment based on whether an objective evidence of impairment exists.

Management believes that the allowance for impairment losses is not necessary as of December 31, 2017, 2016 and 2015, because management believes that current account and placements with other banks are fully collectible.

As of December 31 2017, 2016 and 2015, no current accounts and placements with other bank are pledged as collaterals.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

5. GIRO DAN PENEMPATAN PADA BANK LAIN (lanjutan)

f. Rata-rata tingkat imbal hasil per tahun adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31			Rupiah SIMA
	2017	2016	2015	
Rupiah SIMA	4,26%	5,23%	6,10%	Rupiah SIMA

6. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA

a. Berdasarkan tujuan, jenis dan penerbit:

Penerbit/Issuer	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun (%) / Annual Revenue	Tanggal	Peringkat/Rating ^{a)}			Nilai wajar/Nilai tercatat Fair value/Carrying value		
			31 Des./ Dec. 31, 2017	31 Des./ Dec. 31, 2016	31 Des./ Dec. 31, 2015	31 Des./ Dec. 31, 2017	31 Des./ Dec. 31, 2016	31 Des./ Dec. 31, 2015
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi/ Measured at fair value through profit and loss								
Rupiah								
Pemerintah/Government								
Seri SR008**	8,30	10-Mar-19	-	-	-	3.205	6.576	-
Seri SR007**	8,25	11-Mar-18	-	-	-	1.363	538	44.529
Seri SR006**	8,75	5-Mar-17	-	-	-	-	1.683	664
Seri PBS008**	7,00	15-Jun-16	-	-	-	-	-	49.917
Seri SR005**	6,00	27-Feb-16	-	-	-	-	-	10
						4.568	8.797	95.120
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar								
Pemerintah/Government								
Seri INDOIS18**	4,00	21-Nov-18	-	-	-	-	-	28.746
						4.568	8.797	123.866
Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost								
Rupiah								
Pemerintah/Government								
Seri PBS013**	6,25	15-Mei-19	-	-	-	1.037.952	148.482	-
Seri SR008**	8,25	10-Mar-19	-	-	-	919.655	-	-
Seri PBS009**	7,75	25-Jan-18	-	-	-	751.584	649.534	496.829
Seri PBS014**	6,50	15-Mei-21	-	-	-	743.574	-	-
Seri SPN-S 11042018**	-	11-Apr-18	-	-	-	658.294	-	-
Seri SPN-S 13032018**	-	13-Mar-18	-	-	-	622.900	-	-
Seri PBS006**	8,25	15-Sep-20	-	-	-	617.650	565.933	523.841
Seri SR007**	8,25	11-Mar-18	-	-	-	452.352	152.013	-
Seri PBS011**	8,75	15-Agust-23	-	-	-	265.571	-	-
Seri PBS010**	8,63	25-Jan-19	-	-	-	254.767	259.221	-
Seri SPN-S 02022018**	-	02-Feb-18	-	-	-	209.670	-	-
Seri SPN-S 08052018**	-	08-Mei-18	-	-	-	73.713	-	-
Seri SR009**	6,90	10-Mar-20	-	-	-	30.797	-	-
Seri SPN-S 05012018**	-	05-Jan-18	-	-	-	22.690	-	-
Seri PBS002**	5,5	15-Jan-22	-	-	-	9.452	-	-
RR Seri SBSN-11012017**	5,2	11-Jan-17	-	-	-	-	439.244	-
RR Seri SBSN-04012017**	5,2	5-Jan-17	-	-	-	-	431.470	-
Seri SR006**	8,75	5-Mar-17	-	-	-	-	421.180	221.725
Seri SPN-S 24022017**	-	24-Feb-17	-	-	-	-	359.171	-
Seri SPN-S 21032017**	-	21-Mar-17	-	-	-	-	197.579	-
RR Seri SBSN-25012017**	5,2	25-Jan-17	-	-	-	-	191.566	-
RR Seri SBSN-18012017**	5,2	18-Jan-17	-	-	-	-	163.386	-
Seri SPN-S 19042017**	-	19-Apr-17	-	-	-	-	147.390	-
Seri SPN-S 21034017**	-	21-Mar-17	-	-	-	-	49.373	-
Seri PBS008**	7,00	15-Jun-16	-	-	-	-	-	374.640
Seri SPN-S 04052016**	-	4-Mei-16	-	-	-	-	-	97.571
PT Angkasa Pura I (Persero)								
Tbk -Tahun 2016 Seri A	8,10	22-Nov-21	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	100.000	100.000	-
PT Bank BNI Syariah								
Tahap I Tahun 2015	9,25	26-Mei-18	idAA+(sy)	idAA+(sy)	idAA+(sy)	68.624	68.927	51.046
PT Maybank Indonesia Tbk								
Phase II year 2016	8,25	10-Jun-19	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)	50.000	50.000	-
PT Adira Dinamika								
Multi Finance Tbk - Tahap II Tahun 2014 Seri B	10,50	12-Nov-17	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	20.000	20.000
PT Summarecon Agung Tbk								
Tahap I Tahun 2013	10,50	11-Des-18	idA+(sy)	idA+(sy)	idA+(sy)	10.098	10.194	10.294
Tahap II Tahun 2014	11,50	19-Okt-19	idA+(sy)	idA+(sy)	idA+(sy)	10.000	10.000	10.000
PT Bank Nagari								
Bond VII Year 2015	10,99	8-Jan-21	idA(sy)	idA(sy)	idAA+(sy)	10.000	10.000	-
PT Adira Dinamika								
Multi Finance Tbk - Tahap IV Tahun 2016 Seri A	7,90	16-Agu-17	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	10.000	-

5. CURRENT ACCOUNTS AND PLACEMENTS WITH OTHER BANKS (continued)

f. The average annual return ratio are as follows:

6. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES

a. By purpose, type and issuer:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

a. Berdasarkan tujuan, jenis dan penerbit (lanjutan):

Penerbit/Issuer	Tingkat Bagi Hasil Per Tahun (%) / Annual Revenue	Tanggal	Peringkat/Rating *)			Nilai wajar/Nilai tercatat Fair value/Carrying value		
			31 Des./ Dec. 31, 2017	31 Des./ Dec. 31, 2016	31 Des./ Dec. 31, 2015	31 Des./ Dec. 31, 2017	31 Des./ Dec. 31, 2016	31 Des./ Dec. 31, 2015
Diukur pada biaya perolehan/ Measured at acquisition cost								
Rupiah								
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - PLN IV Tahun 2010 Seri A	11,95	12-Jan-17	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	10.000	10.000
PT Mayora Indah Tbk - Mayora Indah II Tahun 2012	10,40	10-Jul-17	idAAA(sy)	idAAA(sy)	idAAA(sy)	-	4.035	4.104
PT XL Axiata Tbk - XL Axiata II Tahun 2017	8,25	9-Mei-17	idAA-(sy)	idAA-(sy)	idAA-(sy)	-	6.483	6.443
PT Global Mediacom Tbk - Global Mediacom Tahun 2017 Seri A	7,25	8-Mei-18	idAAA(sy)	-	-	25.000	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017	7,50	16-Juni-19	idAAA(sy)	-	-	100.000	-	-
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) RNI Tahun 2017	11,50	7-Jul-22	idA+(sy)	-	-	25.000	-	-
PT Timah (Persero) Tbk - PT Timah Tahun 2017 Seri A	9,60	14-Jul-20	idA(sy)	-	-	10.000	-	-
PT Indosat Tbk - Indosat Tahun 2017 Sei A	10,00	2-Agus-20	idA-(sy)	-	-	25.000	-	-
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2017	8,50	29-Sep-20	idA+(sy)	-	-	7.000	-	-
	6,15	19-Nov-18	idAAA(sy)	-	-	50.000	-	-
	8,05	12-Des-20	idAA-(sy)	-	-	25.000	-	-
						7.186.343	4.475.181	1.826.493
Dolar Amerika Serikat/ United States Dollar								
Pemerintah/Government								
Seri INDOIS19**)	6,13	15-Mar-19	-	-	-	98.066	99.929	104.866
Seri INDOIS18**)	4,00	21-Nov-18	-	-	-	68.781	69.419	72.035
Seri INDOIS22**)	3,30	21-Nov-22	-	-	-	53.310	52.739	53.794
						220.157	222.087	230.695
						7.406.500	4.697.268	2.057.188
Jumlah/Total						7.411.068	4.706.065	2.181.054

*) Berdasarkan peringkat yang diterbitkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)

**) Tanpa peringkat

Jumlah nosional atas INDOIS18, INDOIS19, dan INDOIS22 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2017 adalah masing-masing sebesar USD5.160.866, USD7.358.148, dan USD3.999.978 (nilai penuh).

Jumlah nosional atas INDOIS18, INDOIS19, dan INDOIS22 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2016 adalah masing-masing sebesar USD5.152.658, USD7.417.275, dan USD3.914.579 (nilai penuh).

Jumlah nosional atas INDOIS18, INDOIS19, dan INDOIS22 dalam mata uang Dolar Amerika Serikat pada tanggal 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar USD5.225.607, USD7.607.228 dan USD3.902.378 (nilai penuh).

6. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

a. By purpose, type and issuer (continued):

*) According to PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ratings

**) Unrated

The notional amount of INDOIS18, INDOIS19, and INDOIS22 which is denominated in United States Dollar as of December 31, 2017 are amounted to USD5,160,866, USD7,358,148, and USD3,999,978, respectively (full amount).

The notional amount of INDOIS18, INDOIS19, and INDOIS22 which is denominated in United States Dollar as of December 31, 2016 are amounted to USD5,152,658, USD7,417,275, and USD3,914,579, respectively (full amount).

The notional amount of INDOIS18, INDOIS19, and INDOIS22 which is denominated in United States Dollar as of December 31, 2015 are amounted to USD5,225,607, USD7,607,228 and USD3,902,378, respectively (full amount).

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

- a. Berdasarkan tujuan, jenis dan penerbit (lanjutan):

Bank mengakui keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi - neto dari perubahan nilai wajar efek-efek yang diklasifikasikan "Diukur pada nilai wajar" masing-masing sebesar Rp94, Rp1.397 dan Rp345 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang disajikan di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

- b. Berdasarkan jangka waktu:

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
≤ 1 tahun	1.587.268	2.181.094	-
>1 - ≤ 3 tahun	1.998.538	1.524.873	1.367.478
> 5 tahun	2.647.334	479.699	460.766
> 3 - ≤ 5 tahun	1.177.928	450.399	352.810
Jumlah	7.411.068	4.706.065	2.181.054

- c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
≤ 1 tahun	3.004.971	2.452.558	522.137
>1 - ≤ 3 tahun	3.199.189	1.524.952	966.416
> 3 - ≤ 5 tahun	941.336	675.816	638.707
> 5 tahun	265.572	52.739	53.794
Jumlah	7.411.068	4.706.065	2.181.054

- d. Berdasarkan keterkaitan:

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
<u>Pihak Ketiga</u>	215.098	116.677	46.737
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>			
Pemerintah Republik Indonesia	6.895.346	4.406.426	2.069.167
PT Angkasa Pura I (Persero) Tbk	100.000	100.000	-
PT Sarana Multigriya Financial (Persero)	100.000	-	-
PT Bank BNI Syariah	68.624	68.927	51.046
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	25.000	-	-
PT Timah (Persero) Tbk	7.000	-	-
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	-	14.035	14.104
Jumlah	7.411.068	4.706.065	2.181.054

6. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

- a. By purpose, type and issuer (continued):

The Bank recognized unrealized gain (loss) - net on changes in the value of "Measured at fair value" securities amounting to Rp94, Rp1,397 and Rp345, respectively, for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015 which are recorded in the statements of profit or loss and other comprehensive income.

- b. By period:

- c. By remaining period to maturity:

- d. By relationship:

Third Parties
Related Parties (Note 41)
Government of the Republic of Indonesia
PT Angkasa Pura I (Persero) Tbk
PT Sarana Multigriya Financial (Persero)
PT Bank BNI Syariah
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
PT Timah (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. INVESTASI PADA SURAT BERHARGA (lanjutan)

- e. Berdasarkan kolektibilitas:

Pada tanggal-tanggal 31 Desember, 2017, 2016 dan 2015, seluruh investasi pada surat berharga diklasifikasikan "Lancar".

- f. Bank melakukan penilaian atas penurunan nilai investasi surat berharga secara individual dengan adanya bukti obyektif penurunan nilai.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai tidak diperlukan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 karena manajemen berkeyakinan bahwa investasi pada surat berharga dapat tertagih.

Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat surat berharga yang dijadikan jaminan.

6. INVESTMENTS IN MARKETABLE SECURITIES (continued)

- e. By collectibility:

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, all investments in marketable securities are classified as "Current".

- f. The Bank assessed the impairment on investments in marketable securities individually based on whether an objective evidence of impairment exists.

Management believes that the allowance for impairment losses is not necessary as of December 31, 2017, 2016 and 2015, because management believes that the investments in marketable securities are collectible.

As of December 31 2017, 2016 and 2015, no marketable securities are pledged as collaterals

7. PIUTANG

- a. Berdasarkan jenis, kolektibilitas dan mata uang:

7. RECEIVABLES

- a. By type, collectibility and currency:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Rupiah				Rupiah
<u>Piutang murabahah</u>				<u>Murabahah receivables</u>
Lancar	9.128.637	9.000.803	8.714.511	Current
Dalam perhatian khusus	943.291	1.235.657	798.537	Special mention
Kurang lancar	350.213	66.866	106.564	Substandard
Diragukan	74.904	164.637	81.555	Doubtful
Macet	389.920	314.280	302.108	Loss
	10.886.965	10.782.243	10.003.275	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(429.948)	(281.710)	(222.925)	Allowance for impairment losses
Neto	10.457.017	10.500.533	9.780.350	Net
Rupiah				Rupiah
<u>Piutang istishna</u>				<u>Istishna receivables</u>
Lancar	1.677	2.445	3.868	Current
Dalam perhatian khusus	693	1.061	1.174	Special mention
Kurang lancar	238	662	524	Substandard
Diragukan	139	-	9	Doubtful
Macet	1.674	1.732	1.853	Loss
	4.421	5.900	7.428	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(112)	(140)	(187)	Allowance for impairment losses
Neto	4.309	5.760	7.241	Net
Jumlah	10.461.326	10.506.293	9.787.591	Total

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG (lanjutan)

7. RECEIVABLES (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
Perdagangan	3.214.080	3.485.504	2.861.999		Trading
Industri	1.070.028	1.224.591	1.122.099		Manufacturing
Pengangkutan	714.573	729.805	557.709		Transportation
Sosial/masyarakat	415.508	477.388	3.291.046		Social/public
Pertanian	447.060	388.801	370.904		Agriculture
Jasa usaha	224.128	267.120	308.262		Business services
Konstruksi	153.933	171.538	199.833		Construction
Listrik, gas dan air	17.445	29.485	27.722		Electricity, gas and water
Pertambangan	8.821	19.233	28.699		Mining
Lainnya	4.496.930	3.909.706	1.231.926		Others
	10.762.506	10.703.171	10.000.199		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>					<u>Related Parties (Note 41)</u>
Pengangkutan	40.314	-	404		Transportation
Sosial/masyarakat	-	-	4.711		Social/public
Jasa usaha	74.593	72.044	-		Business services
Lainnya	13.973	12.928	5.389		Others
	128.880	84.972	10.504		
Jumlah	10.891.386	10.788.143	10.010.703		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(430.060)	(281.850)	(223.112)		Allowance for impairment losses
Neto	10.461.326	10.506.293	9.787.591		Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By period:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
≤ 1 tahun	595.643	456.905	409.192		≤ 1 year
> 1 - ≤ 3 tahun	1.295.169	2.328.184	2.078.031		> 1 - ≤ 3 years
> 3 - ≤ 5 tahun	2.275.407	3.716.336	3.587.163		> 3 - ≤ 5 years
> 5 tahun	6.596.287	4.201.746	3.925.813		> 5 years
	10.762.506	10.703.171	10.000.199		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>					<u>Related Parties (Note 41)</u>
> 1 - ≤ 3 tahun	808	1.261	704		> 1 - ≤ 3 years
> 3 - ≤ 5 tahun	43.086	949	923		> 3 - ≤ 5 years
> 5 tahun	84.986	82.762	8.877		> 5 years
	128.880	84.972	10.504		
Jumlah	10.891.386	10.788.143	10.010.703		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(430.060)	(281.850)	(223.112)		Allowance for impairment losses
Neto	10.461.326	10.506.293	9.787.591		Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG (lanjutan)

7. RECEIVABLES (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. *By remaining period to maturity:*

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
≤ 1 bulan	291.198	260.932	21.263		≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	119.358	101.077	180.845		>1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	695.917	604.088	580.829		>3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	5.870.946	6.344.458	5.964.494		>1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	3.785.087	3.392.616	3.252.768		> 5 years
	10.762.506	10.703.171	10.000.199		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>					<u>Related Parties (Note 41)</u>
> 1 - ≤ 3 bulan	686	-	-		>1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	75	-	1.000		>3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	61.503	3.892	3.136		>1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	66.616	81.080	6.368		> 5 years
	128.880	84.972	10.504		
Jumlah	10.891.386	10.788.143	10.010.703		<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(430.060)	(281.850)	(223.112)		<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	10.461.326	10.506.293	9.787.591		Net

e. Berdasarkan keterkaitan:

e. *By relationship:*

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>		10.762.506	10.703.171	10.000.199	<u>Third Parties</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>					<u>Related Parties (Note 41)</u>
Koperasi Karyawan BRISyariah	74.593	72.044	-		Koperasi Karyawan BRISyariah
Perum DAMRI	40.314	-	404		Perum DAMRI
Karyawan Kunci	13.973	12.928	10.100		Key Employees
	128.880	84.972	10.504		
Jumlah	10.891.386	10.788.143	10.010.703		<i>Total</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(430.060)	(281.850)	(223.112)		<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto	10.461.326	10.506.293	9.787.591		Net

f. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat piutang *murabahah* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPP.

f. *Based on the Legal Lending Limit (BMPP) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2017, 2016 and 2015, there are no murabahah receivables which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.*

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya:

- 1) Pinjaman karyawan yang diikat dengan akad *murabahah* adalah pinjaman yang diberikan kepada karyawan untuk pembelian rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan, serta dibebani *margin* rata-rata per tahun sebesar setara:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Tingkat <i>margin</i> rata-rata per tahun	10,00%	10,00%	10,00%	Annual average margin rate

- 2) Tingkat *margin* rata-rata piutang per tahun sebesar setara:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Tingkat <i>margin</i> rata-rata per tahun	16,65%	20,76%	21,94%	Annual average margin rate

- 3) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Saldo awal tahun	281.850	223.112	163.009	Balance at beginning of the year
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan (Catatan 33)	167.674	116.400	132.753	Provision during the year (Note 33)
Penerimaan kembali hapus buku	4.191	7.102	6.291	Recoveries of written-off
Penghapusan bujukan selama tahun berjalan	(23.655)	(64.764)	(78.941)	Write-off during the year
Saldo akhir tahun	430.060	281.850	223.112	Balance at end of the year

Jumlah minimum cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang yang wajib dibentuk sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia adalah sebesar:

The minimum allowance for impairment losses on receivables provided based on Bank Indonesia regulation amounted to:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Jumlah minimum yang wajib dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang, yang wajib dibentuk sesuai dengan POJK	266.013	296.503	240.314	The minimum allowance for impairment losses on receivables based on Financial Services Authority's regulations

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Management believes that the allowance for impairment losses on *mudharabah* financing is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulations.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan):

- 4) Piutang dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 5) Rasio *Non-Performing Financing (NPF)* bruto dan neto atas jumlah piutang adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Jumlah piutang*)	10.891.386	10.783.173	10.010.312	Total receivables*)
<i>NPF</i> - Bruto	817.088	548.177	492.613	<i>NPF</i> - Gross
Persentase <i>NPF</i> - Bruto	7,50%	5,08%	4,92%	Percentage of <i>NPF</i> - Gross
<i>NPF</i> - Neto	575.578	427.561	384.617	<i>NPF</i> - Net
Persentase <i>NPF</i> - Neto	5,28%	3,96%	3,84%	Percentage of <i>NPF</i> - Net

*) Diluar piutang kepada bank lain

*) Exclude receivables to other banks

- 6) Rincian piutang bermasalah (kolektibilitas 3, 4 dan 5) dan total cadangan kerugian penurunan nilai, berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Perdagangan	245.232	163.659	111.755	Trading
Industri	294.037	126.410	63.001	Manufacturing
Pertanian	40.530	29.396	19.113	Agriculture
Sosial/masyarakat	30.020	22.361	105.826	Social/public
Jasa usaha	24.378	22.338	13.979	Business services
Pengangkutan	7.306	24.904	53.977	Transportation
Konstruksi	3.004	1.572	698	Construction
Pertambangan	1.101	695	193	Mining
Listrik, gas dan air	777	422	276	Electricity, gas and water
Lainnya	170.703	156.420	123.795	Others
Jumlah	817.088	548.177	492.613	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(241.510)	(120.616)	(107.996)	Allowance for impairment losses
Neto	575.578	427.561	384.617	Net

- 7) Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat piutang yang dimiliki oleh Bank yang digunakan oleh Bank sebagai jaminan.

7. RECEIVABLES (continued)

g. Other significant information (continued):

- 4) Receivables are collateralized by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage and sell, *mudharabah* time deposits (Note 25) or by other guarantees generally accepted by the Bank.
- 5) The ratio of total *Non-Performing Financing (NPF)* gross and net on receivables are as follows:

- 6) The details of non-performing receivables (with collectibility 3, 4 and 5) and total allowance for impairment losses by economic sector are as follows:

- 7) As of December 31, 2017, 2016 and 2015, no receivables from customers are pledged as collaterals by the Bank.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PINJAMAN QARDH

8. FUNDS OF QARDH

a. Berdasarkan jenis dan mata uang:

a. By type and currency:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
Rupiah					Rupiah
Qardh	362.929	46.166	85.768		Qardh
Rahn	142.560	162.754	173.090		Rahn
Dana Talangan Haji	24.695	76.077	121.742		Haji Bailout Fund
Qardh iB-KLM	4.042	6.507	13.876		Qardh iB-KLM
	534.226	291.504	394.476		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>					<u>Related Parties (Note 41)</u>
Rupiah					Rupiah
Qardh	3.959	3.850	4.332		Qardh
Rahn	58	34	21		Rahn
Dana Talangan Haji	-	-	45		Haji Bailout Fund
	4.017	3.884	4.398		
Jumlah	538.243	295.388	398.874		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.142)	(2.269)	(11.339)		Allowance for impairment losses
Neto	524.101	293.119	387.535		Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
Konstruksi		342.367	20.286	18.490	Construction
Jasa usaha		10.244	12.762	22.975	Business services
Sosial/masyarakat		9.268	11.925	29.369	Social/public
Perdagangan		600	743	84	Trading
Industri		450	450	4.085	Manufacturing
Pengangkutan		-	-	10.697	Transportation
Lainnya		171.297	245.338	308.776	Others
	534.226	291.504	394.476		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>					<u>Related Parties (Note 41)</u>
Sosial/masyarakat		3.400	-	3.400	Social/public
Konstruksi		450	-	-	Construction
Industri		-	3.850	932	Manufacturing
Lainnya		167	34	66	Others
	4.017	3.884	4.398		
Jumlah	538.243	295.388	398.874		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.142)	(2.269)	(11.339)		Allowance for impairment losses
Neto	524.101	293.119	387.535		Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

8. FUNDS OF QARDH (continued)

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By period:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
≤ 1 tahun	505.440	208.893	258.599	≤ 1 year
> 1 - ≤ 3 tahun	49	49	20.747	> 1 - ≤ 3 years
> 3 - ≤ 5 tahun	5.487	76.207	104.808	> 3 - ≤ 5 years
> 5 tahun	23.250	6.355	10.322	> 5 years
	534.226	291.504	394.476	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
≤ 1 tahun	3.908	3.884	4.352	≤ 1 year
> 1 - ≤ 3 tahun	-	-	-	> 1 - ≤ 3 years
> 3 - ≤ 5 tahun	109	-	46	> 3 - ≤ 5 years
	4.017	3.884	4.398	
Jumlah	538.243	295.388	398.874	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.142)	(2.269)	(11.339)	Allowance for impairment losses
Neto	524.101	293.119	387.535	Net

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
≤ 1 bulan	59.739	80.254	99.799	≤ 1 month
>1 - ≤ 3 bulan	78.953	104.508	143.718	>1 - ≤ 3 months
>3 - ≤ 12 bulan	391.458	100.144	51.521	>3 - ≤ 12 months
>1 - ≤ 5 tahun	3.079	4.160	90.106	>1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	997	2.438	9.332	> 5 years
	534.226	291.504	394.476	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
≤ 1 bulan	31	3.406	3.410	≤ 1 month
>1 - ≤ 3 bulan	3.404	28	8	>1 - ≤ 3 months
>3 - ≤ 12 bulan	473	450	980	>3 - ≤ 12 months
> 5 tahun	109	-	-	> 5 years
	4.017	3.884	4.398	
Jumlah	538.243	295.388	398.874	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.142)	(2.269)	(11.339)	Allowance for impairment losses
Neto	524.101	293.119	387.535	Net

e. Berdasarkan kolektibilitas:

e. By collectibility:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Lancar	509.742	280.150	366.286	Current
Dalam perhatian khusus	13.772	14.415	20.391	Special mention
Kurang lancar	3.593	463	2.681	Substandard
Diragukan	3.778	161	1.416	Doubtful
Macet	7.358	199	8.100	Loss
	538.243	295.388	398.874	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.142)	(2.269)	(11.339)	Allowance for impairment losses
Neto	524.101	293.119	387.535	Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

8. FUNDS OF QARDH (continued)

f. Berdasarkan keterkaitan:

f. By relationship:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>	534.226	291.504	394.476	<u>Third Parties</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
PT Inti Konten Indonesia	3.850	3.850	4.332	PT Inti Konten Indonesia
Karyawan Kunci	167	34	66	Key Employees
	4.017	3.884	4.398	
Jumlah	538.243	295.388	398.874	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(14.142)	(2.269)	(11.339)	Allowance for impairment losses
Neto	524.101	293.119	387.535	Net

g. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat pinjaman qardh yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPP.

g. Based on the Legal Lending Limit (BMPP) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2017, 2016 and 2015, there are no funds of qardh which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

h. Informasi penting lainnya:

h. Other significant information:

1) Tingkat *ujrah* rata-rata per tahun untuk pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

1) The annual average *ujrah* rate on funds of *qardh* are as follows:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Tingkat <i>ujrah</i> rata-rata per tahun untuk pinjaman <i>qardh</i>	12,40%	16,47%	15,28%	Annual average <i>ujrah</i> rate on funds of <i>qardh</i>

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

2) The movements of allowance for impairment losses on funds of *qardh* are as follows:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Saldo awal tahun	2.269	11.339	18.677	Balance at beginning of the year
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 33)	10.654	1.681	10.834	Provisions during the year (Note 33)
Penerimaan kembali hapus buku	1.527	3.768	524	Recoveries of written-off
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(308)	(14.519)	(18.696)	Write-off during the year
Saldo akhir tahun	14.142	2.269	11.339	Balance at end of the year

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PINJAMAN QARDH (lanjutan)

h. Informasi penting lainnya (lanjutan):

- 2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut (lanjutan):

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman *qardh* yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Jasa Otoritas Keuangan (POJK).

- 3) Pinjaman *qardh* dijamin agunan yang diikat dengan gadai, hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.
- 4) Rasio *Non-Performing Financing (NPF)* bruto dan neto atas jumlah pinjaman *qardh* adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Jumlah pinjaman <i>qardh</i> *)	538.243	295.388	398.874	Total funds of <i>qardh</i> *)
<i>NPF</i> - Bruto	14.729	823	12.197	<i>NPF</i> - Gross
Persentase <i>NPF</i> - Bruto	2,74%	0,28%	3,06%	Percentage of <i>NPF</i> - Gross
<i>NPF</i> - Neto	4.943	474	3.713	<i>NPF</i> - Net
Persentase <i>NPF</i> - Neto	0,92%	0,16%	0,93%	Percentage of <i>NPF</i> - Net

*) Diluar pinjaman *qardh* kepada bank lain

*) Exclude funds of *qardh* to other banks

- 5) Rincian pinjaman *qardh* bermasalah dan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai, berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Pengangkutan Lainnya*)	-	-	6.775	Transportation Others*)
	14.729	823	5.422	
Jumlah Cadangan kerugian penurunan nilai	14.729	823	12.197	Total
	(9.786)	(349)	(8.484)	Allowance for impairment losses
Neto	4.943	474	3.713	Net

*) Lainnya terdiri dari *rahn*, dana talangan haji dan *qardh* IB-KLM

- 5) The details of non-performing fund of *qardh* and total allowance for impairment losses by economic sector are as follows:

*) Others consist of *rahn*, haji bailout fund and *qardh*-IB KLM

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PEMBIAYAAN MUDHARABAH

9. MUDHARABAH FINANCING

a. Berdasarkan jenis dan mata uang:

a. By type and currency:

31 Desember/December 31				
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
Rupiah				Rupiah
Modal kerja	825.788	1.246.140	1.086.613	Working capital
Investasi	6.299	4.071	34.854	Investment
	832.087	1.250.211	1.121.467	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
Rupiah				Rupiah
Modal kerja	19.121	21.661	-	Working capital
Investasi	6.811	13.710	-	Investment
	25.932	35.371	-	
Jumlah	858.019	1.285.582	1.121.467	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.045)	(14.097)	(14.901)	Allowance for impairment losses
Neto	840.974	1.271.485	1.106.566	Net

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

31 Desember/December 31				
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
Jasa usaha	531.644	739.254	517.097	Business service
Pertanian	178.925	287.009	288.072	Agriculture
Sosial/masyarakat	45.307	69.350	185.441	Social/public
Industri	37.061	63.323	78.984	Manufacturing
Perdagangan	24.066	42.114	36.938	Trading
Listrik, gas dan air	3.859	5.038	739	Electricity, gas and water
Pengkangkutan	739	1.389	3.546	Transportation
Konstruksi	434	863	-	Construction
Pertambangan	157	273	5.127	Mining
Lainnya	9.895	41.598	5.523	Others
	832.087	1.250.211	1.121.467	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
Jasa usaha	25.345	35.371	-	Business service
Sosial/masyarakat	344	-	-	Social/public
Perdagangan	198	-	-	Trading
Pertanian	45	-	-	Agriculture
	25.932	35.371	-	
Jumlah	858.019	1.285.582	1.121.467	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.045)	(14.097)	(14.901)	Allowance for impairment losses
Neto	840.974	1.271.485	1.106.566	Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By period:

31 Desember/December 31				
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
≤ 1 tahun	4.713	3.851	6.803	≤ 1 year
> 1 - ≤ 3 tahun	97.914	331.275	314.652	> 1 - ≤ 3 years
> 3 - ≤ 5 tahun	182.316	780.638	731.668	> 3 - ≤ 5 years
> 5 tahun	547.144	134.447	68.344	> 5 years
	832.087	1.250.211	1.121.467	

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

9. MUDHARABAH FINANCING (continued)

c. Berdasarkan jangka waktu (lanjutan):

c. *By period (continued):*

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
> 1 - ≤ 3 tahun	92	3.994	-	> 1 - ≤ 3 years
> 3 - ≤ 5 tahun	4.464	30.401	-	> 3 - ≤ 5 years
> 5 tahun	21.376	976	-	> 5 years
	25.932	35.371	-	
Jumlah	858.019	1.285.582	1.121.467	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.045)	(14.097)	(14.901)	Allowance for impairment losses
Neto	840.974	1.271.485	1.106.566	Net

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. *By remaining period to maturity:*

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
≤ 1 bulan	1.743	1.565	925	≤ 1 month
>1 - ≤ 3 bulan	4.452	4.830	7.399	>1 - ≤ 3 months
>3 - ≤ 12 bulan	73.617	68.408	65.297	>3 - ≤ 12 months
>1 - ≤ 5 tahun	708.090	1.095.757	1.016.493	>1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	44.185	79.651	31.353	> 5 years
	832.087	1.250.211	1.121.467	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
≤ 1 bulan	24	-	-	
>1 - ≤ 3 bulan	87	-	-	
>3 - ≤ 12 bulan	4.251	1.047	-	>3 - ≤ 12 months
>1 - ≤ 5 tahun	21.205	33.348	-	>1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	365	976	-	> 5 years
	25.932	35.371	-	
Jumlah	858.019	1.285.582	1.121.467	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.045)	(14.097)	(14.901)	Allowance for impairment losses
Neto	840.974	1.271.485	1.106.566	Net

e. Berdasarkan kolektibilitas:

e. *By collectibility:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31			
	2017	2016	2015	
Lancar	834.965	1.269.229	1.109.939	Current
Dalam perhatian khusus	12.257	14.874	7.312	Special mention
Kurang lancar	1.863	14	567	Substandard
Diragukan	2.063	1.410	505	Doubtful
Macet	6.871	55	3.144	Loss
	858.019	1.285.582	1.121.467	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(17.045)	(14.097)	(14.901)	Allowance for impairment losses
Neto	840.974	1.271.485	1.106.566	Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

f. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat pembiayaan *mudharabah* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPP.

g. Informasi penting lainnya:

1) Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015
Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk pembiayaan <i>mudharabah</i>	13,61%	12,89%	13,03%

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015
Saldo awal tahun	14.097	14.901	10.352
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 33)	4.397	7.235	5.444
Penerimaan kembali hapus buku	358	420	527
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(1.807)	(8.459)	(1.422)
Saldo akhir tahun	17.045	14.097	14.901

3) Pembiayaan *mudharabah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

4) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015
Jumlah pembiayaan <i>mudharabah</i> *)	757.074	1.166.581	997.537
NPF - Bruto*)	10.770	1.479	4.216
Persentase NPF - Bruto	1,42%	0,13%	0,42%
NPF - Neto*)	2.615	717	735
Persentase NPF - Neto	0,35%	0,06%	0,07%

*) Diluar pembiayaan *mudharabah* kepada bank lain

9. MUDHARABAH FINANCING (continued)

f. Based on the Legal Lending Limit (BMPP) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2017, 2016 and 2015, there are no *mudharabah* financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

g. Other significant information:

1) The annual average profit sharing rate on *mudharabah* are as follows:

2) The movements of allowance for impairment losses on *mudharabah* financing are as follows:

3) *Mudharabah* financing are collateralized by registered mortgage or powers of attorneys to mortgage or sell, *mudharabah* time deposits (Note 25) or by other guarantees generally accepted by the Bank.

4) The ratio of total *Non-Performing Financing* (NPF) gross and net on *mudharabah* financing are as follows:

*) Exclude *mudharabah* financing to other banks

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. PEMBIAYAAN MUDHARABAH (lanjutan)

g. Informasi penting lainnya (lanjutan):

- 4) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *mudharabah* yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- 5) Rincian pembiayaan *mudharabah* bermasalah (kolektibilitas 3, 4 dan 5) dan total cadangan kerugian penurunan nilai, berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Jasa usaha	7.854	387	3.541	Business services
Perdagangan	1.364	-	-	Trading
Sosial/masyarakat	1.341	1.092	213	Social/public
Pertanian	112	-	-	Agriculture
Lainnya	99	-	462	Others*)
Jumlah	10.770	1.479	4.216	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.155)	(762)	(3.481)	Allowance for impairment losses
Neto	2.615	717	735	Net

9. MUDHARABAH FINANCING (continued)

g. Other significant information (continued):

- 4) The ratio of total *Non-Performing Financing* (NPF) gross and net on *mudharabah* financing are as follows: (continued)

Management believes that the allowance for impairment losses on *mudharabah* financing is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulations.

- 5) The details of non-performing *mudharabah* financing (with collectibility 3, 4 and 5) and total allowance for impairment losses by economic sector are as follows:

10. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

a. Berdasarkan jenis dan mata uang:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
Rupiah				Rupiah
Modal kerja	3.620.191	4.159.331	3.995.894	Working capital
Investasi	1.119.579	837.889	1.045.698	Investment
	4.739.770	4.997.220	5.041.592	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
Rupiah				Rupiah
Modal kerja	833.490	378.596	41.371	Working capital
Investasi	3.960	4.014	-	Investment
	837.450	382.610	41.371	
Jumlah	5.577.220	5.379.830	5.082.963	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.222)	(193.940)	(120.617)	Allowance for impairment losses
Neto	5.447.998	5.185.890	4.962.346	Net

10. MUSYARAKAH FINANCING

a. By type and currency:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

10. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi:

b. By economic sector:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
Industri	1.636.671	1.151.294	1.006.706	Manufacturing
Konstruksi	912.633	655.442	454.368	Construction
Perdagangan	884.886	1.284.437	952.027	Trading
Jasa usaha	527.365	1.035.404	1.442.476	Business service
Sosial/masyarakat	226.092	270.607	517.765	Social/public
Pengangkutan	157.272	190.512	273.171	Transportation
Pertanian	153.583	162.603	283.407	Agriculture
Listrik, gas dan air	96.129	77.534	29.807	Electricity, gas and water
Pertambangan	12.130	65.116	76.763	Mining
Lainnya	133.009	104.271	5.102	Others
	4.739.770	4.997.220	5.041.592	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
Pertanian	400.216	300.088	-	Agriculture
Konstruksi	400.000	-	914	Construction
Jasa usaha	21.167	50.822	-	Business service
Pengangkutan	16.067	31.700	39.999	Transportation
Sosial/masyarakat	-	-	458	Social/public
	837.450	382.610	41.371	
Jumlah	5.577.220	5.379.830	5.082.963	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.222)	(193.940)	(120.617)	Allowance for impairment losses
Neto	5.447.998	5.185.890	4.962.346	Net

c. Berdasarkan jangka waktu:

c. By period:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
≤ 1 tahun	2.071.524	2.211.334	1.825.277	≤ 1 year
> 1 - ≤ 3 tahun	723.733	1.181.845	1.398.996	>1 - ≤ 3 years
> 3 - ≤ 5 tahun	669.894	1.098.590	1.280.805	>3 - ≤ 5 years
> 5 tahun	1.274.619	505.451	536.514	> 5 years
	4.739.770	4.997.220	5.041.592	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
≤ 1 tahun	58	328.740	434	≤ 1 year
> 1 - ≤ 3 tahun	803.293	36.521	40.479	>1 - ≤ 3 years
> 3 - 5 tahun	28.137	13.335	458	>3 - 5 years
> 5 tahun	5.962	4.014	-	>5 years
	837.450	382.610	41.371	
Jumlah	5.577.220	5.379.830	5.082.963	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.222)	(193.940)	(120.617)	Allowance for impairment losses
Neto	5.447.998	5.185.890	4.962.346	Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

10. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

d. By remaining period to maturity:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>					<u>Third Parties</u>
≤ 1 bulan	664.699	442.075	362.066		≤ 1 month
>1 - ≤ 3 bulan	347.130	853.356	347.048		>1 - ≤ 3 months
>3 - ≤ 12 bulan	1.449.922	1.363.460	1.409.792		>3 - ≤ 12 months
> 1 - ≤ 5 tahun	1.948.667	1.951.988	2.531.171		>1 - ≤ 5 years
> 5 tahun	329.352	386.341	391.515		> 5 years
	4.739.770	4.997.220	5.041.592		
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>					<u>Related Parties (Note 41)</u>
≤ 1 bulan	-	-	458		≤ 1 month
>1 - ≤ 3 bulan	400.000	328.653	770		>1 - ≤ 3 months
>3 - ≤ 12 bulan	416.525	87	144		>3 - ≤ 12 months
> 1 - 5 tahun	19.420	49.856	39.999		>1 - 5 years
> 5 tahun	1.505	4.014	-		>5 years
	837.450	382.610	41.371		
Jumlah	5.577.220	5.379.830	5.082.963		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.222)	(193.940)	(120.617)		Allowance for impairment losses
Neto	5.447.998	5.185.890	4.962.346		Net

e. Berdasarkan kolektibilitas:

e. By collectibility:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
Lancar	4.805.119	4.507.147	3.799.658		Current
Dalam perhatian khusus	404.446	604.643	988.913		Special mention
Kurang lancar	140.292	92.258	86.178		Substandard
Diragukan	13.424	12.056	14.117		Doubtful
Macet	213.939	163.726	194.097		Loss
Jumlah	5.577.220	5.379.830	5.082.963		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.222)	(193.940)	(120.617)		Allowance for impairment losses
Neto	5.447.998	5.185.890	4.962.346		Net

f. Berdasarkan keterkaitan:

f. By relationship:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>		4.739.770	4.997.220	5.041.592	<u>Third Parties</u>
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>					<u>Related Parties (Note 41)</u>
PT Inti Konten Indonesia	400.000	-	1.372		PT Inti Konten Indonesia
PT Pegadaian (Persero)	400.000	300.000	-		PT Pegadaian (Persero)
Perum DAMRI	16.067	31.700	39.999		Perum DAMRI
Koperasi Karyawan BRISyariah	14.251	5.161	-		Koperasi Karyawan BRISyariah
Koperasi Swakarya BRI	6.624	45.366	-		Koperasi Swakarya BRI
Karyawan Kunci	508	383	-		Key Employees
	837.450	382.610	41.371		
Jumlah	5.577.220	5.379.830	5.082.963		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(129.222)	(193.940)	(120.617)		Allowance for impairment losses
Neto	5.447.998	5.185.890	4.962.346		Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

g. Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kepada Bank Indonesia pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat pembiayaan *musyarakah* yang melanggar atau melampaui ketentuan BMPP.

h. Informasi penting lainnya:

1) Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31			
	2017	2016	2015	
Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk pembiayaan <i>musyarakah</i>	9,75%	12,15%	12,70%	Annual average profit sharing rate on <i>musyarakah</i>

2) Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31			
	2017	2016	2015	
Saldo awal tahun	193.940	120.617	84.612	Balance at beginning of the year
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 33)	35.388	118.951	74.672	Provisions during the year (Note 33)
Penerimaan kembali hapus buku	12.733	3.602	4.850	Recoveries of written-off
Penghapusan bukuan selama tahun berjalan	(112.839)	(49.230)	(43.517)	Write-off during the year
Saldo akhir tahun	129.222	193.940	120.617	Balance at end of the year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan *musyarakah* yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3) Pembiayaan *musyarakah* dijamin agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa memasang hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, deposito *mudharabah* (Catatan 25) atau jaminan lain yang umumnya dapat diterima oleh Bank.

10. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

g. Based on the Legal Lending Limit (BMPP) report submitted to Bank Indonesia as of December 31, 2017, 2016 and 2015, there are no *musyarakah* financing which violated or exceeded the Legal Lending Limit Regulation.

h. Other significant information:

1) The annual average profit sharing rate on *musyarakah* are as follows:

2) The movements of allowance for impairment losses on *musyarakah* financing are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on *musyarakah* financing is adequate and in compliance with Authorized Financial Services regulations.

3) *Musyarakah* financing are collateralized by registered mortgages or powers of attorneys to mortgage or sell, *mudharabah* time deposits (Note 25) or by other collaterals generally acceptable by the Bank.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (lanjutan)

h. Informasi penting lainnya (lanjutan):

- 4) Rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto atas jumlah pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Jumlah pembiayaan <i>musyarakah</i>	5.577.220	5.379.830	5.082.963	Total <i>musyarakah financing</i>
NPF - Bruto	367.655	268.040	294.392	NPF - Gross
Persentase NPF - Bruto	6,59%	4,98%	5,79%	Percentage of NPF - Gross
NPF - Neto	302.083	142.698	254.043	NPF - Net
Persentase NPF - Neto	5,42%	2,65%	5,00%	Percentage of NPF - Net

- 5) Rincian pembiayaan *musyarakah* bermasalah (kolektibilitas 3, 4 dan 5) dan total cadangan kerugian penurunan nilai, berdasarkan sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Industri	136.361	10.322	76.878	Manufacturing
Perdagangan	92.167	93.736	84.871	Trading
Jasa usaha	21.849	105.509	5.881	Business services
Konstruksi	8.958	8.343	991	Construction
Pertanian	7.954	6.639	7.376	Agriculture
Pengangkutan	1.798	16.009	12.056	Transportation
Sosial/masyarakat	192	1.658	44.934	Social/public
Pertambangan	-	2.377	2.377	Mining
Lainnya*)	98.376	23.447	59.028	Others*)
Jumlah	367.655	268.040	294.392	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(65.572)	(125.342)	(40.349)	Allowance for impairment losses
Neto	302.083	142.698	254.043	Net

10. MUSYARAKAH FINANCING (continued)

h. Other significant information (continued):

- 4) The ratio of total *Non-Performing Financing* (NPF) gross and net on *musyarakah financing* are as follows:

- 5) The details of *non-performing musyarakah financing* (with collectibility 3, 4 and 5) and total allowance for impairment losses by economic sector are as follows:

11. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Akun ini merupakan objek sewa dari transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* dengan rincian sebagai berikut:

11. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH

This account represent lease object transactions from *ijarah muntahiyah bittamlik* with details are as follows:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Pihak Ketiga	1.270.703	291.105	4.279	Third Parties

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH
(lanjutan)

11. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH (continued)

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
Perum DAMRI	15.036	26.731	106.317	Perum DAMRI
PT Perkebunan Nusantara VII	3.611	38.484	103.814	PT Perkebunan Nusantara VII
	18.647	65.215	210.131	
Jumlah	1.289.350	356.320	214.410	Total
Akumulasi Penyusutan	(142.430)	(70.139)	(168.151)	Accumulated Depreciation
Nilai buku	1.146.920	286.181	46.259	Net Book value

12. ASET TETAP

12. PREMISES AND EQUIPMENT

Aset tetap terdiri dari:

Premises and equipment consist of:

31 Desember 2017/December 31, 2017					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<u>Biaya perolehan</u>				<u>Acquisition cost</u>	
Kepemilikan langsung:				Direct Ownership:	
Hak atas tanah	66.674	36.997	-	103.671	Landrights
Bangunan kantor	43.321	9.933	-	53.254	Office buildings
Kendaraan bermotor	10.662	150	611	10.201	Vehicles
Komputer dan mesin	257.363	13.994	752	270.605	Computer and machines
Inventaris lainnya	84.696	3.863	162	88.397	Other equipments
	462.716	64.937	1.525	526.128	
<u>Akumulasi penyusutan</u>				<u>Accumulated depreciation</u>	
Kepemilikan langsung:				Direct Ownership:	
Bangunan kantor	14.116	2.402	-	16.518	Office buildings
Kendaraan bermotor	9.191	1.155	611	9.735	Vehicles
Komputer dan mesin	227.157	18.130	752	244.535	Computer and machines
Inventaris lainnya	71.436	6.127	158	77.405	Other equipments
	321.900	27.814	1.521	348.193	
Nilai buku	140.816			177.935	Net book value
31 Desember 2016/December 31, 2016					
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance		
<u>Biaya perolehan</u>				<u>Acquisition cost</u>	
Kepemilikan langsung:				Direct Ownership:	
Hak atas tanah	66.674	-	-	66.674	Landrights
Bangunan kantor	42.496	825	-	43.321	Office buildings
Kendaraan bermotor	11.347	-	685	10.662	Vehicles
Komputer dan mesin	241.593	16.126	356	257.363	Computer and machines
Inventaris lainnya	81.409	4.242	955	84.696	Other equipments
	443.519	21.193	1.996	462.716	
<u>Akumulasi penyusutan</u>				<u>Accumulated depreciation</u>	
Kepemilikan langsung:				Direct Ownership:	
Bangunan kantor	11.871	2.245	-	14.116	Office buildings
Kendaraan bermotor	8.725	1.151	685	9.191	Vehicles
Komputer dan mesin	202.638	24.875	356	227.157	Computer and machines
Inventaris lainnya	64.097	8.294	955	71.436	Other equipments
	287.331	36.565	1.996	321.900	
Nilai buku	156.188			140.816	Net book value

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

31 Desember 2015/December 31, 2015				
Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan				Acquisition cost
Kepemilikan langsung:				Direct Ownership:
Hak atas tanah	34.823	31.851	-	66.674
Bangunan kantor	33.126	9.370	-	42.496
Kendaraan bermotor	11.347	-	-	11.347
Komputer dan mesin	239.291	3.301	999	241.593
Inventaris lainnya	76.852	5.248	691	81.409
	395.439	49.770	1.690	443.519
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Kepemilikan langsung:				Direct Ownership:
Bangunan kantor	9.818	2.053	-	11.871
Kendaraan bermotor	7.573	1.152	-	8.725
Komputer dan mesin	171.465	32.172	999	202.638
Inventaris lainnya	55.196	9.581	680	64.097
	244.052	44.958	1.679	287.331
Nilai buku	151.387			156.188
				Net book value

Jumlah penyusutan aset tetap yang dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah masing-masing sebesar Rp27.814, Rp36.565 dan Rp44.958 untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (Catatan 35).

Depreciation charged to current operations as reported in the statements of profit or loss and other comprehensive income amounted to Rp27,814, Rp36,565 and Rp44,958 for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively (Note 35).

Bank telah mengasuransikan aset tetap (tidak termasuk hak atas tanah) untuk menutup kemungkinan kerugian terhadap risiko kebakaran, pencurian dan risiko lainnya pada pihak berleasi dengan nilai pertanggungan sebesar Rp385.147, Rp346.917 dan Rp329.408, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

The Bank has insured the premises and equipment (except landrights) to cover for losses against fire, theft and other risks to related parties with total insurance coverage amounted to Rp385,147, Rp346,917 and Rp329,408 as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively.

Rincian penjualan aset tetap Bank adalah sebagai berikut:

The detail of the sale of Bank's premises and equipment are as follows:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Biaya perolehan	1.521	1.996	1.679	Acquisition cost
Akumulasi penyusutan	(1.521)	(1.996)	(1.679)	Accumulated depreciation
Nilai buku neto	-	-	-	Net book value
Harga jual	280	335	68	Selling price
Laba penjualan aset tetap	280	335	68	Gain on sales of premises and equipments

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 jumlah tercatat bruto dari setiap aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing sebesar Rp301.315, Rp222.933 dan Rp182.300 (tidak diaudit).

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the gross amount of premises and equipment which have been fully depreciated and are still in used amounted to Rp301,315, Rp222,933 and Rp182,300, respectively (unaudited).

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. ASET TETAP (lanjutan)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan bangunan yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Tanah	53.478	39.952	36.177	Landrights
Bangunan	22.005	19.053	17.620	Buildings
Jumlah	75.483	59.005	53.797	Total

Pada tahun 2017, 2016 dan 2015 terdapat aset tetap yang dihapusbukukan dengan harga perolehan masing-masing sebesar RpNihil dan RpNihil, dan Rp11, dan akumulasi penyusutannya masing-masing sebesar RpNihil, RpNihil dan RpNihil.

Selain tanah dan bangunan tidak terdapat perbedaan signifikan antara nilai wajar aset dan nilai tercatatnya.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset tetap dan jumlah nilai pertanggungan asuransi cukup untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul atas aset tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

12. PREMISES AND EQUIPMENT (continued)

Taxable value of landrights and buildings owned by Bank as of December 31, 2017, 2016 and 2015, are as follows (unaudited):

In 2017, 2016 and 2015, there are premises and equipment office equipment written-off with acquisition costs amounted to RpNil, RpNil, and Rp11, respectively and accumulated depreciation amounted to RpNil, RpNil and RpNil, respectively.

Other than land and building there are no significant difference between the fair value of the asset and its carrying value.

Management believes that there is no impairment of premises and equipment, and the insurance coverage to cover the possibility of losses on premises and equipment is adequate as of December 31, 2017, 2016 and 2015.

13. ASET LAIN-LAIN

Aset lain-lain terdiri dari:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
Agunan yang diambil alih	633.550	312.698	54.112	Foreclosed collaterals
Pendapatan yang masih akan diterima dari piutang, pembiayaan, ijarah dan surat berharga	193.060	172.141	139.622	Income receivables from financing, receivables, ijarah and marketable securities
Biaya dibayar di muka	184.826	171.048	149.209	Prepaid expense
Tagihan ATM	52.974	51.397	24.129	ATM receivables
Persediaan alat tulis kantor dan materai	7.156	7.393	8.720	Office supplies and stamps
Tagihan <i>Payment Point Online Bank</i> (PPOB)	-	3.334	3.369	Payment Point Online Bank (PPOB) receivables
Lain-lain	21.486	21.483	23.550	Others
	1.093.052	739.494	402.711	
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Party (Note 41)</u>
Tagihan ATM	7.370	7.020	4.311	ATM receivables
Jumlah	1.100.422	746.514	407.022	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(317.687)	(87.001)	(11.910)	Allowance for impairment losses
Neto	782.735	659.513	395.112	Net

Lain-lain terdiri dari tagihan kepada pihak ketiga, aset *istishna* dalam penyelesaian, aset tetap yang belum digunakan dan lainnya.

Other assets consist of:

Others consist of other receivables to third parties, istishna assets in progress, unused fixed assets and others.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Rincian agunan yang diambil alih (AYDA) yang dimiliki Bank pada tanggal - tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, adalah sebagai berikut:

13. OTHER ASSETS (continued)

The details of foreclosed collaterals (AYDA) held by the Bank as of December 31, 2017, 2016 and 2015, are as follows:

31 Desember/December 31 2017

No.	Debitur/ Debtors	Jenis agunan yang diambil alih/ Type of foreclosed collaterals	Nilai tercatat awal/ Beginning carrying value	Penambahan (penjualan) tahun berjalan/ Addition (sales) during the year	Nilai tercatat akhir/ Ending carrying value
1.	PT Nichiwa Kemala Sakti	Tanah dan Bangunan/Land and Properties, Mesin/Machines	90.360	-	90.386
2.	PT Nani Wahyuni Industry	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	61.187	-	61.187
3.	PT Alpindo Mitra Baja	Tanah dan Bangunan/Land and Properties, Mesin/Machines	96.228	-	96.228
4.	PT Pandu Sarana Global	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	18.295	(2.321)	15.974
5.	PT Shuket Engineering	Tanah dan Bangunan/Land and Properties, Mesin/Machines	20.221	-	20.221
6.	PT Providensia	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	11.099	-	11.099
7.	PT Bayu Aji Mandiri	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	6.207	-	6.207
8.	PT Mitra Sukses Banua	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	5.101	-	5.101
9.	PT Multintes Mandiri	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	4.000	(4.000)	-
10.	PT Harindo Putra Perkasa	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	4.011	4.011
11.	CV Dexalindo	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	3.000	3.000
12.	CV Anggut Cellular	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	2.150	2.150
13.	PT Prathonylia Nusa Prima	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	2.850	2.850
14.	I Putu Eka Maryasa SE	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	904	904
15.	PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	106.424	106.424
16.	PT Hardys Retailindo	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	158.862	158.862
17.	Edwin Aditya Nugraha	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	962	962
18.	Mus Mulyadi	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	905	905
19.	Dadan Sunandar	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	690	690
20.	Abdurahman Lapay	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	860	860
21.	PT Garda Cipta Pratama	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	1.560	1.560
22.	Erni Suratinoyo	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	672	672
23.	Wildae Desyanthy Binti	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	789	789
24.	Anasrullah	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	939	939
25.	Serba Jadr Eka Jaya	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	2.694	2.694
26.	Kwee Tek Lie	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	1.332	1.332
27.	CV. Anggun Lestari	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	580	580
28.	Teguh Wahyudi	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	1.649	1.649
29.	H. Syamsuddin	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	1.645	1.645
30.	Irwan Muhammad Asnur	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	2.210	2.210
31.	Wahyu Prasasti	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	1.560	1.560
32.	Kusnadi Koreji	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	3.039	3.039
33.	PT. Nimda Globalindo Jaya Lestari	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	12.462	12.462
34.	Noeri Sukses Mobilindo	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	10.250	10.250
35.	TB Ahmad Badruddin	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	800	800
36.	Ahmad Zakaria	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	953	953
37.	CV Canaya	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	1.395	1.395
38.	Mezra Mahyuddin Koto	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	1.000	1.000
Total			312.698	320.852	633.550
Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses			(75.632)	(234.041)	(309.673)
Neto/Net			237.066	86.811	323.877

31 Desember/December 31 2016

No.	Debitur/ Debtors	Jenis agunan yang diambil alih/ Type of foreclosed collaterals	Nilai tercatat awal/ Beginning carrying value	Penambahan (penjualan) tahun berjalan/ Addition (sales) during the year	Nilai tercatat akhir/ Ending carrying value
1.	Joseph Biantoro	Tanah dan Bangunan/Land and Properties Mesin/Machines	11.936 12.825	(11.936) (12.825)	- -
		Alat berat/Heavy equipment	199	(199)	-
2.	PT Pandu Sarana Global	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	22.945	(4.650)	18.295
3.	PT Bayu Aji Mandiri	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	6.207	-	6.207
4.	PT Alpindo Mitra Baja	Pabrik/Manufacture	-	96.227	96.227
5.	PT Nichiwa Kemala Sakti	Tanah dan Bangunan/Land and Properties Mesin/Machines	- -	81.967 8.393	81.967 8.393
6.	PT Nani Wahyuni Industry	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	61.187	61.187
7.	PT Shuket Engineering	Pabrik/Manufacture	-	20.221	20.221

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Rincian agunan yang diambil alih (AYDA) yang dimiliki Bank pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut (lanjutan):

13. OTHER ASSETS (continued)

The details of foreclosed collaterals (AYDA) held by the Bank as of December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2016

No.	Debitur/ Debtors	Jenis agunan yang diambil alih/ Type of foreclosed collaterals	Nilai tercatat awal/ Beginning carrying value	Penambahan (penjualan) tahun berjalan/ Addition (sales) during the year	Nilai tercatat akhir/ Ending carrying value
8.	PT Providensia	Tanah /Land	-	11.099	11.099
9.	PT Mitra Sukses Banua	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	-	5.102	5.102
10.	PT Multintes Mandiri	Tanah /Land	-	4.000	4.000
Total			54.112	258.586	312.698
Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses			(541)	-	(75.632)
Neto/Net			53.571	258.586	237.066

31 Desember/December 31, 2015

No.	Debitur/ Debtors	Jenis agunan yang diambil alih/ Type of foreclosed collaterals	Nilai tercatat awal/ Beginning carrying value	Penambahan (penjualan) tahun berjalan/ Addition (sales) during the year	Nilai tercatat akhir/ Ending carrying value
1.	Joseph Biantoro	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	11.936	-	11.936
		Mesin/Machines	12.825	-	12.825
		Alat berat/Heavy equipment	199	-	199
2.	PT Pandu Sarana Global	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	22.945	-	22.945
3.	PT Bayu Aji Mandiri	Tanah dan Bangunan/Land and Properties	6.207	-	6.207
Total			54.112	-	54.112
Cadangan kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses			(541)	-	(541)
Neto/Net			53.571	-	53.571

Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan cadangan penyisihan atas tagihan PPOB, agunan yang diambil alih (AYDA) dan tagihan lainnya pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai aset non-produktif adalah sebagai berikut:

Allowance for impairment losses consists of allowance for PPOB receivables, foreclosed collaterals and other receivables as of December 31, 2017, 2016 and 2015. The movements of allowance for impairment losses on non-earning assets are as follows:

31 Desember/December 31

	2017	2016	2015	
Saldo awal tahun	87.001	11.910	5.104	Balance at beginning of the year
Pembentukan selama tahun berjalan (Catatan 33)	234.020	75.091	6.806	Provision during the year (Note 33)
Penghapusbukuan selama tahun berjalan	(3.334)	-	-	Write-off during the year
Saldo akhir tahun	317.687	87.001	11.910	Balance at end of the year

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset lain-lain yang dibentuk telah memadai.

Management believes that allowance for impairment losses on other assets is adequate.

The original financial statements included herein are in the Indonesian language.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. LIABILITAS SEGERA

Liabilitas segera kepada pihak ketiga terdiri dari:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Titipan ATM	65.917	57.785	37.512	Remittance on ATM
Titipan lainnya	19.965	23.802	8.636	Other remittances
Titipan tagihan pembayaran	558	4.756	1.560	Remittance of bills payment
Titipan uang muka <i>istishna</i>	312	568	529	Remittance of <i>istishna</i> advanced payment
Jumlah	86.752	86.911	48.237	Total

Titipan lainnya merupakan titipan biaya administrasi kliring, titipan pembayaran pembiayaan karyawan, titipan pembiayaan biaya notaris, titipan pembayaran asuransi jiwa, titipan setoran penerimaan kas negara dan lain-lain.

14. OBLIGATIONS DUE IMMEDIATELY

Obligations due immediately to third parties consist of:

Other remittances are remittances from clearance administration fees, remittance of payment from employee financing, financing remittance from notarial fee, remittance from life insurance payment, remittance from state cash income and others.

15. BAGI HASIL YANG BELUM DIBAGIKAN

Akun ini merupakan bagi hasil yang belum dibagikan oleh Bank kepada nasabah (*shahibul maal*) atas bagian keuntungan hasil usaha Bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*.

15. UNDISTRIBUTED REVENUE SHARING

This account represents the undistributed share of the customers (*shahibul maal*) on income generated by the Bank from managing *mudharabah* funds.

16. GIRO WADIAH

Giro wadiah terdiri dari:

	31 Desember/ December 31, 2017		31 Desember/ December 31, 2016		31 Desember/ December 31, 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Pihak Ketiga							Third Parties
Rupiah		1.628.392		1.089.280		899.533	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	4.698.990	63.753	1.543.663	20.797	1.680.455	23.165	United States Dollar
Riyal Arab Saudi	16.895.592	61.123					
		1.753.268		1.110.077		922.698	
Pihak Berelasi (Catatan 41)							Related Parties (Note 41)
Rupiah		16.076		19.483		16.133	Rupiah
Jumlah		1.769.344		1.129.560		938.831	Total

Giro wadiah merupakan giro wadiah *yad-dhamanah* yaitu titipan dana pihak ketiga yang dapat diberikan bonus berdasarkan kebijakan Bank.

Pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, tidak terdapat giro wadiah yang di blokir dan dijadikan jaminan.

Wadiah demand deposits consist of:

Wadiah demand deposits represent wadiah *yad-dhamanah* in which the third party funds are entitled to receive bonuses in accordance with the Bank's policy.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, there are no wadiah demand deposits that have been blocked or pledged as collaterals.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk SIMA adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31		
	2017	2016	2015
Tingkat bagi hasil rata-rata per tahun untuk SIMA	4,75 %	5,09%	6,34%

18. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Annual average profit sharing rate of SIMA are as follows:

Annual average profit sharing rate for SIMA

19. PINJAMAN YANG DITERIMA

Pinjaman dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (pihak berelasi) (Catatan 41) merupakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh Bank sebesar Rp100.000 pada tanggal 14 Desember 2012 untuk modal kerja pembiayaan kepemilikan rumah (KPR). Pembiayaan tersebut berjangka waktu 5 (lima) tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2017 dan porsi *nisbah* yang disepakati adalah masing-masing sebesar 63,46% untuk PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan 36,54% untuk Bank. Jaminan atas fasilitas pembiayaan *mudharabah* ini adalah piutang KPR.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, Bank telah memenuhi ketentuan yang ada dalam perjanjian pinjaman yang diterima.

19. FUND BORROWING

Borrowing from PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) (a related party) (Note 41) represents *mudharabah* financing facility obtained by Bank which amounting to Rp100,000 and dated on December 14, 2012 that used for mortgage financing. The financing facility is for 5 (five) years period and matured on December 14, 2017 and the agreed *nisbah* portion for PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) and Bank are 63.46% and 36.54%, respectively. The guarantees for the *mudharabah* financing are the housing receivables (KPR).

As of December 31, 2016 and 2015, the Bank has complied with the existing terms of the fund borrowing agreements.

20. UTANG PAJAK

a. Utang pajak:

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
Pajak penghasilan			
Pasal 4 (2)	18.822	17.164	18.165
Pasal 21	7.996	9.969	1.031
Pasal 22	51	116	19
Pasal 23	342	548	1.534
Pasal 25	9.572	4.785	5.307
Pasal 29	655	13.081	28.431
PPN WAPU	2.953	3.950	1.929
Jumlah	40.391	49.613	56.416

Income taxes
Article 4 (2)
Article 21
Article 22
Article 23
Article 25
Article 29
WAPU - value added tax
Total

b. Beban pajak:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
Years ended December 31

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31		
	2017	2016	2015
Beban pajak kini	130.752	87.416	68.092
Penyesuaian pajak penghasilan badan yang berasal dari tahun sebelumnya (Catatan 20e)	5.090	4.948	-
Pajak tangguhan	(85.976)	(23.964)	(21.660)
Jumlah	49.866	68.400	46.432

Current tax expense
Adjustment in respect of corporate income tax of the previous year (Note 20e)
Deferred tax benefit

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG PAJAK (lanjutan)

b. Beban pajak (lanjutan):

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31		
	2017	2016	2015
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	150.957	238.609	169.069
Beda Temporer:			
Penyisihan kerugian aset non-produktif	222.672	75.093	6.806
Cadangan bonus	(6.633)	11.836	32.500
Penyisihan pembalikan estimasi imbalan kerja (Pembalikan) penyisihan (keuntungan) kerugian pada piutang <i>murabahah</i>	(51.289)	3.600	14.225
Cadangan litigasi	178.588	2.744	27.578
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.528	2.099	4.129
Penyisihan (pembalikan) kerugian aset produktif diluar piutang, pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	(1.304)	840	558
	344	(348)	844
	343.906	95.864	86.640
Beda Permanen:			
Pembinaan jasmani dan rohani	1.458	1.838	2.291
Representasi dan sumbangan	43	49	899
Pemeliharaan rumah dinas	3.113	40	51
Pendapatan sewa	(462)	-	-
Biaya lain-lain	23.995	13.273	13.418
	28.147	15.200	16.659
Taksiran penghasilan kena pajak	523.010	349.673	272.368
Beban pajak kini	130.752	87.416	68.092
Pembayaran pajak penghasilan selama tahun berjalan	(130.097)	(74.337)	(39.661)
Utang pajak - penghasilan pasal 29	655	13.081	28.431

20. TAXES PAYABLE (continued)

b. Tax expense (continued):

Reconcilliation between income before income tax as stated in the statements of profit or loss and other comprehensive income with taxable income are as follows:

Income before income tax expense based on statements of profit or loss and other comprehensive income

Temporary Differences:

Provision for impairment losses on non-earning assets
 Provision of bonus
 Provision of estimated employee benefits
 (Reversal) Provision of impairment (gain) losses on *murabahah* receivables
 Provision of legal case
 Unrealized loss on marketable securities that measured at fair value through profit or loss
 Provision (reversal) of impairment losses on earning assets other than receivables, funds of *qardh* and financing

Permanent Differences:

Development of physical and spiritual
 Representation and donation
 Housing maintenance for employee
 Income from leases
 Other expenses

Estimated taxable income

Current tax expense

Income tax paid during the year

Income tax payable - article 29

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG PAJAK (lanjutan)

b. Beban pajak (lanjutan):

Rekonsiliasi atas beban pajak penghasilan dengan perkalian laba sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31			
	2017	2016	2015	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	150.957	238.609	169.069	Income before income tax expense based on statement of profit or loss and other comprehensive income
Beban pajak dengan tarif pajak 25%	37.739	59.652	42.267	Tax expense with a tax rate of 25%
Penyesuaian pajak penghasilan badan yang berasal dari tahun sebelumnya (Catatan 20e)	5.090	4.948	-	Adjustment in respect of corporate income tax of the previous year (Note 20e)
Pengaruh pajak atas beda permanen	7.037	3.800	4.165	Effect of tax on permanent differences
Beban pajak	49.866	68.400	46.432	Tax expense

20. TAXES PAYABLE (continued)

b. Tax expense (continued):

The reconciliation of income tax expense by multiplying income before income tax to the applicable tax rate are as follows:

c. Manfaat pajak penghasilan - tanggungan:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31			
	2017	2016	2015	
Penyisihan kerugian aset non-produktif	55.667	18.773	1.701	Provision for impairment losses on non-earning assets
Cadangan bonus	(1.658)	2.959	8.125	Provision of bonus
Penyisihan estimasi imbalan kerja	(12.822)	900	3.556	Provision of estimated employee benefits
Penyisihan kerugian piutang <i>murabahah</i>	44.646	686	6.895	Provision of impairment losses on <i>murabahah</i> receivables
Cadangan litigasi	382	525	1.033	Provision of legal case
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	(326)	210	139	Unrealized losses on marketable securities that measured at fair value through profit or loss
Penyisihan (pembalikan) kerugian aset produktif diluar piutang pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	87	(87)	211	Provision (reversal) of impairment losses on earning assets other than receivables, funds of <i>qardh</i> and financing
Jumlah manfaat pajak penghasilan - tanggungan	85.976	23.966	21.660	Total Income tax benefit - deferred

c. Income tax benefit - deferred:

d. Aset pajak tanggungan:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Penyisihan estimasi imbalan kerja	11.933	24.755	23.855	Provision of estimated employee benefits
Penyisihan kerugian aset non-produktif	77.418	21.751	2.978	Provision for impairment losses on non-earning assets
Cadangan bonus	9.426	11.084	8.125	Provision of bonus
Cadangan litigasi	1.940	1.558	1.033	Provision of legal case
Kerugian yang belum direalisasi atas surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	23	349	139	Unrealized losses on marketable securities that measured at fair value through profit or loss

d. Deferred tax assets:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG PAJAK (lanjutan)

d. Aset pajak tangguhan (lanjutan):

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
Penyisihan kerugian aset produktif diluar piutang, pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	310	223	310
Pengukuran kembali program imbalan kerja	(1.152)	(3.907)	(3.907)
Penyisihan (pembalikan) kerugian piutang <i>murabahah</i>	40.985	(3.661)	(4.347)
Jumlah aset pajak tangguhan	140.883	52.152	28.186

e. Pemeriksaan pajak

Pemeriksaan tahun pajak 2008

Pada tanggal 15 November 2013, Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) No. 00005/506/8/093/13 yang menetapkan pajak penghasilan nihil untuk tahun pajak 2008, namun terdapat perbedaan atas perhitungan penghasilan kena pajak, dimana berdasarkan Bank, rugi yang dapat dikompensasi untuk tahun selanjutnya sebesar Rp31.851, sedangkan menurut SKP sebesar Rp238.

Pada tanggal 2 Desember 2013, Bank mengajukan permohonan keberatan atas SKP tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tanggal 26 November 2014, berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-2387/WP.J19/2014, permohonan tersebut ditolak, kemudian pada tanggal 18 Februari 2015, Bank mengajukan permohonan banding kepada Badan Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 8 Juni 2017 Bank telah menerima keputusan Pengadilan Pajak atas pengajuan banding SKP No. 00005/506/8/093/13 yang menetapkan pajak penghasilan nihil untuk tahun pajak 2008, dengan nomor putusan pengadilan pajak No. 83543/PP/M.XVIII/15/2017 tanggal 9 Mei 2017, Dengan hasil putusan mempertahankan koreksi Terbanding (DJP) dan menolak banding yang diajukan pemohon banding (PT. Bank BRISyariah). Bank menerima putusan pengadilan pajak.

20. TAXES PAYABLE (continued)

d. *Deferred tax assets (continued):*

Provision for impairment losses on earning assets other than receivables, funds of qardh and financing

Remeasurement of defined benefit program

Provision of impairment losses on murabahah receivables

Total of deferred tax assets

e. *Tax examination*

Assessment for fiscal year 2008

On November 15, 2013, General Directorate of Tax issued Assessment Letter No. 00005/506/8/093/13 affirming zero income tax for 2008, however there was a difference in calculating taxable income, where according to the Bank, compensated loss for the following year is amounting to Rp31,851, while according to the SKP is Rp238.

On December 2, 2013, the Bank filled an objection of those letter to General Directorate of tax.

On November 26, 2014, based on Decision Letter of General Directorate of Tax No. KEP-2387/WP.J19/2014, the request was rejected. On February 18, 2015, the Bank filled an appeal to the Tax Court Board.

On June 8, 2017, the Bank has received a tax court ruling on appeal No. 00005/506/8/093/13 on setting a zero income tax for the fiscal year 2008. With Tax Court's verdict No. 83543/PP/M.XVIII /15/2017, dated May 9, 2017, the court issued a decision to maintain the correction and to reject the appeal submitted by the applicant (PT Bank BRISyariah). The Bank accepts the tax court ruling.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG PAJAK (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2012

Pada tanggal 23 Maret 2017 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai berikut:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 21 No. 00002/201/12/093/17 sebesar Rp240
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 23 No. 00002/203/12/093/17 sebesar Rp160
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 29 No. 00002/206/12/093/17 sebesar Rp6.885
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 4 (2) No. 00002/240/12/093/17 sebesar Rp55
- 5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN No. 00003/207/12/093/17 sebesar Rp779
- 6) Surat Tagihan Pajak No. 00013/107/12/093/17 sebesar Rp83

Atas seluruh SKP yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, per 29 Desember 2017 Bank telah membayar sebesar Rp8.151 atas kurang bayar dan penalti.

Pemeriksaan tahun pajak 2013

Pada tanggal 28 November 2017 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai berikut:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 21 No. 00012/201/13/093/17 sebesar Rp97
- 2) Surat Ketetapan Pajak Nihil Pasal 23 No. 00064/503/13/093/17
- 3) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 29 No. 00012/206/13/093/17 sebesar Rp647
- 4) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pasal 4 (2) No. 00023/240/13/093/17 sebesar Rp551
- 5) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN No. 00115/207/13/093/17 sebesar Rp260
- 6) Surat Tagihan Pajak No. 00104/107/13/093/17 sebesar Rp35

Atas seluruh SKP yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, per 29 Desember 2017 Bank telah membayar jumlah keseluruhan sebesar Rp1.592 atas kurang bayar dan penalti.

20. TAXES PAYABLE (continued)

e. Tax examination (continued)

Assessment for fiscal year 2012

On March 23, 2017, the Directorate General of Taxes issued the following Tax Assessment Letter:

- 1) Tax Underpayment Assessment Letter Art 21 No. 00002/201/12/093/17 amounting Rp240
- 2) Tax Underpayment Assessment Letter Art 23 No. 00002/203/12/093/17 amounting Rp160
- 3) Tax Underpayment Assessment Letter Art 29 No. 00002/206/12/093/17 amounting Rp6.885
- 4) Tax Underpayment Assessment Letter Art 4 (2) No. 00002/240/12/093/17 amounting Rp55
- 5) Tax Underpayment Assessment Letter VAT No. 00003/207/12/093/17 amounting Rp779
- 6) Tax Collection Letter No. 00013/107/12/093/17 amounting Rp83

Based on all assessment letters issued by the Directorate General of Taxes, as of December 29, 2017, the Bank has paid the total amount of Rp8,151 upon underpayments and penalties.

Assessment for fiscal year 2013

On November 28, 2017, the Directorate General of Taxes issued the following Tax Assessment Letter:

- 1) Tax Underpayment Assessment Letter Art 21 No. 00012/201/13/093/17 amounting Rp97
- 2) Zero Tax Assessment Letter Art 23 No. 00064/503/13/093/17
- 3) Tax Underpayment Assessment Letter Art 29 No. 00012/206/13/093/17 amounting Rp647
- 4) Tax Underpayment Assessment Letter Art 4 (2) No. 00023/240/13/093/17 amounting Rp551
- 5) Tax Underpayment Assessment Letter VAT No. 00115/207/13/093/17 amounting Rp260
- 6) Tax Collection Letter No. 00104/107/13/093/17 amounting Rp35

Based on all Assessment Letters issued by the Directorate General of Taxes, as of December 29, 2017, the Bank has paid the total amount of Rp1,592 for underpayments and penalties.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

20. UTANG PAJAK (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

Pemeriksaan tahun pajak 2014

Pada tanggal 9 Mei 2016, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan untuk tahun 2014 No. 00024/406/14/093/16 dengan jumlah lebih bayar pajak sebesar Rp5.327.

Pada tanggal 19 Mei 2016, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-00080.PPH/WPJ.19/KP.0403/2016, Bank telah menerima pengembalian pajak sebesar Rp3.668 setelah memperhitungkan pajak terhutang yang dimiliki Bank sebesar Rp1.659.

Bank telah membebaskan kerugian atas restitusi lebih bayar yang tidak disetujui oleh Direktorat Jenderal Pajak sebesar Rp4.948, pada periode berjalan.

21. LIABILITAS LAIN-LAIN

Liabilitas lain-lain terdiri dari:

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
Rekening sementara	1.290.882	740.929	484.744
Estimasi liabilitas imbalan kerja (Catatan 39)	43.133	83.402	79.794
Cadangan bonus	37.704	44.338	32.500
Setoran jaminan	4.403	957	378
Premi asuransi	3.420	6.585	6.611
Perantara hasil kliring	958	1.131	953
Lain-lain	21.666	35.636	30.274
Jumlah	1.402.166	912.978	635.254

Rekening sementara terdiri dari rekening titipan khusus Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), angsuran pinjaman, titipan pembayaran kepada notaris, dan lain-lain.

Lain-lain terdiri dari biaya yang masih harus dibayar, cadangan litigasi, rekening administrasi dan lainnya.

20. TAXES PAYABLE (continued)

e. Tax examination (continued)

Assessment for fiscal year 2014

On May 9, 2016, the Directorate General of Taxes issued Tax Overpayment Assessment Letter for Corporate Income Tax for the year 2014 No. 00024/406/14/093/16 with total overpayment amounting to Rp5,327.

On May 19, 2016, based on Decision Letter of Directorate General of Taxes No. KEP-00080.PPH/WPJ.19/KP.0403/2016, The Bank has received tax refund amounted to Rp3,668 after calculating the Bank's tax liabilities amounted to Rp1,659.

The Bank has recognized loss on restitution of the overpayment which was not approved by the Directorate General of Taxes amounting to Rp4,948 in the current period.

21. OTHER LIABILITIES

Other liabilities consist of:

	2017	2016	2015
Rekening sementara	1.290.882	740.929	484.744
Estimasi liabilitas imbalan kerja (Catatan 39)	43.133	83.402	79.794
Cadangan bonus	37.704	44.338	32.500
Setoran jaminan	4.403	957	378
Premi asuransi	3.420	6.585	6.611
Perantara hasil kliring	958	1.131	953
Lain-lain	21.666	35.636	30.274
Jumlah	1.402.166	912.978	635.254

Temporary account represents escrow account of Organizing Cost of Hajj, loans installments, remittances payments to notary and others.

Others consist of accrued expense, provision of legal case, administration accounts and others.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI

22. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi	1.000.000	1.000.000	-
			Subordinated Sukuk <i>Mudharabah</i>

Pada tanggal 17 November 2016, Bank menerbitkan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I Tahun 2016 sebesar Rp1.000.000 dan diterbitkan senilai 100,00% dari nilai nominalnya dengan metode pendapatan bagi hasil. Besarnya *nisbah* pemegang sukuk adalah sebesar 80,2013% yang dihitung dari *gross revenue* tunai, yang diindikasikan sebesar 11,8452%. Bagi hasil dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 16 November 2023. Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini diperingkat A+(idn) oleh Fitch pada saat diterbitkan.

Penerimaan dari penerbitan Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut, akan dimanfaatkan seluruhnya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan.

Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I ini tidak dijamin dengan agunan khusus, termasuk tidak dijamin oleh Negara Republik Indonesia atau pihak ketiga lainnya dan tidak dimasukkan dalam program penjaminan bank yang dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau lembaga penjaminan lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I memperoleh peringkat A+ dari Fitch.

Bertindak sebagai wali amanat untuk Sukuk *Mudharabah* Subordinasi I tersebut adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Perjanjian perwaliamentan memuat beberapa pembatasan terhadap Bank dan memerlukan persetujuan tertulis dari wali amanat sebelum melakukan hal-hal berikut:

- Pengeluaran Sukuk atau MTN yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Sukuk *Mudharabah* Subordinasi.
- Perubahan bidang usaha utama.
- Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.
- Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Bank, atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha.

On November 17, 2016, Bank issued Rp1,000,000 Subordinated Sukuk *Mudharabah* I Year 2016 which are issued at 100.00% of its nominal value using profit sharing method. The amount of Sukuk holder's *nisbah* is 80.2013% which calculated from liquid gross revenue, which indicated 11.8452%. Profit sharing will be paid quarterly and will be due on November 16, 2023. Subordinated Sukuk *Mudharabah* I was rank A+ by Fitch on publication date.

The Receipt from the issuance of the Subordinated Sukuk *Mudharabah* I are intended to strengthen the capital structure in order to support business development activities such as financing expansion.

The Subordinated Sukuk *Mudharabah* I are not guaranteed by special collateral nor guaranteed by the Republic of Indonesia or other third parties and are not included in the bank guarantee program implemented by the Deposit Insurance Agency (Lembaga Penjamin Simpanan/LPS) or other insurance corporation.

As of December 31, 2017, Bank's Subordinated Sukuk *Mudharabah* I obtained a rating of A+ from Fitch.

The trustee of this Subordinated Sukuk *Mudharabah* I is PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

The trustee agreement covers several covenants affecting Bank and requires a written approval from the trustee before conducting the following:

- Issued another Sukuk or MTN which has higher position and prior payment from Subordinated Sukuk *Mudharabah*.
- Changes in the main business.
- Reduction of authorized, issued and paid capital stock.
- Conduct merger, consolidation, acquisition with other parties which caused dissolution of the Bank, or would have negative impact on business continuity.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

22. SUKUK MUDHARABAH SUBORDINASI
(lanjutan)

Pembatasan dan kewajiban Bank tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Bank kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar (melebihi 50%) dari seluruh aset tetap milik Bank berdasarkan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit.
- Melakukan transaksi dengan pihak terafiliasi, kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Bank atau setidaknya-tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Bank dari pihak ketiga yang bukan terafiliasi dalam transaksi yang lazim.
- Memberikan pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain.

Manajemen Bank berpendapat bahwa semua persyaratan/pembatasan yang ditetapkan dalam perjanjian perwalianamanat telah dipenuhi.

Berdasarkan Surat No. SR-32/PB.13/2016 tertanggal 29 November 2016, telah disetujui permohonan Bank oleh OJK untuk memperhitungkan hasil penjualan Sukuk Mudharabah Subordinasi I sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sebagai komponen modal pelengkap bank (setinggi-tingginya 100% dari modal inti).

23. GIRO MUDHARABAH

Giro *mudharabah* terdiri dari:

31 Desember/ December 31, 2017	
Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
	139.535

Pihak Ketiga
Rupiah

Giro *mudharabah* merupakan investasi dana nasabah pada Bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, Bank Garansi, dan sarana perintah pembayaran lainnya.

22. SUBORDINATED SUKUK MUDHARABAH
(continued)

Several covenants affecting Bank without written approval from the trustee are the following:

- Sell or transfer fixed assets of the Bank to other parties, either all or most of fixed assets (over 50%) based on audited financial statement.
- Conduct transactions with affiliated parties, unless either the transaction is performed under favorable terms or at least equal to the requirements obtained by the Bank from independent third parties in prevalent transactions.
- Provide financing or investment in stock shares to other parties.

Management of Bank has complied with the above trustee agreement.

Based on the letter SR-32/PB.13.2016 dated November 29th, 2016 the Financial Service Authority has agreed on the Bank's request to make the proceeds of Sukuk Mudharabah amounting to Rp1,000,000,000 (one trillion rupiah) as a complementary capital component of the Bank (maximum 100% of core capital).

23. MUDHARABAH DEMAND DEPOSITS

Mudharabah demand deposits consist of:

31 Desember/ December 31, 2016		31 Desember/ December 31, 2015	
Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah
	-		-

Third Parties
Rupiah

Mudharabah demand deposits is a current account product in which investor's fund can be withdrawn by check, bank guarantee, or other payment instruction method according to the agreement.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

24. TABUNGAN MUDHARABAH

24. MUDHARABAH SAVINGS DEPOSITS

	31 Desember/ December 31, 2017		31 Desember/ December 31, 2016		31 Desember/ December 31, 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Pihak ketiga - Bukan Bank							Third parties - NonBank
Rupiah							Rupiah
Tabungan haji mudharabah		1.215.106		933.624		654.096	Mudharabah haji savings deposits
Tabungan impian		51.479		47.347		41.313	Impian savings deposits
		1.266.585		980.971		695.409	
Dolar Amerika Serikat							United States Dollar
Tabungan haji mudharabah	287.386	3.899	159.584	2.150	57.266	789	Mudharabah haji savings deposits
Jumlah		1.270.484		983.121		696.198	Total

Tabungan *mudharabah* merupakan simpanan dana pihak ketiga yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Mudharabah savings deposits represent deposits from third parties which are entitled to receive a share in the revenue derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined nisbah.

Kisaran tingkat bagi hasil untuk tabungan *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

The range rate of profit sharing for mudharabah savings deposits are as follows:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Rupiah	1,10% - 2,94%	1,17% - 3,39%	1,85% - 4,09%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,00% - 0,09%	0,00% - 0,06%	0,00% - 0,07%	United States Dollar

25. DEPOSITO MUDHARABAH

25. MUDHARABAH TIME DEPOSITS

a. Berdasarkan mata uang:

a. *By currency:*

	31 Desember/ December 31, 2017		31 Desember/ December 31, 2016		31 Desember/ December 31, 2015		
	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	Jumlah nosional mata uang asing/ Notional amount foreign currency (Dalam nilai penuh/ In full amount)	Ekuivalen/ Equivalent Rupiah	
Bukan Bank							Non Bank
Pihak Ketiga							Third Parties
Rupiah		18.136.341		15.358.278		14.111.339	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	13.985.087	189.743	18.901.000	254.644	6.197.087	85.427	United States Dollar
		18.326.084		15.612.922		14.196.766	
Pihak Berelasi (Catatan 41)							Related Parties (Note 41)
Rupiah		58.002		89.123		101.058	Rupiah
		18.384.086		15.702.045		14.297.824	
Bank							Bank
Pihak Ketiga							Third Parties
Rupiah		45.983		27.580		474.876	Rupiah
Jumlah		18.430.069		15.729.625		14.772.700	Total

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

25. DEPOSITO MUDHARABAH (lanjutan)

25. MUDHARABAH TIME DEPOSITS (continued)

b. Berdasarkan jangka waktu:

b. By period:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31			
	2017	2016	2015	
Rupiah				Rupiah
1 bulan	17.667.666	14.864.287	13.848.663	1 month
3 bulan	324.328	325.065	465.095	3 months
6 bulan	89.183	111.187	205.232	6 months
12 bulan	159.149	174.442	168.283	12 months
	18.240.326	15.474.981	14.687.273	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
1 bulan	189.743	254.644	85.427	1 month
Jumlah	18.430.069	15.729.625	14.772.700	Total

c. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo:

c. By remaining period to maturity:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31			
	2017	2016	2015	
Rupiah				Rupiah
≤ 1 bulan	14.150.533	14.302.244	13.861.931	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	3.949.562	1.009.940	582.229	> 1 - ≤ 3 months
> 3 - ≤ 12 bulan	140.231	162.797	243.113	> 3 - ≤ 12 months
	18.240.326	15.474.981	14.687.273	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
≤ 1 bulan	135.675	254.644	85.427	≤ 1 month
> 1 - ≤ 3 bulan	54.068	-	-	> 1 - ≤ 3 months
Jumlah	18.430.069	15.729.625	14.772.700	Total

d. Deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas piutang yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp71.513, Rp28.488 dan Rp35.930 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (Catatan 7), sedangkan deposito *mudharabah* yang dijadikan jaminan atas pembiayaan yang diberikan oleh Bank berjumlah Rp195.222, Rp107.189 dan Rp79.725 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (Catatan 9 dan 10).

d. *Mudharabah time deposits that are used as collateral for the Bank's receivables amounted to Rp71,513, Rp28,488 and Rp35,930 as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively (Note 7), whereas mudharabah time deposits that are used as collateral for the Bank's financing amounted to Rp195,222, Rp107,189 and Rp79,725 as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively (Notes 9 and 10).*

e. Deposito *mudharabah* merupakan investasi pihak lain yang mendapatkan imbalan bagi hasil dari pendapatan Bank atas penggunaan dana tersebut dengan *nisbah* yang ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

e. *Mudharabah time deposits represent third parties' investments which are entitled to received a share in the income derived by the Bank from the use of such funds based on a predetermined and previously approved nisbah.*

f. Kisaran tingkat bagi hasil untuk deposito *mudharabah* per tahun adalah sebagai berikut:

f. *The range rate of profit sharing for mudharabah time deposits are as follows:*

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Rupiah	2,19% - 7,35%	2,35% - 8,81%	3,24% - 9,48%	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	0,01% - 1,25%	0,01% - 1,14%	0,01% - 0,65%	United States Dollar

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. EKUITAS

Modal Saham

Susunan pemegang saham Bank adalah sebagai berikut:

31 Desember 2017, 2016, dan 2015/
 December 31, 2017, 2016, and 2015

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (Nilai Penuh)/ Amount of Issued and Fully-Paid Share Capital (Full Amount)	Persentase Pemilikan/ Ownership Percentage	Jumlah Modal/ Amount of Capital	Shareholders
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.957.999.000	99,999975%	1.978.999	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI	1.000	0,000025%	1	Yayasan Kesejahteraan Pekerja BRI
Jumlah	3.958.000.000	100%	1.979.000	Total

Pada tanggal 4 Agustus 2015, seluruh pemegang saham Bank menyetujui untuk mengubah Anggaran Dasar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 1, Notaris Fathiah Helmi, S.H., terkait dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp1.479.000 menjadi Rp1.979.000 (Catatan 1a).

Cadangan Umum

Cadangan umum pada awalnya dibentuk dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-undang No. 1/1995 mengenai Perseroan Terbatas (kemudian diganti dengan Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40/2007), yang mengharuskan perusahaan Indonesia untuk membuat penyisihan cadangan umum dan wajib sebesar sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk pembentukan penyisihan tersebut.

Distribusi Laba Bersih

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Bank tanggal 18 April 2017, 11 Maret 2016, dan 8 April 2015 pemegang saham menyetujui distribusi laba bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, dengan penggunaan sebagai berikut:

	Labal/Income			
	2016	2015	2014	
Cadangan umum	17.021	12.264	658	General reserves
Laba ditahan	153.188	110.373	5.919	Retained earnings
Jumlah	170.209	122.637	6.577	Total

26. EQUITY

Share Capital

The composition of the Bank's shareholders are as follows:

On August 4, 2015, all the Bank's shareholders agreed to ammend its Article of Association based on Annual Shareholders' Meeting Decision Statement Deed No. 1, Notary Fathiah Helmi, S.H., regarding the additional issued and fully-paid share capital from Rp1,479,000 to Rp1,979,000 (Note 1a).

General Reserve

The general reserves are originally provided in accordance with Law No. 1/1995 article 61 (1) on Limited Liability Company (later superseded by Limited Liability Company Law No. 40/2007), which requires Indonesian companies to set up a general and legal reserve amounting to at least 20% of the issued and paid-in capital. This particular law does not regulate the period of time in relation to the provision of such reserves.

Distribution of Net Income

Based on the Annual General Shareholders' Meetings of Bank held on April 18, 2017, March 11, 2016 and April 8, 2015, the Shareholders agreed to distribute the net income for the Years Ended December 31, 2016, 2015 and 2014, as follows:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

27. PENDAPATAN DARI JUAL BELI

Pendapatan dari jual beli terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31		
	2017	2016	2015
<i>Murabahah</i>	1.507.099	1.533.338	1.458.382
<i>Istishna</i>	1.124	1.232	3.101
Jumlah	1.508.223	1.534.570	1.461.483

Murabahah
Istishna

Total

27. INCOME FROM SALES AND PURCHASES

Income from sales and purchases consists of:

28. PENDAPATAN BAGI HASIL

Pendapatan bagi hasil terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31		
	2017	2016	2015
<i>Musarakah</i>	528.286	526.506	513.496
<i>Mudharabah</i>	141.919	167.105	128.509
Jumlah	670.205	693.611	642.005

Musarakah
Mudharabah

Total

28. INCOME FROM PROFIT SHARING

Income from profit sharing consists of:

29. PENDAPATAN DARI IJARAH - NETO

Pendapatan dari *ijarah* - neto terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31		
	2017	2016	2015
<i>Ijarah muntahiyah bittamlik</i>	232.935	55.233	56.974
<i>Ujrah Kepemilikan Logam Mulia (KLM)</i>	1.871	4.622	6.699
<i>Ijarah multijasa</i>	596	378	314
	235.402	60.233	63.987
Beban penyusutan aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i>	(142.063)	(47.401)	(49.101)
Neto	93.339	12.832	14.886

Ijarah muntahiyah bittamlik

Ujrah of Gold Financing (KLM)
Ijarah multi-services

Depreciation expense of assets acquired for ijarah

Net

29. INCOME FROM IJARAH - NET

Income from ijarah - net consists of:

30. PENDAPATAN USAHA UTAMA LAINNYA

Pendapatan usaha utama lainnya terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31		
	2017	2016	2015
Pendapatan dari investasi pada surat berharga	366.947	197.782	99.781
Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	132.941	153.349	152.090
<i>Qardh</i>	38.828	39.637	52.722
Bagi hasil penempatan pada bank lain	6.041	2.420	1.785
Jumlah	544.757	393.188	306.378

Income from investments in marketable securities
Bonus from Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS) and Bank Indonesia Sharia Deposit Facilities (FASBIS)

Qardh
Profit sharing from placements with other bank

Total

30. OTHER MAIN OPERATING INCOME

Other main operating income consists of:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL

Hak pihak ketiga atas bagi hasil terdiri atas:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
 Years ended December 31

	2017	2016	2015
Deposito <i>mudharabah</i>	1.077.056	990.611	999.560
Sukuk <i>mudharabah</i> subordinasi	93.286	11.492	-
Tabungan <i>mudharabah</i>	13.341	14.080	10.601
Pinjaman <i>mudharabah</i>	7.884	8.250	8.250
Sertifikat Investasi <i>Mudharabah</i> Antarbank (SIMA)	1.566	11.068	9.031
Giro <i>Mudharabah</i>	785	-	-
Jumlah	1.193.918	1.035.501	1.027.442

Mudharabah time deposits
Subordinated sukuk mudharabah
Mudharabah savings deposits
Mudharabah borrowing
Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA)
Mudharabah demand deposit

Total

31. THIRD PARTIES' SHARE ON RETURN

Third parties' share on return consist of:

32. PENDAPATAN USAHA LAINNYA

Pendapatan usaha lainnya terdiri dari:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
 Years Ended December 31

	2017	2016	2015
Pendapatan imbalan jasa perbankan	122.620	102.545	97.252
Lain-lain	26.383	25.422	33.208
Jumlah	149.003	127.967	130.460

Fee based income from banking services
Others

Total

32. OTHER OPERATING INCOME

Other operating income consists of:

Lain-lain terdiri dari pendapatan administrasi rekening, pendapatan administrasi cek, pendapatan komisi asuransi dan lainnya.

Others consist of account administration fees, income cheque administration fees, commissions and insurance fees and others.

33. BEBAN CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI ASET PRODUKTIF DAN NON-PRODUKTIF - NETO

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif - neto terdiri dari:

Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/
 Years ended December 31

	2017	2016	2015
Piutang (Catatan 7)	167.674	116.400	132.753
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 8)	10.654	1.681	10.834
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (Catatan 9)	4.397	7.235	5.444
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 10)	35.388	118.951	74.672
Aset non-produktif (Catatan 13)	234.020	75.091	6.806
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi (Catatan 38)	1.239	(347)	844
Jumlah	453.372	319.011	231.353

Receivables (Note 7)
Funds of qardh (Note 8)
Mudharabah financing (Note 9)
Musyarakah financing (Note 10)
Non-earning assets (Note 13)
Estimated losses on commitments and contingencies (Note 38)

Total

33. PROVISION FOR IMPAIRMENT LOSSES ON EARNING AND NON-EARNING ASSETS - NET

Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net, consist of:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

34. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN

Beban gaji dan tunjangan terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years ended December 31		
	2017	2016	2015
Gaji dan upah	290.327	303.266	297.146
Tunjangan karyawan	203.090	215.464	185.577
Imbalan kerja (Catatan 39)	22.001	13.639	20.778
Pendidikan dan pelatihan	6.649	5.858	5.597
Jumlah	522.067	538.227	509.098

Salaries and wages
Employee allowances
Employee benefit (Note 39)
Education and trainings

Total

34. SALARIES AND BENEFITS EXPENSE

Salaries and benefits consist of:

35. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
	2017	2016	2015
Sewa	109.853	97.066	91.743
Asuransi	101.733	90.792	82.054
Outsourcing	90.290	88.173	77.847
Komunikasi	43.632	46.750	33.427
Transportasi	31.578	31.861	27.591
Pemeliharaan dan perbaikan	30.292	43.222	33.924
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	27.814	36.565	44.958
Promosi	20.426	20.977	40.015
Listrik, air dan gas	18.252	18.604	20.629
Alat tulis dan barang cetak	10.487	10.473	11.379
Honorarium tenaga ahli	6.906	3.004	5.964
Lain-lain	9.015	2.260	1.530
Jumlah	500.278	489.747	471.061

Rent
Insurance
Outsourcing
Communication
Transportation
Service and maintenance
Depreciation of premises and
equipment (Note 12)
Promotion
Electricity, water and gas
Stationery and printing
Professional fees
Others

Total

35. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSE

General and administrative expenses consist of:

Lain-lain terdiri dari beban pajak tanah dan bangunan, beban pajak kendaraan dan lainnya.

Others consist of land and building tax expenses, vehicle tax expenses and others.

36. PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA - NETO

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31		
	2017	2016	2015
Sewa gedung	462	90	225
Keuntungan (Kerugian) selisih kurs - neto	3.475	(7.056)	3.661
Zakat	(4.255)	(3.066)	(164)
Lainnya*)	11.781	9.409	6.368
Pendapatan (beban) non-usaha - neto	11.463	(623)	10.090

Building rental
Gain (Loss) on foreign exchange - net
Zakat
Others*)

Non-operating Total non-operating (expenses) income (expense) - net

*) Lainnya terdiri dari keuntungan atau kerugian penjualan aset tetap, restrukturisasi atau pembiayaan, beban penanganan pembiayaan, dan lainnya.

*) Others consist of gain or loss on sale of fixed asset, account receivable or financing's restructuring, handling financing expenses, and others.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. LABA PER SAHAM

Perhitungan laba per saham pada untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Laba tahun berjalan	101.091	170.209	122.637	Income for the year
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (nilai penuh)	3.958.000.000	3.958.000.000	3.374.666.667	Weighted average number of shares outstanding (full amount)
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	25,54	43,00	36,34	Basic earnings per share (full Rupiah)

37. EARNINGS PER SHARE

The computation of earnings per share for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, are as follows:

38. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI

a. Bank memiliki tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Komitmen				Commitments
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah				Rupiah
Liabilitas Komitmen				Commitments Payables
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan (tidak diaudit)	105.497	154.650	155.372	Unused financing facilities (unaudited)
<u>Pihak Berelasi (Catatan 41)</u>				<u>Related Parties (Note 41)</u>
Rupiah				Rupiah
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan (tidak diaudit)	-	100.000	-	Unused financing facilities (unaudited)
Jumlah	105.497	254.650	155.372	Total
Kontinjensi				Contingencies
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah				Rupiah
Tagihan Kontinjensi				Contingencies Receivables
Pendapatan dari pembiayaan bermasalah (tidak diaudit)	66.728	40.752	42.685	Revenue from Non-Performing Financing (NPF) (unaudited)
Liabilitas Kontinjensi				Contingencies Payables
Garansi yang diterbitkan	(132.561)	(54.216)	(48.926)	Bank guarantees issued
Liabilitas Kontinjensi - neto	(65.833)	(13.464)	(6.241)	Contingencies Payables - Net

b. Kolektibilitas komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif yang mempunyai risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Lancar	132.561	54.216	27.372	Current
Dalam perhatian khusus	-	-	21.554	Special mention
Jumlah	132.561	54.216	48.926	Total

b. The collectibility of commitments and contingencies with credit risk on administrative accounts are as follows:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2017, 2016 and 2015
 For the Years Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

38. INFORMASI MENGENAI KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

- c. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai estimasi komitmen dan kontinjensi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember/ Years Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Saldo awal tahun	895	1.242	398	Balance at beginning of the year
Pembentukan (pembalikan) selama tahun berjalan (Catatan 33)	1.239	(347)	844	Provisions (reversal) during the year (Note 33)
Saldo akhir tahun	2.134	895	1.242	Balance at end of the year

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan atas nilai estimasi komitmen dan kontinjensi yang dibentuk telah memadai dan telah sesuai dengan ketentuan POJK.

38. INFORMATION ON COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

- c. The movements of allowance for impairment losses on estimated commitments And contingencies are as follows:

Management believes that the allowance for impairment losses on estimated commitments and contingencies is adequate and in compliance with FSA regulations.

39. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year Ended December 31,			
	2017	2016	2015	
Cuti Besar	30.304	25.294	32.828	Grand Leaves
Pemutusan Hubungan Kerja	12.829	58.108	46.966	Work Separation Scheme
Jumlah (Catatan 21)	43.133	83.402	79.794	Total (Note 21)

Analisis Sensitivitas atas Asumsi Tingkat Diskonto per 31 Desember 2017:

	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value Defined Benefit Obligation	Perubahan/Change
+0,50%	77.996	-3,70%
+0,50%	84.199	3,96%

Analisis Sensitivitas atas Asumsi Tingkat Kenaikan Upah per 31 Desember 2017:

	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Present Value Defined Benefit Obligation	Perubahan/Change
+0,50%	85.735	5,85%
+0,50%	76.604	-5,42%

39. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS

Sensitivity Analysis of discount rate assumptions as per December 31, 2017:

Maturity Benefit Analysis and Current Value of Defined Benefit Obligation as per December 31, 2017:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisis Manfaat Jatuh Tempo dan Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti per 31 Desember 2017:

Jangka waktu/ Time period	Manfaat Jatuh Tempo/ Benefits Matured	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Current Value of Defined Benefit Obligation
< 1 year	3.038	2.829
1 - < 2 years	4.312	3.451
2 - < 3 years	2.475	1.662
3 - < 4 years	8.572	4.567
4 - < 5 years	7.377	3.307
≥ 5 years	784.122	65.179

a) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perhitungan manajemen Bank yang menggunakan asumsi-asumsi penilaian aktuarial atas liabilitas Bank berkaitan dengan cadangan untuk biaya penyelesaian PHK yang meliputi penetapan uang pesangon, uang penghargaan tanda jasa dan ganti kerugian disusun berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

Perhitungan aktuarial tersebut dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 4 Januari 2018 dan 4 Januari 2017, dan PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 5 Januari 2016, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2017	2016	2015
Tingkat diskonto per tahun	7,10%	8,10%	9,20%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	5,00%	5,00%
Tingkat cacat	5,00%	5,00%	5,00%
Tabel mortalita	TMI-III 2011	TMI-III 2011	TMI-III 2011
Usia pensiun	56 tahun/years old	56 tahun/years old	56 tahun/years old

Annual discount rate
Annual salary increase rate
Defect rate
Mortality table
Retirement age

39. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Sensitivity Analysis of Wage Income Rate Assumption as per December 31, 2017:

Jangka waktu/ Time period	Manfaat Jatuh Tempo/ Benefits Matured	Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti/ Current Value of Defined Benefit Obligation
< 1 year	3.038	2.829
1 - < 2 years	4.312	3.451
2 - < 3 years	2.475	1.662
3 - < 4 years	8.572	4.567
4 - < 5 years	7.377	3.307
≥ 5 years	784.122	65.179

a) Work Separation Scheme (PHK)

The Bank's management calculation which used the actuarial valuation assumptions on the Bank's liability related to the allowance for work separation scheme (PHK) including severance, gratuity and compensation benefits is based on Labor Law No. 13 year 2003 (UU No. 13/2003) dated March 25, 2003 for liability as of December 31, 2017, 2016, and 2015, respectively.

The above actuarial calculations were prepared by PT Bestama Aktuarial, an independent actuary, in its reports dated January 4, 2018 and January 4, 2017, and PT Katsir Imam Sapto Sejahtera Aktuarial, an independent actuary, in its report dated January 5, 2016, by using the Projected Unit Credit Method with the following assumptions:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA
(lanjutan)

a) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

Mutasi atas liabilitas pemutusan hubungan kerja masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2017	2016	2015
Liabilitas pada awal tahun	58.108	46.966	38.037
Beban imbalan pasca-kerja yang diakui pada tahun berjalan	11.955	12.654	12.509
Pembayaran imbalan pasca-kerja selama tahun berjalan	(254)	(1.519)	-
Penempatan aset program	(68.000)	-	-
Pengukuran kembali program imbalan pasti	11.020	7	(3.580)
Jumlah (Catatan 21)	12.829	58.108	46.966

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) PHK - neto masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	2015
Saldo awal	(15.622)	(15.629)	(12.049)
kerugian (Keuntungan) aktuarial	11.020	7	(3.580)
Pengukuran kembali atas liabilitas PHK - neto	(4.602)	(15.622)	(15.629)

Perhitungan beban PHK untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sesuai dengan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	2015
Beban jasa kini	8.269	8.033	9.276
Beban bunga	3.686	4.621	3.233
Jumlah (Catatan 34)	11.955	12.654	12.509

39. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a) Work Separation Scheme (PHK) (continued)

Movements in the work separation scheme liability as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively, are as follows:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year Ended December 31		
	2017	2016	2015
Liabilities at beginning of the year	58.108	46.966	38.037
Employee benefit expense during the year	11.955	12.654	12.509
Payment of post-employment benefit during the year	(254)	(1.519)	-
Placement of program assets	(68.000)	-	-
Remeasurement of defined benefit plan	11.020	7	(3.580)
Total (Note 21)	12.829	58.108	46.966

Remeasurement on liabilities (assets) for PHK - net as of December 31, 2017, 2016, and 2015, respectively, are as follows:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	2015
Beginning balance	(15.622)	(15.629)	(12.049)
Actuarial loss (gain)	11.020	7	(3.580)
Remeasurement on liabilities for PHK - net	(4.602)	(15.622)	(15.629)

The calculation of PHK expense for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, based on actuarial calculation are as follows:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	2015
Current service cost	8.269	8.033	9.276
Interest cost	3.686	4.621	3.233
Total (Note 34)	11.955	12.654	12.509

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA
(lanjutan)

a) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (lanjutan)

Mutasi nilai kini liabilitas PHK adalah sebagai berikut:

Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year ended December 31,				
	2017	2016	2015	
Saldo awal tahun	58.108	46.966	38.037	<i>Beginning balance of the year</i>
Biaya jasa kini	8.269	8.033	9.276	<i>Current service cost</i>
Beban bunga	3.686	4.621	3.233	<i>Interest cost</i>
Pembayaran imbalan pasca-kerja selama tahun berjalan	(254)	(1.519)	-	<i>Payment of post-employment benefit during the year</i>
Penempatan aset program	(68.000)	-	-	<i>Placement of program assets</i>
Keuntungan (kerugian) pengukuran kembali	11.020	7	(3.580)	<i>Actuarial gain (loss) on remeasurement</i>
Saldo akhir tahun	12.829	58.108	46.966	<i>Ending balance of the year</i>

39. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

a) *Work Separation Scheme (PHK) (continued)*

The movements in the present value of PHK liabilities are as follows:

Pada tanggal 4 September 2017, Perusahaan melakukan penempatan untuk Aset Program di Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK BRI") senilai Rp60.000 sebagai iuran dasar. Dikuti iuran berkala untuk tanggal 19 September, 16 Oktober, 15 November, dan 13 Desember 2017 masing-masing senilai Rp2.000. Keseluruhan Aset Program ditempatkan dalam instrumen keuangan dengan prinsip syariah (tidak diaudit).

On September 4, 2017, the Company placed placement for Program Assets at Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("DPLK BRI") amounting to Rp60,000 as a contribution basis. Followed by regular dues for September 19, October 16, November 15, and December 13, 2017 amounting to Rp2,000, each. All Program Assets are placed in financial instruments with sharia principles (unaudited).

Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year ended December 31,				
	2017	2016	2015	
Aset Program awal periode	-	-	-	<i>Program Asset beginning balance</i>
Hasil Pengembangan Riil	-	-	-	<i>Real development result</i>
Bunga sesuai bunga diskonto	1.358	-	-	<i>Interest based on discount rate</i>
Kelebihan / (kekurangan) pengembangan atas bunga diskonto	-	-	-	<i>Excess/(shortfall) development of discount rate</i>
Pembayaran iuran-iuran	-	-	-	<i>Payment of contribution - employer</i>
- Pemberi Kerja	68.000	-	-	
Penilaian kembali	(981)	-	-	<i>Remeasurement</i>
Aset Program akhir periode	68.166	-	-	<i>Program Asset ending balance</i>

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

39. ESTIMASI LIABILITAS IMBALAN KERJA
(lanjutan)

b) Cuti Besar

Perhitungan aktuarial tersebut dilakukan oleh PT Bestama Aktuarial, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 4 Januari 2018 dan dalam laporannya tertanggal 4 Januari 2017, dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* serta mempertimbangkan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Tingkat diskonto per tahun	7,10%	8,10%	9,20%	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00%	5,00%	5,00%	Annual salary increase rate
Tabel mortalitas	TMI-III 2011	TMI-III 2011	TMI-III 2011	Mortality table
Usia pensiun	56 tahun /years old	56 tahun /years old	56 tahun /years old	Retirement age

Mutasi untuk cadangan atas cuti besar masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for grand leaves as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively, are as follows:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Liabilitas pada awal tahun	25.294	32.828	31.112	Liabilities at beginning of the year
Beban imbalan pasca-kerja pada tahun berjalan	10.046	985	8.269	Employee benefit expense during the year
Pembayaran imbalan pasca-kerja selama tahun berjalan	(5.036)	(8.519)	(6.553)	Payment of post-employment benefit during the year
Jumlah (Catatan 21)	30.304	25.294	32.828	Total (Note 21)

Beban cuti besar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 berdasarkan perhitungan aktuarial adalah sebagai berikut:

Grand leaves expense for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, based on actuarial calculation are as follows:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year Ended December 31			
	2017	2016	2015	
Beban jasa kini	5.372	6.484	7.196	Current service cost
Beban bunga	1.722	2.927	2.645	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial	2.952	(8.426)	(1.572)	Actuarial loss(gains)
Jumlah (Catatan 34)	10.046	985	8.269	Total (Note 34)

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

40. JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK UMUM

Berdasarkan Undang-undang No. 24 tanggal 22 September 2004, efektif sejak tanggal 22 September 2005, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tanggal 13 Oktober 2008, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dibentuk untuk menjamin kewajiban tertentu bank-bank umum berdasarkan program penjaminan yang berlaku, yang besaran nilai jaminannya dapat berubah jika memenuhi kriteria tertentu yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan LPS No. 2 tanggal 25 November 2010, simpanan yang dijamin meliputi giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan simpanan dari bank lain.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 66 tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008, tentang "Besarnya Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan", maka pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, jumlah simpanan yang dijamin LPS adalah simpanan sampai dengan Rp2.000.000.000 (disajikan dalam nilai penuh) untuk per nasabah per bank.

Simpanan dari nasabah dijamin hanya jika tingkat bagi hasil sama dengan atau dibawah 5,75%, 6,25% dan 7,50% untuk mata uang rupiah dan masing-masing sebesar 0,75%, 0,75% dan 0,75% untuk simpanan dalam mata uang asing pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

Beban penjaminan dana pihak ketiga yang dijamin kepada Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) adalah Rp47.656, Rp42.190 dan Rp36.958, masing-masing pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015.

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI

Pihak-pihak berelasi terdiri dari entitas induk, Pemerintah Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Entitas Anak (entitas dan lembaga Pemerintah), Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan kunci berdasarkan PSAK No. 7 (Revisi 2015), "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

40. GOVERNMENT GUARANTEES ON OBLIGATIONS OF COMMERCIAL BANKS

Based on Law No. 24, dated September 22, 2004, effective on September 22, 2005, as amended by Government Regulation of the Republic of Indonesia for Substitute of Law No. 3 dated October 13, 2008, the Government established the Deposit Insurance Institution (LPS) to guarantee certain liabilities of commercial banks based on the prevailing guarantee programs, in which the guaranteed amount may change if they meet certain specified criteria.

Based on LPS Regulation No. 2 dated November 25, 2010, the deposits guaranteed included demand deposits, time deposits, certificates of deposits, savings deposits and deposits from other banks.

Based on the Government of the Republic of Indonesia Regulation No. 66 Year 2008, dated October 13, 2008, regarding "the Amount of Public Deposits Guaranteed by the Government Established Deposit Insurance Institution", as of December 31, 2017, 2016 and 2015, the amount of Deposits that are guaranteed by LPS amounted to Rp2,000,000,000 (express in full amount) for each customer, each bank.

Deposits are guaranteed only if the profit sharing rate is same or less than 5.75%, 6.25% and 7.50% for Rupiah and 0.75%, 0.75% and 0.75% for foreign currency as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively. As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the Bank is a participant of the government guarantee program.

Insurance premium related to third party funds paid to the Deposit Insurance Institution (LPS) is amounted to Rp47,656, Rp42,190 and Rp36,958 for the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively.

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Related parties consist of parent company, Government of the Republic of Indonesia, State-Owned Enterprises and their subsidiaries (Government entities and institutions), Board of Commissioners, Board of Directors and key employees of the Bank based on SFAS No. 7 (Revised 2015), "Related Party Disclosures".

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi

a. Type of relationships and related parties transactions

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen:

Related parties from the entity level and/or management are:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Angkasa Pura I (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Investasi pada surat berharga, giro wadiah/ <i>Investments in marketable securities, Wadiah time deposits</i>
PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ <i>Wadiah demand deposits</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah, deposito mudharabah/ <i>Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits</i>
PT AXA Mandiri Financial Services	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Deposito mudharabah/ <i>Mudharabah time deposits</i>
PT Bank BNI Syariah	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Investasi pada surat berharga/ <i>Investments in marketable securities</i>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro dan penempatan pada bank lain/ <i>Current accounts and placements with other bank</i>
PT BNI Life Insurance	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Deposito mudharabah, giro wadiah/ <i>Mudharabah time deposits, wadiah demand deposits</i>
PT BNI Life Insurance Divisi Syariah	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah, deposito mudharabah/ <i>Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits</i>
PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ <i>Wadiah demand deposits</i>

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi (lanjutan)

a. Type of relationships and related parties transactions (continued)

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen (lanjutan):

Related parties from the entity level and/or management are (continued):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Utama Karya (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Indosat Tbk	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Inti Konten Indonesia	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman <i>qardh</i> , pembiayaan musyarakah, giro wadiah/ <i>Funds of qardh, musyarakah financing, wadiah demand deposits</i>
PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah, deposito <i>mudharabah</i> / Wadiah demand deposits, <i>mudharabah time deposits</i>
PT Jasa Raharja (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Kimia Farma (Persero) Tbk	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Mandiri AXA General Insurance	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Deposito <i>mudharabah</i> / <i>Mudharabah time deposits</i>
PT PANN Multi Finance (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah, deposito <i>mudharabah</i> / Wadiah time deposits, <i>mudharabah time deposits</i>
PT Pegadaian (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> , giro wadiah, komitmen dan kontijensi/ <i>Musyarakah financing, wadiah demand deposits, commitment and contingencies</i>

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi (lanjutan)

a. Type of relationships and related parties transactions (continued)

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen (lanjutan):

Related parties from the entity level and/or management are (continued):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Pemerintah Negara Republik Indonesia/ <i>Government of the Republic of Indonesia</i>	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ <i>Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia</i>	Investasi pada surat berharga/ <i>Investments in marketable securities</i>
Kementerian Perumahan Rakyat Republik Indonesia	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ <i>Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia</i>	Giro Wadiah/ <i>Wadiah demand deposits</i>
Kementerian Agama Republik Indonesia	Kepemilikan saham mayoritas melalui Kementerian Keuangan RI/ <i>Majority shareholder through the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia</i>	Tabungan Wadiah/ <i>Wadiah saving deposits</i>
PT Perkebunan Nusantara VII	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang murabahah, giro wadiah, aset yang diperoleh untuk ijarah/ <i>Murabahah receivable, wadiah demand deposits, assets acquired for ijarah</i>
Perum DAMRI	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Pembiayaan <i>musyarakah</i> , aset yang diperoleh untuk ijarah, giro wadiah/ <i>Musyarakah financing, assets acquired for ijarah, wadiah demand deposits</i>
Perum PERUMNAS	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ <i>Wadiah demand deposits</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Investasi pada surat berharga/ <i>Investments in marketable securities</i>
Perum Jaminan Kredit Indonesia	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah, deposito <i>mudharabah</i> / <i>Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits</i>
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ <i>Wadiah demand deposits</i>

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi (lanjutan)

a. Type of relationships and related parties transactions (continued)

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen (lanjutan):

Related parties from the entity level and/or management are (continued):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Rekayasa Engineering	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Investasi pada surat berharga, pinjaman yang diterima/ <i>Investment in marketable securities, fund borrowing</i>
PT Telekomunikasi Seluler	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Wijaya Karya Realty	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur (BSAM) Divisi Syariah	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Giro wadiah, deposito mudharabah/ Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera (BRINGIN LIFE)	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Tabungan wadiah, giro wadiah, deposito mudharabah/ Wadiah saving, wadiah demand deposits, mudharabah time deposits
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas induk/ <i>Parent company</i>	Giro dan penempatan pada bank lain, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA), aset lain-lain/ <i>Current accounts and placements with other bank, Interbank Mudharabah Investment Certificate (SIMA), other assets</i>
PT Bringin Gigantara	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Bringin Karya Sejahtera	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Giro wadiah/ Wadiah demand deposits
PT Bringin Sejahtera Makmur	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Giro wadiah, deposito mudharabah/ Wadiah demand deposits, mudharabah time deposits

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2017, 2016 and 2015
 For the Years Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi berelasi (lanjutan)

a. Type of relationships and related parties transactions (continued)

Pihak-pihak berelasi secara entitas dan/atau manajemen (lanjutan):

Related parties from the entity level and/or management are (continued):

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bringin Jiwa Sejahtera	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Deposito <i>mudharabah</i> / <i>Mudharabah time deposits</i>
Koperasi Karyawan BRISyariah	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Piutang murabahh, pembiayaan <i>musyarakah</i> , giro wadiah, komitmen dan kontijensi/ <i>Murabahah receivables, musyarakah financing, wadiah demand deposits, commitment and contingencies</i>
Koperasi Swakarya BRI	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Giro wadiah, pembiayaan <i>musyarakah</i> / <i>Wadiah time deposits, musyarakah financing</i>
Yayasan Baitul Maal BRI	Hubungan pengendalian melalui entitas induk/ <i>Control relationship through parent company</i>	Giro wadiah, tabungan wadiah, deposito <i>mudharabah</i> / <i>Wadiah demand deposits, wadiah saving deposits, mudharabah time deposits</i>
Karyawan Kunci/ <i>Key Employees</i>	Hubungan pengendalian kegiatan Bank/ <i>Control relationship on Bank's activities</i>	Piutang <i>murabahah</i> , pinjaman <i>qardh</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> , tabungan wadiah, tabungan <i>mudharabah</i> , deposito <i>mudharabah</i> , pembiayaan <i>musyarakah</i> / <i>Murabahah receivable, funds of qardh, musyarakah financing, wadiah savings deposits, mudharabah savings deposits, mudharabah time deposits, musyarakah financing</i>
PT Timah (Persero) Tbk	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Investasi pada surat berharga/ <i>Investment in marketable securities</i>
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Hubungan pengendalian melalui Pemerintah Pusat RI/ <i>Control relationship through the Central Government of the Republic of Indonesia</i>	Investasi pada surat berharga/ <i>Investment in marketable securities</i>

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi

b. Transaction with related parties

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut:

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows:

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
Aset					Assets
Giro dan penempatan pada bank lain (Catatan 5)					Current accounts and placements with other banks (Note 5)
Entitas induk	210.348	138.392	89.212		Parent company
Entitas dan lembaga Pemerintah	973	962	949		Government entities and institutions
	<u>211.321</u>	<u>139.354</u>	<u>90.161</u>		
Investasi pada surat berharga (Catatan 6)					Investments in marketable securities (Note 6)
Entitas dan lembaga Pemerintah	7.195.970	4.589.388	2.134.317		Government entities and institutions
Piutang <i>murabahah</i> (Catatan 7)					Murabahah receivables (Note 7)
Entitas koperasi karyawan BRI Syariah	74.593	72.044	-		Parent Company
Entitas dan lembaga Pemerintah	40.314	-	404		Government entities and institutions
Karyawan kunci	13.973	12.928	10.100		Key employees
	<u>128.880</u>	<u>84.972</u>	<u>10.504</u>		
Pinjaman <i>qardh</i> (Catatan 8)					Funds of qardh (Note 8)
Entitas dan lembaga Pemerintah	3.850	3.850	4.332		Government entities and institutions
Karyawan kunci	167	34	66		Key employees
	<u>4.017</u>	<u>3.884</u>	<u>4.398</u>		
Pembiayaan <i>mudharabah</i> (Catatan 9)					Mudharabah financing (Note 9)
Entitas Induk	25.932	35.371	-		Parent company
Pembiayaan <i>musyarakah</i> (Catatan 10)					Musyarakah financing (Note 10)
Entitas dan lembaga Pemerintah	816.067	331.700	41.371		Government entities and institutions
Entitas Induk	20.875	50.527	-		Parent company
Karyawan Kunci	508	383	-		Key Employees
	<u>837.450</u>	<u>382.610</u>	<u>41.371</u>		
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> (Catatan 11)					Assets acquired for ijarah (Note 11)
Entitas dan lembaga Pemerintah	18.647	65.215	210.131		Government entities and institutions
Aset lain-lain (Catatan 13)					Other assets (Note 13)
Entitas induk	7.370	7.020	4.311		Parent company
Jumlah aset dari pihak-pihak berelasi	<u>8.429.587</u>	<u>5.307.814</u>	<u>2.495.193</u>		Total assets from related parties
Jumlah aset	<u>31.543.384</u>	<u>27.687.188</u>	<u>24.230.247</u>		Total assets
Persentase jumlah aset dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah aset	<u>26,72%</u>	<u>19,17%</u>	<u>10,30%</u>		Percentage of total assets from related parties to total assets

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties (continued)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows (continued):

		31 Desember/December 31			
		2017	2016	2015	
Liabilitas					Liabilities
Giro wadiah (Catatan 16)					Wadiah demand deposits (Note 16)
Hubungan melalui Dana Pensiun BRI		7.844	8.535	6.422	Relationship through Pension Funds of BRI
Hubungan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		6.129	8.468	4.890	Management relations with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Entitas dan lembaga Pemerintah		2.103	2.480	4.821	Government entities and institutions
		<u>16.076</u>	<u>19.483</u>	<u>16.133</u>	
Tabungan wadiah (Catatan 17)					Wadiah savings deposits (Note 17)
Hubungan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		4.291	4.347	853	Management relations with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Karyawan kunci		3.526	1.934	2.517	Key employees
		<u>7.817</u>	<u>6.281</u>	<u>3.370</u>	
Simpanan dari bank lain (Catatan 18)					Deposits from other banks (Note 18)
Entitas induk		-	410.000		Parent company
Hubungan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		-	-	476.355	Management relations with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
		<u>-</u>	<u>410.000</u>	<u>476.355</u>	
Liabilitas imbalan kerja - karyawan kunci		22.529	16.157	10.514	Liabilities for employee benefits - key personnel
Pinjaman yang diterima (Catatan 19)					Fund borrowing (Note 19)
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)		-	100.000	100.000	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)
Jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi		<u>46.422</u>	<u>551.921</u>	<u>606.372</u>	Total liabilities from related parties
Jumlah liabilitas		<u>9.100.455</u>	<u>8.464.428</u>	<u>6.421.537</u>	Total liabilities
Persentase jumlah liabilitas dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah liabilitas		<u>0,51%</u>	<u>6,52%</u>	<u>9,44%</u>	Percentage of total liabilities from related parties to total liabilities

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2017, 2016 and 2015
 For the Years Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

41. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

41. INFORMATION ON TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

b. Transaksi pihak-pihak berelasi (lanjutan)

b. Transaction with related parties (continued)

Dalam kegiatan perbankan, Bank melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagai berikut (lanjutan):

For banking activities, the Bank has performed the following transactions with related parties as follows (continued):

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
<u>Dana Syirkah Temporer</u>				<u>Temporary Syirkah Funds</u>
Deposito <i>mudharabah</i> (Catatan 25a)				<i>Mudharabah time deposits (Note 25a)</i>
Entitas dan				<i>Government entities and institutions</i>
lembaga Pemerintah	15.550	23.491	28.041	<i>Relationship through Pension Funds of BRI</i>
Hubungan melalui Dana Pensiun BRI	32.309	55.448	32.733	<i>Management relations with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk</i>
Hubungan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.600	4.600	33.529	<i>Key employees</i>
Karyawan kunci	5.543	5.584	6.755	
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer dari pihak-pihak berelasi	58.002	89.123	101.058	<i>Total temporary syirkah funds from related parties</i>
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	19.840.088	16.712.746	15.468.898	<i>Total temporary syirkah funds</i>
Persentase jumlah dana <i>syirkah</i> temporer dari pihak-pihak berelasi terhadap jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	0,29%	0,53%	0,65%	<i>Percentage of total temporary syirkah funds from related parties to total temporary syirkah funds</i>
<u>Rekening administratif</u>				<u>Administrative accounts</u>
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan (tidak diaudit) (catatan 38a)				<i>Unused financing facilities (unaudited) (notes 38a)</i>
PT Pegadaian (Persero)	-	100.000	-	<i>PT Pegadaian (Persero)</i>
Jumlah	-	100.000	-	<i>Total</i>

Perusahaan menyediakan kompensasi dan manfaat kepada Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

The Company provides compensation and benefits for the Boards of Commissioners and Directors as follows:

	31 Desember/December 31			
	2017	2016	2015	
Imbalan kerja jangka pendek	6.403	3.588	6.185	<i>Short-term employee benefits</i>
Persentase terhadap total beban	0,39%	0,24%	0,45%	<i>Percentage to total expenses</i>

42. MANAJEMEN RISIKO

42. RISK MANAGEMENT

Bank dalam menjalankan usahanya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko. Seiring dengan berkembangnya bisnis Bank, risiko yang dihadapi Bank menjadi semakin kompleks. Bank dituntut untuk mampu menerapkan manajemen risiko yang handal agar dapat beradaptasi dengan kompleksitas

The Bank's business is constantly exposed to various risks. Along with the development of the Bank's business, risks faced by the Bank became increasingly complex. Bank is required to implement a reliable risk management in order to adapt to the complexity of the business. The principles of risk

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

kegiatan usaha tersebut. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang diterapkan harus dapat mendukung Bank untuk lebih berhati-hati seiring dengan perkembangan kegiatan usaha dan operasional perbankan yang sangat pesat..

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Upaya yang dilakukan Bank untuk mengurangi eksposur risiko pembiayaan, diantaranya melalui berbagai langkah mitigasi risiko pembiayaan dengan menggunakan sejumlah teknik seperti agunan dan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi dampak risiko. Teknik mitigasi risiko pembiayaan memungkinkan Bank untuk terlindungi dari terjadinya pemburukan kualitas pembiayaan.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko pembiayaan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan dari calon nasabah.
- 2) Melakukan *review* terhadap kebijakan pembiayaan dan prosedur operasi standar untuk setiap segmen pembiayaan.
- 3) Mengembangkan *loan originating system* untuk pembiayaan mikro dan konsumen sebagai alat yang membantu untuk mengurangi risiko pembiayaan.
- 4) Menetapkan target *market* nasabah dalam rangka mengantisipasi terjadinya *Non-Performing Financing (NPF)*.
- 5) Melakukan analisa portofolio terhadap pembiayaan yang diberikan baik berdasarkan segmen bisnis maupun sektor industri.
- 6) Menentukan Batas Maksimum Penyaluran Dana internal.
- 7) Melakukan analisa dampak terhadap pembiayaan Bank akibat terjadinya penurunan harga komoditas dan penurunan ekspor.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

management practices should be used to support the Bank in the development of business activities and banking operations very rapidly.

a. Financing Risk

Financing risk is the risk of the failure of customers or other parties to fulfill their obligations to the Bank in accordance with the agreed contract.

Efforts are made to reduce the Bank's exposure to financing risk, such as through a variety of measures of financing risk mitigation by using a number of techniques such as collateral and third party guarantees to reduce the risks. Financing risk mitigation techniques enable the Bank to be protected against the deterioration of the quality of financing.

The actions taken by the Bank to minimize the financing risk include the following:

- 1) *Conducting an analysis of funding requests from prospective customers.*
- 2) *Reviewing the financial policies and standard operating procedures for each segment of the financing.*
- 3) *Developing loan originating system for microfinance and consumer financing as a tool to help reducing the financing risk.*
- 4) *Defining the customers market target in order to anticipate the occurrence of Non-Performing Financing (NPF).*
- 5) *Conducting a portfolio analysis of the financing provided both by business and industry segments.*
- 6) *Defining internal Disbursement Limit.*
- 7) *Analyzing the impact on Bank's financing due to lower commodity prices and a decline in exports.*

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan

Tabel di bawah menunjukkan kualitas aset keuangan berdasarkan golongan aset untuk semua aset keuangan yang mempunyai risiko pembiayaan (diluar cadangan kerugian penurunan nilai):

31 Desember/December 31, 2017

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired		Mengalami penurunan nilai/Impaired	Jumlah/Total	
	Tingkat tinggi/High grade	Tingkat standar/Standard grade					
Aset							Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.015.626	-	-	-	-	4.015.626	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	245.821	-	-	-	-	245.821	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	7.411.068	-	-	-	-	7.411.068	Investments in marketable securities
Piutang murabahah	8.837.202	291.435	650.324	1.108.004	10.886.965	10.886.965	Murabahah receivables
Piutang istishna	1.677	-	693	2.051	4.421	4.421	Istishna receivables
Pinjaman qardh	509.742	-	13.772	14.729	538.243	538.243	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	800.899	34.066	12.257	10.797	858.019	858.019	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	4.427.430	377.689	404.446	367.655	5.577.220	5.577.220	Musyarakah financing
Aset lain-lain*)	193.060	-	-	-	-	193.060	Other assets*)
Jumlah	26.442.525	703.190	1.081.492	1.503.236	29.730.443	29.730.443	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

31 Desember/December 31, 2016

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/Neither past due nor impaired		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/Past due but not impaired		Mengalami penurunan nilai/Impaired	Jumlah/Total	
	Tingkat tinggi/High grade	Tingkat standar/Standard grade					
Aset							Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3.814.178	-	-	-	-	3.814.178	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	453.391	-	-	-	-	453.391	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	4.706.065	-	-	-	-	4.706.065	Investments in marketable securities
Piutang murabahah	8.747.928	252.875	1.235.657	545.783	10.782.243	10.782.243	Murabahah receivables
Piutang istishna	2.445	-	1.061	2.394	5.900	5.900	Istishna receivables
Pinjaman qardh	280.150	-	14.415	823	295.388	295.388	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	1.232.204	37.025	14.874	1.479	1.285.582	1.285.582	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	4.182.477	324.670	604.643	268.040	5.379.830	5.379.830	Musyarakah financing
Aset lain-lain*)	172.141	-	-	-	-	172.141	Other assets*)
Jumlah	23.590.979	614.570	1.870.650	818.519	26.894.718	26.894.718	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

a. Financing Risk (continued)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

(i) Financial assets quality (continued)

Tahun yang berakhir 31 Desember 2017/
 Year ended December 31, 2017

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>					
Aset							Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	-	-	-	-	4.769.138	<i>Current accounts and placements with Bank Indonesia</i>
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	-	-	-	-	130.417	<i>Current accounts and placements with other banks</i>
Investasi pada surat berharga	2.181.054	-	-	-	-	2.181.054	<i>Investments in marketable securities</i>
Piutang <i>murabahah</i>	8.513.080	201.431	798.537	490.227	10.003.275	10.003.275	<i>Murabahah receivables</i>
Piutang <i>istishna</i>	3.868	-	1.174	2.386	7.428	7.428	<i>Istishna receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	366.286	-	20.391	12.197	398.874	398.874	<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	1.109.454	485	7.312	4.216	1.121.467	1.121.467	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	3.610.654	189.004	988.913	294.392	5.082.963	5.082.963	<i>Musyarakah financing</i>
Aset lain-lain*)	139.622	-	-	-	139.622	139.622	<i>Other assets*)</i>
Jumlah	20.823.573	390.920	1.816.327	803.418	23.834.238		Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

Kualitas pembiayaan didefinisikan sebagai berikut:

Financing quality are defined as follows:

Tingkat tinggi

High grade

- (a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia, giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada institusi Pemerintah, institusi Pemerintah Daerah, bank yang terdaftar di bursa serta transaksi dengan bank yang memiliki reputasi baik dengan tingkat kemungkinan gagal bayar atas kewajiban yang rendah.
- (b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, efek-efek dan obligasi yang termasuk dalam *investment grade* dengan rating minimal idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) atau BBB+ (Fitch).
- (c) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang sangat baik dan tidak pernah menunggak sepanjang jangka waktu pembiayaan dan debitur dengan riwayat tidak pernah direstrukturisasi.

- (a) *Current accounts and placements with Bank Indonesia, current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with the Sovereign, local government institutions, banks listed in the stock exchange and transaction with reputable banks with low probability of insolvency.*
- (b) *Investments in marketable securities are securities issued by Government and investment grade securities and bonds with a rating of at least idBBB (Pefindo), BBB+ (S&P), Baa1 (Moody's) or BBB+ (Fitch).*
- (c) *Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to borrowers with very satisfactory track record of loan repayment and whose accounts did not turn as due during the term of the loan and borrowers whose accounts has never been restructured.*

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

- (d) Aset lain-lain yaitu piutang kepada Pemerintah (termasuk Bank Indonesia) atau Pemerintah Daerah seperti piutang pendapatan yang masih akan diterima.

Tingkat standar

- (a) Giro dan penempatan pada bank lain yaitu giro atau penempatan pada bank yang tidak terdaftar di bursa.
- (b) Investasi pada surat berharga yaitu surat berharga yang termasuk dalam *non-investment grade* dengan rating minimal idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) atau BBB- (Fitch).
- (c) Pembiayaan, piutang dan pinjaman yaitu pembiayaan, piutang dan pinjaman kepada debitur dengan riwayat pembayaran yang baik dan debitur dengan riwayat pernah direstrukturisasi.
- (d) Aset lain-lain yaitu aset keuangan lainnya selain piutang pendapatan yang masih akan diterima kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah seperti tagihan rupa-rupa kepada pihak ketiga lainnya.

Berdasarkan PSAK 60, aset keuangan yang telah jatuh tempo ditentukan ketika debitur gagal melakukan pembayaran sesuai jadwal. Tabel di bawah menunjukkan *aging analysis* terhadap pembiayaan, piutang dan pinjaman yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai:

31 Desember 2017/ December 31, 2017					
	≤ 30 hari/ days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total	
Piutang <i>murabahah</i>	252.471	169.765	228.088	650.324	<i>Murabahah receivables</i>
Piutang <i>istishna</i>	186	370	137	693	<i>Istishna receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	3.294	5.889	4.589	13.772	<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	2.336	-	9.921	12.257	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	375.225	7.327	21.894	404.446	<i>Musyarakah financing</i>
Jumlah	633.512	183.351	264.629	1.081.492	Total

31 Desember 2016/ December 31, 2016					
	≤ 30 hari/ days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total	
Piutang <i>murabahah</i>	864.505	156.457	214.695	1.235.657	<i>Murabahah receivables</i>
Piutang <i>istishna</i>	564	361	136	1.061	<i>Istishna receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	10.872	2.571	972	14.415	<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	10.233	4.221	420	14.874	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	585.727	13.105	5.811	604.643	<i>Musyarakah financing</i>
Jumlah	1.471.901	176.715	222.034	1.870.650	Total

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financing Risk (continued)

(i) Financial assets quality (continued)

- (d) Other assets are receivables from Sovereign (including Bank Indonesia) or local government such as income receivables.

Standard grade

- (a) Current accounts and placements with other banks are current accounts or placements with non-listed banks.
- (b) Investments in marketable securities are non-investment grade securities with a rating of at least idBB (Pefindo), BBB- (S&P), Baa3 (Moody's) or BBB- (Fitch).
- (c) Financing, receivables and funds are financing, receivables and funds to borrowers with an average track record of loan repayment and borrowers whose accounts has been restructured.
- (d) Other assets are financial assets other than income receivables from Sovereign or local government such as other receivables to third parties.

According to SFAS 60, financial asset is due when the repayment is default. The table below shows aging analysis of past due but not impaired financing, receivables and fund:

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

(i) Kualitas aset keuangan (lanjutan)

Kualitas pembiayaan didefinisikan sebagai berikut (lanjutan):

Tingkat standar (lanjutan)

	31 Desember/December 31, 2015			
	≤ 30 hari/ days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total
Piutang <i>murabahah</i>	521.740	183.057	93.740	798.537
Piutang <i>istishna</i>	431	712	31	1.174
Pinjaman <i>qardh</i>	13.076	4.418	2.897	20.391
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	5.835	1.477	-	7.312
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	979.952	4.454	4.507	988.913
Jumlah	1.521.034	194.118	101.175	1.816.327

Murabahah receivables
Istishna receivables
Funds of qardh
Mudharabah financing
Musyarakah financing

Total

(ii) Analisa konsentrasi risiko

(a) Sektor geografis

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (tidak diaudit):

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financing Risk (continued)

(i) Financial assets quality (continued)

Financing quality are defined as follows (continued):

Standard grade (continued)

	31 Desember/December 31, 2015			
	≤ 30 hari/ days	31 - 60 hari/ days	61 - 90 hari/ days	Jumlah/ Total
Piutang <i>murabahah</i>	521.740	183.057	93.740	798.537
Piutang <i>istishna</i>	431	712	31	1.174
Pinjaman <i>qardh</i>	13.076	4.418	2.897	20.391
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	5.835	1.477	-	7.312
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	979.952	4.454	4.507	988.913
Jumlah	1.521.034	194.118	101.175	1.816.327

(ii) Risk concentration analysis

(a) Geographical sectors

The following tables show the details of financing exposures categorized by geographic area as of December 31, 2017, 2016 and 2015. Geographic grouping is based on the Bank's business operations which also illustrates the business potential of each region (unaudited):

	31 Desember/December 31, 2017					Jumlah/ Total	
	Jabodetabek	Jawa/Java	Sumatera	Kalimantan/ Borneo	Indonesia Timur dan Bali/ East Indonesia and Bali		
Aset							Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.015.626	-	-	-	-	4.015.626	<i>Current accounts and placements with Bank Indonesia</i>
Giro dan penempatan pada bank lain	245.821	-	-	-	-	245.821	<i>Current accounts and placements with other banks</i>
Investasi pada surat berharga	7.411.068	-	-	-	-	7.411.068	<i>Investments in marketable securities</i>
Piutang <i>murabahah</i>	2.193.397	4.393.613	2.000.365	1.186.796	1.112.794	10.886.965	<i>Murabahah receivables</i>
Piutang <i>istishna</i>	4.090	331	-	-	-	4.421	<i>Istishna receivables</i>
Pinjaman <i>qardh</i>	364.658	121.958	30.510	16.744	4.373	538.243	<i>Funds of qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	439.353	324.282	70.654	11.444	12.286	858.019	<i>Mudharabah financing</i>
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	2.756.581	1.893.661	523.498	175.755	227.725	5.577.220	<i>Musyarakah financing</i>
Aset lain-lain*)	118.303	40.892	16.691	7.705	9.469	193.060	<i>Other assets*)</i>
Jumlah	17.548.897	6.774.737	2.641.718	1.398.444	1.366.647	29.730.443	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(590.469)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto						29.139.974	Net
Rekening Administratif							Administrative accounts
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan (tidak diaudit)	30.708	52.320	11.345	2.122	9.002	105.497	<i>Unused financing facility (unaudited)</i>
Bank garansi yang diterbitkan	26.220	98.924	7.417	-	-	132.561	<i>Bank guarantees issued</i>
Jumlah	56.928	151.244	18.762	2.122	9.002	238.058	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

(ii) Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

(a) Sektor geografis (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan yang dikategorikan berdasarkan wilayah geografis pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015. Pengelompokan wilayah geografis berdasarkan tempat beroperasinya bisnis Bank yang sekaligus menggambarkan potensial bisnis wilayah masing-masing (tidak diaudit): (lanjutan)

31 Desember/December 31, 2016

	Jabodetabek	Jawa/Java	Sumatera	Kalimantan/Borneo	Indonesia Timur dan Bali/East Indonesia and Bali	Jumlah/Total	
Aset							Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3.814.178	-	-	-	-	3.814.178	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	453.391	-	-	-	-	453.391	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	4.706.065	-	-	-	-	4.706.065	Investments in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	2.395.337	4.486.483	1.863.954	1.028.557	1.007.912	10.782.243	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>	5.397	503	-	-	-	5.900	Istishna receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	35.066	190.833	43.454	21.179	4.826	295.388	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	680.502	469.436	96.050	21.202	18.392	1.285.582	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	2.445.990	1.756.334	555.268	197.340	424.898	5.379.830	Musyarakah financing
Aset lain-lain*)	107.458	34.573	14.948	7.782	7.380	172.141	Other assets*)
Jumlah	14.643.414	6.938.162	2.573.674	1.276.060	1.463.408	26.894.718	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(492.156)	Allowance for impairment losses
Neto						26.402.562	Net
Rekening Administratif							Administrative Accounts
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan (tidak diaudit)	131.978	86.994	21.186	3.154	11.338	254.650	Unused financing facility (unaudited)
Bank garansi yang diterbitkan	33.548	19.578	906	184	-	54.216	Bank guarantees issued
Jumlah	165.526	106.572	22.092	3.338	11.338	308.866	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

31 Desember 2015/
December 31, 2015

	Jabodetabek	Jawa/Java	Sumatera	Kalimantan/Borneo	Indonesia Timur dan Bali/East Indonesia and Bali	Jumlah/Total	
Aset							Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	-	-	-	-	4.769.138	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	-	-	-	-	130.417	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	2.181.054	-	-	-	-	2.181.054	Investments in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	2.622.182	3.883.312	1.774.899	853.556	869.326	10.003.275	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>	6.851	577	-	-	-	7.428	Istishna receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	47.686	267.027	54.894	23.195	6.072	398.874	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	572.363	425.882	77.642	29.570	16.010	1.121.467	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	2.234.253	1.592.440	528.415	218.450	509.405	5.082.963	Musyarakah financing
Aset lain-lain*)	139.622	-	-	-	-	139.622	Other assets*)
Jumlah	12.703.566	6.169.238	2.435.850	1.124.771	1.400.813	23.834.238	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai						(369.969)	Allowance for impairment losses
Neto						23.464.269	Net
Rekening Administratif							Administrative accounts
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan (tidak diaudit)	17.233	106.510	17.715	3.811	10.103	155.372	Unused financing facility (unaudited)
Bank garansi yang diterbitkan	31.839	16.598	489	-	-	48.926	Bank guarantees issued
Jumlah	49.072	123.108	18.204	3.811	10.103	204.298	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

(ii) Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

(b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (tidak diaudit):

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financing Risk (continued)

(ii) Risk concentration analysis (continued)

(b) Industrial sector (continued)

The following tables provide the details of the financing exposure at the carrying amounts categorized by industrial sector as of December 31, 2017, 2016 and 2015 (unaudited):

31 Desember/December 31, 2017

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total	
Aset						Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.015.626	-	-	-	4.015.626	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	-	245.821	-	-	245.821	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	6.895.346	263.628	252.094	-	7.411.068	Investments in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	2.261	1.018	2.123.078	8.760.608	10.886.965	Murahabah receivables
Piutang <i>istishna</i>	-	-	2.011	2.410	4.421	Istishna receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	-	-	365.799	172.444	538.243	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	2.313	103.516	752.190	-	858.019	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	400.000	400.000	4.200.971	576.249	5.577.220	Musyarakah financing
Aset lain-lain*)	-	-	193.060	-	193.060	Other assets*)
Jumlah	11.315.546	1.013.983	7.889.203	9.511.711	29.730.443	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(590.469)	Allowance for impairment losses
Neto					29.139.974	Net
Rekening Administratif Liabilitas						Administrative Accounts Liabilities
Fasilitas pembiayaan yang Belum digunakan (tidak diaudit)	-	59.197	46.300	-	105.497	Unused financing facility (unaudited)
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	132.011	550	132.561	Bank guarantees issued
Jumlah	-	59.197	178.311	550	238.058	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

(ii) Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

(b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (tidak diaudit) (lanjutan):

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financing Risk (continued)

(ii) Risk concentration analysis (continued)

(b) Industrial sector (continued)

The following tables provide the details of the financing exposure at the carrying amounts categorized by industrial sector as of December 31, 2017, 2016 and 2015 (unaudited) (continued):

31 Desember/December 31, 2016						
	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total	
Aset						Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3.814.178	-	-	-	3.814.178	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	-	453.391	-	-	453.391	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	4.420.469	228.919	56.677	-	4.706.065	Investments in marketable securities
Piutang murabahah	4.119	4.970	2.505.476	8.267.678	10.782.243	Murabahah receivables
Piutang istishna	-	-	2.321	3.579	5.900	Istishna receivables
Pinjaman qardh	-	33	49.212	246.143	295.388	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	12.741	119.001	1.153.608	232	1.285.582	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	672.862	45.366	3.969.878	691.724	5.379.830	Musyarakah financing
Aset lain-lain*)	90.497	-	81.644	-	172.141	Other assets*)
Jumlah	9.014.866	851.680	7.818.816	9.209.356	26.894.718	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(492.156)	Allowance for impairment losses
Neto					26.402.562	Net
Rekening Administratif Liabilitas						Administrative Accounts Liabilities
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan (tidak diaudit)	100.000	-	97.808	56.842	254.650	Unused financing facility (unaudited)
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	53.665	551	54.216	Bank guarantees issued
Jumlah	100.000	-	151.473	57.393	308.866	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

(ii) Analisa konsentrasi risiko (lanjutan)

(b) Sektor industri (lanjutan)

Tabel berikut menggambarkan rincian eksposur pembiayaan pada nilai tercatat yang dikategorikan berdasarkan sektor industri pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (tidak diaudit) (lanjutan):

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financing Risk (continued)

(ii) Risk concentration analysis (continued)

(b) Industrial sector (continued)

The following tables provide the details of the financing exposure at the carrying amounts categorized by industrial sector as of December 31, 2017, 2016 and 2015 (unaudited) (continued):

31 Desember/December 31, 2015

	Pemerintah (termasuk Bank Indonesia)/ Government (including Bank Indonesia)	Bank dan lembaga keuangan lainnya/ Banks and other financial institutions	Perusahaan lainnya/ Other companies	Perseorangan/ Individuals	Jumlah/ Total	
Aset						Assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.769.138	-	-	-	4.769.138	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	-	130.417	-	-	130.417	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	2.069.167	51.046	60.841	-	2.181.054	Investments in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	-	391	2.401.553	7.601.331	10.003.275	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>	-	-	57	7.371	7.428	Istishna receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	-	-	68.342	330.532	398.874	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	-	123.930	995.641	1.896	1.121.467	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musarakah</i>	-	-	4.240.673	842.290	5.082.963	Musarakah financing
Aset lain-lain*)	30.297	-	109.325	-	139.622	Other assets*)
Jumlah	6.868.602	305.784	7.876.432	8.783.420	23.834.238	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(369.969)	Allowance for impairment losses
Neto					23.464.269	Net
Rekening Administratif Liabilitas						Administrative Accounts Liabilities
Fasilitas pembiayaan yang belum digunakan (tidak diaudit)	-	-	90.787	64.585	155.372	Unused financing facility (unaudited)
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	47.583	1.343	48.926	Bank guarantees issued
Jumlah	-	-	138.370	65.928	204.298	Total

*) Aset lain-lain terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

*) Other assets consist of income receivables

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan

- (a) Giro dan penempatan pada Bank Indonesia

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

- (b) Giro dan penempatan pada bank lain

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

- (c) Investasi pada surat berharga

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, aset keuangan ini tidak mengalami penurunan nilai secara individual maupun kolektif.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financing Risk (continued)

(iii) Impairment of financial assets

- (a) Current accounts and placements with Bank Indonesia

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, this financial assets are not individually or collectively impaired.

- (b) Current accounts and placements with other banks

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, this financial assets is not individually or collectively impaired.

- (c) Investments in marketable securities

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, this financial assets is not individually or collectively impaired.

31 Desember/December 31, 2017

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>				
Jasa pelayanan sosial	584.947	50.973	30.754	33.244	699.918	Social services
Perdagangan	3.076.459	231.924	467.520	347.929	4.123.832	Trading
Jasa dunia usaha	1.218.656	10.044	126.293	59.494	1.414.487	Business services
Perindustrian	2.224.012	59.711	30.091	430.397	2.744.211	Manufacturing
Pertanian	964.353	114.943	43.162	57.373	1.179.831	Agriculture
Konstruksi	1.647.828	140.388	9.637	11.963	1.809.816	Construction
Pengangkutan	545.186	87.032	23.993	272.754	928.965	Transportation
Listrik, air dan gas	115.235	-	1.421	777	117.433	Electricity, water and gas
Pertambangan	18.609	235	1.163	1.101	21.108	Mining
Lain-lain	4.181.665	7.941	347.458	288.204	4.825.267	Others
Jumlah	14.576.950	703.190	1.081.492	1.503.236	17.864.868	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(590.469)	Allowance for impairment losses
Neto					17.274.399	Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

a. Financing Risk (continued)

(iii) Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

(iii) Impairment of financial assets (continued)

31 Desember/December 31, 2016

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>					
Jasa pelayanan sosial	4.191.217	58.597	310.973	138.082	4.698.869		<i>Social services</i>
Perdagangan	3.758.632	176.583	620.187	257.396	4.812.798		<i>Trading</i>
Jasa dunia usaha	1.899.503	157.198	27.842	128.233	2.212.776		<i>Business services</i>
Perindustrian	1.839.338	28.566	438.872	136.732	2.443.508		<i>Manufacturing</i>
Pertanian	931.542	54.603	116.320	36.035	1.138.500		<i>Agriculture</i>
Konstruksi	774.478	56.452	7.283	9.915	848.128		<i>Construction</i>
Pengangkutan	534.564	73.952	303.977	40.913	953.406		<i>Transportation</i>
Listrik, air dan gas	111.293	39	302	422	112.056		<i>Electricity, water and gas</i>
Pertambangan	77.886	160	3.503	3.072	84.621		<i>Mining</i>
Lain-lain	326.751	8.420	41.391	67.719	444.281		<i>Others</i>
Jumlah	14.445.204	614.570	1.870.650	818.519	17.748.943		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(492.156)		<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto					17.256.787		Net

31 Desember/December 31, 2015

	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>		Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past due but not impaired</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade</i>					
Jasa pelayanan sosial	3.499.318	38.066	199.172	293.166	4.029.722		<i>Social services</i>
Perdagangan	3.171.579	135.249	347.594	196.626	3.851.048		<i>Trading</i>
Jasa dunia usaha	1.783.337	40.264	443.807	23.401	2.290.809		<i>Business services</i>
Perindustrian	1.830.939	12.908	231.548	139.879	2.215.274		<i>Manufacturing</i>
Pertanian	791.236	25.562	99.095	26.487	942.380		<i>Agriculture</i>
Konstruksi	506.258	361	165.298	1.688	673.605		<i>Construction</i>
Pengangkutan	412.863	134.411	265.445	72.808	885.527		<i>Transportation</i>
Listrik, air dan gas	57.727	250	16	276	58.269		<i>Electricity, water and gas</i>
Pertambangan	107.229	440	352	2.570	110.591		<i>Mining</i>
Lain-lain	1.442.856	3.409	64.000	46.517	1.556.782		<i>Others</i>
Jumlah	13.603.342	390.920	1.816.327	803.418	16.614.007		Total
Cadangan kerugian penurunan nilai					(369.969)		<i>Allowance for impairment losses</i>
Neto					16.244.038		Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

a. Risiko Pembiayaan (lanjutan)

- (iv) Analisa eksposur maksimum terhadap risiko pembiayaan setelah memperhitungkan dampak agunan dan mitigasi risiko pembiayaan lainnya

Nilai tercatat dari aset keuangan bank selain pembiayaan yang diberikan menggambarkan eksposur maksimum atas risiko pembiayaan.

Untuk pembiayaan yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Berdasarkan klasifikasi, pembiayaan Bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Partially secured loans*

Untuk *secured loans*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijamin sesuai skema pembiayaan. Jenis dari agunan terdiri dari:

- a. *Physical collateral*, berupa tanah dan bangunan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan bermotor dan properti.
- b. *Financial collateral*, berupa simpanan (tabungan, giro, deposito), surat berharga dan emas.

Apabila terjadi *default* (gagal bayar), Bank akan menggunakan agunan tersebut sebagai pilihan terakhir untuk pemenuhan kewajiban *counterparty*.

Partially secured loans terdiri dari pembiayaan untuk golongan berpenghasilan tetap, pembiayaan untuk para pensiunan dan pembiayaan konsumen lainnya. Dalam pembayaran kewajibannya, *partially secured loans* umumnya dilakukan melalui pemotongan penghasilan secara otomatis. Dengan demikian, tingkat risiko dari *partially secured loans* tidak sebesar nilai tercatat pembiayaannya.

Mitigasi risiko pembiayaan untuk *partially secured loans* terdiri dari surat keputusan pengangkatan pegawai dan surat keterangan pensiun.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

a. Financing Risk (continued)

- (iv) Analysis of maximum exposure to financing risk after considering the effect of collateral and other financing enhancements

The carrying value of Bank's financial assets other than financing represent the maximum exposure to financing risk.

For the financing loans, Bank uses the collateral to minimize the financing risk. Loans are classified into two major category, which is:

1. *Secured loans*
2. *Partially secured loans*

For *secured loans*, Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme. Types of collateral are as follows:

- a. *Physical collateral*, such as land and buildings, proof of vehicle ownership and properties.
- b. *Financial collateral*, such as deposits (time deposits, savings, demand deposit), securities and gold.

In case of *default*, Bank will use the collateral as the last resort in recovering its investment.

Partially secured loans are loans for fixed income employees, loans for retirees, and other consumer loans. In their payment obligations, *partially secured loans* are generally made through automatic payroll deduction. Hence, maximum exposure to financing risk is lower than the carrying value.

Financing risk mitigations for *partially secured loans* consist of employee recruitment decision letter and certificate of retirement.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko dari perubahan nilai aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Risiko pasar terdiri dari dua jenis risiko: risiko nilai tukar dan risiko pergerakan harga sukuk yang diklasifikasikan pada nilai wajar.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko pasar diantaranya sebagai berikut:

- Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko pasar.
- Melakukan pengawasan terhadap perkembangan tingkat margin di pasar dan menganalisa pengaruhnya terhadap kinerja Bank.

Risiko Nilai Tukar

Risiko nilai tukar merupakan risiko yang timbul karena adanya *gap* posisi valuta asing yang dimiliki Bank yang tercermin dalam Posisi Devisa Neto (PDN) baik secara individual maupun secara keseluruhan. Termasuk dalam posisi valuta asing tersebut yaitu posisi *trading book* yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan transaksi valuta asing dalam jangka pendek maupun posisi *banking book* dalam rangka pengendalian PDN.

Perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN) didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 5/13/PBI/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank diwajibkan untuk menjaga rasio PDN maksimum 20% dari jumlah modal. PDN adalah penjumlahan nilai absolut yang dinyatakan dalam Rupiah dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi yang dicatat dalam rekening administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market Risk

Market risk is a risk due to changes in market prices, such as risks of changes in the value of assets that can be traded or leased. Market risk comprise two types of risk: exchange rate risk and the risk of price movement of sukuk that classified at fair value.

The actions taken by the Bank to minimize market risk include the following:

- Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of market risk.
- Monitoring the development of margin rates in the market and analyzing its effect on the Bank's performance.

Exchange Rate Risk

Exchange rate risk is the risk due to the gap of foreign exchange positions held by the Bank which is reflected in the Net Open Position (NOP) either individually or as a whole. Included in the foreign exchange position is the position of the trading book which is done either to gain foreign exchange transaction income in the short-term period or banking book positions in order to control NOP.

The Net Open Position (NOP) is calculated based on Bank Indonesia Regulation No. 5/13/PBI/2003 dated July 1, 2003 which was last amended by Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. Based on this regulation, the Bank is required to maintain Net Open Position ratio at a maximum of 20% of the total capital. The NOP is the sum of the absolute values, which are stated in Rupiah, of the net difference between the assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of the receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2017, 2016 and 2015
 For the Years Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Berikut adalah PDN Bank pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 sebagai berikut:

42. RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market Risk (continued)

Exchange Rate Risk (continued)

The NOP of Bank as of December 31, 2017, 2016 and 2015 are as follows:

31 Desember/December 31, 2017				
Mata Uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	Currencies
Laporan Posisi Keuangan Dan Rekening Administratif				Statement of Financial Position and Administrative Accounts
Dolar Amerika Serikat	260.172	257.111	3.061	United States Dollar
Riyal Saudi Arabia	70.425	61.139	9.286	Saudi Arabian Riyal
Jumlah			12.347	Total
Modal (Catatan 44a)			3.611.233	Capital (Note 44a)
Rasio PDN			0,34%	NOP Ratio
31 Desember 2016/ December 31, 2016				
Mata Uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	Currencies
Laporan Posisi Keuangan Dan Rekening Administratif				Statement of Financial Position and Administrative Accounts
Dolar Amerika Serikat	323.908	277.830	46.078	United States Dollar
Riyal Saudi Arabia	3.492	-	3.492	Saudi Arabian Riyal
Jumlah			49.570	Total
Modal (Catatan 44a)			3.467.399	Capital (Note 44a)
Rasio PDN			1,43%	NOP Ratio
31 Desember 2015/ December 31, 2015				
Mata Uang	Aset/ Assets	Liabilitas/ Liabilities	Posisi Devisa Neto/ Net Open Position	Currencies
Laporan Posisi Keuangan Dan Rekening Administratif				Statement of Financial Position and Administrative Accounts
Dolar Amerika Serikat	290.512	150.905	139.607	United States Dollar
Riyal Saudi Arabia	1.139	-	1.139	Saudi Arabian Riyal
Jumlah			140.746	Total
Modal (Catatan 44a)			2.343.249	Capital (Note 44a)
Rasio PDN			6,01%	NOP Ratio

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

b. Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko Nilai Tukar (lanjutan)

Tabel di bawah ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemungkinan perubahan atas nilai tukar terhadap laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan asumsi bahwa semua variabel lain yang dimiliki adalah konstan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (tidak diaudit) (lanjutan):

31 Desember/December 31, 2017		
Perubahan persentase/ Change in percentage	Dampak terhadap laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ Impact to profit or (loss) and other comprehensive income before tax	
Mata Uang Asing	+1% 123 -1% (123)	Foreign Currencies
Tahun yang berakhir 31 Desember 2016/ Year ended December 31, 2016		
Perubahan persentase/ Change in percentage	Dampak terhadap laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ Impact to profit or (loss) and other comprehensive income before tax	
Mata Uang Asing	+1% 496 -1% (496)	Foreign Currencies
Tahun yang berakhir 31 Desember 2015/ Year ended December 31, 2015		
Perubahan persentase/ Change in percentage	Dampak terhadap laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain sebelum pajak/ Impact to profit or (loss) and other comprehensive income before tax	
Mata Uang Asing	+1% 1.407 -1% (1.407)	Foreign Currencies

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, dampak atas perubahan nilai tukar dari mata uang selain Dolar Amerika Serikat tidak material.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

b. Market Risk (continued)

Exchange Rate Risk (continued)

The tables below demonstrated the sensitivity of the Bank's profit or loss and other comprehensive income to reasonably possible changes in exchange rate, assuming all other variables are constant for the year ended December 31, 2017, 2016 and 2015 (unaudited) (continued):

For the years ended December 31, 2017, 2016 and 2015, the effect of fluctuations in exchange rates of currency other than United States Dollar is not material.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban. Seiring dengan perkembangan bisnis Bank, risiko likuiditas merupakan salah satu risiko yang menjadi perhatian utama Bank. Risiko ini dapat terjadi akibat pertumbuhan pembiayaan bank yang lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga. Perbedaan antara ketersediaan sumber dana dan jatuh tempo piutang dan pembiayaan dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban bank kepada nasabah dan pihak lainnya.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko likuiditas diantaranya sebagai berikut:

- 1) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.
- 2) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko likuiditas.
- 3) Melakukan *monitoring* terhadap kondisi likuiditas bank secara berkala melalui beberapa rasio liku seperti *Financing to Deposit Ratio* (FDR), rasio kewajiban antar-bank, arus kas dan kesenjangan likuiditas.
- 4) Menentukan batas risiko likuiditas seperti batas dari persyaratan Giro Wajib Minimum (GWM) dan juga *secondary reserve*.
- 5) Memelihara akses Bank ke pasar uang melalui penempatan dan pinjaman antar bank.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to the inability of the Bank to meet its maturing obligations. Along with the development of the Bank's business, liquidity risk is the risk that one of the major concern of the Bank. This risk may result from the growth of bank financing greater than the growth in deposits. The difference between the availability of funds and the receivable and financing maturity can lead to difficulty in meeting obligations for the Bank to the customers and other parties.

The actions taken by the Bank to minimize the liquidity risk include the following:

- 1) *Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of liquidity risk.*
- 2) *Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of liquidity risk.*
- 3) *Monitoring the liquidity conditions periodically through some liquidity ratios such Financing to Deposit Ratio (FDR), the ratio of inter-bank liabilities, cash flow and liquidity gaps.*
- 4) *Determining the liquidity risk limit such as limit of Statutory Reserve Requirement (GWM) and secondary reserve.*
- 5) *Maintaining access to the money market through placements and loans between banks.*

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisa jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo:

42. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity Risk (continued)

Table of asset and liabilities maturity analysis as of December 31, 2017, 2016 and 2015, based on the remaining maturity are as follows:

Keterangan	31 Desember 2017/ December 31, 2017					Jumlah/ Total	Descriptions
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ more than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ more than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities		
Aset							Assets
Kas	347.997	-	-	-	-	347.997	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3.915.626	100.000	-	-	-	4.015.626	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	245.821	-	-	-	-	245.821	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	1.642.239	1.076.614	286.119	4.406.096	-	7.411.068	Investments in marketable securities
Piutang murabahah	291.015	119.919	695.487	9.780.544	-	10.886.965	Murabahah receivables
Piutang istishna	183	125	505	3.608	-	4.421	Istishna receivables
Pinjaman qardh	59.770	82.357	391.931	4.185	-	538.243	Funds of qardh
Pembiayaan mudharabah	1.767	4.539	77.868	773.845	-	858.019	Mudharabah financing
Pembiayaan musyarakah	664.699	747.130	1.866.447	2.298.944	-	5.577.220	Musyarakah financing
Aset yang diperoleh untuk ijarah - neto	-	92	6.325	1.140.496	7	1.146.920	Assets acquired for ijarah-net
Aset tetap - neto	-	-	-	-	177.935	177.935	Premises and equipment-net
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	140.883	140.883	Deferred tax assets
Aset lain-lain	-	-	-	-	782.735	782.735	Other assets
	7.169.117	2.130.776	3.324.682	18.407.718	1.101.560	32.133.853	
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(590.469)	(590.469)	Total Allowance for impairment losses
Jumlah aset	7.169.117	2.130.776	3.324.682	18.407.718	511.091	31.543.384	Total Asset
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	86.752	-	-	-	-	86.752	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	35.683	-	-	-	-	35.683	Undistributed revenue sharing
Simpanan dari nasabah	6.518.996	-	-	-	-	6.518.996	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	14.333	-	-	-	-	14.333	Deposits from other banks
Utang pajak	40.391	-	-	-	-	40.391	Taxes payable
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	2.134	2.134	Estimated losses on commitments and contingencies
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	1.402.166	1.402.166	Other liabilities
Sukuk Mudharabah Subordinasi	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	subordinated sukuk mudharabah
Jumlah liabilitas	6.696.155	-	-	1.000.000	1.404.300	9.100.455	Total liabilities

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

Berikut adalah tabel mengenai analisa jatuh tempo aset dan liabilitas pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 berdasarkan waktu yang tersisa sampai dengan tanggal jatuh tempo (lanjutan):

42. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Liquidity Risk (continued)

Table of asset and liabilities maturity analysis as of December 31, 2017, 2016 and 2015 based on the remaining maturity are as follows (continued):

31 Desember 2017/ December 31, 2017							
Keterangan	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ more than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ more than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities	Jumlah/ Total	Descriptions
Dana Syirkah Temporer							Temporary Syirkah Funds
Tabungan <i>mudharabah</i>	1.270.484	-	-	-	-	1.270.484	Mudharabah savings deposits
Deposito <i>mudharabah</i>	14.286.208	4.003.630	140.231	-	-	18.430.069	Mudharabah time deposits
Giro <i>mudharabah</i>	139.535	-	-	-	-	139.535	Mudharabah demand deposits
Jumlah dana syirkah temporer	15.696.227	4.003.630	140.231	-	-	19.840.088	Total temporary syirkah funds
Perbedaan jatuh tempo	(15.223.265)	(1.872.854)	3.184.451	17.407.718	(893.209)	2.602.841	Maturity gap

31 Desember 2016/ December 31, 2016							
Keterangan	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ more than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ more than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities	Jumlah/ Total	Descriptions
Aset							Assets
Kas	318.105	-	-	-	-	318.105	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	2.364.178	100.000	1.350.000	-	-	3.814.178	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	453.391	-	-	-	-	453.391	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	1.235.665	1.028.985	187.909	2.253.506	-	4.706.065	Investments in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	250.189	76.112	622.016	9.833.926	-	10.782.243	Murabahah receivables
Piutang <i>istishna</i>	199	3	164	5.534	-	5.900	Istishna receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	58.152	108.470	122.116	6.650	-	295.388	Funds of qardh
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	805	4.151	65.865	1.214.761	-	1.285.582	Mudharabah financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	398.365	1.187.553	1.355.267	2.438.645	-	5.379.830	Musyarakah financing
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> – neto	-	-	-	-	286.181	286.181	Assets acquired for <i>ijarah</i> -neto
Aset tetap – neto	-	-	-	-	140.816	140.816	Premises and equipment-net
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	52.152	52.152	Deferred tax assets
Aset lain-lain	-	-	-	-	746.514	746.514	Other assets
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(579.157)	(579.157)	Total Allowance for impairment losses
Jumlah aset	5.079.049	2.505.274	3.703.337	15.753.022	1.225.663	28.266.345	Total Asset

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

**31 Desember 2016/
 December 31, 2016**

Keterangan	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ more than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ more than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities	Jumlah/ Total	Descriptions
Liabilitas							
Liabilities							
Liabilitas segera	86.911	-	-	-	-	86.911	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	34.991	-	-	-	-	34.991	Undistributed revenue sharing
Simpanan dari nasabah	5.306.321	-	-	-	-	5.306.321	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	972.719	-	-	-	-	972.719	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	-	-	-	100.000	-	100.000	Fund borrowing
Utang pajak	49.613	-	-	-	-	49.613	Taxes payable
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	895	895	Estimated losses on commitments and contingencies
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	912.978	912.978	Other liabilities
Sukuk <i>Mudharabah</i> Subordinasi	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	Subordinated Sukuk Mudharabah
Jumlah liabilitas	6.450.555	-	-	1.100.000	913.873	8.464.428	Total liabilities
Dana <i>Syirkah</i> Temporer							
Temporary <i>Syirkah</i> Funds							
Tabungan <i>mudharabah</i>	983.121	-	-	-	-	983.121	<i>Mudharabah</i> savings deposits
Deposito <i>mudharabah</i>	12.203.336	3.363.493	161.048	1.748	-	15.729.625	<i>Mudharabah</i> time deposits
Jumlah dana <i>syirkah</i> temporer	13.186.457	3.363.493	161.048	1.748	-	16.712.746	Total temporary <i>syirkah</i> funds
Perbedaan jatuh tempo	(14.557.963)	(858.219)	3.542.289	14.651.274	(267.367)	2.510.014	Maturity gap

**31 Desember 2015/
 December 31, 2015**

Keterangan	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ more than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ more than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities	Jumlah/ Total	Descriptions
Aset							
Assets							
Kas	279.855	-	-	-	-	279.855	Cash
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	3.419.138	300.000	1.050.000	-	-	4.769.138	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	130.417	-	-	-	-	130.417	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	10	-	522.127	1.658.917	-	2.181.054	Investments in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	21.257	180.835	578.827	9.222.356	-	10.003.275	<i>Murabahah</i> receivables
Piutang <i>istishna</i>	6	10	3.002	4.410	-	7.428	<i>Istishna</i> receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	103.209	143.726	52.501	99.438	-	398.874	Funds of <i>qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	925	7.399	65.297	1.047.846	-	1.121.467	<i>Mudharabah</i> financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	362.524	347.818	1.409.936	2.962.685	-	5.082.963	<i>Musyarakah</i> financing
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - neto	-	-	-	-	46.259	46.259	Assets acquired for <i>ijarah</i> -neto
Aset tetap - neto	-	-	-	-	156.188	156.188	Premises and equipment-net
Aset pajak tangguhan	-	-	-	-	28.186	28.186	Deferred tax assets
Aset lain-lain	-	-	-	-	407.022	407.022	Other assets
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	(381.879)	(381.879)	Total Allowance for impairment losses
Jumlah aset	4.317.341	979.788	3.681.690	14.995.652	637.655	24.612.126	Total Asset

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

42. RISK MANAGEMENT (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

Keterangan	31 Desember 2015/ December 31, 2015					Jumlah/ Total	Descriptions
	Sampai dengan 1 bulan/ Up to 1 month	Lebih dari 1 bulan sampai dengan 3 bulan/ more than 1 month up to 3 months	Lebih dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun/ more than 3 months up to 1 year	Lebih dari 1 tahun/ More than 1 year	Lainnya yang tidak memiliki jatuh tempo/ Others that have no maturities		
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segera	48.237	-	-	-	-	48.237	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	34.776	-	-	-	-	34.776	Undistributed revenue
Simpanan dan nasabah	4.654.760	-	-	-	-	4.654.760	sharing
Simpanan dari bank lain	890.852	-	-	-	-	890.852	Deposits from customers
Pinjaman yang diterima	-	-	-	100.000	-	100.000	Deposits from other banks
Utang pajak	56.416	-	-	-	-	56.416	Fund borrowing
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi	-	-	-	-	1.242	1.242	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	-	-	-	-	635.254	635.254	Estimated losses on commitments and contingencies
Jumlah liabilitas	5.685.041	-	-	100.000	636.496	6.421.537	Total liabilities
Dana Syirkah Temporer							Temporary Syirkah Funds
Tabungan mudharabah	696.198	-	-	-	-	696.198	Mudharabah savings
Deposito mudharabah	13.947.358	582.229	243.113	-	-	14.772.700	deposits
Jumlah dana syirkah temporer	14.643.556	582.229	243.113	-	-	15.468.898	Total temporary syirkah funds
Perbedaan jatuh tempo	(16.011.256)	397.559	3.438.577	14.895.652	(380.720)	2.339.812	Maturity gap

d. Risiko Operasional

d. Operational Risk

Risiko operasional adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate internal processes, failure of internal processes, human error, system failure and/or external events affecting the operations of the Bank.

Risiko operasional merupakan risiko utama yang dikelola Bank dalam bentuk pengembangan pengendalian internal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kontrol di kantor cabang melalui pemisahan tugas dan tanggung jawab, mekanisme *dual control* dalam pelaksanaan fungsi transaksi, deviasi/otorisasi, pembatasan otoritas sistem akses, peningkatan kompetensi karyawan dan pelaksanaan audit internal.

Operational risk is a major risk that is managed internally in the form of development control. One of the efforts is the increased control at the branch through the separation of duties and responsibilities, dual control mechanism in the implementation of the transaction function, deviation/authorization, restrictions on access to the system authority, increasing employee competence and the implementation of internal audit.

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional diantaranya sebagai berikut:

The actions taken by the Bank to minimize operational risks include the following:

- 1) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko operasional.
- 2) Mengembangkan panduan pengelolaan risiko operasional untuk kantor cabang.

- 1) Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of operational risk.
- 2) Developing guidelines for the management of operational risk for branches.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

d. Risiko Operasional (lanjutan)

Tindakan yang diambil oleh Bank untuk meminimalkan risiko operasional diantaranya sebagai berikut (lanjutan):

- 3) Menerapkan alat bantu *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) untuk menilai dan mitigasi risiko operasional yang sedang melakukan secara mandiri oleh unit-unit bisnis.
- 4) Melakukan analisa risiko operasional untuk produk baru yang diusulkan dan atau kegiatan yang akan diluncurkan oleh Bank.
- 5) Mengembangkan *Business Continuity Management* (BCM) untuk memastikan kelangsungan operasional Bank secara terus menerus meskipun terjadi gangguan (bencana) untuk melindungi kepentingan *stakeholder*.
- 6) Mengembangkan kebijakan manajemen risiko termasuk prosedur untuk teknologi informasi termasuk jaringan komunikasi data dan standarisasi perangkat lunak, manajemen sistem akses, pengembangan layanan perbankan elektronik dalam hal keamanan aksesibilitas dan *Disaster Recovery Plan*.

e. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Timbulnya risiko hukum antara lain dapat disebabkan karena kurangnya pendukung hukum atau kelemahan dari kontrak. Sebagai perusahaan yang diatur oleh hukum Republik Indonesia, Bank harus selalu mematuhi semua hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator dalam industri perbankan di Indonesia.

42. RISK MANAGEMENT (continued)

d. Operational Risk (continued)

The actions taken by the Bank to minimize operational risks include the following (continued):

- 3) Applying *Risk & Control Self Assessment* (RCSA) tools to assess and mitigate operational risk by doing independent business units.
- 4) Performing operational risk analysis for proposed new products or activities which will be launched by the Bank.
- 5) Developing a *Business Continuity Management* (BCM) to ensure the continuity of operations of the Bank is continuously despite the disturbance (disaster) to protect the interests of stakeholders.
- 6) Developing risk management policies including information technology and standardization of data communication network software, access system management, the development of electronic banking services in terms of accessibility security and *Disaster Recovery Plan*.

e. Legal Risk

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses of juridical aspects. The emergence of legal risk, among others can be caused by lack of legal support or weakness in the documentation of the contract. As a company governed by the laws of the Republic of Indonesia, the Bank must comply with all applicable laws and regulations issued by Bank Indonesia/ Financial Service Authority as a regulator in the banking industry in Indonesia.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

e. Risiko Hukum (lanjutan)

Selain itu, Bank juga harus mengikuti semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank. Kegagalan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dapat menimbulkan klaim litigasi terhadap Bank. Jika terjadi klaim litigasi terhadap Bank dalam jumlah yang cukup signifikan, maka secara langsung dapat mempengaruhi kinerja keuangan Bank.

Dalam mengelola risiko hukum, Bank melakukan tindakan diantaranya:

- 1) Melakukan *review* terhadap kebijakan dan prosedur operasi standar yang terkait dengan pengelolaan risiko hukum.
- 2) Mengembangkan organisasi hukum yang kuat.
- 3) Dilakukannya standarisasi akad dan perjanjian kerja sama untuk program pembiayaan tertentu.

f. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul dari kegagalan Bank dalam memenuhi dan/atau menerapkan hukum yang berlaku dan peraturan untuk bank syariah. Dalam terlibat jasa industri perbankan, Bank wajib untuk selalu mematuhi peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Secara umum, risiko kepatuhan terkait erat dengan hukum yang berlaku dan peraturan, yang mengatur Bank sebagai lembaga perbankan syariah, seperti:

- 1) Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM);
- 2) Kualitas Aset Produktif;
- 3) Penyisihan Penghapusan Aset (PPA);
- 4) Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan;
- 5) *Good Corporate Governance* (GCG); dan
- 6) Rencana Bisnis Bank (RBB).

42. RISK MANAGEMENT (continued)

e. Legal Risk (continued)

In addition, the Bank must also follow all rules and regulations that apply in the community either directly or indirectly related to the business activities conducted by the Bank. Failure to comply with applicable laws and regulations can lead to litigation claims against the Bank. In case of litigation claims against the Bank with significant amounts involved, it can directly affect the financial performance of the Bank.

In managing legal risk, the Bank performs actions such as:

- 1) *Conducting a review of policies and standard operating procedures related to the management of legal risk.*
- 2) *Developing a strong legal organization.*
- 3) *Standardizing agreement and cooperation agreement for a specific financing program.*

f. Compliance Risk

Compliance risk is the risk arising from the Bank failures in meeting and/or enforcing applicable laws and regulations for Islamic banks. The services involved in the banking industry, the Bank is obliged to maintain compliance with banking regulations issued by the Government, Bank Indonesia and the National Sharia Council. In general, this risk is closely related to compliance with applicable laws and regulations, which govern the Bank as an Islamic banking institution, such as:

- 1) *Capital Adequacy Ratio (CAR);*
- 2) *Quality of Earning Assets;*
- 3) *Allowance of Earning Assets (PPA);*
- 4) *Legal Lending Limit;*
- 5) *Good Corporate Governance (GCG); and*
- 6) *Bank Business Plan (RBB).*

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
 Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah,
 kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
 As of December 31, 2017, 2016 and 2015
 For the Years Then Ended
 (Expressed in millions of Rupiah,
 unless otherwise stated)

42. MANAJEMEN RISIKO (lanjutan)

f. Risiko Kepatuhan (lanjutan)

Ketidakmampuan Bank untuk mengikuti dan mematuhi semua hukum dan peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan dapat mempengaruhi kelangsungan Bank.

Dalam mengelola risiko kepatuhan, Bank melakukan tindakan diantaranya:

- 1) Meningkatkan pemahaman tentang tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan kode etik.
- 2) Penguatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan memastikan bahwa semua debitur pembiayaan untuk memenuhi semua kebutuhan pembiayaan.
- 3) Mempersiapkan laporan rencana aksi tata kelola perusahaan yang baik (GCG) kepada Bank Indonesia.
- 4) Meningkatkan *Know Your Customer* (KYC), Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- 5) Meningkatkan pelaksanaan *compliance certification*.
- 6) Bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah dalam memastikan kepatuhan operasi Bank dengan prinsip syariah.
- 7) Memberdayakan *Compliance* Syariah untuk meninjau dan menganalisis kepatuhan dari produk Bank/kegiatan dengan prinsip syariah.

43. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini.

	31 Desember/ December 31, 2017		31 Desember/ December 31, 2016		31 Desember/ December 31, 2015		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Aset keuangan							Financial assets
Giro dan penempatan pada Bank Indonesia	4.015.626	4.015.626	3.814.178	3.814.178	4.769.138	4.769.138	Current accounts and placements with Bank Indonesia
Giro dan penempatan pada bank lain	245.821	245.821	453.391	453.391	130.417	130.417	Current accounts and placements with other banks
Investasi pada surat berharga	7.411.068	7.492.979	4.706.065	4.505.152	2.181.054	2.034.129	Investments in marketable securities
Piutang <i>murabahah</i>	10.886.965	10.901.749	10.782.243	10.790.178	10.003.275	10.342.418	<i>Murabahah</i> receivables
Piutang <i>istishna</i>	4.421	4.421	5.900	5.900	7.428	7.428	<i>Istishna</i> receivables
Pinjaman <i>qardh</i>	538.243	538.243	295.388	295.388	398.874	398.874	Funds of <i>qardh</i>
Pembiayaan <i>mudharabah</i>	858.019	858.019	1.285.582	1.285.582	1.121.467	1.121.467	<i>Mudharabah</i> financing
Pembiayaan <i>musyarakah</i>	5.577.220	5.577.220	5.379.830	5.379.830	5.082.963	5.082.963	<i>Musyarakah</i> financing
Aset lain-lain*)	193.060	193.060	172.141	172.141	139.622	139.622	Other assets*)
Total aset keuangan	29.730.443	29.827.138	26.894.718	26.701.740	23.834.238	24.026.456	Total financial assets

42. RISK MANAGEMENT (continued)

f. Compliance Risk (continued)

The inability of the Bank to follow and comply with all laws and regulations related to banking activities may affect the continuity of the Bank.

In managing the compliance risks, the Bank performs actions such as:

- 1) Improving understanding of Good Corporate Governance (GCG) and the code of conduct.
- 2) Strengthening Good Corporate Governance (GCG) implementation and ensure that all financing debtors meet all financing needs.
- 3) Preparing action plan report on Good Corporate Governance (GCG) to Bank Indonesia.
- 4) Increasing the Know Your Customer (KYC), Anti Money Laundering (APU) and the Prevention of Financing for Terrorism (PPT).
- 5) Improving the implementation of compliance certification.
- 6) Working closely with the Sharia Supervisory Board in ensuring compliance of the Bank operation with Islamic principles.
- 7) Empowering Shariah Compliance to review and analyze the compliance of the Bank's products/activities with Islamic principles.

43. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2017, 2016 and 2015, and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan antara nilai tercatat dan nilai wajar dari semua aset dan liabilitas keuangan. Nilai wajar yang diungkapkan adalah berdasarkan informasi relevan yang tersedia pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, dan tidak diperbaharui untuk mencerminkan perubahan dalam kondisi pasar yang telah terjadi setelah tanggal ini (lanjutan).

43. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The table below summarizes the comparison between the carrying amounts and fair values of all financial assets and liabilities of the Bank. The fair values disclosed are based on relevant information available as of December 31, 2017, 2016 and 2015, and are not updated to reflect changes in market conditions which have occurred after these dates (continued).

	31 Desember/ December 31, 2017		31 Desember/ December 31, 2016		31 Desember/ December 31, 2015		
	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai Tercatat/ Carrying Value	Nilai wajar/ Fair value	
Liabilitas keuangan							Financial liabilities
Liabilitas segera	86.752	86.752	86.911	86.911	48.237	48.237	Obligations due immediately
Bagi hasil yang belum dibagikan	35.683	35.683	34.991	34.991	34.776	34.776	Undistributed revenue sharing
Simpanan nasabah							Deposits from customers
Giro wadiah	1.769.344	1.769.344	1.129.560	1.129.560	938.831	938.831	Wadiah demand deposits
Tabungan wadiah	4.749.652	4.749.652	4.176.761	4.176.761	3.715.929	3.715.929	Wadiah saving deposits
Simpanan dari Bank Lain	14.333	14.333	972.719	972.719	890.852	890.852	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima			100.000	100.000	100.000	100.000	Fund borrowing
Utang pajak	40.391	40.391	49.613	49.613	56.416	56.416	Taxes payable
Liabilitas lain-lain**)	4.403	4.403	957	957	378	378	Other liabilities**)
Mudharabah Subordinasi					-	-	Subordinated Sukuk
Dana Syirkah Temporer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	Sukuk Mudharabah
							Temporary Syirkah Funds
Giro mudharabah	139.535	139.535	-	-	-	-	Mudharabah demand deposit
Tabungan mudharabah	1.270.484	1.270.484	983.121	983.121	696.198	696.198	Mudharabah saving deposits
Deposito mudharabah	18.430.069	18.430.069	15.729.625	15.729.625	14.772.700	14.772.700	Mudharabah time deposits
Total liabilitas keuangan	27.540.646	27.540.646	24.264.258	24.264.258	21.254.317	21.254.317	Total financial liabilities

*) Terdiri atas piutang pendapatan yang masih akan diterima

***) Terdiri dari setoran jaminan.

*) Consists of income receivables

***) Consists of guarantee deposits.

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

- (i) Tingkat 1: harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- (ii) Tingkat 2: input selain harga kuotasi yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- (iii) Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

- (i) Level 1: quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities which are accessible at the measurement date.
- (ii) Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 that are observable for the assets and liabilities, either directly or indirectly.
- (iii) Level 3: inputs that are not observable for the assets and liabilities.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

Tabel di bawah ini menyajikan instrumen keuangan yang diakui pada nilai wajar berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan (lanjutan):

31 Desember 2017/ December 31, 2017			
Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3
Aset Keuangan			
Investasi pada surat berharga	7.492.979	-	-
Piutang <i>murabahah</i>	10.901.749	10.107.453	794.296
Total Aset Keuangan	18.394.728	10.107.453	794.296

Financial Assets
Investments in marketable securities
Murabahah receivables
Total financial assets

31 Desember 2016/ December 31, 2016			
Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3
Aset Keuangan			
Investasi pada surat berharga	4.505.152	-	-
Piutang <i>murabahah</i>	10.790.178	9.754.558	1.035.620
Total Aset Keuangan	15.295.330	9.754.558	1.035.620

Financial Assets
Investments in marketable securities
Murabahah receivables
Total financial assets

31 Desember 2015/ December 31, 2015			
Nilai Wajar/ Fair Value	Tingkat/ Level 1	Tingkat/ Level 2	Tingkat/ Level 3
Aset Keuangan			
Investasi pada surat berharga	2.034.129	-	-
Piutang <i>murabahah</i>	10.342.418	9.583.349	759.069
Total Aset Keuangan	12.376.547	9.583.349	759.069

Financial Assets
Investments in marketable securities
Murabahah receivables
Total financial assets

- a. Nilai wajar aset dan kewajiban keuangan tertentu, kecuali efek-efek dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo, piutang dan pembiayaan yang diberikan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan, mendekati nilai tercatatnya karena mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang singkat.

Estimasi nilai wajar terhadap aset keuangan tertentu ditetapkan berdasarkan diskonto arus kas dengan menggunakan tingkat *margin* pasar uang yang berlaku untuk utang dengan risiko piutang dan pembiayaan dan sisa jatuh tempo yang serupa.

- b. Piutang dan pembiayaan

Portofolio piutang dan pembiayaan Bank secara umum terdiri dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat *margin* mengambang dan piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan jangka pendek dengan tingkat *margin* tetap. Piutang dan pembiayaan yang diberikan dinyatakan berdasarkan *amortized cost*.

43. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

The tables below show the financial instruments recognized at fair value based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments (continued):

- a. The fair values of certain financial assets and liabilities, except for securities and Government sukuk classified as held to maturity, receivables and financing, fund borrowings, and marketable securities issued approximate to their carrying values due to their short-term maturities.

The estimated fair values of certain financial assets are determined based on discounted cash flows using money market margin rates for debt instruments with similar credit risk and remaining maturities.

- b. Receivables and financing

Generally, the Bank's receivables and financing portfolio consists of receivables and financing with variable margin rate and short-term loans with fixed interest rate. Loans are stated at *amortized cost*.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

43. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

b. Piutang dan pembiayaan (lanjutan)

Nilai wajar dari piutang dan pembiayaan yang diberikan menunjukkan nilai diskon dari perkiraan arus kas masa depan yang diharapkan akan diterima oleh Bank dengan menggunakan tingkat *margin* pasar saat ini. Nilai tercatat dari piutang dan pembiayaan yang diberikan dengan tingkat *margin* mengambang dan nilai tercatat atas piutang dan pembiayaan jangka pendek dengan tingkat *margin* tetap adalah perkiraan yang layak atas nilai wajar.

c. Efek-efek dan sukuk Pemerintah

Nilai wajar untuk surat-surat berharga dan sukuk Pemerintah yang dimiliki hingga jatuh tempo ditetapkan berdasarkan harga pasar atau harga kuotasi perantara (broker)/pedagang efek (dealer). Jika informasi ini tidak tersedia, nilai wajar diestimasi dengan menggunakan harga pasar kuotasi efek yang memiliki karakteristik piutang dan pembiayaan, jatuh tempo dan *yield* yang serupa atau dinilai dengan menggunakan metode penilaian internal.

d. Pinjaman yang diterima

Nilai wajar agregat berdasarkan model diskonto arus kas menggunakan tingkat *margin* pasar untuk sisa periode jatuh temponya.

44. INFORMASI PENTING LAINNYA

- a. Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2017	2016	2015
Modal inti	2.452.308	2.336.293	2.224.219
Modal pelengkap (maksimum 100% dari modal inti)	1.000.000	1.000.000	-
Cadangan umum penyesuaian kerugian aset produktif (maksimum 1,25% dari ATMR)	158.925	131.106	119.030
	<u>3.611.233</u>	<u>3.467.399</u>	<u>2.343.249</u>

43. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (continued)

b. *Receivables and financing (continued)*

The estimated fair value of loans represents the discounted amount of estimated future cash flows expected to be received by the Bank using the current market rates. The carrying amounts of variable rate receivables and financing and short-term fixed rate receivables and financing are the reasonable approximation of their fair values.

c. *Securities and Government Sukuk*

The fair values of held-to-maturity marketable securities and Government sukuk are based on the market prices or broker/dealer price quotations. When this information is not available, the fair value is estimated using quoted market prices for securities with similar credit, maturity and yield characteristics or using internal valuation model.

d. *Fund borrowings*

The aggregate fair values are based on discounted cash flow model using current market rate for the remaining term to maturity.

44. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION

- a. As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) are calculated based on Financial Service Authority (OJK) No. 21/POJK.03/2014 dated November 19, 2014, as amended previous regulation. The CARs are as follows:

Core capital
 Supplementary capital (maximum 100% over core capital)
 General reserves of allowance for impairment losses of earning assets (maximum 1.25% of ATMR)

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

- a. Pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.03/2014 tanggal 19 November 2014 yang mencabut peraturan sebelumnya. Rasio KPMM tersebut adalah sebagai berikut (lanjutan):

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Risiko Kredit ^{*)}	15.035.619	14.367.884	14.676.042
ATMR Risiko Pasar (tidak diaudit)	12.347	49.569	140.746
ATMR Risiko Operasional (tidak diaudit)	2.752.209	2.389.722	1.997.656
	17.800.175	16.807.175	16.814.444
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit dan Operasional (tidak diaudit)	20,30%	20,69%	14,05%
Rasio KPMM Bank untuk Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional (tidak diaudit)	20,29%	20,63%	13,94%
Rasio KPMM yang diwajibkan	9 - 10%	9 - 10%	9 - 10%

*) Aset Pajak tangguhan dan penyertaan saham memiliki bobot risiko 0%

Berdasarkan profil risiko Bank pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, yaitu *satisfactory*, maka CAR minimum pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, ditetapkan sebesar 9% sampai dengan kurang dari 10%.

Sejak 1 Januari 2016, selain wajib membentuk modal inti dan modal pelengkap, Bank wajib untuk memenuhi *Countercyclical Buffer* yang ditetapkan dalam kisaran 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR sesuai dengan POJK No. 21/POJK.03/2014 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Syariah.

Hasil penilaian menunjukkan bahwa Bank mampu untuk memenuhi KPMM sesuai dengan profil risiko dan mampu memenuhi ketentuan tambahan modal (*buffer*).

- b. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 rasio *Non-Performing Financing* (NPF) bruto dan neto masing-masing adalah sebagai berikut:

	31 Desember/December 31		
	2017	2016	2015
NPF - Bruto	6,43%	4,57%	4,86%
NPF - Neto	4,72%	3,19%	3,89%

44. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION (continued)

- a. As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the Minimum Required Capital Adequacy Ratio (CAR) are calculated based on Financial Service Authority (OJK) No. 21/POJK.03/2014 dated November 19, 2014, as amended previous regulation. The CARs are as follows (continued):

Risk Weighted Assets (RWA) for Financing Risk^{)}*
RWA for Market Risk (unaudited)
RWA for Operational Risk (unaudited)

Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit Risk and Operational Risk (unaudited)
Bank's Capital Adequacy Ratio (CAR) for Credit Risk, Market Risk and Operational Risk (unaudited)

Minimum CAR

*) *Deferred Tax Assets and investment in shares have a 0% risk weight*

Based on the risk profile as of December 31, 2017, 2016 and 2015, which is satisfactory, the minimum CAR as of December 31, 2017, 2016 and 2015 by 9% to less than 10%.

Since January 1, 2016, in addition to provide core capital and supplementary capital, the Bank is required to provide Countercyclical Buffer ranging between 0% to 2.5% from RWA based on POJK regulation (POJK) No. 21/POJK.03/2014 regarding the Minimum Required Capital Adequacy Ratio of Sharia Bank.

The assessment result shows that Bank has met the Minimum CAR in accordance to its risk profile, and met additional capital buffer requirement.

- b. As of December 31, 2017, 2016 and 2015 ratio of *Non-Performing Financing* (NPF) gross and net, respectively, are as follows:

NPF - Gross
NPF - Net

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

44. INFORMASI PENTING LAINNYA (lanjutan)

- c. Rasio piutang, pembiayaan, dan pinjaman usaha kecil terhadap jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman syariah yang diberikan Bank adalah sebesar 37%, 26% dan 23% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 (tidak diaudit).
- d. Jumlah piutang, pembiayaan dan pinjaman yang diberikan yang telah direstrukturisasi oleh Bank sampai dengan tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan masing-masing adalah sebesar Rp1.918.413, Rp1.917.049 dan Rp1.439.172 (tidak diaudit).

Skema restrukturisasi tersebut dilakukan dengan perpanjangan jangka waktu dan penurunan tingkat *margin* dan/atau bagi hasil.

44. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION (continued)

- c. The ratio of small business receivables, financing and funds to total sharia receivables, financing and funds are 37%, 26% and 23% as of December 31, 2017, 2016 and 2015, respectively (unaudited).
- d. Receivables, financing and funds that have been restructured by the Bank until December 31, 2017, 2016 and 2015 which are reported to Financial Service Authority is amounted to Rp1,918,413, Rp1,917,049 and Rp1,439,172, respectively (unaudited).

Restructuring scheme involves extension of receivables/financing maturity date and reduction of margin rate and/or profit sharing.

45. INFORMASI SEGMENT

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit):

45. SEGMENT INFORMATION

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows (unaudited):

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut/ As of December 31, 2017 and for the Year Then Ended							
Keterangan	Komersil/ Commercial	Ritel kemitraan/ Retail linkage	Konsumer/ Consumer	Mikro/ Micro	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	Descriptions
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	532.482	486.218	593.465	701.774	502.235	2.816.174	Revenue from fund management as <i>mudharib</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(381.130)	(219.227)	(311.640)	(235.238)	(82.009)	(1.229.244)	Third parties' share on return
Hak bagi hasil milik Bank	151.352	266.991	281.825	466.536	420.226	1.586.930	Bank's share in profit sharing
Pendapatan (beban) usaha lainnya	57.638	33.294	46.702	32.413	5.066	175.113	Other operating income (expenses)
Beban usaha	(153.710)	(250.909)	(283.178)	(428.793)	(29.378)	(1.145.968)	Operating expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif neto	(68.029)	(19.069)	(6.445)	(12.988)	(367.357)	(473.888)	Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net
Total beban	(221.739)	(269.978)	(289.623)	(441.781)	(396.735)	(1.619.856)	Total expenses
Beban non-operasional	1.795	1.037	1.454	1.009	3.475	8.770	Non-operating expenses
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan (Beban) manfaat pajak penghasilan - neto	(10.954)	31.344	40.358	58.177	32.032	150.957	Income (loss) before income tax expenses
	3.618	(10.354)	(13.331)	(19.218)	(10.581)	(49.866)	Income tax expenses - net
Laba (rugi) tahun berjalan	(7.336)	20.990	27.027	38.959	21.451	101.091	Income (loss) for the year

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit) (lanjutan):

45. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows (unaudited) (continued):

Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut/ As of December 31, 2017 and for the Year Then Ended							
Keterangan	Komersil/ Commercial	Ritel kemitraan/ Retail linkage	Konsumer/ Consumer	Mikro/ Micro	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	Descriptions
Aset segmen							Segment of assets
Piutang, pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	6.067.050	3.616.706	5.185.691	3.551.874	-	18.421.321	Receivables, funds of <i>qardh</i> and financing
Non-piutang, pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	-	-	-	-	13.122.064	13.122.064	Non-receivables, funds of <i>qardh</i> and financing
	<u>6.067.050</u>	<u>3.616.706</u>	<u>5.185.691</u>	<u>3.551.874</u>	<u>13.122.064</u>	<u>31.543.385</u>	
Liabilitas dan dana syirkah							Segment of liabilities and temporary syirkah funds
Temporer segmen							
Pendanaan	-	-	-	-	26.373.416	26.373.416	Funding
Non-pendanaan	-	-	-	-	5.169.969	5.169.969	Non-funding
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>31.543.385</u>	<u>31.543.385</u>	
Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut/ As of December 31, 2016 and for the Year Then Ended							
Keterangan	Komersil/ Commercial	Ritel kemitraan/ Retail linkage	Konsumer/ Consumer	Mikro/ Micro	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	Descriptions
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	558.811	529.005	454.123	741.959	350.303	2.634.201	Revenue from fund management as <i>mudharib</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(219.668)	(207.951)	(178.515)	(291.663)	(137.704)	(1.035.501)	Third parties' share on return
Hak bagi hasil milik bank	339.143	321.054	275.608	450.296	212.599	1.598.700	Bank's share in profit sharing
Pendapatan (beban) usaha lainnya	40.088	32.225	29.517	28.785	(2.648)	127.967	Other operating income (expenses)
Beban usaha	(204.059)	(250.268)	(247.313)	(389.095)	(77.689)	(1.168.424)	Operating expenses
Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif neto	(171.280)	(105.834)	(3.470)	(38.427)	-	(319.011)	Provision for impairment losses on earning and non-earning assets - net
Total beban (expenses)	<u>(375.339)</u>	<u>(356.102)</u>	<u>(250.783)</u>	<u>(427.522)</u>	<u>(77.689)</u>	<u>(1.487.435)</u>	Total expense
Beban non-operasional	(118)	(98)	(90)	(87)	(230)	(623)	Non-operating expenses
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	3.774	(2.921)	54.252	51.472	132.032	238.609	Income (loss) before income tax expenses
(Beban)manfaat pajak penghasilan - neto	(1.082)	837	(15.552)	(14.755)	(37.848)	(68.400)	Income tax expenses - net
Laba (rugi) tahun berjalan	<u>2.692</u>	<u>(2.084)</u>	<u>38.700</u>	<u>36.717</u>	<u>94.184</u>	<u>170.209</u>	Income (loss) for the year
Aset segmen							Segment of assets
Piutang, pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	5.027.182	4.352.810	4.015.010	3.861.785	-	17.256.787	Receivables, funds of <i>qardh</i> and financing
Non-piutang, pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	-	-	-	-	10.430.401	10.430.401	Non-receivables, funds of <i>qardh</i> and financing
	<u>5.027.182</u>	<u>4.352.810</u>	<u>4.015.010</u>	<u>3.861.785</u>	<u>10.430.401</u>	<u>27.687.188</u>	
Liabilitas dan dana syirkah							Segment of liabilities and temporary syirkah funds
Temporer segmen							
Pendanaan	451.520	7.808.847	11.687.641	2.071.059	-	22.019.067	Funding
Non-pendanaan	-	-	-	-	3.158.107	3.158.107	Non-funding
	<u>451.520</u>	<u>7.808.847</u>	<u>11.687.641</u>	<u>2.071.059</u>	<u>3.158.107</u>	<u>25.177.174</u>	

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

45. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

Berikut ini adalah informasi segmen Bank berdasarkan segmen operasi (tidak diaudit) (lanjutan):

45. SEGMENT INFORMATION (continued)

Information concerning the operating segments of the Bank are as follows (unaudited) (continued):

Tanggal 31 Desember 2015 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut/ As of December 31, 2015 and for the Year Then Ended							
Keterangan	Komersil/ Commercial	Ritel kemitraan/ Retail linkage	Konsumer/ Consumer	Mikro/ Micro	Lainnya/ Others	Jumlah/ Total	Descriptions
Pendapatan pengelolaan dana sebagai <i>mudharib</i>	523.066	550.363	453.755	716.521	181.047	2.424.752	Revenue from fund management as <i>mudharib</i>
Hak pihak ketiga atas bagi hasil	(221.639)	(233.206)	(192.270)	(303.612)	(76.715)	(1.027.442)	Third parties' share on return
Hak bagi hasil milik bank	301.427	317.157	261.485	412.909	104.332	1.397.310	Bank's share in profit sharing
Pendapatan usaha lainnya	40.177	34.870	27.346	27.850	217	130.460	Other operating income
Beban usaha (Beban) pembalikan cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dan non-produktif neto	(200.655)	(259.272)	(249.267)	(385.781)	(42.463)	(1.137.438)	Operating expenses (Provision) reversal for impairment losses on earning and non-earning assets - net
Total beban	(314.901)	(324.722)	(266.617)	(420.918)	(41.633)	(1.368.791)	Total expenses
Pendapatan non-operasional	3.107	2.697	2.115	2.154	17	10.090	Non-operating income
Laba sebelum beban pajak penghasilan	29.810	30.002	24.329	21.995	62.933	169.069	Income before income tax expenses
Beban pajak penghasilan - neto	(8.187)	(8.240)	(6.682)	(6.041)	(17.282)	(46.432)	Income tax expenses - net
Laba tahun berjalan	21.623	21.762	17.647	15.954	45.651	122.637	Income for the year
Aset segmen							Segment of assets
Piutang, pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	4.843.429	4.407.609	3.532.310	3.460.690	-	16.244.038	Receivables, funds of <i>qardh</i> and financing
Non-piutang, pinjaman <i>qardh</i> dan pembiayaan	-	-	-	-	7.986.209	7.986.209	Non-receivables, funds of <i>qardh</i> and financing
	4.843.429	4.407.609	3.532.310	3.460.690	7.986.209	24.230.247	
Liabilitas dan dana syirkah Temporer segmen							Segment of liabilities and temporary syirkah funds
Pendanaan	808.587	7.122.517	10.532.355	1.660.199	-	20.123.658	Funding
Non-pendanaan	-	-	-	-	1.766.777	1.766.777	Non-funding
	808.587	7.122.517	10.532.355	1.660.199	1.766.777	21.890.435	

46. PERJANJIAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI SIGNIFIKAN

Liabilitas kontinjensi

Dalam melakukan usahanya, Bank menghadapi berbagai perkara hukum dan tuntutan dimana Bank sebagai tergugat, terutama sehubungan dengan kepatuhan dengan kontrak. Walaupun belum ada kepastian yang jelas, Bank berpendapat bahwa berdasarkan informasi yang ada dan keputusan terakhir dari perkara bahwa tuntutan hukum ini tidak akan berdampak secara material pada operasi, posisi keuangan atau tingkat likuiditas Bank.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Bank telah membentuk cadangan (disajikan dalam akun "Liabilitas Lain-lain") untuk sejumlah tuntutan hukum yang belum diputuskan sebesar Rp7.755, Rp6.228 dan Rp4.129. Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan yang dibentuk atas kemungkinan timbulnya kerugian akibat tuntutan hukum yang belum diputuskan atau masih dalam proses tersebut telah memadai.

46. SIGNIFICANT AGREEMENTS, COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

Contingent liabilities

In the conduct of its business, the Bank is a defendant in various litigation proceedings and legal claims mainly with respect to matters of contractual compliance. Although there is no clear assurance yet, the Bank believes that based on information currently available, the ultimate resolution of these legal proceedings and legal claims will not likely to have a material effect on the operations, financial position or liquidity level of the Bank.

As of December 31, 2017, 2016 and 2015, the Bank has established an provision (included in "Other Liabilities") for several pending lawsuits filed against the Bank amounted to Rp7,755, Rp6,228 and Rp4,129. Management believes that the provision is adequate to cover possible losses arising from pending litigations or legal claims that are currently in progress.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

47. OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Berdasarkan surat No. 001/BRIS/DPS/01/2018 tanggal 22 Januari 2018, surat No. 001/BRIS/DPS/01/2017 tanggal 16 Januari 2017 dan surat No. 001/BRIS/DPS/01/2016 tanggal 4 Januari 2016 masing-masing untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015, Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank BRISyariah menyatakan bahwa secara umum aspek syariah dalam operasional dan produk PT Bank BRISyariah telah mengikuti fatwa dan ketentuan syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta opini syariah dari DPS.

48. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN

- A. Perubahan anggaran dasar terakhir Bank berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) No. 8 tanggal 8 Januari 2018, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan surat persetujuan oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0000386.AH.01.02. tanggal 10 Januari 2018 serta telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0009224 tanggal 10 Januari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0002437.AH.01.11 tanggal 10 Januari 2018. Akta tersebut mencantumkan persetujuan pemegang saham Bank atas beberapa hal yaitu:
1. Rencana Bank untuk menghimpun dana dari Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).
 2. Peningkatan Modal Dasar Bank yang semula berjumlah 10.000.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp5.000.000, menjadi 15.000.000.000 lembar saham (nilai penuh) atau sebesar Rp7.500.000.
 3. Perubahan anggaran dasar dalam rangka menjadi Perusahaan Terbuka, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal termasuk Peraturan No. IX.J.1, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32, dan POJK No. 33

47. OPINION OF THE SHARIA SUPERVISORY BOARD

Based on letters No. 001/BRIS/DPS/01/2018 dated January 22, 2018, letters No. 001/BRIS/DPS/01/2017 dated January 16, 2017 and letters No. 001/BRIS/DPS/01/2016 dated January 4, 2016 for the years ended December 31, 2016 and 2015, respectively, the Sharia Supervisory Board (DPS) of Bank BRISyariah expressed opinions that in general, the sharia aspects on products and operations of PT Bank BRISyariah have complied with fatwa and sharia regulations issued by National Sharia Board of Indonesian Ulama Council (DSN-MUI), and sharia opinion of DPS.

48. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- A. The latest amendment of the Bank's Articles of Association based on its Shareholders' Extraordinary General Meeting (EGM) no. 8 dated January 8, 2018, notarized by Fathiah Helmi, S.H., Notary in Jakarta, which was approved by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Letter No. AHU-0000386.AH.01.02. dated January 10, 2018 in which the notice of change has been received by the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia based on letter of acceptance No. AHU-AH.01.03-0009224 and recorded in the register of companies No. AHU-0002437.AH.01.11 dated January 10, 2018, the Deed includes the approval of the Bank's shareholders on the following matters;
1. The Bank's plan to raise funds from the public through an Initial Public Offering (IPO).
 2. Increasing the Bank's authorized share capital from Rp5,000,000, which consists of 10,000,000,000 shares at Rp500 (full amount), to Rp7,500,000, which consists of 15,000,000,000 shares at Rp500 (full amount).
 3. The amendment of the Bank's Articles of Association to become a Public Company, in accordance with the laws and regulations of the Capital Market including Regulation No. IX.J.1, POJK No. 32 and POJK No. 33.

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

4. Kepemilikan 1% (satu persen) saham milik BRI dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh Bank setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk tidak dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, namun dalam bentuk warkat, sesuai Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum.
5. Penerbitan saham baru dari portepel maksimal 27% (dua puluh tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana dilaksanakan. Nilai nominal masing-masing saham yang ditawarkan sebesar Rp500 termasuk pengalokasian pengeluaran saham baru tersebut sebanyak-banyaknya 2,5% (dua setengah persen) dari saham baru yang akan dikeluarkan dalam rangka IPO, dengan program ESA.
6. Pelepasan hak oleh BRI dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia (YKP BRI) untuk mengambil saham baru sehubungan dengan IPO Bank.
7. Pengeluaran saham baru dalam rangka program opsi saham untuk Manajemen dan Karyawan, dengan jumlah maksimal 3% (tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah IPO selesai dilaksanakan.
8. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi menjadi:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama*/Independen
Komisaris*
Komisaris Independen
Komisaris Independen*

Hermanto Siregar
Fahmi Subandi
Komaruddin Hidayat
Eko Suwardi

Board of Commissioner
*President Commissioner/Independent**
*Commissioner**
Commissioner Independent
*Commissioner Independent**

*) Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

*) Will be effective upon approval from Financial Service Authority (OJK)

Dewan Direksi

Direktur Utama
Direktur
Direktur/Independen
Direktur*
Direktur*

Moch. Hadi Santoso
Agus Katon Eko S.
Wildan
Widodo Januarso
Kokok Alun Akbar

Board of Director
President Director
Director
Director/Independent
*Director**
*Director**

*) Akan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

*) Will be effective upon approval from Financial Service Authority (FSA)

PT BANK BRISYARIAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT BANK BRISYARIAH
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017, 2016 and 2015
For the Years Then Ended
(Expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

48. PERISTIWA SETELAH PERIODE LAPORAN
(lanjutan)

B. Berdasarkan hasil keputusan RUPST tanggal 21 Februari 2018 disetujui peningkatan modal disetor melalui kapitalisasi laba senilai Rp567.381.449.000 dan setoran tunai dari BRI senilai Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), sehingga modal ditempatkan dan disetor semula sejumlah 3.958.000.000 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.979.000.000.000 menjadi 7.092.762.898 saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp500 setiap saham, dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.546.381.449.000.

49. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Bank BRISyariah di Bursa Efek Indonesia.

50. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja dengan laporan auditor independen No.RPC-5656/PSS/2018 tertanggal 9 Februari 2018. Sehubungan dengan proses Penawaran Umum Perdana Saham PT BRISyariah di Bursa Efek Indonesia, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan tersebut dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan (Catatan 2c, 3, 7, 12, 16, 17, 41 dan 48).

51. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Bank bertanggung jawab dalam penyusunan laporan keuangan yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan kepada direksi pada tanggal 13 Maret 2018.

48. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(continued)

B. Based on the resolutions of the AGMS dated February 21, 2018, the increase in fully paid up capital through the capitalization of profit amounting to Rp567,381,449,000 and cash deposit from BRI amounting to Rp1,000,000,000,000 (one trillion rupiah) has been approved, therefore the issued and fully paid up capital of 3,958,000,000 shares at a par value of Rp500 per share with total nominal value of Rp1,979,000,000,000 has become 7,092,762,898 shares at a par value of Rp500 per share with total nominal value of Rp3,546,381,449,000.

49. PURPOSE OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements were prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the initial public offering of PT Bank BRISyariah on Indonesia Stock Exchange.

50. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

The Company has previously issued the financial statements as of December 31, 2017, 2016 and 2015 and for the years then ended, which were audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja with independent auditors' report No.RPC-5656/PSS/2018 dated 9 February 2018. In accordance with the process of Initial Public Offering of PT Bank BRISyariah in Indonesia Stock Exchange, the Company has reissued the financial statements with several changes and additional disclosures in the Notes to the Financial Statements (Notes 2c, 3, 7, 12, 16, 17, 41 dan 48).

51. COMPLETION OF FINANCIAL STATEMENTS

The Bank's management is responsible for the preparation of the financial statement which were completed and authorized for issue by the Board of Directors on March 13, 2018.

Halaman ini sengaja dikosongkan



PT Bank BRISyariah

Gedung BRISyariah, Jln Abdul Muis No. 2-4, - Jakarta Pusat 10160

Telp : +62-21 345 0226 / 27 Ext. 360 | Fax : +62-21 231 6064

www.brisyariah.co.id